LAPORAN
TAHUNAN
2020

HSBC

KOKOH
BERTAHAN

Pembatasan Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil kegiatan operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mencakup hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, yang dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang berbeda dengan yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan yang bersifat prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat dengan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi ke depan dari Bank serta lingkungan bisnis di mana Bank melakukan kegiatan usahanya. Bank tidak menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diambil akan membawa hasil-hasil tertentu sebagaimana yang diharapkan. Laporan Tahunan ini memuat kata "Bank" atau "HBID" yang didefinisikan sebagai PT Bank HSBC Indonesia. Ada kalanya kata "Perusahaan", atau "Perseroan" juga digunakan untuk penyebutan PT Bank HSBC Indonesia secara umum.

KOKOH
BERTAHAN

Sebagai bank global yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari satu abad, HSBC Indonesia telah melalui banyak krisis. Setiap krisis menguji ketahanan serta ketangkasan kami sehingga kami tetap bisa mempertahankan prinsip-prinsip yang ada dan memastikan fundamental tetap kuat untuk meraih pertumbuhan ke depan di saat yang tepat. Menghadapi pandemi COVID-19, kami menyadari perlunya untuk bersikap fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang ada selagi memaksimalkan kinerja di tengah tantangan-tantangan yang besar. Respons kami berhasil menjaga fundamental tetap kuat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR ISI

04 Ikhtisar Kinerja 2020

4 Ikhtisar Utama 2020
5 Ikhtisar Keuangan
6 Langkah-langkah strategis di 2020
6 Penghargaan 2020
7 Peristiwa Penting

09 Laporan Manajemen

10 Laporan Dewan Komisaris
14 Laporan Direksi

25 Profil Perusahaan

26 Profil Perusahaan
28 Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar
30 Filosofi *Brand*
31 Struktur Pemegang Saham
32 Kepemilikan Saham
32 Produk dan Jasa
33 Aktivitas Usaha
34 Profil Dewan Komisaris
38 Profil Direksi
42 Struktur Organisasi

45 Analisis dan Diskusi Manajemen

46 Tinjauan Perekonomian
48 Tinjauan Bisnis
54 Tinjauan Pemasaran
56 Tinjauan Kinerja Keuangan
65 Informasi Keuangan Material Lainnya
72 Tinjauan Pendukung Bisnis
72 - Sumber Daya Manusia
80 - Teknologi & Operasional
82 Manajemen Risiko
82 - Eksposur Risiko dan Permodalan
86 - Praktik Manajemen Risiko
94 - Pengungkapan Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
147 Prospek Usaha

149 **Tata Kelola Perusahaan**

150 Dasar Penerapan Tata Kelola
150 Pernyataan Tata Kelola
151 Prinsip Tata Kelola
151 Tujuan Penerapan Tata Kelola
151 Penilaian Tata Kelola
152 Struktur Tata Kelola
152 Rapat Umum Pemegang Saham
153 Dewan Komisaris
163 Direksi
170 Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan
171 Sekretaris Perusahan
172 Fungsi Kepatuhan
173 Permasalahan Hukum
173 Opsi Saham
173 Kepemilikan Saham Komisaris dan Direksi
173 Hubungan Afiliasi
173 Penilaian oleh Pihak Internal (*Self–Assessment*)
174 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
174 Audit Eksternal
174 Penerapan Manajemen Risiko
176 Penyediaan Dana Besar Secara Rinci
176 Pengungkapan Remunerasi 2020
180 *Internal Fraud*
180 Penanganan Pengaduan Nasabah

183 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

184 Keberlanjutan
187 Rencana, Fokus, dan Program di 2021

189 **Data Perusahaan**

190 Profil Pejabat Eksekutif
191 Alamat Kantor & Cabang

193 **Laporan Keberlanjutan 2020**

223 **Laporan Keuangan**

IKHTISAR UTAMA 2020

Sektor perbankan di tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana pandemi COVID-19 menjatuhkan sendi-sendi perekonomian dunia. HSBC Indonesia mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada dan melakukan respons untuk dapat mempertahankan fundamental Bank demi kinerja ke depannya.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

26,70%

Berada di tingkat yang sehat dan di atas ketentuan regulasi.

Jumlah Simpanan dari Nasabah

Rp72,16 triliun

Jumlah Simpanan meningkat 10,22% dari Rp65,47 triliun di 2019.

Jumlah Aset

Rp112,60 triliun

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 naik 0,66% dari Rp111,86 triliun di tahun sebelumnya.

Rasio Kredit Bermasalah - Bruto

3,45%

Rasio Kredit Bermasalah - Bruto per tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Kredit yang Diberikan – Bruto

Rp58,39 triliun

Jumlah Kredit yang Ddiberikan – Bruto per tanggal 31 Desember 2020.

Return on Assets

1,56%

Rasio Pengembalian Aset per 31 Desember 2020.

Return on Equity

7,04%

Rasio Pengembalian Ekuitas per 31 Desember 2020.

Laba Bersih

Rp1,31 triliun

Laba bersih per 31 Desember 2020.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

84,67%

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional per 31 Desember 2020.

IKHTISAR KEUANGAN

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
Laporan posisi keuangan		
Total Aset	112.601	111.860
Total Aset Produktif	105.957	101.223
Kredit yang diberikan - bruto	58.394	67.657
Efek-efek untuk tujuan investasi	17.861	14.418
Total liabilitas	93.303	93.724
Dana pihak ketiga		
- Giro	35.871	27.964
- Tabungan	15.281	12.399
- Deposito dan *deposits on call*	21.008	25.106
Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi	8.571	16.104
Total ekuitas	19.298	18.136
Laporan laba rugi komprehensif		
Pendapatan bunga	5.307	6.197
Beban bunga	(1.433)	(2.217)
Pendapatan bunga bersih	3.874	3.980
Pendapatan non-bunga	2.955	3.149
Pendapatan operasional	5.112	6.458
Laba tahun berjalan sebelum pajak	1.774	3.040
Laba bersih tahun berjalan	1.310	2.311
Total laba komprehensif	384	168
Laba bersih per saham (dalam Rupiah penuh)	N/A	N/A
Rasio Keuangan		
Permodalan		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	26,70%	23,65%
Kualitas aktiva produktif		
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,14%	0,99%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,90%	1,69%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,93%	2,10%
Kredit bermasalah (NPL) terhadap kredit yang diberikan - bruto	3,45%	2,52%
Kredit bermasalah (NPL) terhadap kredit yang diberikan - bersih	0,94%	1,22%
Rentabilitas		
Return on Assets (ROA)	1,56%	2,72%
Return on Equity (ROE)	7,04%	13,78%
Net Interest Margin (NIM)	4,03%	4,39%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,67%	74,16%
Cost to Income Ratio (CIR)	65,58%	N/A
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR)	80,84%	89,05%
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	72,95%	86,24%
Rasio Dana Murah	70,89%	61,65%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	483,49%	516,78%
Rasio Liabilitas terhadap Aset	82,86%	83,79%
Kepatuhan		
Persentase Pelanggaran BMPK		
a. Pihak Terkait	0,00%	0,00%
b. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Persentase Pelampauan BMPK *		
a. Pihak Terkait	54,56%	0,00%
b. Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
a. GWM Utama Rupiah **		
- Harian	0,00%	3,00%
- Rata-rata	4,12%	4,12%
b. GWM Valuta Asing ***	4,12%	8,12%
Posisi Devisa Neto (PDN)	2,92%	6,44%

*) Pelampauan disebabkan oleh perubahan ketentuan yaitu dengan berlakunya POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Bank telah memiliki rencana tindak dengan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**) GWM Rupiah untuk posisi Desember 2020 mengacu pada PADG No 22/10/PADG/2020 dan PADG No 22/4/PADG/2020, sedangkan untuk posisi Desember 2019 mengacu pada PADG No 21/14/PADG/2019

***) GWM Valuta Asing untuk posisi Desember 2020 mengacu perubahan ketentuan dalam PADG No 22/2/PADG/2020, sedangkan untuk posisi Desember 2019 mengacu pada PADG NOMOR 20/10/PADG/2018

LANGKAH-LANGKAH **STRATEGIS 2020**

Pada tahun 2020 PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") fokus pada prioritas strategis untuk tumbuh secara berkesinambungan:

- Meningkatkan fokus terhadap nasabah untuk bertumbuh di segmen, sektor, wilayah, dan industri yang dituju.
- Membantu nasabah terdampak COVID-19 dan terus memetakan dan memitigasi risiko terkait untuk menjaga kesehatan portolio Bank.
- Memanfaatkan jaringan internasional untuk memaksimalkan peluang bisnis lintas batas.
- Memperkuat proposisi produk untuk menarik lebih banyak rekening operasional untuk mendukung portofolio DPK yang lebih kuat.
- Berinvestasi di bidang digital untuk memacu bisnis ritel, termasuk jumlah nasabah, kartu kredit, *wealth*, dan *Retail Business Banking*.
- Menarik, mendidik, dan menjaga talenta yang ada di samping merampingkan operasi dan meningkatkan pengawasan.

PENGHARGAAN **2020**

- **Top 3 Indonesia's World Best Bank 2020 dari Forbes**
- **Indonesia's Best Subcustodian, Best Fund Administrator for Retail Fund 2020 dari The Asset Triple A Awards**
- **Indonesia Trade Finance Market Leader 2020 dari Euromoney**
- **Indonesia Best Trade Finance Service Leader 2020 dari Euromoney**
- **Asia's Best Bank for Financing dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Asia's Best Bank for Sustainable Finance dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Excellence in Leadership in Asia dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Best Performance in the Year dari Infobank Awards 2020**
- **Indonesia's Best Wealth Manager 2020 dari The Asset Triple A Awards**
- **Top Bank Award 2020 Predikat Platinum Kategori BUKU 3 dari RRI dan Iconomics Research and Consulting**
- **Best in Service Cash Manager for Corporates in Indonesia for Overall Service 2020 dari Euromoney**

PERISTIWA PENTING

14-19 Januari 2020
Daihatsu Indonesia Masters 2020

24 Juli 2020
Premier Experience Webinar
(Wajah Tetap Glowing Walau di Rumah Saja)

12 November 2020
Fusion Webinar
"Digital Marketing 2020, Strategi UKM untuk Bangkit dari Krisis"

26-27 November 2020
Wealth Connect Webinar – A Private Session

HSBC Economic Forum 2020

HSBC Indonesia menyelenggarakan acara webinar Economic Forum tahunan yang bertema "Orchestrating the Next Move: Transforming Indonesia into Asia's Next Supply Chain Hub", dengan presentasi mengenai perkembangan dalam negeri dan internasional, serta membahas potensi Indonesia untuk menarik investasi baru dan relokasi rantai permintaan. Acara ini menampilkan para pemangku kepentingan dan jajaran pembicara yang ternama yang memiliki peranan penting dalam menarik investasi asing, untuk dapat memahami seberapa jauh Indonesia perlu bertransformasi untuk menjadi hub rantai permintaan.

Dengan Francois de Maricourt, Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, sebagai *host*, sesi pertama menampilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang menyampaikan tentang menangkap peluang relokasi industri, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pekerja, serta kesejahteraan dan produktivitas. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meyakinkan investor untuk datang ke Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan tantangan-tantangan yang dihadapi investor di Indonesia.

Sesi kedua menampilkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Ekonom HSBC untuk ASEAN Joseph Incalcaterra, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani. Panel ini mengeksplorasi dampak dari kebijakan dan strategi pemerintah dalam perbaikan ekonomi dan bagaimana pengusaha dapat mengeluarkan jurus-jurusnya untuk bertahan dan bangkit kembali.

/02

LAPORAN MANAJEMEN

10 Laporan Dewan Komisaris
14 Laporan Direksi

LAPORAN
DEWAN KOMISARIS

Matthew Kneeland Lobner
Presiden Komisaris

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pandemi ini berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi dunia di tahun 2020 dalam skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Pemerintah di seluruh dunia seketika berfokus untuk menahan perederan virus. Akibatnya, perekonomi global mengalami kontraksi 4,3%. Hanya beberapa negara yang mampu membangun ekonominya kembali dan membukukan pertumbuhan positif, seperti Tiongkok dan Taiwan.

Indonesia juga terkena dampak dari pelemahan ekonomi global melalui jalur investasi dan perdagangan. Konsumsi swasta, yang biasanya merupakan motor pertumbuhan, menurun karena orang-orang kehilangan pekerjaan dan hanya membeli barang-barang kebutuhan pokok. Pemerintah mencoba memberikan stimulus melalui subsidi, namun PDB masih mengalami kontraksi 2,07% pada akhir 2020.

Kecuali jasa kesehatan dan komunikasi, mayoritas sektor perekonomian mengalami perlambatan, yang berdampak pada industri perbankan dengan menurunnya pertumbuhan kredit. Upaya regulator untuk membolehkan penundaan pembayaran kredit juga membuat pendapatan bank menurun, walaupun hal ini membantu menjaga rasio kredit bermasalah (NPL). Namun, terlepas dari kinerja yang melemah di tahun 2020, industri perbankan masih tetap kokoh dengan permodalan yang baik.

Penilaian Kinerja Direksi

Direksi melakukan revisi target Bank untuk 2020, menyadari bahwa pandemi ini akan berdampak negatif terhadap industri perbankan dengan kenaikan risiko kredit dan penurunan kinerja keuangan. Pengurangan ekspektasi target Bank di 2020 tidak dapat dihindari karena semua sektor terkena dampak pandemi. Namun, fundamental Bank tetap kuat dan dapat menopang pertumbuhan dalam tiga sampai lima tahun ke depan.

Per 31 Desember 2020, Bank masih merupakan 20 bank terbesar di Indonesia dari segi aset. Permodalan tetap kuat, seperti terlihat dari rasio kecukupan modal sebesar 26,70%, dan kualitas aset tetap baik – rasio NPL meningkat tapi tetap terkendali. Manajemen Bank berfokus untuk meningkatkan hubungan dengan nasabah serta mengembangkan ekosistem digital untuk membatasi interaksi fisik di kala pandemi.

Kami memberi apresiasi kepada Direksi karena respons yang cepat menghadapi COVID-19 di tahun 2020. Dengan fundamental Bank yang tetap kuat, kami percaya bahwa Bank berada dalam posisi yang baik untuk memulai pertumbuhan ketika situasi perlahan-lahan kembali normal.

Pengawasan Strategi Bank dan Frekuensi Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dewan Komisaris berkomunikasi dengan Direksi lebih sering di tahun 2020 karena kami harus memastikan bahwa strategi Bank sesuai dengan kondisi perekonomian. Di tahun 2020, kami melakukan enam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat tersebut diadakan secara *online* karena keperluan untuk membatasi interaksi fisik di Bank untuk menahan peredaran virus COVID-19.

Bank menekankan di tahun 2020 untuk membukukan kinerja yang cukup di tahun yang tidak terduga ini, serta mempertahankan fundamental yang kuat untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan di tahun-tahun ke depan.

Prospek Usaha

Kinerja industri perbankan diharapkan akan membaik di tahun 2021 seiring dengan kembalinya aktivitas perekonomian. Namun, hal ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mendistribusikan vaksin dan menjaga kasus COVID-19. Kami telah melihat gelombang kedua COVID-19 di beberapa negara di dunia dan harus memperhitungkan hal tersebut dalam mendesain rencana bisnis Bank.

Direksi telah mendesain rencana bisnis yang realistis untuk 2021 dan kami yakin, dengan kekuatan kompetitif kami, ada perluang-peluang di depan untuk menjalankan rencananya dengan sukses. Pertumbuhan kredit diharapkan akan meningkat, namun profitabilitas mungkin masih tertekan karena Bank perlu mengalokasikan provisi lebih untuk berjaga-jaga terhadap potensi gagal bayar.

Keberlangsungan

Strategi Bank dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memastikan agar operasional berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk "membuat bisnis berkembang dan perekonomian menjadi sejahtera, membantu orang-orang mencapai harapan dan mimpinya dan merealisasikan ambisinya."

Laporan Dewan Komisaris

Kami telah mengadaptasi operasional kami sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa, agar dapat mengembangkan bisnis dan berkontribusi pada kesejahteraan negara tempat kami beroperasi.

Tata Kelola Perusahaan

Bank menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam semua aktivitas usaha, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kepatuhan Bank terhadap GCG tercermin dari peringkat tata kelola yaitu 2 (Baik), sesuai dengan hasil *self-assessment* Desember 2020.

Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Ada tiga komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Semuanya telah bekerja sebaik-sebaiknya dalam menjalankan tugasnya. Di tahun 2020, Komite Audit mengadakan 7 pertemuan, Komite Pemantau Risiko mengadakan 4 pertemuan, dan Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 5 pertemuan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2020, ada dua perubahan di komposisi Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris terdiri dari:

Nama	Jabatan	-
Matthew Kneeland Lobner	Presiden Komisaris	Warga Negara AS, 49 tahun. Telah bergabung dengan Grup HSBC sejak tahun 2005. Diangkat sebagai presiden komisaris di tahun 2017.
Hanny Wurangian	Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Warna Negara Indonesia, 70 tahun. Memiliki kantor akuntan publik ternama. Diangkat sebagai wakil presiden komisaris di tahun 2013.
Mark Thomas McKeown	Komisaris	Warga Negara Inggris, 62 tahun. Telah bersama Grup HSBC selama hampir tiga dekade. Diangkat sebagai komisaris di tahun 2015.
Umar Juoro	Komisaris Independen	Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Berpengalaman di sektor pemerintahan dan swasta. Diangkat sebagai komisaris independen di tahun 2017.
Catherinawati Hadiman Sugianto	Komisaris Independen	Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Telah bekerja di sektor perbankan selama lebih dari tiga dekade. Diangkat sebagai komisaris independen di tahun 2020.
Mark Trevor Surgenor*	Komisaris	Warga Negara Inggris, 48 tahun. Berpengalaman di industri perbankan di dunia. Diangkat sebagai komisaris di tahun 2020.

* Efektif jika mendapat dan sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *Fit and Proper Test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apresiasi

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luar biasa kepada para nasabah, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang kami layani. Dewan Komisaris mengapresiasi Direksi, manajemen, dan semua karyawan Bank atas profesionalisme, dedikasi, dan energi mereka yang luar biasa di tengah kondisi yang begitu menantang di tahun 2020. Kami juga bertemina kasih kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kerja sama dan kepercayaannya.

Matthew Kneeland Lobner
Presiden Komisaris

DEWAN KOMISARIS

Matthew Kneeland Lobner
Presiden Komisaris

Catherinawati Hadiman Sugianto
Komisaris Independen

Hanny Wurangian
Wakil Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen

Mark Trevor Surgenor
Komisaris

Mark Thomas Mckeown
Komisaris

Umar Juoro
Komisaris Independen

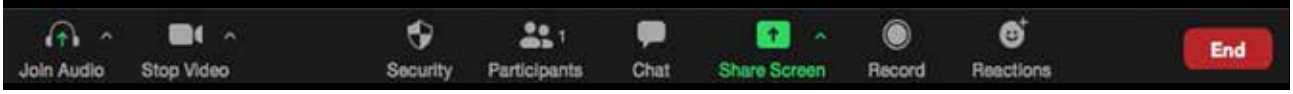

LAPORAN DIREKSI

Francois de Maricourt
Presiden Direktur

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Di tahun 2020, PT Bank HSBC Indonesia menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah Bank karena pandemi COVID-19. Dunia usaha bergumul dan orang-orang dipaksa tetap di rumah, akibat cepatnya laju peredaran virus COVID-19 di seluruh dunia. Sebagai bagian dari komunitas industri keuangan, Bank berada di garis depan menolong pengusaha dan individu untuk menghadapi tantangan yang ada bersama dengan pemerintah dan regulator. Kami mengubah cara kerja dan strategi kami untuk memastikan Bank dapat tetap memberikan stabilitas kepada nasabah di kondisi yang penuh ketidakstabilan ini dan membukukan kinerja keuangan yang baik dalam konteks pandemi demi fundamental yang kuat dalam jangka panjang.

Kondisi Ekonomi dan Perbankan 2020

Pandemi COVID-19 mengguncang dunia di tahun 2020. Hal ini memaksa pemerintahan di seluruh dunia untuk melakukan *lockdown* untuk meminimalkan peredaran virus, membatasi pergerakan orang, serta barang dan jasa. *Lockdown* mengakibatkan ekonomi tertahan, sehingga perekonomian global mengalami kontraksi 4,3%. Industri padat karya, seperti pengolahan, harus menyesuaikan operasional dengan tenaga kerja terbatas, sementara sektor non-esensial lainnya juga mengalami perlambatan.

Hampir semua perekonomian mengalami kontraksi. Amerika Serikat terkontraksi 3,5% di tahun 2020, terbesar sejak 1946. Di zona Eropa, PDB jatuh 6,8%, sementara PDB Jepang turun 4,8%. Hanya beberapa negara yang masih membukukan pertumbuhan PDB positif di tahun 2020. Tiongkok, yang dapat melonggarkan pembatasan perdagangan, hiburan, dan pengolahan, mencapai pertumbuhan ekonomi 2,3%. Vietnam membukukan pertumbuhan PDB 2,91% dan ekonomi Taiwan tumbuh 2,98%, melebihi Tiongkok untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.

Pelemahan ekonomi global juga berdampak pada Indonesia melalui jalur perdagangan dan investasi. Konsumsi swasta, yang biasanya merupakan motor pertumbuhan utama, melemah karena orang-orang kehilangan pekerjaan dan banyak usaha yang tutup. Mengakhiri 2020, PDB Indonesia terkontraksi 2,07%, walaupun pemerintah sudah memberikan subsidi untuk membantu mereka yang terkena dampak COVID-19.

Semua sektor ekonomi di Indonesia, kecuali jasa kesehatan dan komunikasi, mengalami penurunan di 2020. Daya beli melemah, yang tercermin di laju inflasi yang terendah sepanjang sejarah di 1,68%.

Upaya Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 125 bps menjadi 3,75% di akhir 2020 belum berhasil menopang pertumbuhan kredit. Kredit industri perbankan di tahun 2020 berkontraksi 2,41%, namun rasio kredit bermasalah masih cukup baik di 3,06% walau otoritas mengizinkan debitur untuk menunda pembayaran kredit. Likuiditas terbilang positif dengan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 11,11% dan rasio kecukupan modal masih stabil di angka 23,78%, dibandingkan 23,31% di 2019.

Kinerja Bank

Pandemi COVID-19 turut berdampak pada kinerja keuangan Bank di tahun 2020. Kami berupaya menjaga fundamental dalam jangka panjang dan juga membukukan kinerja positif di 2020. Kami mempertahankan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan memastikan agar bisnis tetap sesuai dengan *appetite* risiko kami. Penutupan perekonomian global di semester satu 2020 berdampak pada peningkatan kerugian kredit dan penurunan pendapatan. Karenanya, laba sebelum pajak turun dari Rp2,61 triliun, sesudah normalisasi transaksi tidak berulang di 2019, menjadi Rp1,77 triliun.

Total kredit bruto mencapai Rp58,39 triliun di 2020, turun 13,69% dari Rp67,66 triliun di 2019, dengan tingkat NPL di 3,45% akibat kesulitan para debitur untuk membayar utangnya karena kondisi perekonomian yang tidak pasti. Bank terus memonitor nasabah yang rentan terhadap dampak COVID-19 dan berupaya memberikan dukungan termasuk melalui program bantuan pemerintah. Hal ini dilakukan secara hati-hati dan selektif. Sementara, dana pihak ketiga naik 10,22% menjadi Rp72,16 triliun, dengan dominasi dana murah sebesar 70,89% dari total dana pihak ketiga.

Bank juga mencoba lebih efisien dengan mengurangi biaya-biaya yang kurang produktif dan mengalokasikan dananya untuk area yang lebih produktif. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) mencapai 84,67% terutama karena ekspektasi kerugian kredit yang meningkat akibat kondisi ekonomi yang negatif. Modal Bank tetap kuat, dengan rasio kecukupan modal meningkat ke angka yang sehat 26,70%.

DIREKSI

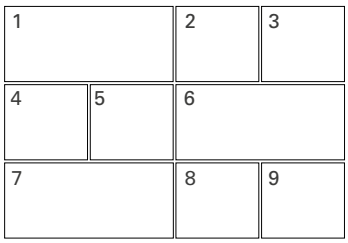

No	Nama
1	Francois de Maricourt
2	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo
3	Caecilia Pudji Widyarti
4	James Rex Elwes
5	Eri Budiono
6	Stephen Whilton Angell
7	Dio Alexander Samsoeri
8	Riko Adythia
9	Nisha Asha Bhambhani

Invest with the best
Invest with the best
Invest with the best
Invest with the best
Chat
Share Screen
Record
Reactions
End

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan HSBC Indonesia sejalan dengan Grup HSBC, yang berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan di negara-negara tempat kami beroperasi. Di tahun 2020, fokus kami adalah untuk:
Fokus pada nasabah:

- **Fokus pada hubungan dengan nasabah:**
  - Memberikan dengan cepat produktivitas yang terbaik di kelasnya.
  - Investasi di area digital.
  - Aktif terlibat dengan komunitas, dan mempromosikan nilai-nilai kami untuk terbuka, terkoneksi, dan dapat diandalkan.
- **Pertumbuhan selektif:**
  - Fokus menumbuhkan segmen nasabah dimana kami dapat berinovasi, membuat perbedaan, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif kami.
  - Menggunakan jaringan internasional untuk memaksimalkan peluang di koridor bisnis lintas batas tertentu.
- **Kontrol yang kuat:**
  - Meningkatkan kontrol untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
  - Mengoptimalkan sumber daya manusia, sistem, dan proses, serta mendorong inisiatif dan kerja sama tim di dalam Bank.

Target vs Pencapaian

Bank meninjau ulang targetnya setelah menghitung ulang dampak dari pandemi COVID-19. Tabel berikut ini memperlihatkan target dan pencapaian Bank di tahun 2020:

Area	Target	Realisasi
Pertumbuhan kredit	0,03%	-13,69%
Pertumbuhan dana pihak ketiga	5,10%	10,22%
ROA	1,18%	1,56%
ROE	5,47%	7,04%
NIM	3,96%	4,03%
CAR	21,08%	26,70%
BOPO	88,40%	84,67%

Mengatasi Tantangan

Sebagai salah satu bank internasional papan atas di Indonesia, kami menganalisa tantangan-tantangan di tahun 2020 dan mencoba mengatasinya. Bank menyadari bahwa rintangan utama pertumbuhan di tahun 2020 adalah pandemi COVID-19 dan mengatasi hal ini adalah di luar kapabilitas kami. Perkembangan vaksin COVID-19 di dunia memberikan harapan bahwa dampak pandemi akan menjadi sesuatu yang normal sebelum memanjang. Yang bisa kami lakukan adalah memperbaiki diri untuk menghadapi ketidakpastian yang ada dan bertahan pada rencana jangka menengah, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan selektif dengan memperkuat kualitas portofolio kredit, mempertahankan likuiditas, dan meminimalkan risiko kejahatan finansial dan pencucian uang.

Kami percaya hal ini membantu kami untuk mempertahankan fundamental dan menempatkan kami di posisi yang baik untuk meraih pertumbuhan ke depannya ketika dunia kembali normal.

Aktivitas Usaha dan Produk dan Jasa

Bisnis utama HSBC Indonesia adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke bank lain atau nasabah, serta mengeluarkan surat utang. Produk dan jasa Bank dibagi menjadi tiga segmen utama: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, dan Global Banking & Markets, yang dapat dilihat di bagian Profil Perusahaan.

Suku Bunga Kredit dan Penghimpunan Dana

Di tahun 2020, suku bunga kredit dan penghimpunan dana adalah:

Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Segmen Kredit					Suku Bunga Penghimpunan Dana dalam Rupiah
Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi		
			KPR	Non KPR	
8,00%	9,80%	-	10,00%	-	-

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank didesain untuk memastikan keberlanjutan operasional Bank serta jenjang karir yang jelas bagi karyawan. Struktur ini memampukan organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mengeluarkan produk dan jasa yang baik untuk nasabah serta menghadapi tantangan yang ada.

Jaringan dan Mitra Usaha

Sebagai bank global yang beroperasi di Indonesia, HSBC Indonesia mengombinasikan keahlian rantai global dan pengetahuan lokal untuk membuat produk dan jasa bagi nasabah Indonesia. Jaringan HSBC yang berada di 64 negara di seluruh dunia membuat kami bisa memberikan pengalaman internasional, sementara staf lokal membuat Bank memahami keinginan para nasabah. Bank juga bekerja sama dengan mitra usaha terbaik dalam memberikan produk dan jasa.

Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Bank di tahun 2020 melayani nasabah melalui lebih dari 69 cabang kantor di 24 kota di Indonesia, didukung oleh lebih dari 3.000 karyawan.

Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham apapun di Bank di tahun 2020, sebagaimana tertera di bagian Profil Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan-Perubahan Penting di Bank

Direksi dapat melaporkan bahwa tidak ada perubahan penting di Bank di tahun 2020.

Komitmen Keuangan Berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank telah merumuskan tujuan keuangan berkelanjutan melalui pembiayaan yang memungkinkan terjadinya transisi menuju ekonomi rendah karbon dan membantu nasabah mengelola risiko yang disebabkan oleh transisi tersebut. Kegiatan pembiayaan ini termasuk menyediakan fasilitas kredit, serta layanan konsultasi atau akses pada pasar modal.

Komitmen Bank terkait dengan pelaksanaan prinsip berkelanjutan dilakukan melalui:

Pengembangan pengetahuan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan keterlibatan.

- Membentuk kelompok kerja khusus keuangan berkelanjutan.
- Merawat dan melanjutkan posisi Bank sebagai pemimpin di institusi keuangan untuk keuangan berkelanjutan dengan menjadi pembicara pada konferensi dan beragam forum.
- Berkoordinasi dengan nasabah untuk memahami risiko yang mungkin berdampak pada bisnis mereka, sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
- Di internal, Bank melaksanakan proses transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk pada kegiatan operasional.

Nilai Berkelanjutan dan Tanggapan Bank

Hingga tahun 2020, Bank telah menerapkan standar operasional dan prosedur yang mengintegrasikan isu lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kegiatan usaha Bank. Khususnya yang berkenaan dengan lini bisnis utama, yaitu di bidang penyaluran dana. Bank memberikan perhatian khusus pada nasabah yang kegiatan usahanya memiliki atau berpotensi memiliki dampak buruk terhadap lingkungan atau masyarakat.

Dari sisi manajemen risiko, pencapaian Bank adalah mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial untuk menghindari dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional. Bank juga meningkatkan kapasitas staf internal dan kemitraan kolaboratif (meningkatkan pengetahuan keuangan berkelanjutan dan perubahan iklim).

Kondisi Eksternal dan Tantangan Pencapaian Keuangan Berkelanjutan

Bank menyadari hambatan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Sebagai salah satu Bank yang terlibat dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), Bank meyakini bahwa platform IKBI dapat memanfaatkan keuangan swasta untuk mengurangi risiko terkait dengan persoalan lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola untuk mencapai ekonomi rendah karbon. HSBC Indonesia juga berkontribusi terhadap studi, penelitian, dan para ahli dari IKBI untuk industri perbankan.

Untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang didukung POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Pencapaian Kinerja Keuangan Berkelanjutan 2020

Aspek Lingkungan

Bank terus berupaya mengurangi jejak karbon. Pada tahun 2020, total penurunan jejak karbon mencapai 1.141 ton, dengan konsumsi listrik sebanyak 1,5 juta Kilowatt Hour (KwH).

HSBC Indonesia juga berkomitmen meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan alat penerang ramah lingkungan, seperti LED dan sensor lampu yang mengurangi konsumsi listrik pada enam kantor cabang. Penggunaan kertas terus menurun. Di tahun 2020 terjadi pengurangan sebanyak 24% (atau 0,8 juta lembar) untuk komunikasi dengan nasabah melalui kampanye inisiatif *paperless*, otomasi proses internal, dan migrasi ke *channel* digital. Kebijakan *work from home* ikut menurunkan jumlah pencetakan sebesar 21% atau 2,6 juta lembar kertas. Pembelian kertas Bank juga turun sebesar 44% sejak 2019.

Pertimbangan Sosial

Kegiatan usaha utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk membantu mengembangkan perekonomian. Kami ingin memberikan dampak positif kepada nasabah dengan mendukung mereka untuk dapat tumbuh berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi kami. Kami memahami bahwa dengan tumbuh bersama, maka kami dapat memberikan dampak yang lebih besar pada komunitas dan negara tempat kami beroperasi.

Manajemen Risiko

HSBC Indonesia terus memastikan agar jasa keuangannya bermanfaat pada lingkungan dan komunitas. Karena itu, kami dapat yakin bahwa kami berkontribusi pada pertumbuhan yang bekelanjutan.

Manajemen risiko terkait implementasi keuangan berkelanjutan Bank terdiri dari dua aspek. Pertama, risiko adaptasi. Bank menyadari pentingnya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, yang berdampak pada kehidupan manusia, serta operasional, perilaku pasar, dan keputusan investasi. Kedua, risiko fisik. Perubahan iklim dapat berakibat kerugian ekonomi. Untuk memitigasi risiko ini, Bank melakukan riset lengkap untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap nasabahnya dan investasi mereka.

Peluang

Untuk mencapai keuangan berkelanjutan, HSBC Indonesia perlu menangkap peluang-peluang yang ada. Kami beranggapan bahwa keuangan berkelanjutan akan mendukung transisi bisnis dari operasional yang menggunakan banyak karbon menjadi ekonmi rendah karbon dengan menciptakan sumber daya energi baru, teknologi, atau infrastruktur yang dibutuhkan demi masa depan yang lebih bersih.

Peluang-peluang yang dapat ditangkap Bank termasuk: energi terbarukan, efisiensi energi, manajemen air dan sampah, penggunaan lahan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, dan bangunan serta transportasi yang bersih.

Prospek Usaha

Perekonomian global diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 seiring dengan upaya pemerintah dunia untuk mempercepat distribusi vaksin COVID-19. Namun, sejauh ini distribusi vaksin masih belum merata. Indonesia juga berupaya mendistribusikan vaksin untuk membantu perbaikan ekonomi, namun distribusinya masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Kami berharap perekonomian akan pulih, namun kami akan terus memonitor perkembangan yang ada dan meninjau portofolio kami untuk meminimalisir risiko. Bisnis kami bersifat jangka panjang, dan kami akan memastikan agar likuiditas dan permodalan tetap kuat untuk tumbuh berkelanjutan di masa depan.

Tata Kelola Perusahaan

Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, dan belajar dari praktik-praktik terbaik, sebagai bagian Tata Kelola Perusahaan (GCG). Lima prinsip GCG kami adalah: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Adil. Kami melakukan *self-assessment* secara berkala pada 11 Aspek Evaluasi Implementasi GCG.

Penilaian ini dimasukkan ke dalan sebuah sistem tata kelola yang mencakup tiga area: struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. Peringkat di tahun 2020 adalah Baik. Bank menjalankan GCG untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan layanan untuk pemangku kepentingan.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Sebagai penopang bisnis kami, para karyawan melakukan pelatihan reguler dan mendapatkan penghargaan atas kinerjanya. Bank juga memberikan eksposur internasional pada karyawan dengan dinas ke luar negeri. Sayangnya, akibat pandemi COVID-19 beberapa program dan kelas pelatihan serta penugasan ke luar negeri di tahun 2020 harus dibatalkan. Bank memilih melakukan program pelatihan dan pengembangan melalui *e-learning* dan secara virtual.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada cara orang memakai teknologi. Dengan keterbatasan interaksi fisik, Bank meningkatkan penggunaan teknologi agar para karyawan dapat tetap produktif sementara bekerja di rumah atau bergantian. Departemen Teknologi Informasi bekerja keras untuk memastikan infrastruktur Bank dapat menopang bisnis dalam waktu lima tahun ke depan.

Tanggung Jawab Sosial

Bank berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan di Indonesia melalui program pendidikan, lingkungan, dan sosial. Kami mengadakan kegiatan literasi bisnis dan keuangan untuk memberikan pengetahuan pada komunitas tentang bisnis dan keuangan, sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kami juga berpartisipasi dalam progam konservasi lingkungan, serta program pemberdayaan masyarakat.

Di saat negara menghadap pandemi COVID-19, HSBC Indonesia memiliki keinginan untuk berkontribusi menolong orang-orang yang terkena dampak pandemi. Kami menyediakan alat pelindung diri untuk para tenaga kesehatan dan alat kebersihan serta *voucher* medis untuk masyarakat yang rentan. Kami juga mendukung pengusaha mikro wanita dan petani yang terpukul oleh pelemahan ekonomi. Secara total, Bank mengeluarkan Rp8,63 miliar untuk respons COVID-19.

Perubahan Komposisi Direksi

Untuk mematuhi peraturan yang ada, HSBC Indonesia menambah dua direktur Warga Negara Indonesia pada tanggal 26 Juni 2020 sebagai anggota Direksi. Keduanya telah mendapatkan persetujuan OJK.

Per 31 Desember 2020, susunan Direksi terdiri dari:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Francois de Maricourt
Direktur	Caecilia Pudji Widyarti
Direktur	Stephen Whilton Angell
Direktur	Dio Alexander Samsoeri
Direktur	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo
Direktur	Eri Budiono
Direktur	Riko Adythia
Direktur Kepatuhan	Nisha Asha Bhambhani[1)]
Direktur	James Rex Elwes[2)]

[1)] Efektif sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *Fit and Proper Test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[2)] Efektif jika mendapat dan sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas *Fit and Proper Test* atau tanggal keluarnya izin kerja, mana yang terbit terakhir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apresiasi

Saya ingin berterima kasih pada Direksi, manajemen, dan karyawan atas kerja kerasnya yang luar biasa di tahun 2020 yang sulit ini. Saya juga ingin mengucapkan apreasiasi pada Dewan Komisaris atas bimbingannya dan pada regulators atas dukungannya. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa HSBC Indonesia berhasil menjaga fundamentalnya di tahun yang menantang ini dan berupaya untuk tumbuh lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

Francois de Maricourt
Presiden Direktur

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 2020 PT BANK HSBC INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank HSBC Indonesia tahun 2020 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2021

Dewan Komisaris

Matthew Kneeland Lobner
Presiden Komisaris

Hanny Wurangian
Wakil Presiden Komisaris dan
Komisaris Independen

Mark Thomas McKeown
Komisaris

Umar Juoro
Komisaris Independen

Catherihawati Hadiman Sugianto
Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 2020 PT BANK HSBC INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT Bank HSBC Indonesia tahun 2020 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2021

Direksi

Francois de Maricourt
Presiden Direktur

Caecilia Pudji Widyarti
Direktur

Stephen Whilton Angell
Direktur

Dio Alexander Samsoeri
Direktur

Edhi Tjahja Negara Darmohusolo
Direktur

Eri Budiono
Direktur

Riko Adythia
Direktur

/03

PROFIL PERUSAHAAN

26 Profil Perusahaan
28 Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar
30 Filosofi *Brand*
31 Struktur Pemegang Saham
32 Kepemilikan Saham
32 Produk dan Jasa
33 Aktivitas Usaha
34 Profil Dewan Komisaris
38 Profil Direksi
42 Struktur Organisasi

PROFIL PERUSAHAAN

Kami menawarkan rangkaian peluang luas yang tak tertandingi bagi para nasabah dengan keterhubungan erat lintas-batas. Bersama sebagai mitra dan dalam kesatuan organisasi.

Tentang Grup HSBC

Grup HSBC (HSBC) adalah salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terbesar di dunia dan beroperasi di pasar-pasar yang mapan serta berkembang. Sepanjang sejarahnya, HSBC hadir di daerah yang memiliki pertumbuhan, menghubungkan nasabah dengan berbagai peluang yang ada. Kami mendukung kegiatan usaha dan ekonomi menuju kemakmuran, membantu masyarakat untuk memenuhi harapan dan mewujudkan ambisinya.

HSBC melayani lebih dari 40 juta nasabah di seluruh dunia, mulai dari nasabah individu sampai dengan perusahaan besar, melalui tiga bisnis global yaitu *Commercial Banking*, *Global Banking and Markets*, serta *Wealth and Personal Banking* yang baru dibentuk di kuartal kedua tahun 2020 dengan menggabungkan bisnis *Retail Banking and Wealth Management* dan *Global Private Banking*. Jaringan HSBC mencakup 64 negara di Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Utara, serta Amerika Latin. HSBC berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, berkesinambungan dan etis, memberikan nilai wajar untuk nasabah dan menguatkan komunitas komunitas kami.

HSBC juga memfasilitasi sejumlah perusahaan Indonesia untuk terkoneksi dengan peluang global. Transaksi-transaksi penting yang terjadi selama 2020, antara lain:

- Mendapat amanah sebagai *Joint Lead Manager* dan *Joint Bookrunner* untuk *USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes dual tranche* untuk Pertamina senilai USD1,5 miliar terdiri dari USD500 juta dengan maturitas 10 tahun dan USD1 miliar dengan maturitas 30 tahun.
- Mendapat amanah sebagai *Joint Global Coordinator* dan *Joint Bookrunner* untuk *Reg S Registered 5NC3 Fixed Rate Senior Unsecured Bond* senilai USD350 juta untuk Grup Tower Bersama dengan kupon 4,25%. Transaksi tersebut merupakan transaksi pertama yang dikeluarkan oleh Korporasi Indonesia (di luar BUMN) dengan *unrated basis*.
- Mendapat amanah sebagai *Subordinated Basel III Compliant Tier 2* perdana dari Indonesia untuk BTN dengan nilai USD300 juta dengan maturitas 5-tahun dengan *yield* sebesar 4,20%.
- Ambil bagian dalam surat utang *dual tranche* senilai USD1,45 miliar terdiri dari USD650 juta dengan maturitas 10,5 tahun dan USD800 juta dengan maturitas 40 tahun untuk Pertamina dan juga sebagai *Joint Dealer Manager* pada *Any-and-All tender offer*, menargetkan surat utang yang ada senilai USD1,5 miliar di 5,25% dengan jatuh tempo pada 2021. Transaksi tersebut mewakili debut *benchmark* untuk surat utang 40 tahun bagi penerbit dari Indonesia dan merupakan transaksi perdana untuk *liability management* bagi Pertamina.
- Menjadi *Joint Bookrunner* dan *Joint Lead Manager* untuk Republik Indonesia SEC *Registered Senior Unsecured Fixed Rated Notes*, terdiri dari USD1,65 miliar dengan maturitas 10 tahun, USD1,65 miliar dengan maturitas 30 tahun, dan USD1 miliar dengan maturitas 50 tahun. Transaksi tersebut merupakan transaksi pertama di ASEAN, transaksi *sovereign* pertama di Asia sejak awal pandemi COVID-19 dan juga penawaran perdana untuk surat utang 50 tahun dari Pemerintah Indonesia.
- Menjadi *Joint Bookrunner* dan *Joint Lead Manager* untuk penerbitan perdana dari PT Hutama Karya (Persero) untuk *Senior Unsecured Fixed Rated Notes* senilai USD600 Juta dengan maturitas 10 tahun. Penerbitan ini nir-kondisi dan dijamin tidak dapat dibatalkan oleh Pemerintah Indonesia, merupakan Obligasi Global pertama di luar negeri dengan struktur penjaminan dari pemerintah.
- Sebagai *Joint Global Coordinator, Lead Manager* dan *Active Bookrunner* untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ("MIND ID") untuk USD *Senior Unsecured Fixed Rate Notes triple tranche* senilai USD2,5 miliar terdiri dari USD1 miliar dengan maturitas 5 tahun, USD1 miliar dengan maturitas 10 tahun dan USD500 juta dengan maturitas 30 tahun. Penawaran ini adalah *liability management* perdana *any-and-all cash tender offer* dari MIND ID. HSBC bertindak sebagai *Joint Dealer Manager* pada transaksi *tender offer*.

HSBC Grup:

- HSBC didirikan di Hong Kong pada **3 Maret 1865**.
- HSBC saat ini beroperasi di **64 negara** dan wilayah.
- Memiliki lebih dari **40 juta nasabah** di seluruh dunia.
- Mempekerjakan **226.000 orang** di seluruh dunia.
- Pada tahun 2020, HSBC Grup membukukan laba sebelum pajak sebesar **USD8,8 miliar** dengan total aset sebesar **USD3 triliun**.

- Sebagai *Joint Arrangers* pada pembentukan EMTN perdana untuk Bank Negara Indonesia
- Sebagai *Joint Bookrunner, Joint Lead Manager* dan *Joint Green Structuring Advisor* pada 144A/Reg S *Trust Certificates* (the "Wakala Sukuk") *triple tranche* untuk Republik Indonesia senilai USD750 juta dengan maturitas 5 tahun, USD1 miliar dengan maturitas 10 tahun dan USD750 juta dengan maturitas 30 tahun. Green Sukuk dengan maturitas 5 tahun tersebut merupakan penawaran ketiga dari Pemerintah Indonesia dalam Green Bond dan Kerangka Green Sukuk dan HSBC berturut-turut selama 3 tahun menjadi *Green Structuring Advisor* untuk Pemerintah Indonesia.
- Sebagai *Joint Lead Manager* dan *Joint Bookrunner* untuk USD *Senior Unsecured Fixed Rate Notes dual tranche* dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terdiri dari USD500 juta dengan maturitas 10 tahun dan USD1 miliar dengan maturitas 30 tahun. Transaksi Kupon dan *yield* terendah untuk surat utang dalam USD untuk 30 tahun dari perusahaan di Indonesia.

Dapatkan informasi selengkapnya mengenai HSBC dengan mengunjungi: www.hsbc.com/about-hsbc

Tentang Bank

Sebagai pelopor perbankan modern di negara-negara Asia, HSBC memiliki sejarah panjang di Indonesia. HSBC membuka kantor pertamanya di Indonesia di Jakarta (saat itu dikenal sebagai Batavia) pada tahun 1884 untuk memfasilitasi perdagangan gula, yang merupakan perdagangan penting saat itu. Operasional Bank kemudian diperluas ke Surabaya pada tahun 1896.

Akibat gejolak di pasar Indonesia, HSBC terpaksa menutup kegiatannya selama Perang Dunia Kedua dan beroperasi kembali setelah perang usai. Setelah penutupan usahanya di pertengahan 1960-an, HSBC kembali mendapat izin perbankan baru pada tahun 1968. Sejak itu Bank terus bertumbuh serta mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia.

Pada Mei 2009, HSBC resmi mengakuisisi PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan tujuan untuk meningkatkan bisnis perbankan komersial HSBC di Indonesia, memperluas bisnis ritel di sektor perbankan, dan melipatgandakan jaringan HSBC di Indonesia. PT Bank Ekonomi Raharja berubah menjadi PT Bank HSBC Indonesia (Bank) pada Oktober 2016.

HSBC mengintegrasikan kantor cabang bank asingnya (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta) ke dalam anak perusahaan (PT Bank HSBC Indonesia) pada 17 April 2017, sebagai bentuk dukungan kepada agenda konsolidasi perbankan Pemerintah Republik Indonesia. HSBC mendapat kehormatan sebagai bank internasional pertama yang diberi izin untuk mengintegrasikan kantor cabang asing.

Bank saat ini melayani nasabahnya melalui lebih dari 69 kantor di 24 kota di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 3.000 karyawan, Bank menawarkan layanan perbankan *Wealth and Personal Banking, Commercial Banking*, dan *Global Banking and Markets*. Komitmen Bank terhadap komunitas di Indonesia tercermin dari berbagai kegiatan keberlangsungan perusahaan yang diselenggarakan oleh Bank.

VISI, MISI DAN **NILAI-NILAI DASAR**

Visi

"Sepanjang sejarah HSBC hadir seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan-kawasan yang sedang berkembang, menghubungkan nasabah dengan beragam peluang. Kami membantu memajukan kegiatan usaha dan mewujudkan harapan dan ambisi tiap individu. Inilah peran dan tujuan kami."

Misi

"Membantu nasabah berkembang di manapun mereka berada dan menghubungkan mereka dengan beragam peluang, apapun dan di manapun."

Nilai-nilai Kami

Nilai-nilai kami menggambarkan karakter HSBC sebagai organisasi dan menunjukkan keunikan kami:

TERBUKA

Kami menghargai keragaman

- Kami dilahirkan dalam beragam bahasa. Kami berdiri di atas kekuatan beragam pengalaman, sifat, dan suara; itulah jati diri kami seutuhnya dan cara kami bekerja.
- Semakin besar empati dan keragaman kami, semakin baik kami mencerminkan dunia para nasabah dan komunitas kami – dan semakin baik pula kami dapat melayani mereka.
- Jadi, kami memperjuangkan keterbukaan. Kami mau mendengar. Kami melenyapkan hambatan. Kami mencari pandangan yang berbeda dari pandangan kami sendiri.

TERHUBUNG

Kami sukses bersama

- Kami menawarkan rangkaian peluang luas yang tak tertandingi bagi nasabah kami.
- Namun, kami hanya dapat menggenapi seluruh janji ini dengan keterhubungan erat lintas-batas. Bersama nasabah dan mitra kami. Bersama sebagai mitra dan dalam kesatuan organisasi.
- Jadi, kami berkolaborasi lintas-batas. Kami melenyapkan hambatan. Kami saling mendukung bahkan, tanpa saling menghambat.
- Bersama, kami mewujudkan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri.

Andal

- Tindakan kami berdampak nyata pada dunia dan kehidupan masyarakat. Kami mengemban tanggung jawab ini sungguh-sungguh.
- Kami menetapkan standar tinggi bagi diri sendiri dan kami bertanggung jawab atas setiap tindakan kami. Kami senantiasa mengedepankan penilaian objektif. Untuk tiap hal yang terasa tidak pada tempatnya kami akan angkat bicara dan bertindak.
- Masa depan kami bangun di hari ini. Kesuksesan hanya dapat kami raih dengan pandangan jangka panjang yang menitikberatkan keberlanjutan bagi nasabah, investor dan planet kita bersama.

Kami menuntaskan

- Kami menciptakan nilai bagi nasabah dengan senantiasa bergerak maju dan mewujudkan sesuatu.
- Kami memiliki semangat wirausaha: Kami mencoba hal baru, kami belajar dan berkembang, kami mengambil risiko cerdas.
- Kami dinamis: Kami tidak mau biasa-biasa saja. Kami bergerak cepat.
- Kami tegas: Kami membuat pilihan jelas dan berani bertindak.
- Terakhir, kami menepati janji: Kami selalu menuntaskan apa yang kami janjikan.

FILOSOFI ***BRAND***

Arti *Brand* Kami

Karakter kami lahir dari nilai-nilai dan pengalaman panjang Grup HSBC. Berdiri lebih dari 150 tahun yang lalu, HSBC hadir untuk melayani kebutuhan jalur perdagangan yang berkembang di Asia. Sejak itu, HSBC tumbuh menjadi bank internasional yang melayani kebutuhan jutaan orang, perusahaan, dan masyarakat di seluruh dunia.

Tujuan *Brand*

Memajukan kesejahteraan semua yang kami layani, saat ini, esok, dan di masa depan. Apapun yang kami lakukan, setiap produk yang kami tawarkan, setiap layanan yang kami berikan, hadir hanya untuk satu alasan: demi meningkatkan kesejahteraan nasabah kami.

Janji *Brand*

Jika peran kami adalah pekerjaan kami, dan karakter kami adalah cara dan gaya penyampaiannya, maka janji *brand* kami adalah komitmen untuk nasabah.

Komitmen Kami

"Bersama kita berkembang" menyampaikan posisi dan karakter kami ke hati dan pikiran semua yang terhubung dengan HSBC. Hal ini didasarkan pada kemitraan dan timbal balik. Keberhasilan nasabah adalah keberhasilan HSBC juga. Demikian pula, keberhasilan orang di sekitar kami adalah keberhasilan HSBC. Jika pemegang saham, pemasok, dan masyarakat sekitar berkembang, maka ini adalah keberhasilan kita bersama.

Ini adalah pandangan modern yang melandasi bisnis kami: bersama-sama membantu mereka yang kami layani untuk mewujudkan harapan, impian, dan ambisinya, serta menghubungkan mereka dengan berbagai peluang di seluruh dunia.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah struktur pemegang saham Bank sampai dengan *ultimate shareholder* per 31 Desember 2020:

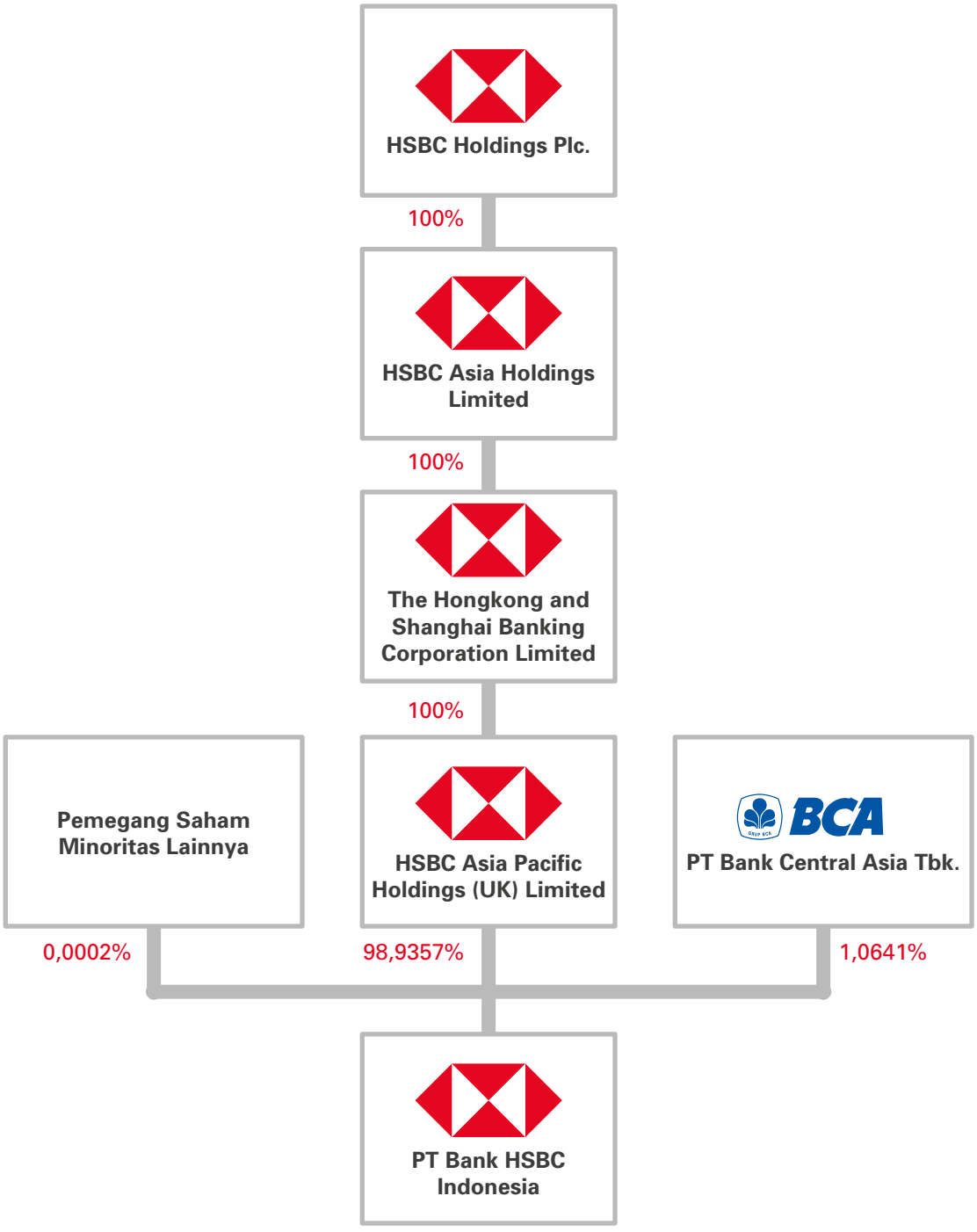

KEPEMILIKAN SAHAM

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited	10.473.719.274	98,9357%
PT Bank Central Asia Tbk.	112.653.737	1,0641%
Lainnya	21.986	0,0002%
Total	**10.586.394.997**	**100,0000%**

PRODUK DAN JASA

Simpanan

- Rekening Giro Rupiah
- Deposito Rupiah dan Mata Uang Asing
- Rekening Tabungan Rupiah dan Mata Uang Asing
- HSBC High Rate Savings

Pinjaman

- Pinjaman Modal Kerja
- Pinjaman Investasi
- Kredit Pemilikan Rumah
- Personal Instalment Loan
- Pinjaman Berjangka
- Revolving Loan
- Flexi Credit
- HSBC Overdraft
- Smart Money
- Investment Link
- Syndicated Loan
- Project Export Financing

Wealth Management

Investasi
- Reksa Dana
- Obligasi
- Structured Products

Asuransi
- Care Invest Plus
- College Care
- Optima Care Invest
- Future Care
- Joint Life Care
- Premium Wealth Assurance
- Ultima Wealth Assurance
- Optima Protection Assurance PASTI
- Credit Pro Plus
- Smart Traveler
- AXA Pro Medicare
- AXA Medicare Essential

Wealth Management
- Growing Wealth Planning
- Children's Education Planning
- Retirement Planning
- Protection Planning

Kartu Kredit

- HSBC Visa Signature
- HSBC Visa Platinum
- HSBC Platinum Cash Back
- HSBC Gold Card
- HSBC Premier MasterCard

Global Markets

- Money Market-Loan & Deposit
- Repo - Reverse Repo
- FX – Spot
- FX – Forward
- FX – Swap
- FX – Option
- FX – Call Spread Option
- FX - DNDF
- Fixed Income - Government Bonds & Corporate Bonds - IDR & FX
- Derivatives - Interest Rate Swap
- Derivatives - Cross Currency Swap
- Dual Currency Investment

AKTIVITAS USAHA

Sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya Bank adalah untuk melaksanakan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan usaha Bank adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat
- Memberikan kredit
- Menerbitkan surat hutang
- Membeli, menjual, atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga
- Melakukan kegiatan kustodian
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing
- Melakukan kegiatan penyertaan modal
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

HSBC Securities Services

- Accounting and Valuation Services
- Transfer Agency
- Custodian Services

Transaction Services

- HSBCnet Mobile
- HSBCnet Connect
- In-house Transfer
- National Clearing System
- Real Time Gross Settlement (RTGS)
- Telegraphic Transfer
- Autopay
- Utility Pay
- Tax Payment
- Cheque Giro Bill
- Cash Withdrawal
- Cash Deposit
- Post-dated Cheque Warehousing
- Post-dated Cheque Discounting
- Cheque Collection
- Direct Debit
- Virtual Account
- RMS
- Domestic Cash Concentration
- ATM
- Personal Internet Banking
- Business Internet Banking
- Mobile Banking
- Phone Banking
- Satellite Branches
- Trade Transaction Tracker
- Soft Token HSBCnet
- Digital Account Receivable Tools (DART)
- Omni Channel
- Liquidity Management Dashboard (LMD)
- Cash Flow Forecasting

Global Trade and Receivables Financing (GTRF)

Import

- Letter of Credit (Sight & Usance)
- UPAS & UPAU
- Import Documentary Collection
- Avalisation
- Shipping Guarantee

Export

- Letter of Credit Negotiation
- Letter of Credit Transfer
- Letter of Credit Confirmation
- Export Forfaiting
- Export Documentary Collection
- Documentary Collection Financing
- Financing against Avalised/Co-accepted Bills

Trade Loans

- Pre-Shipment and Post-Shipment Seller Loan
- Pre-Shipment and Post-Shipment Buyer Loan

Structured Trade Finance

- Supply Chain Financing
- Receivables Finance

Bank Guarantee (BG)/Standby Letter of Credit (SBLC)

- Bid/Tender BG/SBLC
- Custom BG/SBLC
- Retention BG/SBLC
- Performance BG/SBLC
- Advance Payment BG/SBLC
- Financial BG/SBLC

Commodities and Structure Trade Finance

- Borrowing Base Facility
- Pre-Export Finance
- Prepayment Finance
- Warehouse Finance

PROFIL
DEWAN KOMISARIS

Matthew Kneeland Lobner
Presiden Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, usia 49 tahun. Diangkat menjadi Presiden Komisaris PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 September 2017.

Meraih gelar Master dari Massachusetts Institute of Technology.

Matthew Lobner adalah *Head of International, Asia-Pacific*, dan *Head of Strategy and Planning*, Asia-Pacific, HSBC. Beliau bergabung dengan HSBC Group pada tahun 2005 dari McKinsey & Company dan telah bekerja pada berbagai posisi di Amerika Serikat, Inggris, dan Asia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Chief of Staff and Head of Strategy & Planning* di Eropa; *Global Head of Strategy for Commercial Banking*; serta CEO di HSBC Thailand.

Hanny Wurangian
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 70 tahun. Diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 7 Mei 2013.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan manajemen dan akuntansi, serta gelar Magister Akuntansi, dari Universitas Airlangga.

Mengawali karirnya sebagai staf pengajar di Universitas Airlangga sebelum menekuni bidang akuntan publik. Saat ini beliau menjalankan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, Kreston International.

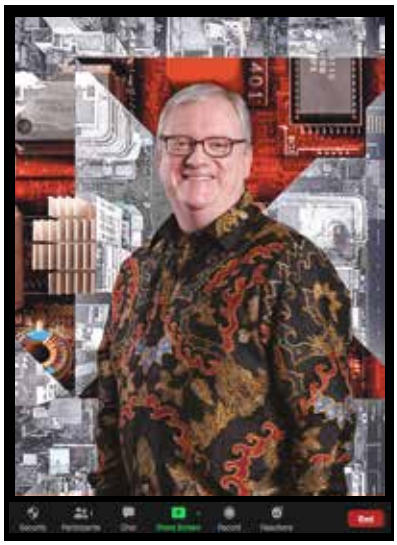

Mark Thomas Mckeown

Komisaris

Warga Negara Inggris, usia 62 tahun. Diangkat menjadi Komisaris PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Oktober 2015.

Memperoleh gelar Associates of the Chartered Institute of Bankers (ACIB) dari Liverpool School of Banking (Liverpool John Moores University).

Mark bekerja pada Midland Bank mulai tahun 1976, dan bergabung dengan HSBC seiring dengan akuisisi Midland. Sebelumnya beliau menjabat sebagai posisi senior dalam Risk, Operations, Retail Banking and Commercial Banking, dengan lingkup global. Beliau pernah diangkat menjadi Group General Manager dengan salah satu tugasnya mengelola seluruh *Risk Disciplines* untuk wilayah Asia Pasifik. Pada bulan Februari 2020 beliau ditunjuk sebagai Group General Manager di Group Head Office, Global Chief Corporate Credit Officer and Head of Wholesale Credit and Market Risk, dan Sejak juni 2020 beliau juga menjabat sebagai Chief Risk Officer, Asia Pacific. Beliau juga pernah menjabat Chairman of the Region's Risk Management Committee, anggota Komite Eksekutif, juga sebagai anggota HSBC Group Risk Management Board, dan ditunjuk sebagai Chairman HSBC Bank (Taiwan) Limited tahun 2019 dan anggota HSBC Asia Holdings Board.

PROFIL **DEWAN KOMISARIS**

Umar Juoro

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun. Penunjukan beliau sebagai Komisaris Independen dilakukan pada resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 September 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1985, kemudian melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar Master of Arts pada bidang ekonomi dari University of Philippines, dan Master of Arts dalam bidang ekonomi politik dari Boston University, AS. Beliau melanjutkan pendidikan pada bidang ekonomi internasional di Kiel, Jerman.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank HSBC Indonesia, beliau pernah menjadi komisaris independen di PT Bank Maybank Indonesia Tbk tahun 2002 hingga 2017, Dewan Wali Amanat Maybank Foundation (Kuala Lumpur) tahun 2012 sampai 2017, dan ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tahun 2010 sampai 2017. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai asisten bidang ekonomi, moneter, dan industri untuk mantan Wakil Presiden/Presiden RI B.J. Habibie dari tahun 1998 sampai 1999. Beliau juga terlibat dalam berbagai proyek konsultasi dengan Bank Dunia, ADB, ILO, dan UNDP.

Catherinawati Hadiman Sugianto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Independen PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 30 Juni 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti dan Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Atmajaya.

Memulai karir di KAP KPMG tahun 1989. Pada tahun 1990 bergabung di PT Bank CIMB Niaga Tbk dan selama lebih dari 22 tahun menggeluti berbagai bidang: *consumer banking, treasury, commercial dan corporate banking*. Jabatan terakhir di PT Bank CIMB Niaga adalah Vice President Director.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau menjabat sebagai Direktur Commercial Banking PT Bank HSBC Indonesia pada tahun 2016 dan pernah menjadi Komisaris Independen di PT Bank Tabungan Negara Tbk.

Mark Trevor Surgenor

Komisaris

Warga Negara Inggris, usia 48 tahun. Diangkat menjadi Komisaris PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Oktober 2020.

Beliau memperoleh gelar BA (Hons) Business Studies pada bidang *Marketing* di Sheffield Hallam University Business School (UK) dan gelar Master of Science International pada bidang *Marketing* di Sheffield Hallam University Business School (UK).

Jabatan di HSBC meliputi Group Head of Wealth Management, Group Wealth & Personal Banking, Regional Head of Wealth Management, RBWM Asia Pacific; Regional Head of Wealth Business Performance, RBWM Asia Pacific; Head of Wealth Sales, HSBC Singapore; Head of Premier and Wealth, HSBC Mexico; Board Member, HSBC Asset Management Mexico SA; Regional Head of Wealth Products Europe, HSBC UK (berbasis di Perancis).

Di Lloyds Bank beliau pernah bekerja sebagai Global Head of Products & Marketing di Lloyds International dan Kepala Pemasaran & *Share Dealing* di Lloyds Wealth (UK).

PROFIL DIREKSI

Francois de Maricourt

Presiden Direktur

Warga Negara Perancis, usia 49 tahun. Diangkat menjadi Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 27 Februari 2020.

Beliau memperoleh gelar DESS (*Post Graduate*) di bidang Keuangan dan Perbankan dari Universite Robert Schuman dan gelar Maitrise (MSc) di bidang ekonomi dari Universite Paris Dauphine.

Beliau telah bekerja untuk Grup HSBC selama lebih dari 25 tahun dalam berbagai posisi di Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Jabatan terakhirnya adalah Chief Executive Officer (CEO) - HSBC Bangladesh dari tahun 2014 hingga tahun 2020.

Caecilia Pudji Widyarti

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun, dan sudah bekerja di HSBC sejak Mei 2015. Diangkat menjadi Direktur PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 19 Oktober 2016.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Psikologi Klinis dan memperoleh sertifikasi Behavior Therapy dari Camarillo State Hospital, USA.

Sebelum bergabung dengan Bank beliau menjabat sebagai *SVP Human Resources* di KCBA HSBC Jakarta; Kepala/Direktur Sumber Daya Manusia di General Electric (GE); Direktur Sumber Daya Manusia di Pfizer Pharmaceutical; dan Kepala Sumber Daya Manusia di Asean Brown Boveri Indonesia.

Stephen Whilton Angell

Direktur Manajemen Risiko

Warga Negara Inggris, usia 54 tahun. Diangkat menjadi Direktur Risk Management di PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 September 2017.

Beliau meraih gelar Sarjana Geografi dan Geologi dari Nottingham University.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai CRO Private Banking ASP and Global CRO Private Wealth Solutions, HSBC Hong Kong; Regional Head Reputational Risk and Client Selection ASP, HSBC Hong Kong; Regional Head of Wholesale Risk and Risk Strategy Audit, HSBC Asia Pacific; dan Regional Head of Credit Risk Review and Risk Identification, HSBC Asia Pacific.

Dio Alexander Samsoeri

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, usia 45 tahun. Diangkat menjadi Direktur PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Mei 2019.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Jabatan sebelumnya meliputi Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern); Chief Financial Officer HSBC Brunei Darussalam; SVP Financial Controller and Chief Operating Officer Finance; VP Quality Control & Process Monitoring Personal Financial Services serta beberapa posisi di bagian Finance di KCBA HSBC Jakarta.

Sebelum bergabung dengan Bank, beliau pernah menjabat sebagai Head of Country Finance di Standard Chartered Bank Indonesia; Manager Management Accounting and Business Planning di ABN AMRO Bank NV dan sebagai Auditor di Siddharta, Siddharta & Harsono *member firm of* KPMG International.

PROFIL **DIREKSI**

Edhi Tjahja Negara Darmohusolo

Direktur Retail Banking & Wealth Management

Warga Negara Indonesia, usia 51 tahun. Diangkat menjadi Direktur PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 27 Februari 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan dari Universitas Negeri Jember.

Jabatan beliau sebelumnya meliputi Head of Network Sales Distribution Retail Banking & Wealth Management di PT Bank HSBC Indonesia; EVP Head, Sales & Distribution di BII Maybank; Region Head di Bank Permata; Region Head Up Country & National Sales Head, Branch Manager di ABN AMRO/RBS Bank; Commercial Relationship Manager dan Senior Credit Officer di Bank Danamon.

Eri Budiono

Direktur Commercial Banking

Warga Negara Indonesia, usia 52 tahun. Diangkat menjadi Direktur PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 17 April 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis, Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia.

Jabatan beliau sebelumnya meliputi Direktur Global Banking di PT Bank Maybank Indonesia; Direktur, Corporate and Investment Banking di PT Rabobank International Indonesia; Direktur di Teak Capital Partners Singapore; Head of Corporate and Institutional Banking, KCBA HSBC Jakarta; Head of Financial Institutional Group, KCBA HSBC Jakarta; Vice President, Corporate and Institutional Banking, KCBA HSBC Jakarta; Assistant Vice President Special Credits Group, Bank ABN AMRO Indonesia; Asia Pacific Credit Analyst, Bank ABN AMRO Singapore; dan Account Relationship Manager, Bank ABN AMRO Indonesia.

Riko Adythia

Direktur Global Banking

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Diangkat menjadi Direktur Global Banking PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 30 Juni 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan Magister Bisnis Administrasi dari Booth School of Business, University of Chicago.

Jabatan sebelumnya meliputi Head of Global Banking di PT Bank HSBC Indonesia; Managing Director & Country Head of Global Subsidiaries Group di Citibank Indonesia; Managing Director & Country Head Treasury and Trade Solution, Citibank, Indonesia; Director/COO and Treasury Trade Solution Product Head, Citibank Indonesia; Director & Deputy Country CFO/Strategic Business Planning Head, Citibank Indonesia; VP Structured Trade Finance, Citibank New York; Cash Product Manager dan beberapa posisi di Finance, Citibank Indonesia.

Nisha Asha Bhambhani

Kandidat Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun. Diangkat menjadi Kandidat Direktur Kepatuhan PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Desember 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran.

Jabatan sebelumnya meliputi Direktur Kepatuhan di Deutsche Bank; Direktur Kepatuhan di Bank of America; Executive Director, Country Head of Legal di JPMorgan Chase; SVP Compliance, VP Compliance, AVP Compliance di KCBA HSBC Jakarta, AVP Legal di Standard Chartered Bank; Legal Manager di KCBA HSBC Jakarta; Senior Associate Lawyer di DNC Advocates Indonesia.

James Rex Elwes

Kandidat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, usia 38 tahun. Diangkat menjadi Kandidat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank HSBC Indonesia berdasarkan resolusi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 Desember 2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis dan Ekonomi dari University of Newcastle dan Magister Bisnis Administrasi dari London Business School.

Jabatan sebelumnya meliputi Country COO, HSBC Qatar; Deputy COO, HSBC Turkey Commercial Banking; Area Director for Business Banking di Western and Wales Region UK; Senior Strategy Analyst, HSBC Global Commercial Banking; Relationship Manager in Commercial Banking, HSBC Canada; Acting CFO, Regional Insurance HSBC Middle East and North Africa; dan Project Manager, Business Transformation Asia Pacific.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi PT Bank HSBC Indonesia per 31 Desember 2020

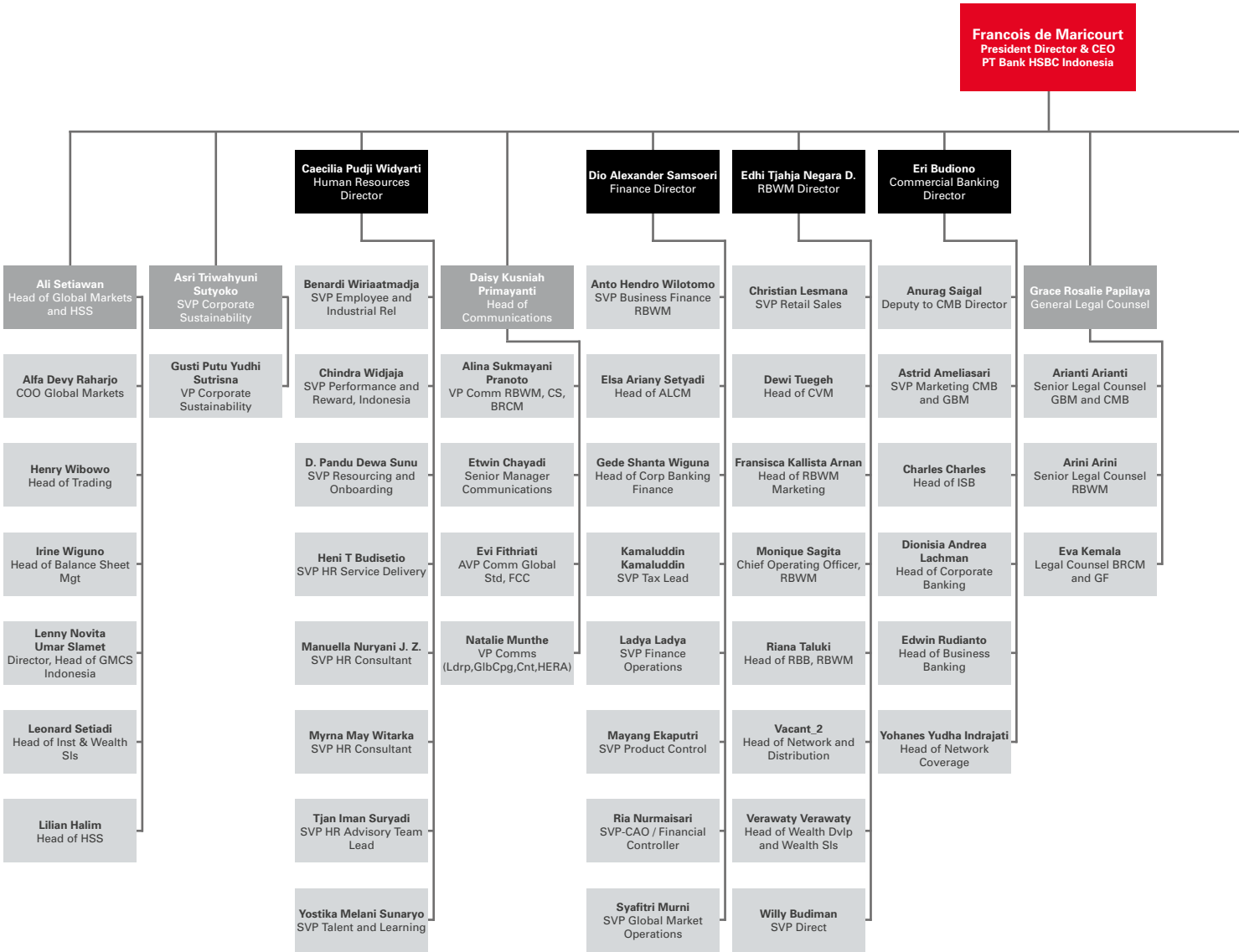

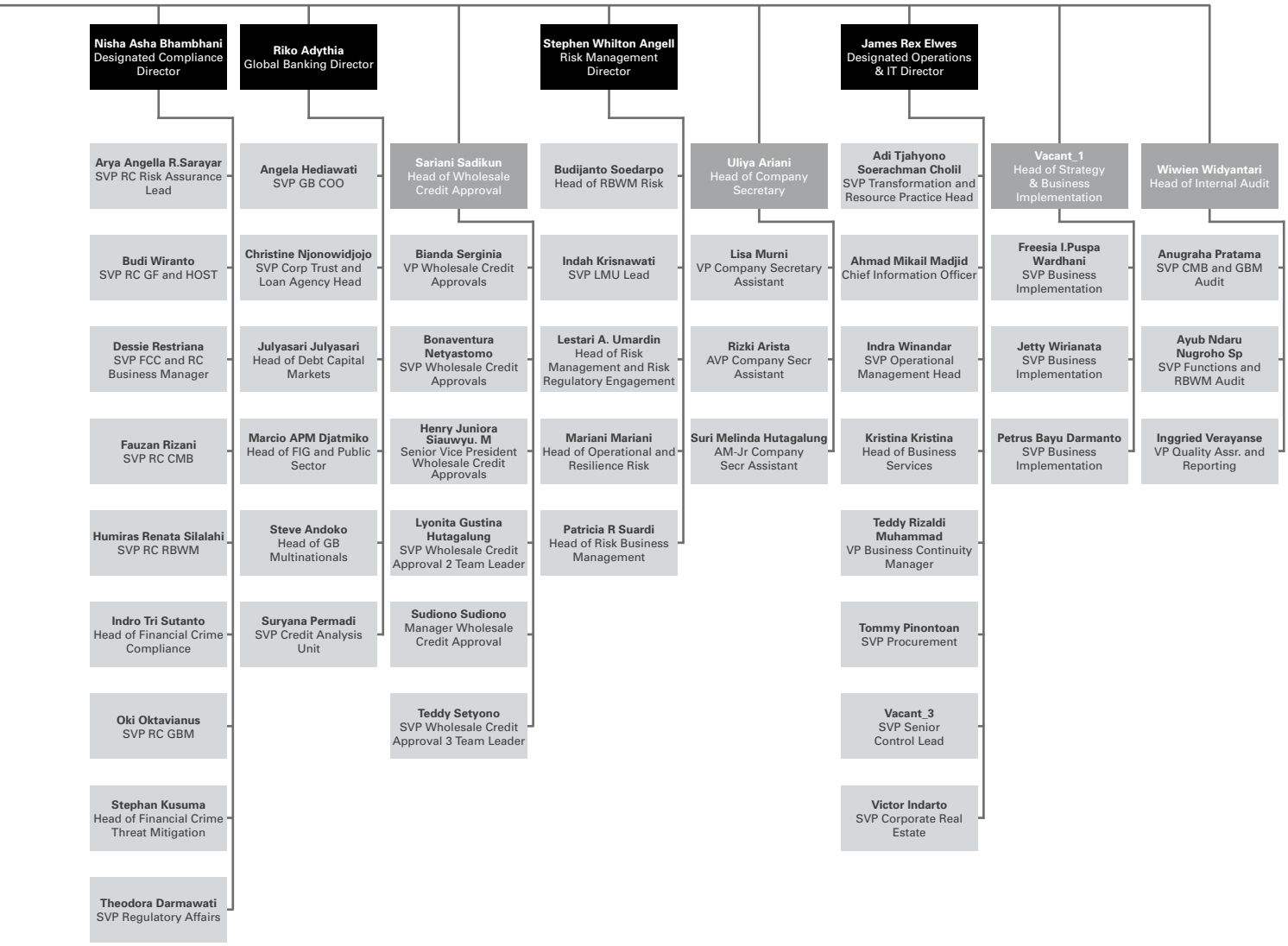
Nisha Asha Bhambhani
Designated Compliance Director
Arya Angella R.Sarayar
SVP RC Risk Assurance Lead
Budi Wiranto
SVP RC GF and HOST
Dessie Restriana
SVP FCC and RC Business Manager
Fauzan Rizani
SVP RC CMB
Humiras Renata Silalahi
SVP RC RBWM
Indro Tri Sutanto
Head of Financial Crime Compliance
Oki Oktavianus
SVP RC GBM
Stephan Kusuma
Head of Financial Crime Threat Mitigation
Theodora Darmawati
SVP Regulatory Affairs
Riko Adythia
Global Banking Director
Angela Hediawati
SVP GB COO
Christine Njonowidjojo
SVP Corp Trust and Loan Agency Head
Julyasari Julyasari
Head of Debt Capital Markets
Marcio APM Djatmiko
Head of FIG and Public Sector
Steve Andoko
Head of GB Multinationals
Suryana Permadi
SVP Credit Analysis Unit
Sariani Sadikun
Head of Wholesale Credit Approval
Bianda Serginia
VP Wholesale Credit Approvals
Bonaventura Netyastomo
SVP Wholesale Credit Approvals
Henry Juniora Siauwyu. M
Senior Vice President Wholesale Credit Approvals
Lyonita Gustina Hutagalung
SVP Wholesale Credit Approval 2 Team Leader
Sudiono Sudiono
Manager Wholesale Credit Approval
Teddy Setyono
SVP Wholesale Credit Approval 3 Team Leader
Stephen Whilton Angell
Risk Management Director
Budijanto Soedarpo
Head of RBWM Risk
Indah Krisnawati
SVP LMU Lead
Lestari A. Umardin
Head of Risk Management and Risk Regulatory Engagement
Mariani Mariani
Head of Operational and Resilience Risk
Patricia R Suardi
Head of Risk Business Management
Uliya Ariani
Head of Company Secretary
Lisa Murni
VP Company Secretary Assistant
Rizki Arista
AVP Company Secr Assistant
Suri Melinda Hutagalung
AM-Jr Company Secr Assistant
James Rex Elwes
Designated Operations & IT Director
Adi Tjahyono Soerachman Cholil
SVP Transformation and Resource Practice Head
Ahmad Mikail Madjid
Chief Information Officer
Indra Winandar
SVP Operational Management Head
Kristina Kristina
Head of Business Services
Teddy Rizaldi Muhammad
VP Business Continuity Manager
Tommy Pinontoan
SVP Procurement
Vacant_3
SVP Senior Control Lead
Victor Indarto
SVP Corporate Real Estate
Vacant_1
Head of Strategy & Business Implementation
Freesia I.Puspa Wardhani
SVP Business Implementation
Jetty Wirianata
SVP Business Implementation
Petrus Bayu Darmanto
SVP Business Implementation
Wiwien Widyantari
Head of Internal Audit
Anugraha Pratama
SVP CMB and GBM Audit
Ayub Ndaru Nugroho Sp
SVP Functions and RBWM Audit
Inggried Verayanse
VP Quality Assr. and Reporting

/04

ANALISIS DAN DISKUSI MANAJEMEN

46 Tinjauan Perekonomian
48 Tinjauan Bisnis
54 Tinjauan Pemasaran
56 Tinjauan Kinerja Keuangan
65 Informasi Keuangan Material Lainnya
72 Tinjauan Pendukung Bisnis
72 - Sumber Daya Manusia
80 - Teknologi & Operasional
82 Manajemen Risiko
82 - Eksposur Risiko dan Permodalan
86 - Praktik Manajemen Risiko
94 - Pengungkapan Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan
147 Prospek Usaha

TINJAUAN PEREKONOMIAN

Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian global jatuh pada tahun 2020 setelah dihadapkan pada krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Optimisme yang sempat mengemuka dengan meredanya konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berbalik negatif menyusul penanggulangan COVID-19 melalui pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dunia. Ini memberikan tekanan besar terhadap sistem keuangan, serta berbagai sektor seperti perdagangan, pariwisata, dan komoditas.

Menurut Bank Dunia, PDB dunia mengalami kontraksi 4,3% di 2020, jatuh dari pertumbuhan 2,4% di 2019. Angka ini tidak seburuk perkiraan, terutama karena kontraksi yang lebih kecil di negara maju dan pembaikan ekonomi di Tiongkok. Walaupun mayoritas negara berkembang dan maju mengalami kondisi yang lebih parah.

Perekonomian AS mengalami kontraksi 3,6% di tengah konflik politik yang menguat selama pemilihan presiden, terlepas dari pemberian stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif. Eropa, yang telah memperketat perjalanan dan aktivitas bisnis, menurun 7,4%. Jepang juga mengalami kontraksi 5,3%.

Secara umum, hampir semua negara mengalami kontraksi ekonomi di 2020, kecuali Vietnam, Taiwan, dan China, yang perekonomiannya masih positif karena respons cepat mengatasi pandemi. Vietnam membukukan pertumbuhan PDB 2,91%; sementara Taiwan tumbuh 2,98%, untuk pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir melampaui laju ekonomi Tiongkok.

Tiongkok, yang berhasil mengatasi pandemi COVID-19 melalui *lockdown* mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2,3% pada 2020. Respons ketat dari pemerintah dalam menangani penyebaran virus menjadikan Tiongkok negara yang paling awal melonggarkan aktivitas perdagangan, hiburan, dan manufaktur.

Perkembangan Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% di tahun 2020, dibandingkan pertumbuhan 5,02% di 2019. Ketidakpastian penanganan COVID-19 berdampak pada penurunan tajam aktivitas ekonomi nasional, yang menekan kinerja korporasi serta UMKM.

Ekspor-impor mengalami penurunan terbesar karena pembatasan pergerakan barang. Konsumsi rumah tangga, pendorong utama perekonomian Indonesia, berkontraksi karena banyak pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK, sehingga daya belinya melemah. Pertumbuhan satu-satunya datang dari konsumsi pemerintah melalui stimulus fiskal.

Penurunan ekonomi tercermin dari rendahnya laju inflasi di angka 1,68% di tahun 2020, terendah sepanjang sejarah. Untuk mendorong daya beli dan mengakselerasi perbaikan ekonomi, pemerintah memberikan stimulus fiskal sementara Bank Indonesia memotong suku bunga 7-*day reverse repo rate* sebanyak 125 bps sepanjang 2020. Suku bunga acuan mencapai 3,75% pada akhir 2020, sedangkan suku bunga *deposit facility* mencapai 3% dan *lending facility* 4,5%.

Investor bersikap hati-hati dan memindahkan modal ke instrumen yang lebih aman. Hal ini menyebabkan pembalikan arus modal asing, yang membuat nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi signifikan menjadi Rp16.824 per Dolar AS di awal April, dan akhirnya ditutup di Rp14.175 per Dolar pada akhir 2020. Pasar saham juga mengalami tekanan, terutama di antara Januari dan Maret. IHSG ditutup di angka 5.979, jatuh 5,4%, di akhir 2020.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih tetap dianggap baik, yang tercermin dari afirmasi predikat layak investasi dari lembaga rating S&P, Moody's, dan Fitch di tengah penurunan *rating* di banyak negara.

Perkembangan Industri Perbankan

Industri perbankan membukukan kinerja negatif pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang memaksa dunia usaha untuk menahan operasional. Kredit industri perbankan jatuh 2,41%, koreksi yang cukup dalam dari pertumbuhan sebesar 6,1% di 2019.

Perbankan umum dan asing mengalami kontraksi kredit, sementara bank persero dan bank pembangunan daerah masih mengalami pertumbuhan, antara lain karena stimulus pemerintah.

Kebijakan restrukturisasi kredit pemerintah menghasilkan restrukturisasi kredit sebanyak 18% dari total. Ini membuat rasio kredit bermasalah (*non-performing loans*/NPL) tetap terjaga di 3,06% pada 2020, dibanding 2,53% di 2019. Rasio kecukupan modal juga tetap kuat di 23,89%, dibandingkan 23,40% di 2019.

Dari segi profitabilitas, Rasio Pengembalian Aset (ROA) bank umum turun menjadi 1,59% dari 2,47% pada tahun 2019 menyusul kontraksi pertumbuhan kredit. Efisiensi perbankan juga turun, terlihat dari rasio belanja operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 86,58%, naik dibandingkan 79,39% pada 2019. Margin bunga bersih (NIM) turun menjadi 4,45% dari 4,91% di tahun 2019.

Sementara likuiditas perbankan di tahun 2020 tetap terjaga dengan pertumbuhan alat likuid mencapai Rp2.111 triliun dari Rp1.251 triliun di 2019, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,11%.

TINJAUAN BISNIS

Wealth and Personal Banking

Bank mengakomodasi berbagai kebutuhan perbankan perorangan dengan menyediakan beragam produk dan layanan. Salah satunya adalah HSBC Premier, produk spesial dengan jaringan global, yang menawarkan berbagai macam layanan perbankan eksklusif. Selain itu, Bank menyediakan layanan *wealth management*, yang memberikan beragam manfaat global serta layanan eksklusif bagi nasabah kelas atas.

Bank juga menawarkan HSBC Advance sebagai solusi perbankan dan investasi yang lengkap bagi semua nasabah di segmen *emerging affluent*. Produk investasi ini menawarkan beragam reksa dana pilihan yang pengelolaannya bermitra dengan perusahaan-perusahaan pengelolaan aset terbaik di Indonesia.

Bank juga memiliki produk reksadana, *bancassurance*, Obligasi Pemerintah Indonesia, dan Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan menawarkan berbagai varian produk investasi, Bank berharap bisa menjadi pemimpin di pasar *wealth management* dan mitra terpercaya investasi nasabah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank melakukan pendekatan dan edukasi kepada kelompok nasabah menengah ke atas guna membantu mereka menemukan solusi investasi.

Personal Banking

Rekening Rupiah dan valuta asing serta kartu debit masih menjadi produk-produk unggulan di segmen Personal Banking, baik dalam bentuk rekening tabungan, giro, dan deposito. Untuk tabungan, varian produknya berupa *Regular Saving Plan* dan Tabungan Ekonomi. Sedangkan untuk kartu debit, Bank memiliki produk Kartu Debit VISA HSBC dan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) HSBC.

Sepanjang tahun 2020, Bank terus mengoptimalkan jaringan guna meningkatkan pertumbuhan nasabah segmen menengah ke atas dan memperkuat penetrasi segmen ritel di berbagai wilayah operasional.

Kredit Personal

Untuk kredit konsumsi, Bank menawarkan layanan dan produk berupa Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan, *FlexiCredit*, Kredit Pemilikan Rumah, *Personal Overdraft*, *Smart Money*, dan *Investment Link*.

Bank juga menawarkan produk kartu kredit yakni HSBC Premier MasterCard, HSBC Visa Signature, HSBC Visa Platinum, HSBC Platinum Cash Back, dan HSBC Gold.

Bank memberikan opsi kartu kredit dengan nilai proposisi yang berbeda sebagai upaya meningkatkan penetrasi produk terkait. Dalam prosesnya, Bank memperluas mitra strategis untuk meningkatkan *brand* dan pemakaian kartu akuisisi di berbagai kota di Indonesia. Termasuk juga meningkatkan penetrasi produk perbankan dengan menyasar nasabah kartu kredit serta melanjutkan penawaran kartu kredit Premier untuk memperkuat proposisi nasabah kelas atas.

Guna meningkatkan pemakaian dan loyalitas nasabah, Bank juga melibatkan *merchant* dan mitra strategis lainnya dalam menyediakan program, layanan, dan sarana terkait fitur cicilan atau bonus poin dengan kartu kredit HSBC.

Retail Business Banking

Pada layanan HSBC Retail Business Banking (RBB), Bank menyediakan pinjaman bisnis dengan agunan hingga Rp10 miliar. Skema ini berupa Pinjaman Berjangka (*Term Loan*), *Overdraft*, dan *Revolving Loan*. Pada Maret 2020, HSBC Retail Business Banking melakukan *rebranding* menjadi layanan HSBC Fusion untuk pengembangan jenis dan variasi produk serta layanan guna membantu segmen UKM meningkatkan usahanya di lokasi operasional kantor cabang.

Dalam membantu segmen UKM menghadapi pandemi COVID-19, HSBC Fusion meluncurkan program *relief* dan secara aktif berpartisipasi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diluncurkan Kementerian Keuangan.

HSBC Fusion telah melayani lebih dari 5.100 nasabah per Desember 2020, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang lebih dari 3.100 nasabah.

Guna mendukung pencapaian bisnis nasabah, Bank melengkapi fitur dan proposisi layanan RBB melalui penyederhanaan proses pembukaan rekening dan pengajuan pinjaman. Layanan RBB ini lebih dominan diperkenalkan kepada nasabah *personal* HSBC yang memiliki kebutuhan bisnis.

Wealth Management

Untuk membantu nasabah dalam mengelola kekayaan, Bank menawarkan layanan dan produk investasi, asuransi, dan *wealth management*. Produk investasi yang ditawarkan berupa reksadana, surat berharga negara, obligasi BUMN, dan *Dual Currency Investment* (DCI).

Sedangkan terkait asuransi, Bank menawarkan produk berupa Care Invest Plus, College Care, Optima Care Invest, Future Care, Joint Life Care, Premium Wealth Assurance, Ultima Wealth Assurance, Optima Protection Assurance PASTI, Credit Pro Plus, Smart Traveller, AXA ProMedicare, AXA Medicare Essential. Adapun untuk *wealth management*, Bank mempunyai pelayanan dan produk berupa *Managing and Growing Wealth*, Perencanaan Pendidikan Anak, Perencanaan Pensiun, dan *Protection Planning*.

Pada 2020, Bank berusaha meningkatkan penetrasi *Wealth Management* pada nasabah segmen menengah ke atas melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan hidup, yang meliputi: pengembangan kekayaan (*wealth*), persiapan dana pendidikan anak, perlindungan masa depan keluarga, dan perencanaan dana pensiun.

Bank juga terus memantapkan proses, sistem, dan infrastruktur internal demi menjaga pertumbuhan DPK yang sehat. Bank mengembangkan produk *Wealth Management* dengan melengkapi produk reksa dana dan menawarkan beragam seri obligasi pemerintah, serta obligasi yang diterbitkan BUMN. Selain itu, Bank ikut berpartisipasi sebagai agen penjual obligasi pemerintah di pasar perdana (seperti ORI dan SUKUK ritel) dan di pasar sekunder.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis *Wealth Management* di tahun 2020, Bank melakukan kajian dan berbagai perbaikan sehubungan dengan proses, sistem, dan infrastruktur yang terkait dengan investasi.

Rencana, Strategi, dan Fokus Kinerja 2021

Bank merespons persaingan bisnis perbankan perorangan yang semakin ketat dengan merumuskan sejumlah strategi prioritas tahun 2021 sebagai berikut:

- Meningkatkan penetrasi *Wealth Management* di antara nasabah segmen menengah ke atas melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan hidup.
- Mengoptimalkan jaringan kantor untuk meningkatkan pertumbuhan nasabah segmen menengah ke atas.
- Meningkatkan penetrasi produk perbankan ataupun produk pinjaman di kalangan nasabah kartu kredit dan segmen ritel di kota-kota tempat Bank beroperasi untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat umum.
- Meningkatkan penetrasi produk kartu kredit dengan memberikan pilihan kartu kredit dengan proporsi nilai yang berbeda.
- Mengembangkan mitra strategis untuk meningkatkan *brand awareness* dan pemakaian kartu di berbagai kota di Indonesia
- Memperkuat penetrasi penjualan ke nasabah korporasi di Indonesia dengan menyediakan proposisi produk kepada karyawannya melalui *Corporate Employee Program*.
- Meningkatkan kualitas *Internet Banking* dan *Mobile Banking* menjadi fitur layanan yang lebih mudah, ramah dengan penggunanya, dan memiliki kapabilitas untuk terus dikembangkan menjadi lebih baik.

- *Rebranding* HSBC Fusion dan fokus di segmen UKM guna mengakomodasi kebutuhan nasabah, baik bisnis maupun pribadi, dengan menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan bisnis serta memberikan solusi terintegrasi dalam proses *onboarding* dan akses fasilitas kredit dan layanan khusus UKM.
- Meningkatkan penetrasi produk RBB melalui peningkatan layanan digital yang memberikan akses dan kemudahan bagi pemilik bisnis dalam bertransaksi melalui *Internet Banking* serta meningkatkan jumlah transaksi dan pendapatan dari *Digital Banking*.

Commercial Banking

Untuk layanan komersial, Bank menawarkan layanan perbankan lengkap kepada nasabah korporasi, mulai dari kategori *upper business banking* hingga perusahaan berskala besar, termasuk anak-anak perusahaan nasabah global dan regional. Rangkaian layanan perbankan ini meliputi kredit modal kerja, kredit investasi/pendanaan proyek, transaksi valuta asing, derivatif, fasilitas serta layanan *trade finance* dan *cash management*.

Pada tahun 2020, Bank melanjutkan program untuk menjadi "Bank Pilihan Nasabah Korporat" melalui kolaborasi yang lebih erat dengan *Global Trade and Receivables Finance (GTRF), Global Liquidity and Cash Management (GLCM),* dan *Global Banking and Markets (GBM)*. Untuk mewujudkan program tersebut, Bank berfokus pada upaya berikut:

- Meningkatkan penetrasi ke perusahaan dan bisnis terkemuka di Indonesia.
- Memperkuat kemitraan lokal dan menargetkan nasabah internasional di pasar modal Indonesia.
- Berkoordinasi dengan *Global Banking and Markets* (GBM) untuk melakukan *cross selling*.

Layanan *Trade Finance* merupakan salah satu layanan utama dari Divisi Perbankan Komersial. Untuk memaksimalkan solusi yang ditawarkan, HSBC juga menyediakan akses *Subject Matter Expert* (SME) bagi nasabah, melalui jaringan *Relationship Manager* HSBC dan *trade business sales team*. Selain itu, HBID juga mengoperasikan *counter* perdagangan di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, dan Surabaya untuk mendukung bisnis perdagangan dan memperluas jaringan.

Kemudian, Bank menawarkan solusi *supply chain* dengan terus mengembangkan layanan pembiayaan khusus di area-area tertentu seperti infrastruktur, otomotif, FMCG, TI, dan usaha-usaha ritel. Hal ini juga bertujuan untuk memaksimalkan penambahan jaringan perdagangan.

Bank juga membantu memaksimalkan potensi perusahaan-perusahaan Indonesia dengan mempromosikan layanan pembiayaan ekspor bagi nasabah di luar Jakarta.

Sejalan dengan itu, Bank meningkatkan pendapatan *fee* dari kantor-kantor cabang di luar Jakarta dengan memanfaatkan proposisi *Trade, Cash Management*, dan Valas.

Layanan *Cash Management* HBID menawarkan berbagai solusi *cash management* secara digital dan berbasis teknologi tinggi termutakhir demi memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang. Bank juga melakukan ekspansi jaringan melalui kemitraan dengan bank-bank lokal dan pihak ketiga berupa *switching agent* atau *collection agent.*
Secara keseluruhan, *Commercial Banking* telah memberikan kinerja yang baik di tahun 2020 dan akan terus mengembangkan kinerjanya di tahun 2021.

Bank sangat memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja berbagai industri dan individu. Sejalan dengan pedoman OJK terkait Stimulus Ekonomi Nasional, Bank telah menawarkan bantuan berupa perpanjangan jatuh tempo terutama untuk produk perdagangan dan kredit modal kerja bagi nasabah yang terdampak COVID-19. Sepanjang 2020 Bank telah memberikan keringanan pembayaran sebesar Rp3,4 triliun.

Rencana, Strategi, dan Fokus Kinerja 2021

Bank akan terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi digital dan memanfaatkan kekuatan sebagai bank internasional terkemuka untuk membangun *Commercial Banking* menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan pada tahun 2021. Adapun fokus Bank adalah sebagai berikut:

- Memaksimalkan konektivitas internasional kami dengan berpartisipasi dalam Belt and Road Initiatives serta ASEAN Initiatives, dengan fokus pada sektor-sektor yang berkembang seperti infrastruktur, otomotif, FMCG, TI, dan bisnis ritel.

- Berpartisipasi dan mendukung pembangunan infrastruktur melalui keahlian *financing* dan *advisory* kami.
- Membantu mempromosikan Indonesia sebagai tujuan penanaman modal asing melalui HSBC *Global Network* sejalan dengan usaha Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing.
- Memperkuat operasional kerangka risiko finansial maupun non-finansial guna mengurangi kerugian akibat penurunan nilai pinjaman serta menjaga rasio kredit bermasalah sejalan dengan *Risk Appetite.*
- Meningkatkan pertumbuhan pinjaman korporasi secara selektif di sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh dampak pandemi COVID-19.
- Menumbuhkan *Operating Account* dengan melakukan kegiatan promosi berbagai produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan demikian diharapkan kepercayaan nasabah meningkat dan tertarik untuk menempatkan dananya di Bank.
- Optimalisasi pendapatan *Non-Funds Income* (NFI) untuk mengimbangi berkurangnya *Net Interest Margin* (NIM) akibat perlambatan ekonomi.
- Meningkatkan kepuasan pengalaman perbankan nasabah yang tercermin dari perbaikan hasil survei kepuasan pelanggan.
- Terlibat dan mempromosikan secara aktif *sustainable financing* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.
- Melanjutkan dukungan terhadap Pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui program bantuan untuk nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Global Banking & Markets

Dalam segmen Global Banking and Markets (GBM), Bank menyediakan layanan penuh perbankan untuk berbagai latar belakang nasabah baik perusahaan multinasional, perusahaan besar lokal, institusi keuangan, termasuk sektor publik dan lembaga pemerintahan. Bank menyediakan produk dan layanan solutif, serta kapabilitas jaringan internasional yang ditunjang oleh sistem perbankan terbaik di kelasnya. GBM juga melayani Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku nasabah utama sebagai dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan negara. Pelayanan perbankan meliputi pinjaman untuk modal kerja, pembiayaan proyek, transaksi valuta asing dan derivatif, serta pembiayaan perdagangan dan pelayanan *cash management*. Nasabah GBM dilayani oleh *relationship manager* yang sekaligus merupakan spesialis produk yang memberikan solusi keuangan setiap nasabah dalam memperkuat hubungan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan di Indonesia.

Global Banking

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, Bank berhasil mempertahankan momentum positif dalam meningkatkan pertumbuhan neraca di tengah kondisi marjin yang tertekan akibat penurunan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan perbankan lokal maupun internasional. Untuk itu, Bank berupaya tetap menerapkan prinsip kehati–hatian untuk terus menjaga kualitas kredit.

Bank mempromosikan dan meningkatkan solusi ekosistem dengan menyediakan solusi tunggal perbankan melalui kolaborasi dengan segmen bisnis lain (Corporate Banking/CMB dan Global Markets) untuk terus mendukung pertumbuhan nasabah yang berkelanjutan.

Selama pandemi COVID-19, Bank melanjutkan dukungan terhadap nasabah dengan mengedepankan layanan perbankan digital guna membantu memenuhi kebutuhan nasabah atas solusi perbankan.

Bank fokus pada pengembangan konektivitas dengan *Global Relationship Banker* untuk koridor-koridor utama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, AS, dan Perancis serta Intra-ASEAN dalam mendukung PMA dan pertumbuhannya di Indonesia.

Secara umum, Global Banking memberikan hasil yang sangat baik dalam mendukung nasabah dan prioritas utama Pemerintah, serta dalam membangun momentum yang kuat untuk kelanjutan pertumbuhan di 2021.

Global Markets & Securities Services

Divisi Global Markets & Securities Services mengelola bagian integral dari operasi bank, saldo dan layanan *treasury* dan kustodian untuk nasabah lokal dan internasional.

Tim Global Markets terdiri dari beberapa *desk*, yakni tim *Trading, Markets-Treasury, Corporate Sales,* dan *Institutional & Wealth Sales*. Tim ini menyediakan layanan produk yang lengkap dan mencakup seluruh kebutuhan bisnis waralaba Bank, seperti korporasi, lembaga keuangan, dan nasabah ritel. Produk-produk yang ditawarkan meliputi valuta asing, derivatif, pendapatan tetap, dan produk pasar uang lainnya. Strategi bisnis Bank di Global Markets terus berfokus pada kolaborasi bisnis waralaba yang menguntungkan nasabah dan meningkatkan konektivitas internasional dengan mendukung kegiatan lintas batas terkait dengan produk unggulan, seperti GTRF, GLCM, dan Securities Services.

Pada saat yang sama, Bank terus mendukung pendalaman dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri sejalan dengan visi Bank Indonesia dan OJK. Bank menawarkan berbagai instrumen *treasury* untuk melayani nasabah dalam mengelola eksposur risiko pasar dan pada saat yang sama mendukung kebutuhan operasional bisnis.

Securities Services juga merupakan bagian strategis utama bagi bisnis Global Markets. Di Indonesia, kami menawarkan layanan lengkap dan menyeluruh mulai dari sub-kustodian, administrasi dana, hingga agen transfer. Layanan ini disediakan guna memastikan pengelolaan aset nasabah luar negeri dan domestik dalam pengawasan dan administrasi yang baik. Sesuai dengan komitmen berkelanjutan Bank dalam mendukung transaksi pasar modal di Indonesia, Securities Services fokus memenuhi kebutuhan nasabah melalui peningkatan aset dan jenis produk yang akan dikelola, investasi sumber daya manusia dan teknologi, serta efisiensi operasional untuk memastikan kualitas layanan.

Rencana, Strategi, dan Fokus Kinerja 2021

Bank optimistis menatap tahun 2021 dan berkomitmen melanjutkan dukungan kepada nasabah melalui strategi bisnis yang berfokus pada hal-hal berikut:

- Memanfaatkan pendekatan *One Target Client* dalam mengembangkan bisnis dari nasabah eksisting dan percepatan akuisisi nasabah baru.
- Mendorong solusi *Flows and Transaction Banking* (termasuk layanan *cash management, trade finance*, dan *securities services*) dengan memanfaatkan kemampuan digital, terutama selama pandemi COVID-19.
- Meningkatkan konektivitas koridor Internasional dengan fokus kepada AS, Jepang, Korea Selatan, China, Intra-ASEAN, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya.
- Meningkatkan solusi ekosistem dan rantai pasokan melalui identifikasi, konektivitas, dan penetrasi sektor-sektor pertumbuhan industri utama (FMCG, manufaktur, farmasi, telekomunikasi, institusi keuangan, serta sektor infrastruktur dan energi) dan prioritas utama rantai pasok: Pemerintah dan pasar.
- Memperkuat hubungan dengan kementerian, badan/lembaga terkait, serta BUMN untuk dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur dan sektor publik.
- Fokus pada lima BUMN besar termasuk bank lokal; berkolaborasi dengan Global Market and Securities Services; fokus pada pertumbuhan nasabah yang sudah ada; dan meningkatkan layanan secara intensif kepada bank BUMN terbesar, perusahaan asuransi berskala besar (dengan mandat regional), manajer investasi, dan transaksi Global Markets.
- Mengembangkan talenta dan bankir kelas dunia melalui penyelenggaraan pelatihan yang baik dengan kurikulum yang terstruktur guna meningkatkan kemampuan dan membangun organisasi yang berfokus kepada nasabah.

HSBC
Premier
Premier

TINJAUAN PEMASARAN

Bank berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan dan badan usaha dengan menyediakan beragam produk dan layanan perbankan. Untuk nasabah perorangan, Bank menawarkan dua jenis segmen yaitu HSBC Premier dan HSBC Advance, agar nasabah dapat memilih layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

HSBC Premier merupakan layanan perbankan dan *wealth management* bagi nasabah kelas atas yang memberikan manfaat dan layanan eksklusif secara global. Sedangkan HSBC Advance diperuntukkan untuk membantu nasabah *emerging affluent* sebagai mitra terpercaya agar semakin maju, tanpa perlu khawatir mengenai keadaan keuangan mereka.

Beragam program promosi kartu kredit HSBC juga diinisiasi oleh Bank guna memenuhi kebutuhan gaya hidup pemegang kartunya. Berbagai keuntungan ditawarkan Bank kepada para pemegang kartu kredit HSBC di setiap transaksi berbelanja, bersantap, dan bepergian ke seluruh dunia. Keuntungan lainnya dari penggunaan kartu kredit HSBC adalah fitur *cashback* atau *reward program* yang mekanisme pemberiannya didasarkan pada pengumpulan *reward point* dari setiap transaksi penggunaan kartu kredit, serta penukaran poin dalam bentuk *voucher* hotel, program *mileage*, *voucher* belanja, atau diskon langsung di berbagai *Instant Reward Merchant* yang berpartisipasi.

Sepanjang 2020, Bank mempunyai program promosi kartu kredit dengan *merchant-merchant* terpilih yang terbagi dalam enam kategori yaitu:

- *Thematic Campaign* yang mencakup Tahun Baru China, Ramadhan, dan Program Liburan Akhir Tahun.
- *E-Commerce online daily deals* yaitu program diskon dan cicilan di berbagai *merchant e-commerce* pada hari-hari tertentu.
- Program pesan antar makanan dan belanja kebutuhan pokok yaitu diskon atau *cashback voucher* di berbagai restoran dan supermarket yang bekerja sama.
- Program baru yaitu layanan kesehatan *online*, bekerja sama dengan aplikasi Halodoc. Layanan meliputi pemeriksaan kesehatan secara *virtual*, pesan antar pembelian obat, reservasi tes *swab*/ PCR COVID-19.
- Program belanja di supermarket secara langsung/ *offline* seperti diskon di hari tertentu.
- Program diskon dan cicilan 0% untuk kategori kebutuhan rumah tangga, elektronik, *handphone*, dan komputer.

Produk lain yang ditawarkan Bank adalah Kredit Tanpa Agunan dengan suku bunga yang kompetitif, persetujuan yang cepat, dan jangka waktu mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun. Fasilitas pembiayaan ini dikhususkan untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. Selain itu, Bank juga menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk nasabah yang memiliki kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan pembelian properti maupun alih pinjaman (*take over*) dari Bank lain. Suku bunga KPR HSBC cukup bersaing, dengan proses pemberian kredit yang mudah serta disesuaikan dengan kebutuhan finansial nasabah.

Pengembangan teknologi perbankan yang semakin mutakhir juga dilakukan Bank dengan menyediakan beragam saluran distribusi keuangan yang efisien dan mampu melayani nasabah kapan dan dimana pun. Seperti penyediaan ATM, *phone banking*, fasilitas perbankan *internet* pribadi untuk keperluan investasi dan transaksi perbankan, *video banking*, dan *mobile banking*.

Berkaitan dengan cakupan layanan di Indonesia, Bank mengoperasikan jaringan kantor cabang yang tersebar di 24 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Bank juga melakukan pembukaan kantor cabang satelit di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan Bandung guna memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan di akhir pekan melalui fasilitas *video banking* yang langsung terhubung dengan *Contact Centre*. Tidak hanya itu, nasabah juga dapat mengakses layanan Bank di lebih dari 77.000 jaringan ATM Bersama dan lebih dari 100.000 jaringan ATM PRIMA.

Selain itu, selama 2020 Bank juga menjalankan beberapa program pemasaran sebagai berikut:

- Sebanyak 76 *event* edukasi *Wealth Management* & Kapabilitas Perbankan HSBC dihelat sepanjang tahun 2020, terutama di kota-kota lokasi kantor-kantor cabang HSBC.
- Dalam hal investasi, Bank terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis seperti *investment partners*, BUMN serta Pemerintah dalam promosi dan pemasaran berbagai produk investasi seperti reksa dana saham, obligasi korporasi, sukuk, obligasi pemerintah serta termasuk obligasi IPO.
- Melanjutkan kemitraan dengan *partners* (*e-commerce,* belanja rumah tangga, makanan, rumah, dan kesehatan) dengan membuat program promosi untuk memperkuat pemakaian pada *merchant-merchant* terkait.
- Meningkatkan proposisi penetrasi produk kepada nasabah perbankan melalui pengembangan proses dan variasi produk yang dapat dinikmati oleh nasabah Premier dan Advance.
- Meningkatkan komunikasi dengan nasabah perbankan mengenai penawaran dan keuntungan kartu kredit guna menarik minat nasabah mengajukan permohonan kartu kredit.
- Bank meluncurkan *branding* dan layanan baru untuk segmen RBB yaitu HSBC Fusion. Layanan baru ini bertujuan untuk membantu bisnis nasabah bertumbuh dan naik kelas melalui disiplin finansial. *Soft launch* dilakukan di bulan Maret 2020, diikuti oleh 11 seri *webinar* sepanjang tahun untuk membantu bisnis nasabah.
- Bank melanjutkan *presence* di media digital dan media sosial untuk mempromosikan HSBC Fusion. Selain itu, kemitraan dengan *e-commerce* dimulai untuk dapat menjangkau pemilik bisnis UKM yang lebih luas.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tinjauan kinerja keuangan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan mendapat opini tanpa modifikasi, atas semua hal yang material, posisi keuangan Bank, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

Posisi Keuangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Aset				
Kas	627	696	(69)	-9,91%
Giro pada Bank Indonesia	4.252	7.344	(3.092)	-42,10%
Giro pada bank-bank lain - bersih	3.741	2.261	1.480	65,46%
Penempatan pada bank-bank lain - bersih	10.654	7.697	2.957	38,42%
Penempatan pada Bank Indonesia	1.152	1.488	(336)	-22,58%
Efek-efek untuk tujuan investasi	17.861	14.418	3.443	23,88%
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	1.218	2.864	(1.646)	-57,47%
Tagihan derivatif	671	477	194	40,67%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.293	465	8.828	1.898,49%
Wesel ekspor – bersih	921	1.435	(514)	-35,82%
Tagihan akseptasi - bersih	2.022	2.602	(580)	-22,29%
Kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih	55.335	65.534	(10.199)	-15,56%
Aset lain-lain	3.928	3.451	477	13,82%
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	571	716	(145)	-20,25%
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	89	137	(48)	-35,04%
Aset pajak tangguhan	266	275	(9)	-3,27%
Jumlah Aset	**112.601**	**111.860**	**741**	**0,66%**

Posisi Keuangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Simpanan dari nasabah	72.160	65.469	6.691	10,22%
Simpanan dari bank-bank lain	4.492	5.058	(566)	-11,19%
Liabilitas derivatif	659	473	186	39,32%
Utang akseptasi	2.047	2.602	(555)	-21,33%
Utang pajak penghasilan	182	-	182	100,00%
Beban akrual dan provisi	414	503	(89)	-17,69%
Liabilitas lain-lain	4.278	2.985	1.293	43,32%
Pinjaman yang diterima	7.517	15.063	(7.546)	-50,10%
Pinjaman subordinasi	1.054	1.041	13	1,25%
Liabilitas imbalan kerja	500	530	(30)	-5,66%
Jumlah Liabilitas	**93.303**	**93.724**	**(421)**	**-0,45%**
Ekuitas				
Modal saham	10.586	10.586	-	0,00%
Tambahan modal disetor – bersih	258	258	-	0,00%
Laba komprehensif lain - bersih	470	81	389	480,25%
Saldo laba:				
- Telah ditentukan penggunaannya	49	26	23	88,46%
- Belum ditentukan penggunaannya	7.935	7.185	750	10,44%
Jumlah Ekuitas	**19.298**	**18.136**	**1.162**	**6,41%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**112.601**	**111.860**	**741**	**0,66%**

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Total Aset

Per tanggal 31 Desember 2020, total aset Bank mencapai Rp112.601 miliar, meningkat sebesar Rp741 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019.

Total aset Bank didominasi oleh penyaluran kredit ke nasabah sebesar Rp55.335 miliar (bersih), efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp17.861 miliar, dan penempatan pada bank-bank lain sebesar Rp10.654 miliar (bersih).

Sebagai bagian dari manajemen risiko likuiditas dan pendanaan, Bank menempatkan surplus dana komersial dan memelihara sebagian aset dalam bentuk aset likuid karena sewaktu-waktu jika dibutuhkan dapat segera dicairkan.

Bank mengelola aset likuid sekitar Rp46.428 miliar pada 2020. Aset-aset likuid tersebut dalam bentuk kas, giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, penempatan pada bank-bank lain, efek-efek untuk tujuan investasi serta efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Aset Likuid				
Kas	627	696	(69)	-9,91%
Giro pada Bank Indonesia	4.252	7.344	(3.092)	-42,10%
Giro pada bank-bank lain - bersih	3.741	2.261	1.480	65,46%
Penempatan pada bank-bank lain - bersih	10.654	7.697	2.957	38,42%
Efek-efek untuk tujuan investasi	17.861	14.418	3.443	23,88%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.293	465	8.828	1.898,49%
Total	**46.428**	**32.881**	**13.547**	**41,20%**

Efek-Efek untuk Tujuan Investasi

Efek-Efek untuk Tujuan Investasi Bank per 31 Desember 2020 mencapai Rp17.861 miliar, meningkat 23,88% dari 31 Desember 2019. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan surplus komersial dan merupakan bagian dari manajemen risiko pendanaan dan likuiditas Bank.

Kredit yang Diberikan kepada Nasabah

Komposisi terbesar aset Bank per 31 Desember 2020 adalah kredit ke nasabah sebesar Rp55.335 miliar (bersih) atau sekitar 49,14%. Apabila dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya, kredit ke nasabah menurun sebesar 15,56%.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya permintaan kredit dan meningkatnya kompetisi terhadap aset berkualitas tinggi. Di sisi lain, Bank berhasil mempertahankan rasio NPL bruto di level 3,45% per 31 Desember 2020 berkat upaya berkelanjutan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan tindakan korektif sebagai bentuk komitmen Bank dalam menjaga NPL sesuai dengan *risk-appetite*.

Komposisi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Kredit Modal Kerja	44.933	76,95%	53.955	79,75%	(9.022)	-16,72%
Kredit Investasi	9.392	16,08%	9.009	13,32%	383	4,25%
Kredit Konsumsi	3.368	5,77%	3.934	5,81%	(566)	-14,39%
Pinjaman karyawan	701	1,20%	759	1,12%	(58)	-7,64%
Total	**58.394**	**100,00%**	**67.657**	**100,00%**	**(9.263)**	**-13,69%**

Komposisi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi - bruto	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Jasa-jasa usaha	6.683	11,44%	8.303	12,27%	(1.620)	-19,51%
Konstruksi	4.967	8,51%	4.164	6,16%	803	19,28%
Pengangkutan, pergudangan & jasa komunikasi	6.214	10,64%	4.563	6,74%	1.651	36,18%
Perdagangan, restoran & hotel	9.855	16,88%	12.796	18,91%	(2.941)	-22,98%
Perindustrian	23.417	40,10%	27.615	40,82%	(4.198)	-15,20%
Lainnya	7.258	12,43%	10.216	15,10%	(2.958)	-28,95%
Total	**58.394**	**100,00%**	**67.657**	**100,00%**	**(9.263)**	**-13,69%**

Pinjaman Berdasarkan Klasifikasi Kolektibilitas Bank Indonesia

Kolektibilitas	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Performing Loan	56.380	96,55%	65.953	97,48%	(9.573)	-14,51%
Lancar	54.791	93,83%	64.732	95,68%	(9.941)	-15,36%
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	1.589	2,72%	1.221	1,80%	368	30,14%
Non performing loan	2.014	3,45%	1.704	2,52%	310	18,19%
Kurang Lancar	282	0,48%	82	0,12%	200	243,90%
Diragukan	60	0,10%	365	0,54%	(305)	-83,56%
Macet	1.672	2,87%	1.257	1,86%	415	33,02%
Total Kredit	58.394	100,00%	67.657	100,00%	(9.263)	3,68%
Rasio NPL – bruto	3,45%	n/a	2,52%	n/a	0,93%	n/a
Rasio NPL – neto	0,94%	n/a	1,22%	n/a	-0,28%	n/a

Liabilitas

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Simpanan dari nasabah	72.160	65.469	6.691	10,22%
Simpanan dari bank-bank lain	4.492	5.058	(566)	-11,19%
Liabilitas derivatif	659	473	186	39,32%
Utang akseptasi	2.047	2.602	(555)	-21,33%
Utang pajak penghasilan	182	-	182	100,00%
Beban akrual dan provisi	414	503	(89)	-17,69%
Liabilitas lain-lain	4.278	2.985	1.293	43,32%
Pinjaman yang diterima	7.517	15.063	(7.546)	-50,10%
Pinjaman subordinasi	1.054	1.041	13	1,25%
Liabilitas imbalan kerja	500	530	(30)	-5,66%
Jumlah Liabilitas	**93.303**	**93.724**	**(421)**	**-0,45%**

Jumlah liabilitas Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp93.303 miliar. Komposisi liabilitas tahun 2020 didominasi oleh simpanan dari nasabah sebesar 77,34% dari total liabilitas dan pinjaman yang diterima dari HSBC Hong Kong dalam mata uang USD dengan porsi 8,06%.

Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah mencapai Rp72.160 miliar di akhir tahun 2020 atau meningkat 10,22% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama disumbangkan oleh giro sebesar Rp7.907 miliar. Rasio Giro dan Tabungan terhadap Total Deposito Berjangka adalah 71%:29%.

Simpanan dari Nasabah	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Giro	35.871	49,71%	27.964	42,71%	7.907	28,28%
Tabungan	15.281	21,18%	12.399	18,94%	2.882	23,24%
Deposito berjangka dan *Deposits on Call*	21.008	29,11%	25.106	38,35%	(4.098)	-16,32%
Total	**72.160**	**100,00%**	**65.469**	**100,00%**	**6.691**	**10,22%**

Giro

Berdasarkan jenis mata uang, giro dalam denominasi Rupiah memiliki kontribusi terbesar yaitu 67,92% atau Rp24.362 miliar terhadap total giro.

Mata Uang	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Rupiah	24.362	67,92%	18.054	64,56%	6.308	34,94%
Mata uang asing	11.509	32,08%	9.910	35,44%	1.599	16,14%
Total	**35.871**	**100,00%**	**27.964**	**100,00%**	**7.907**	**28,28%**

Tabungan

Saldo tabungan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp15.281 miliar. Komposisi tabungan berdasarkan mata uang didominasi oleh tabungan dalam valuta asing sebesar 56,76% terhadap total tabungan.

Mata Uang	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Rupiah	6.608	43,24%	4.758	38,37%	1.850	38,88%
Mata uang asing	8.673	56,76%	7.641	61,63%	1.032	13,51%
Total	**15.281**	**100,00%**	**12.399**	**100,00%**	**2.882**	**23,24%**

Deposito Berjangka dan *Deposit On Call*

Pada tahun 2020, deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak didominasi oleh kelompok deposito berjangka waktu satu bulan yaitu sebesar 70,87%.

Maturitas	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
1 bulan	14.888	70,87%	18.366	73,15%	(3.478)	-18,94%
3 bulan	3.289	15,65%	2.743	10,93%	546	19,91%
6 bulan	2.182	10,39%	2.934	11,69%	(752)	-25,63%
12 bulan	649	3,09%	1.063	4,23%	(414)	-38,95%
Total	**21.008**	**100,00%**	**25.106**	**100,00%**	**(4.098)**	**-16,32%**

Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Bank pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.517 miliar, turun 50,10% dari 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp15.063 miliar yang dikarenakan adanya pembayaran sebesar USD550 juta selama tahun 2020.

Ekuitas

Pada akhir 2020, ekuitas Bank sebesar Rp19.298 miliar, meningkat sebesar Rp1.162 miliar atau 6,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan laba bersih Bank. Pertumbuhan ekuitas memberikan kontribusi positif terhadap permodalan Bank dengan rasio KPMM berada pada tingkatan yang sehat sebesar 26,70%.

Komposisi Ekuitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Modal saham	10.586	10.586	-	0,00%
Tambahan modal disetor	258	258	-	0,00%
Laba komprehensif lain - bersih	470	81	389	480,25%
Saldo laba:				
- Telah ditentukan penggunaannya	49	26	23	88,46%
- Belum ditentukan penggunaannya	7.935	7.185	750	10,44%
Jumlah Ekuitas	**19.298**	**18.136**	**1.162**	**6,41%**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Pendapatan bunga	5.307	6.197	(890)	-14,36%
Beban bunga	(1.433)	(2.217)	784	-35,36%
Pendapatan bunga bersih	3.874	3.980	(106)	-2,66%
Pendapatan provisi dan komisi bersih	1.204	1.312	(108)	-8,23%
Pendapatan operasional lainnya	1.751	1.837	(86)	-4,68%
Kerugian penurunan nilai aset keuangan-bersih	(1.717)	(671)	(1.046)	155,89%
Jumlah pendapatan operasional	5.112	6.458	(1.346)	-20,84%
Jumlah beban operasional	(3.338)	(3.418)	80	-2,34%
Laba sebelum pajak	1.774	3.040	(1.266)	-41,64%
Beban pajak	(464)	(729)	265	-36,35%
Laba bersih tahun berjalan	1.310	2.311	(1.001)	-43,31%
Laba komprehensif lain	384	168	216	128,57%
Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk Tahun Berjalan	**1.694**	**2.479**	**(785)**	**-31,67%**

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga turun 14,36% atau sebesar Rp890 miliar pada 2020 terutama karena saldo kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan 2019 akibat terdampak pandemi COVID-19. Pada 2020, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada nasabah berkontribusi sebesar Rp3.857 miliar atau 72,68% dari total pendapatan bunga.

Komposisi Pendapatan Bunga pada Tahun 2020

Pendapatan Bunga	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Kredit yang diberikan kepada nasabah	3.857	72,68%	5.002	80,72%	(1.145)	-22,89%
Efek-efek untuk tujuan investasi	1.072	20,20%	894	14,43%	178	19,91%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	292	5,50%	58	0,94%	234	403,45%
Penempatan pada Bank Indonesia	38	0,72%	41	0,66%	(3)	-7,32%
Kredit yang diberikan dan penempatan pada bank	2	0,04%	9	0,14%	(7)	-77,78%
Giro pada Bank Indonesia	19	0,36%	4	0,06%	15	375,00%
Lain-lain	27	0,50%	189	3,05%	(162)	-85,71%
Total	**5.307**	**100,00%**	**6.197**	**100,00%**	**(890)**	**-14,36%**

Beban Bunga

Beban bunga tercatat sebesar Rp1.433 miliar, menurun sebesar 35,36% atau Rp784 miliar. Hal ini sejalan dengan penurunan biaya bunga atas pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi sebesar Rp392 miliar dikarenakan adanya pembayaran pinjaman yang diterima selama tahun 2020 sebesar USD550 juta.

Beban Bunga	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Giro	226	15,77%	365	16,46%	(139)	-38,08%
Tabungan	100	6,98%	70	3,16%	30	42,86%
Deposito berjangka dan *Deposits on Call*	808	56,39%	1.021	46,05%	(213)	-20,86%
Pinjaman yang diterima dan Pinjaman subordinasi	246	17,17%	638	28,78%	(392)	-61,44%
Lainnya	53	3,69%	123	5,55%	(70)	-56,91%
Total	**1.433**	**100.00%**	**2.217**	**100,00%**	**(784)**	**-35,36%**

Pendapatan Bunga Bersih

Sampai dengan 31 Desember 2020, Bank berhasil membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp3.874 miliar. Untuk menjaga pendapatan bunga bersih, Bank secara proaktif mengkaji komposisi pendanaan Bank secara berkala agar biaya pendanaan dapat dikendalikan dan margin bunga bersih (NIM) terjaga di level yang optimal.

Pendapatan Non Bunga

Pada tahun 2020, Bank membukukan pendapatan non-bunga sebesar Rp2.955 miliar atau turun dari tahun sebelumnya karena terdampak pandemi COVID-19 dan transaksi tidak berulang yang berkaitan dengan pajak pada tahun 2019.

Pendapatan Non Bunga	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Pendapatan provisi dan komisi-bersih	1.204	40,74%	1.312	41,66%	(108)	-8,23%
Pendapatan operasional lainnya	1.751	59,26%	1.837	58,34%	(86)	-4,68%
Total	**2.955**	**100,00%**	**3.149**	**100,00%**	**(194)**	**-6,16%**

Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan – Bersih

Bank mengalami kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1.717 miliar pada 2020. Beban ini meningkat terutama karena pencadangan terkait perkiraan dampak negatif kondisi ekonomi masa depan terhadap kualitas kredit akibat COVID-19 dan beberapa penambahan cadangan kerugian individu untuk nasabah korporasi. Sejalan dengan ketidakpastian akibat COVID-19, Bank akan terus memonitor dampak pandemi terhadap kualitas kredit dan menelaah pencadangan kerugian kredit yang diekspektasi.

Beban Operasional

Selama tahun 2020, beban operasional Bank sebesar Rp3.338 miliar, dengan komposisi terbesar adalah beban karyawan yakni 51,83%.

Bank terus berupaya mengelola biaya secara efektif dan efisien guna menjaga kesinambungan pertumbuhan. Biaya operasional berkurang sebesar Rp80 miliar pada tahun 2020, sebagai hasil dari inisiatif penghematan dan kesempatan untuk menunda biaya selama pandemi Covid-19.

Beban Operasional	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Beban karyawan	1.730	51,83%	1.949	57,02%	(219)	-11,24%
Beban umum dan administrasi	1.254	37,57%	1.112	32,53%	142	12,77%

Beban Operasional	2020		2019		Pertumbuhan	
	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%	Rp Miliar	%
Beban depresiasi aset tetap	296	8,87%	300	8,78%	(4)	-1,33%
Beban amortisasi aset tak berwujud	58	1,73%	57	1,67%	1	1,75%
Total	**3.338**	**100,00%**	**3.418**	**100,00%**	**(80)**	**-2,34%**

Laba Sebelum Pajak

Tahun 2020, Bank membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp1.774 miliar. Laba sebelum pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena peningkatan kerugian penurunan nilai aset keuangan serta penurunan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga sebagaimana dijelaskan di atas.

Laba Bersih

Laba bersih Bank tercatat sebesar Rp1.310 miliar, turun Rp1.001 miliar atau 43,31% dari perolehan tahun 2019 sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Tinjauan kinerja per segmen usaha

Pendapatan bank pada tahun 2020 terutama dikontribusikan oleh segmen *Wholesale* (*Commercial Banking* dan *Global Banking & Markets*), sisanya sekitar seperempat dikontribusikan oleh segmen Ritel. Sisi profitabilitas juga mencerminkan hal yang serupa.

Laporan Penghasilan Komprehensif

Bank juga mencatat pendapatan komprehensif sebesar Rp1.694 miliar, menurun sebesar Rp785 miliar dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya sejalan dengan penurunan laba bersih. Laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Pertumbuhan	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Laba bersih tahun berjalan	1.310	2.311	(1.001)	-43,31%
Penghasilan komprehensif lain :				
Efek-efek untuk tujuan investasi				
- Pada nilai wajar melalui laba penghasilan komprehensif lain	380	196	184	93,88%
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja				
- Laba/(rugi) aktuarial tahun berjalan	4	(28)	32	-114,29%
Laba Komprehesif lain, bersih setelah pajak	384	168	216	128,57%
Total laba komprehensif untuk tahun berjalan	**1.694**	**2.479**	**(785)**	**-31,67%**

Laporan Arus kas

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Fluktuasi	
	Rp Miliar	Rp Miliar	Rp Miliar	%
Arus kas aktivitas operasi	15.510	8.061	7.449	92,41%
Arus kas aktivitas investasi	(3.151)	(2.326)	(825)	35,47%
Arus kas aktivitas pendanaan	(8.703)	(4.388)	(4.315)	98,34%
Kenaikan bersih kas dan setara kas	3.656	1.347	2.309	171,42%
Pengaruh fluktuasi kurs	(2.716)	(147)	(2.569)	1747,62%
Kas dan setara kas 1 Januari	19.486	18.286	1.200	6,56%
Kas dan setara kas 31 Desember	20.426	19.486	940	4,82%

Pada akhir periode 2020, Bank membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar Rp20.426 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp15.510 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp8.061 miliar. Kenaikan kas dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas dari kredit yang diberikan kepada nasabah.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 2020 minus Rp3.151 miliar, meningkat 35,47% dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas masuk dari hasil maturitas efek-efek untuk tujuan investasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan minus Rp8.703 miliar pada 2020 atau meningkat 98,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2019 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank telah menerapkan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kepada masyarakat melalui publikasi *website* dan Laporan Tahunan.

Segmen Kredit	2020	2019
Kredit Korporasi	8,00%	9,50%
Kredit Ritel	9,80%	10,25%
Kredit Konsumsi		
- KPR	10,00%	10,76%
- Non-KPR	0,00%	0,00%

Likuiditas dan Solvabilitas

Untuk mengukur kemampuan finansial Bank dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, Bank menggunakan beberapa rasio likuiditas seperti Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). RIM menggambarkan besarnya simpanan nasabah dan pinjaman yang diterima jangka panjang yang digunakan untuk mendanai kredit yang diberikan kepada nasabah. Rasio RIM Bank per 31 Desember 2020 sebesar 72,95%.

Sedangkan NSFR untuk memantau risiko pendanaan dan LCR untuk memantau risiko likuiditas secara harian, Pada tanggal 31 Desember 2020, NSFR dan LCR Bank masing-masing sebesar 164,89% dan 648,89%.

Rasio Likuiditas

Keterangan	2020	2019
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	72,95%	86,24%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	648,89%	516,92%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	164,89%	152,64%
Rasio dana murah	70,89%	61,65%

Bank juga menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban, dengan membandingkan liabilitas terhadap seluruh aset dan liabilitas terhadap ekuitas.

Rasio Solvabilitas

Keterangan	2020	2019
Rasio liabilitas terhadap total aset	82,86%	83,79%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	483,49%	516,78%
Rasio pengungkit	14,61%	13,83%

INFORMASI KEUANGAN MATERIAL LAINNYA

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek, diukur menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Hingga akhir 2020, kemampuan membayar utang Bank tergolong baik berdasarkan kedua rasio tersebut.

Tingkat likuiditas Bank yang diukur melalui rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (Rasio Intermediasi Makroprudensial/RIM) adalah 72,95%. Bank senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana dan penyediaan dana. Bank juga melakukan diversifikasi pendanaan dengan mendapatkan pinjaman jangka panjang dalam menunjang likuidasi Bank.

Rasio KPMM Bank tahun 2020 sebesar 26,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk dapat mengimbangi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional sebab rasionta lebih tinggai dari rasio kecukupan modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu berkisar 9%-10%.

Tingkat Kolektibilitas Kredit

Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) bruto Bank pada 31 Desember 2020 adalah 3,45%. Adapun NPL neto Bank berada pada besaran 0,94%.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam menghitung kebutuhan modal tahun 2020, Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016. Modal yang diwajibkan regulator dianalisis dalam dua tier sebagai berikut:

- **Modal Inti (*Tier* 1),** yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif. Aset pajak tangguhan dan aset tak berwujud merupakan faktor utama yang mengurangi modal ini. Bank tidak memiliki modal inti tambahan.
- **Modal Pelengkap (*Tier* 2),** antara lain meliputi pinjaman subordinasi dan cadangan umum aset produktif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank ditentukan berdasarkan ketentuan persyaratan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko terkait dengan aset dan eksposur yang tidak tercermin dalam laporan keuangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Bank juga menjalankan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali di mana proses ini menggabungkan regulasi dan sumber daya internal serta ketentuan yang diperlukan terhadap model bisnis, strategi, kinerja dan perencanaan, risiko terhadap permodalan, dan implikasi dari *stress testing* untuk menilai posisi dari modal Bank. Selain itu, Bank juga membuat Perencanaan Permodalan yang dilakukan secara tahunan, selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% (delapan persen) dari ATMR;
2. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR;
3. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR; dan
4. Untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR.

Beberapa batasan juga diberlakukan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*Tier* 1) paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan.

Posisi modal yang diwajibkan regulator Bank sesuai peraturan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Modal *Tier* 1		
Modal saham	10.586	10.586
Tambahan modal disetor	258	258
Cadangan umum	49	26
Saldo laba	6.625	4.874
Laba periode berjalan	1.310	2.311
Penghasilan komprehensif lain	502	133
Selisih kurang antara penyisihan wajib dan CKPN aset produktif	-	
PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	(64)	(43)
Perhitungan pajak tangguhan	(266)	(275)
Aset tidak berwujud lainnya	(89)	(137)
Modal *Tier* 2		
Instrumen Modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2	1.054	1.041
Cadangan umum aset produktif	800	893
Jumlah modal	**20.765**	**19.667**
ATMR		
Risiko kredit	63.979	71.418
Risiko pasar	1.733	3.145
Risiko operasional	12.044	8.584
Jumlah ATMR	**77.756**	**83.147**
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	26,70%	23,64%
CET 1	24,32%	21,33%
Tier 1	24,32%	21,33%
Tier 2	2,38%	2,33%
Capital Conversion Buffer	2,50%	2,50%

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Countercyclical Buffer	0,00%	0,00%
Domestically Systemically Important Bank	1,00%	1,00%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9% sampai dengan kurang dari 10%	9% sampai dengan kurang dari 10%
Rasio CET 1 minimum yang diwajibkan	4,50%	4,50%
Rasio *Tier* 1 minimum yang diwajibkan	6,00%	6,00%

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi Desember 2020 menggunakan peringkat profil risiko per Juni 2020.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat ke-2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Pada tanggal 31 Desember 2020, KPMM Bank sebesar 26,70% atau jauh di atas modal minimum yang diwajibkan otoritas yakni 9%-10%.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Informasi Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Selama tahun 2020, Bank tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Relasi	Jenis Transaksi
HSBC Bank Australia Ltd	Perusahaan afiliasi	Giro
HSBC Bank Canada	Perusahaan afiliasi	Giro dan pendapatan provisi dan komisi
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Thailand branch) Bangkok	Perusahaan afiliasi	Giro
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Australian branches) Sydney	Perusahaan afiliasi	Giro
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Indian branches) Mumbai	Perusahaan afiliasi	Giro dan Akseptasi
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Japanese branches) Tokyo	Perusahaan afiliasi	Giro
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (New Zealand branches) Auckland	Perusahaan afiliasi	Giro
Hang Seng Bank Ltd	Perusahaan afiliasi	*Call money*
HSBC Bank plc	Perusahaan afiliasi	Giro,surat berharga dan transaksi derivatif
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Singaporean branches) Singapore	Perusahaan afiliasi	Giro, akseptasi, transaksi derivatif, dan surat berharga
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Perusahaan afiliasi	Giro, akseptasi, transaksi derivatif, *call money*, pinjaman yang diterima, surat berharga, dan beban bunga yang masih harus dibayar

Pihak Berelasi	Sifat Relasi	Jenis Transaksi
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch [1)]	Perusahaan afiliasi	-
HSBC Trinkaus and Burkhardt AG	Perusahaan afiliasi	Giro dan akseptasi
HSBC Bank Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi	Giro dan akseptasi
HSBC Amanah Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi	Giro
HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Ltd	Perusahaan induk	Liabilitas lain-lain, Pinjaman subordinasi
Dewan Komisaris, Direksi dan keluarga	Manajemen kunci	Kredit yang diberikan kepada nasabah dan simpanan dari nasabah
HSBC Bank USA	Perusahaan afiliasi	Giro
HSBC Bank (China) Company Limited	Perusahaan afiliasi	Giro dan akseptasi
HSBC France	Perusahaan afiliasi	Giro
HSBC Bank (Taiwan) Limited	Perusahaan afiliasi	Giro dan akseptasi

[1)] Telah dilakukan pencabutan izin usaha pada tanggal 8 April 2019. Terdapat saldo laba rugi selama periode 1 January 2019 - 8 April 2019

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen setiap tahun ditetapkan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Pada tahun 2020, para pemegang saham Bank menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp23 miliar dari saldo laba tahun 2019 serta pembagian dividen tunai sejumlah Rp636 miliar (Rp60,1 (nilai penuh) per saham) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Pembayaran dividen dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2020.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan.

Selama tahun 2020, Bank tidak menerapkan program kepemilikan saham oleh karyawan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan pada Tahun 2020

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Kecuali dinyatakan di bawah ini, PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit saat peristiwa kerugian kredit terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank memilih penerapan secara restropektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp 98.972 yang berasal dari penurunan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Bank dimana saat ini, Bank tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh terhadap Kinerja Bank

Pada tahun 2020 terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang telah terbit, baik itu peraturan baru maupun perubahan peraturan yang berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Secara total terdapat 71 Peraturan, yang terdiri dari 20 Peraturan OJK dan 51 Peraturan Bank Indonesia, di mana peraturan tersebut telah disosialisasikan kepada internal Bank dan secara spesifik telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait, antara lain mengenai:

- Perubahan atas POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
- Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- Konsolidasi Bank Umum
- Perubahan atas POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank
- Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Perubahan Ketiga atas POJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
- Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
- Saluran Pemasaran Produk Asuransi
- Konglomerasi Keuangan
- Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- Perubahan atas POJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019
- Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/20/PADG/2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia
- Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bBagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF)
- Perubahan atas PBI No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
- Pelaksanaan tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
- Pelaksanaan PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
- Lelang Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana untuk Menjaga Kesinambungan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
- Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)
- Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan
- Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
- Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
- Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter
- Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
- Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan
- Klarifikasi atas Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya
- Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter*
- Perubahan Kedua PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
- Penyediaan *Prefund* dalam Penyelenggaraan Transfer Dana Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
- Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Perubahan Keenam PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020
- Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*) Melalui Bank
- Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang Menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank
- Perubahan Ketiga atas PBI No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum
- Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- Operasi Moneter
- Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Perubahan atas PADG No. 21/25/PADG/2019 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- Instrumen Operasi Pasar Terbuka (PADG Instrumen OPT)
- Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
- *Standing Facilities*

- Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- Kepesertaan Operasi Moneter
- Perubahan Kedua atas PADG No. 20/2/PADG/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari
- Perubahan Kedua atas PADG No. 20/4/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga melalui Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*
- Perubahan Kedua atas PADG No. 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*
- Perubahan Kedua atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Perubahan Ketiga atas PADG No. 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
- Perubahan Ketiga atas PADG No. 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*
- Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Thailand Menggunakan Rupiah dan Baht Melalui Bank
- Perubahan atas PADG No. 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan PBI No. 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus
- Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona
- Perubahan atas PBI No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Hasil Pembayaran Impor
- Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi
- Sistem Pembayaran

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

SUMBER DAYA MANUSIA

Bank terus berinvestasi pada kapabilitas sumber daya manusia, seiring dengan pertumbuhan di industri perbankan Indonesia. Hal ini dapat tercapai melalui aktivitas-aktivitas dari Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus mendukung pertumbuhan Bank, beradaptasi dan menyelaraskan dengan perubahan pasar, khususnya di industri perbankan, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada karyawan, dan melalui perbaikan berkelanjutan atas kebijakan SDM, tata kelola dan manajemen risiko terkait sumber daya manusia.

Profil Karyawan

Jumlah karyawan Bank pada 31 Desember 2020 adalah 3.419 karyawan, atau 10% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Komposisi dari sumber daya manusia pada 31 Desember 2020 berdasarkan pendidikan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pendidikan	2020		2019	
	Jumlah Karyawan	Persentase	Jumlah Karyawan	Persentase
S3	6	0,18%	3	0,08%
S2	316	9,24%	215	5,66%
S1	3.033	88,71%	3.404	89,65%
D3	9	0,26%	132	3,48%
D1	47	1,37%	7	0,18%
SLTA	8	0,23%	36	0,95%
Total	**3.419**	**100,00%**	**3.797**	**100,00%**

Pada tahun 2020, lebih dari 98% karyawan memiliki jenjang pendidikan S1 atau lebih tinggi, naik 3 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan karena Bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi.

Komposisi SDM berdasarkan Usia

Usia	2020		2019	
	Jumlah Karyawan	Persentase	Jumlah Karyawan	Persentase
18-30 tahun	1.037	30,33%	1.312	34,55%
31-40 tahun	1.442	42,18%	1,560	41,09%
41-50 tahun	807	23,60%	805	21,20%
Di atas 50 tahun	133	3,89%	120	3,16%
Total	**3.419**	**100,00%**	**3.797**	**100,00%**

Pada tahun 2020, sama dengan tahun sebelumnya, komposisi karyawan masih didominasi oleh usia produktif dan generasi muda yang dinamis. Lebih dari 73% karyawan berusia di bawah 40 tahun.

Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Organisasi

Jenjang	2020		2019	
	Jumlah Karyawan	Persentase	Jumlah Karyawan	Persentase
Manajemen Puncak	7	0,20%	8	0,21%
Manajemen Madya	128	3,74%	136	3,58%
Manajemen Lini	811	23,72%	815	21,46%
Staf dan Lainnya	2.473	72,33%	2.838	74,74%
Total	**3.419**	**100,00%**	**3.797**	**100,00%**

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan tingkatan dalam struktur organisasi antara Manajer Madya, Manajemen Lini, Karyawan masing-masing adalah 128, 811, dan 2.437. Rata-rata, seorang Manajer membawahi 5 atau 6 orang karyawan. Rasio tersebut mendekati arahan yang direkomendasikan, yaitu untuk memastikan manajemen yang efektif dan efisien, seorang Manajer dapat membawahi 8 orang karyawan.

Komposisi SDM berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	2020		2019	
	Jumlah Karyawan	Persentase	Jumlah Karyawan	Persentase
Pegawai Tetap	3.055	89,35%	3.264	85,96%
Pegawai Kontrak	364	10,65%	533	14,04%
Total	**3.419**	**100,00%**	**3.797**	**100,00%**

Pada tahun 2020, jumlah karyawan kontrak terus mengalami penurunan, dari 533 di tahun 2019 menjadi 364 (turun 31,7%). Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerjaan kontrak sementara yang sudah selesai.

Komposisi SDM berdasarkan Gender

Gender	2020		2019	
	Jumlah Karyawan	Persentase	Jumlah Karyawan	Persentase
Laki-laki	1.536	44,93%	1.706	44,93%
Perempuan	1.883	55,07%	2.091	55,07%
Total	**3.419**	**100,00%**	**3.797**	**100,00%**

Dalam hal komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin, tidak ada perubahan dibandingkan dengan 2019. Komposisi antara karyawan perempuan dibandingkan karyawan laki-laki tetap berada pada tingkat 55,07% terhadap 44,93%. Hal ini membuktikan bahwa Bank memberikan kesempatan yang besar kepada karyawan perempuan untuk memiliki karir di Bank.

Penerapan Peraturan Remunerasi termasuk *Material Risk Takers*

Pada tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC) telah menyelesaikan aktivitas-aktivitas di bawah ini dan memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris:

- Peninjauan tahunan atas RNC *Terms of Reference* (TOR) dan kajian tahunan keanggotaan termasuk pengangkatan anggota baru untuk memperkuat komite.
- Kajian atas komposisi anggota Direksi dan anggotanya dan memberikan rekomendasi perubahan kepada Dewan Komisaris.
- Nominasi enam Direktur baru (Direktur Utama, Direktur CMB, Direktur WPB, Direktur *Global Banking*, Direktur Kepatuhan, Direktur Operasi dan TI) dan dua Komisaris baru.
- Peninjauan *scorecard* kinerja untuk Direktur sesuai dengan prioritas strategis Bank dan indikator keuangan utama.

- Peninjauan remunerasi tahunan untuk kinerja tahun 2019 dan memberikan rekomendasi hasil remunerasi bagi anggota Direksi, Komisaris Independen, dan pihak independen.
- Kajian materi bagi pengambil risiko (*Material Risk Taker*) di mana terdapat tujuh orang yang dikenakan penangguhan remunerasi bersifat variabel sesuai kebijakan Bank.
- Perumusan yang terkait prosedur Malus dan Clawback serta pembaharuan terkait aturan mengenai MRT sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Remunerasi.

Kinerja Manajemen

Bank menerapkan program Kinerja dan Pengembangan Karyawan (*Employee Performance and Development*/ EPD) dengan menyediakan panduan untuk karyawan dan atasan, dan meluncurkan modul teknologi yang bernama *Continuous Performance Management* (CPM) untuk semua karyawan sebagai pendukung EPD dan untuk membantu mempermudah penilaian akhir tahun. Selain itu, kebijakan terkait struktur dan skala upah telah diperbaharui dan dikomunikasikan. Proses peninjauan kinerja akhir tahun dan gaji tahunan juga telah dilakukan dengan serangkaian sesi komunikasi untuk meningkatkan kemampuan manajer.

Perekrutan Karyawan

Hingga akhir tahun 2020, Bank sudah merekrut 403 karyawan yang terdiri dari 218 karyawan tetap dan 185 karyawan kontrak. Terdapat 11 posisi penting yang direkrut pada tahun 2020 yang terdiri dari: empat posisi Direktur (secara internal: Direktur *Wealth Personal Banking*, Direktur *Global Banking*, sedangkan eksternal: Direktur *Commercial Banking* dan Direktur Kepatuhan), dan sisanya merupakan posisi Manajer Madya dari berbagai departemen seperti IT, HR, Kepatuhan, WPB.

Pada tahun 2020, *Recruitment and Onboarding* (ROC) berfokus pada perbaikan *customer experience* dengan melakukan inisiatif sebagai berikut:

- Mempercepat dan memperbaiki proses dan pengalaman *Onboarding* bagi karyawan baru melalui *Welcoming Pack* dan panduan bagi Karyawan Baru sehingga mereka dapat terlibat dan bangga menjadi bagian dari Bank.
- Survei Kepuasan yang berasal dari kandidat dan Manajer pada tahun 2020 yang mencapai 4,4 dari skala 5.

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2020, Bank terus bertumbuh dan strategi SDM difokuskan pada tiga (3) bidang utama:

1. Membangun Kemampuan Manajer untuk masa depan.
2. Menumbuhkan lingkungan yang berkomitmen untuk keberagaman dan inklusi yang sejahtera.
3. Mendorong, mengerti, dan menanggapi suara karyawan.

Pelatihan dan Pengembangan

Bank secara berkala dan berkesinambungan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung pencapaian strategi bisnis Bank. Secara garis besar, program pelatihan dan pengembangan meliputi bidang *hard skill*/kompetensi teknis, kompetensi *soft skill*, pendidikan kepemimpinan, dan *in-house training* untuk bidang pelatihan tertentu.

Program ini dikelompokkan menjadi:

- Bisnis atau peran yang spesifik terkait kompetensi teknis/fungsional:
  Program pembelajaran dan pengembangan mengenai kompetensi khusus yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
- Kompetensi kepemimpinan:
  Program pembelajaran dan pengembangan terkait topik kepemimpinan dan manajerial, bagi karyawan yang memiliki peran struktural/pemimpin.
- Kompetensi kepatuhan peraturan:
  Program pembelajaran dan pengembangan mengenai manajemen risiko, *wealth management*, pasar modal, asuransi, *treasury* dan sertifikasi kepatuhan sesuai peran karyawan.
- Kompetensi umum:
  Program pembelajaran dan pengembangan mengenai kompetensi umum yang mencerminkan nilai dan sikap yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan. Program ini meliputi pelatihan di bidang nilai dan budaya.

Selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia, dan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan, beberapa program pelatihan di tahun 2020 ditunda ataupun dibatalkan. Bank mengoptimalkan program pelatihan dan pengembangan melalui *e-learning* ataupun secara *virtual*:

- Seminar, lokakarya, dan konferensi.
- Program pelatihan dan sertifikasi yang diwajibkan oleh regulator dan Bank, termasuk *Global Mandatory Training* (GMT), *Financial Crime and Compliance* (FCC), Standar Global dan Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi Treasury, WAPERD, AAJI, dan WPPE.
- Pengenalan Program Keterampilan untuk Masa Depan (*Future Skills Learning Programme*).
- Program pelatihan untuk karyawan baru.
- Program sosialisasi yang diadakan secara internal dan eksternal yang meliputi produk, proses, sistem dan prosedur, kebijakan dan ketentuan.
- Program pengenalan Budaya dan Kepemimpinan Perusahaan
- Program identifikasi bakat awal untuk lulusan baru terbaik melalui *Global Graduate Program* (GGP) dan *Corporate Functions Graduate Program* (CFGP).

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, pada tahun 2020 Bank melaksanakan program pengembangan kepada 3.773 pegawai dengan total partisipasi pelatihan sebanyak 60.789 topik pelatihan.

Jumlah Karyawan	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan per Karyawan	Jumlah Partisipan Pelatihan	Jumlah Karyawan Terlatih
3.443	59.706	17.34	60.789	3.773

Rincian jumlah jam pelatihan berdasarkan jenis pelatihan, sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Jam	Total Jam
***INTERNAL TRAINING*:**		**52.006**
Assessment	3.065	
Elearning	36.342	
Classroom	8.020	
Virtual Classroom	4.579	
***EXTERNAL TRAINING*:**		**7.700**
Assessment	41	
Classroom	4.327	
Virtual Classroom	3.332	
Jumlah		**59.706**

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa program pelatihan di tahun 2020, yang meliputi:

Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Dewan Komisaris		
Authorised Spokesperson 2020 Conference Presenter	HSBC University	Feb 20
Building Financial Crime Capability	HSBC University	Apr, Jul, Sep 20
Compliance with HKMA Banking (Exposure Limits) Rules (BELR)	HSBC University	Jul, Des 20
Employee Bankruptcy/Composition with creditors and Offence involving fraud or dishonesty	HSBC University	Jan, Feb 20
Fighting Financial Crime	HSBC University	Agt 20
HSBC and Me	HSBC University	Jun, Jul 20
HSBC Indonesia (HBID) Interaction Model - Practical Guide	HSBC University	Sep 20
Values, Conduct and Me	HSBC University	Okt, Des 20
Volcker Rule Awareness Training	HSBC University	Agt, Sep 20

Pelatihan	Penyelenggara	Waktu
Direksi		
Fighting Financial Crime	HSBC University	Mei-Sep 20
Values, Conduct and Me	HSBC University	Jun-Des 20
Operational Risk Bootcamp for MANCO	HSBC University	Okt 20
Building Financial Crime Capability	HSBC University	Jan, Okt, Des 20
Advanced Competition Law	HSBC University	Jun 20
Cyber Stars for Business Level 1	HSBC University	Jun, Jul 20
HSBC and Me	HSBC University	Jun, Jul 20
Leading Businesses and Functions Programme	HSBC University	Okt, Nov 20
Risk Stewards Introduction to Non-Financial Risk	HSBC University	Feb, Mar, Jun 20
Volcker Rule Awareness Training	HSBC University	Jun, Sep, Okt 20
2019 Market Conduct Risks	HSBC University	Jun, Jul 20
Authorised Spokesperson 2020 Media Spokesperson	HSBC University	Feb 20
Building Financial Crime Capability	HSBC University	Okt-Nov 20
Introduction to Non-Financial Risk	HSBC University	Feb-Mar 20
AB&C Training for High Risk Roles for Senior Leaders - Virtual Delivery	HSBC University	Mei, Jul 20
Refreshment SMR - Governance, Risk & Compliance (GRC) and Three Lines of Defence	BSMR	Apr 20

Pelatihan Wajib Global (GMT)

Pelatihan Wajib Global (GMT) membantu karyawan untuk memahami Prinsip Global, landasan tentang siapa dan bagaimana Bank beroperasi. Secara khusus, GMT melihat risiko utama yang dihadapi oleh bank dan cara mengelolanya secara efektif, sehingga Bank dapat memberikan hasil yang tepat bagi nasabah dan pemangku kepentingan.

Ikhtisar Kalendar GMT 2020

Trimester 1/2020 April-Juni	Trimester 2/2020 Agustus-Oktober	Trimester 3/2020 Oktober-December
HSBC and Me	Fighting Financial Crime	Values, Conduct and Me
• Managing Risk at HSBC • Sustainability • Health, Safety and Well-being • Data Privacy • Cyber Security	Anti Money Laundering, Tax, Sanctions, Fraud and Anti-Bribery & Corruption	Values & Conduct Workplace Harassment
Ditugaskan 19 April - Selesai 17 Juni 2020	Ditugaskan 9 Agustus - Selesai 7 October 2020	Ditugaskan 18 Oktober - Selesai 16 Desember 2020

Program Pelatihan Kejahatan Keuangan untuk Peran Berisiko Tinggi

Berikut adalah rangkaian modul yang dirancang untuk memenuhi persyaratan pembelajaran bagi karyawan yang memegang peran yang berisiko tinggi. Peran berisiko tinggi adalah peran yang melibatkan aktivitas yang memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko Pencucian Uang, Sanksi dan Suap, dan Korupsi. Sebagai akibat dari eksposur ini, karyawan dalam peran berisiko tinggi harus mengembangkan dan menunjukkan kemampuan yang ditingkatkan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola dan melaporkan kejahatan keuangan.

Program pelatihan terkait Kejahatan Keuangan untuk Peran Berisiko Tinggi yang diadakan adalah sebagai berikut:

- *AML and Sanctions* (AMLS) untuk Peran Berisiko Tinggi
  Pelatihan ini wajib untuk semua Peran Berisiko Tinggi di dalam Bank dan terpisah dari *Global Mandatory Training* (GMT) yang harus diambil semua karyawan. Pembelajaran ini akan membantu karyawan untuk secara efektif mengelola risiko kejahatan keuangan dan memberikan kepercayaan diri dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif dalam perannya. Baik karyawan tetap maupun kontrak harus menyelesaikan pembelajaran serta mengikuti penilaian pascakursus. Penilaian *e-Learning* dan pascakursus bersifat wajib dan karyawan memiliki 90 hari untuk menyelesaikan modul yang ditugaskan. Selama tahun 2020, program pelatihan *AML and Sanctions* untuk Peran Berisiko Tinggi terdiri dari 7 kurikulum yang ditugaskan kepada 1.048 karyawan dari masing-masing fungsi bisnis. Jumlah karyawan yang telah menyelesaikan pelatihan sebanyak 694 karyawan atau 66,22%, dan sisanya akan menyelesaikan pelatihan pada tahun 2021.

- Anti Suap & Korupsi (AB&C) untuk Peran Berisiko Tinggi
  Program pelatihan ini terdiri dari 2 kurikulum yang diberikan kepada 230 karyawan dari masing-masing bisnis dan fungsi, dan 217 atau 94,35% karyawan telah menyelesaikan kurikulum yang ditetapkan.

Program Pelatihan Kepemimpinan HSBC

Bank memiliki beberapa program pelatihan kepemimpinan unggulan, beberapa di antaranya merupakan bagian dari program Universitas HSBC. Pada tahun 2020, jumlah karyawan yang berpartisipasi mencapai 78 karyawan.

Program Kepemimpinan	Global Business	Global Functions	HOST	Jumlah
People Management Essentials	4	-	11	15
Hiring Essential	32	5	18	55
Coaching for Performance	-	1	1	2
Coaching for Performance People Management Toolkit	3	-	-	3
Coaching for Performance Personal Coaching Challenge	1	-	2	3
Jumlah	40	6	32	78

Program Pelatihan Keterampilan Masa Depan

Bank telah mengidentifikasi keterampilan penting yang dapat diberikan kepada karyawan untuk membantu kesuksesan HSBC di masa mendatang. Keterampilan tersebut termasuk keterampilan yang difokuskan baik untuk masa kini maupun masa mendatang yang dapat digunakan sebagai acuan. Selama tahun 2020, program pelatihan terkait Future Skills yang tersedia sebanyak 13 kurikulum dan ada 178 karyawan yang telah mengikuti dan menyelesaikan kurikulum tersebut.

Kurikulum Future Skills	Global Business	Global Functions	HOST	Jumlah
Communicating with Impact	-	-	1	1
Connectivity	15	16	3	34
Creativity	3	-	2	5
Curiosity	-	3	1	4
Customer Engagement	1	-	-	1
Design Mindset	7	2	-	9
Growth Mindset	10	5	25	40
Interview Skills	9	9	4	22
Negotiation Skills	10	2	2	14
Presentation Skills	6	3	1	10
Resilience	1	2	3	6
Sense Making	14	9	6	29
Virtual Collaboration	1	2	-	3
Jumlah	77	53	48	178

Pelatihan Penanganan COVID-19

Untuk membekali karyawan yang akan kembali bekerja di kantor dalam situasi *new normal*, Bank telah memberikan pelatihan khusus yang disebut "COVID-19: Kembali Ke Kantor" bagi 3.586 karyawan untuk memastikan karyawan dapat menerapkan standar protokol kesehatan di tempat kerja.

Program Sertifikasi Perbankan

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan program sertifikasi perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank telah melaksanakan program sertifikasi sebagai berikut:

- Sertifikasi Manajemen Risiko
  Jumlah karyawan yang telah tersertifikasi manajemen risiko sesuai dengan jenjang jabatannya adalah 1.562 karyawan, dan 354 karyawan telah menyelesaikan program penyegaran sertifikasi manajemen risiko.

- Sertifikasi Treasury
  Sejak 2017, OJK mewajibkan bank untuk menerapkan sertifikasi *treasury* sesuai dengan ketentuan PBI 19/5/PBI 2017. Selama tahun 2020, 26 pegawai Global Market telah menyelesaikan sertifikasi *treasury*-nya.

- Sertifikasi WAPERD
  Sertifikasi WAPERD merupakan persyaratan wajib bagi karyawan penjualan pada area RBWM yang memasarkan produk reksa dana. Jumlah karyawan baru yang melakukan penjualan di RBWM yang telah menyelesaikan sertifikat WAPERD selama tahun 2020 adalah 349 karyawan.

- Sertifikasi AAJI
  Sertifikasi AAJI diperlukan bagi karyawan yang melakukan penjualan di area RBWM yang memasarkan produk *bancassurance*. Jumlah karyawan penjualan RBWM baru yang telah menyelesaikan sertifikat AAJI selama tahun 2020 adalah 362 karyawan

- Sertifikasi WPPE/lisensi obligasi untuk Ritel dan Treasury
  Jumlah karyawan yang telah menyelesaikan sertifikat WPPE selama tahun 2020 sebanyak 363 karyawan.

Program Sertifikasi	Fungsi Bisnis					Jumlah
	Commercial Banking	Global Banking & Markets	Retail Banking Wealth Management	HOST	Others LOB's	
Sertifikasi Manajemen Risiko						
SMR Level 1	110	59	34	207	40	763
SMR Level 2	147	53	171	102	92	565
SMR Level 3	24	11	44	18	87	184
SMR Level 4	4	2	5	4	29	44
SMR Level 5	1	-	1	1	3	6
SMR Refresher Programme	93	41	118	46	56	354
Sertifikasi Tresuri						
Treasuri Level Basic	-	19	-	-	-	19
Treasuri Level Intermediate	-	4	-	-	-	4
Treasuri Level Advance	-	3	-	-	-	3
Sertifikasi WAPERD	-	-	349	-	-	349
Sertifikasi AAJI	-	-	362	-	-	362
Sertifikasi WPPEP	-	11	352	-	-	363

Biaya Pelatihan dan Pengembangan 2020

Total biaya yang digunakan untuk pelatihan dan pengembangan selama tahun 2020 adalah Rp34.789 juta atau 2,04% dari total biaya karyawan tahun 2020.

Deskripsi	2020 (dalam jutaan)
Realisasi Biaya Pelatihan	34.789
Realisasi Biaya Tenaga Kerja	1.701.543
Rasio Biaya Pelatihan terhadap Biaya Tenaga Kerja	2,04%

TEKNOLOGI & OPERASIONAL

Strategi & Implementasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Bank terus memperbaharui perangkat keras, perangkat lunak, dan proses operasional untuk memenuhi kewajiban kepada regulator, mendukung pertumbuhan bisnis, menurunkan biaya operasional, meningkatkan pelayanan nasabah dan manajemen risiko menuju standar yang tertinggi.

Digitalisasi dan *Streamlining*

Bank terus memperbaharui proses operasional dengan otomasi, migrasi transaksi nasabah ke media elektronik, pembaruan platform *mobile banking*, dan penggunaan identitas digital serta tanda tangan digital. Inisiatif tersebut menghasilkan peningkatan skalabilitas kapasitas operasional, kecepatan, akurasi, dan pelayanan kepada nasabah serta penurunan risiko operasional.

Bank meluncurkan kapabilitas baru untuk proses *onboarding* nasabah ritel secara digital melalui gawai tablet seperti validasi data dan dokumen terlebih dahulu serta pengecekan secara otomatis untuk menghindari duplikasi data.

Bank meluncurkan program HSBC Fast Pay guna mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi *online* dengan meningkatkan limit transaksi *online*. Program ini menyebabkan peningkatan transaksi berbasis *mobile* sebesar 40% dalam satu bulan.

Platform *digital banking* HSBCNet untuk bisnis korporasi telah dikembangkan untuk memudahkan layanan kepada nasabah. Fitur yang ditambahkan adalah registrasi dari luar negeri, perbaikan terhadap perdagangan dan solusi rantai pasok secara elektronik, implementasi teknologi baru *blockchain* yang dapat mengeluarkan *Letter of Credit* secara digital, dan laporan likuiditas berbasis *Cloud* untuk mempercepat proses.

Kepatuhan

Bank secara berkelanjutan memastikan data, sistem, dan proses mematuhi peraturan yang terkini. Otomatisasi pada proses pelaporan ke regulator terus mendukung mekanisme pelaporan ke regulator secara *paperless*.

Manajemen Risiko

Bank secara berkelanjutan terus berinvestasi pada infrastruktur dan proses terkait manajemen risiko keuangan dan risiko non-keuangan, seperti dijelaskan di bawah ini:

Pencucian Uang dan Sanksi

Bank terus berinvestasi terkait kapabilitas untuk mendeteksi, menghalau, dan mencegah kejahatan keuangan. Bank memanfaatkan teknologi pemrosesan data dan kumpulan data untuk menyimpan data dari berbagai sumber yang terproses kemudian disempurnakan menggunakan parameter kualitas data yang spesifik. Hal ini akan mempermudah tim untuk secara proaktif mengidentifikasi, memahami, serta mencegah potensi risiko untuk terjadi sehingga melindungi nasabah dari potensi risiko.

Anti Penyuapan dan Korupsi

Bank meningkatkan tata kelola administrasi hadiah dan hiburan untuk mendukung tidak adanya toleransi terhadap tindak penyuapan dan korupsi.

Risiko Penipuan

Bank telah memperbaharui kapabilitas anti penipuan dengan kemampuan memantau potensi penipuan untuk kartu debit, *internet banking*, dan transaksi manual secara *real time*. Produk HSBC menggunakan VISA atau MASTERCARD sekarang lebih aman dengan diterapkannya autentikasi nasabah yang lebih maju.

Risiko Kredit

Menimbang kondisi industri perbankan selama 2020, Bank meningkatkan kemampuan pemantauan sistem manajemen risiko kredit melalui penerapan *scorecard* berdasarkan riwayat penggunaan fasilitas, penanganan eksposur, dan otorisasi melalui sistem. Ini dilakukan dalam upaya mempertahankan kualitas portofolio dan meminimalisir kerugian.

Keamanan Siber

HSBC Indonesia berkolaborasi dengan HSBC grup dalam pelaksanaan *Cyber Security Maturity Improvement Program* (CSMIP) untuk meningkatkan keamanan dari ancaman serangan siber. Hal ini mendorong Bank secara aktif untuk melakukan perkembangan sesuai dengan standar internasional sehingga memaksimalkan kapabilitas Bank untuk menangkal dan mengantisipasi serangan siber guna melindungi nasabah dan mencegah kebocoran data. Bank juga terus melakukan komunikasi berkelanjutan untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan terhadap potensi serangan siber melalui rangkaian sosialisasi.

Ketahanan Operasional
Bank telah sukses menguji sistem kritis dan rencana kelangsungan bisnis yang menunjukkan kemampuan Bank untuk menghadapi kejadian dan melayani bisnis dan nasabah pada keadaan darurat. Hal ini didukung dengan pelatihan kepada karyawan senior untuk menghadapi kejadian kritis.

Bank menghadapi kondisi pandemi dengan baik dengan mengimplementasikan kebijakan *Open Work* dan *Remote Working* lebih awal, di mana karyawan diizinkan bekerja secara fleksibel dari rumah dengan tetap mempertahankan kualitas dan standar layanan perbankan yang baik.

Bank secara berkelanjutan memperbaharui perangkat lunak dan perangkat keras untuk memastikan layanan, baik untuk internal dan eksternal, berjalan semestinya dan meminimalkan risiko terganggunya pelayanan kepada nasabah.

Sumber Daya Manusia
Bank memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi karyawan dengan secara aktif memberikan pelatihan internal maupun eksternal, serta memberikan kesempatan untuk menambah wawasan ke dunia internasional. Pelatihan yang diberikan menyeimbangkan antara *softskill* dan *hardskill* karyawan.

Bank menerapkan metodologi seperti *Agile and DevOps* untuk meraih pengembangan dan implementasi sistem yang lebih efisien.

Guna menjaga kesehatan karyawan dalam kondisi pandemi, pelaksanaan pelatihan dialihkan melalui media elektronik seperti HSBC University dan penggunaan konferensi video. Bank juga bekerja sama dengan sarana digital lain seperti *Degreed*, *LinkedIn Learning*, *Fit for Banking*, dan *Coursera* untuk memberikan kesempatan bagi karyawan melakukan pembelajaran secara *online*.

Rencana dan Strategi Tahun 2021

Pengembangan berkelanjutan terkait sarana TI
Bank terus meningkatkan kapasitas, sistem, dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Termasuk mempertimbangkan teknologi baru seperti *Cloud*, API, dan *BlockChain*.

Digitalisasi dan *Streamlining*
Bank terus mengupayakan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi. Pengembangan sistem dilakukan secara terintegrasi sehingga menghasilkan suatu proses yang berkesinambungan dan efisien sehingga memberikan pelayanan nasabah yang lebih baik.

Manajemen risiko
Penerapan manajemen risiko yang disiplin menjadi kunci perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh Bank. Bank senantiasa melakukan kontrol aktif dan menerapkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional.

Bank akan melakukan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas sistem dan mitigasi risiko. Di antaranya sistem untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan, sistem pelaporan kepada regulator yang terintegrasi, dan perangkat keamanan siber untuk menjaga integritas dan data nasabah.

Data *on-shoring*
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank tetap berkomitmen untuk menempatkan Pusat Data di Indonesia.

Ketahanan Operasional
Bank akan terus memperbaharui perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengoptimalkan tingkat layanan dan meningkatkan keamanan secara umum.

Sumber Daya Manusia
Bank tetap berkomitmen untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan budaya layanan di departemen TI dan Operasional. Hal ini akan diraih melalui pelatihan, program pembinaan, penghargaan dan pengakuan, dan menggunakan hubungan dengan grup HSBC untuk memberikan wawasan internasional dan berbagi pengetahuan.

Bank akan terus menerapkan metodologi seperti *Agile* dan *DevOps* untuk meraih pengembangan dan implementasi sistem yang lebih efisien.

MANAJEMEN RISIKO

EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

A. PENENTUAN MODEL DAN INTERAKSI PROFIL RISIKO

Risk Appetite (minat risiko) adalah artikulasi atas tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil Bank dalam rangka pencapaian tujuan strategisnya.

Risk Appetite memungkinkan manajemen senior dalam mengalokasikan modal, pendanaan dan likuiditas secara optimal untuk membiayai pertumbuhan yang strategis sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima, selagi memantau eksposur serta dampak biaya dalam pengelolaan risiko, yang dapat menyebabkan kinerja dan tingkat pengembalian yang tidak optimal kepada pemegang saham, termasuk sanksi ketidakpatuhan regulasi dan kerusakan reputasi apabila eksposur telah melebihi batas yang ditetapkan.

Bank telah menerapkan berbagai parameter pengukuran risiko baik dalam pengukuran tingkat risiko Bank maupun mekanisme lain yang terakomodasi dalam Laporan Minat Risiko (*Risk Appetite Statement Monitoring*). Minat risiko (*Risk Appetite*) adalah artikulasi atas tingkat dan jenis risiko yang dapat diambil Bank dalam rangka pencapaian tujuan strategisnya. *Risk Appetite* memungkinkan manajemen senior dalam mengalokasikan modal, pendanaan dan likuiditas secara optimal untuk membiayai pertumbuhan yang strategis sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima, selagi memantau eksposur serta dampak biaya dalam pengelolaan risiko, yang dapat menyebabkan kinerja dan tingkat pengembalian yang tidak optimal kepada pemegang saham, termasuk sanksi ketidakpatuhan regulasi dan kerusakan reputasi apabila eksposur telah melebihi batas yang ditetapkan.

Minat Risiko (*Risk Appetite Statement*) dikaji secara berkala minimum satu tahun sekali dan disetujui oleh Direksi dan juga oleh Dewan Komisaris. Pengawasan minat risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Dewan Komisaris. Dengan demikian, kontrol dan upaya mitigasi telah menjadi bagian dari proses internal Bank untuk menjaga profil risiko dalam posisi yang aman. *Risk Appetite Framework* (Kerangka Kerja Minat Risiko) dikaji secara berkala untuk menetapkan pendekatan yang konsisten dalam mendefinisikan, mengukur dan mengelola serta melaporkan *risk appetite* (minat risiko) dan *risk tolerance* (toleransi risiko) dan juga menguraikan peran dan tanggung jawab di tiga Lini Pertahanan (3LOD).

B. STRUKTUR TATA KELOLA RISIKO

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam pengawasan manajemen risiko, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

(i) Komite Manajemen Risiko (RMC)

Proses manajemen risiko dievaluasi oleh Komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan manajemen risiko secara keseluruhan. Komite ini berfungsi sebagai badan pengendali atas keseluruhan manajemen risiko perusahaan dengan fokus pada kultur risiko, minat risiko *(risk appetite)*, profil risiko, dan keselarasan manajemen risiko dalam tujuan strategis Bank.

Komite diketuai oleh Direktur Manajemen Risiko dan beranggotakan Direksi, termasuk Direksi Kepatuhan serta pejabat eksekutif dengan keahlian di bidangnya masing-masing yaitu bidang Manajemen Risiko (SKMR) dan bidang Hukum. Komite ini memiliki tanggung jawab penuh atas penetapan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan serta memastikan seluruh risiko Bank telah dikelola dengan tepat.

Wewenang dan Tanggung Jawab RMC

- Untuk mempertimbangkan isu utama/tema umum terkait manajemen risiko yang diidentifikasi dari berbagai laporan risiko perusahaan.
- Untuk melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris meliputi kebijakan dan strategi manajemen risiko, penyempurnaan implementasi manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi, serta keputusan bisnis.

- Mengkaji dan memutuskan hal untuk eskalasi.
- Mempromosikan dan menurunkan budaya yang mendukung manajemen risiko dan pengendalian, dan juga memastikan praktik manajemen risiko bank mendukung hasil berperilaku.

(ii) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif sesuai dengan peraturan perundangan POJK No. 17/POJK. 03/2014, Entitas Utama yang dalam hal ini adalah PT Bank HSBC Indonesia wajib membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab atas pemantauan manajemen risiko dan implementasi atas kerangka kerja manajemen risiko di entitas yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Risiko dan beranggotakan perwakilan Direksi yang ditunjuk sebagai anggota dari Entitas Utama, yaitu Direktur Kepatuhan dan Direktur Keuangan serta pejabat eksekutif yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko (SKMR). Termasuk di dalam keanggotaan adalah Direksi atau perwakilan yang ditunjuk dari entitas yang termasuk dalam Konglomerasi Keuangan (pada saat ini; PT HSBC Sekuritas Indonesia).

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi:

Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

(iii) Komite Pemantau Risiko (ROC)

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi Bank dalam menjalankan usahanya. Komite Pemantau Risiko juga berperan dalam mengawasi perkembangan, implementasi kebijakan manajemen risiko, dan memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang harus diimplementasikan oleh Bank. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan hanya dapat bertindak sebagai Ketua dari komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite terdiri dari Komisaris Independen serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.

Wewenang dan Tanggung Jawab ROC

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris dalam hal:
  1. Perihal yang terkait Risiko
  2. *Risk Appetite*
  3. *Stress Testing*
  4. Kerangka Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern
  5. Direktur Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko
  6. Internal Audit
  7. Eksternal Audit
  8. Laporan Tahunan

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Lainnya, antara lain

1. *Review* Tahunan Tata Tertib dan Efektivitas Komite serta laporan kepada Dewan Komisaris.

   Komite Pemantau Risiko melakukan review atas tata tertib ini setiap tahun dan efektivitasnya dan menyampaikan rekomendasi atas perubahan yang diperlukan kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melaporkan kepada Dewan Komisaris bagaimana Komite Pemantau Risiko melaksanakan tanggung jawabnya dan akan membuat rekomendasi atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan.

2. Laporan kepada Dewan Komisaris
   Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal yang diatur dalam tata tertib ini dan akan memberikan pengawasan tambahan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan efektivitas fungsi manajemen risiko.

3. Tanggung jawab yang tumpang tindih
   Jika terdapat tanggung jawab yang dirasakan tumpang tindih antara Komite Pemantau risiko dan komite lain dari Dewan Komisaris, maka masing-masing Ketua Komite memiliki keleluasaan untuk menyetujui komite mana yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban apa pun. Kewajiban berdasarkan Tata Tertib komite mana pun akan dianggap oleh Dewan Komisaris telah dipenuhi, sepanjang ditangani oleh komite lain tersebut.

C. KOMUNIKASI DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Gambaran Umum Kebijakan Manajemen Risiko HSBC Indonesia

Kebijakan dan sistem manajemen risiko dikaji secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan, serta memenuhi ketentuan regulator. Bank melalui berbagai pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan budaya pengendalian risiko. Bank juga melibatkan seluruh karyawan sehingga mereka memahami dan berperan serta sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif melalui Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi memastikan pengukuran risiko yang kemudian dilaporkan, dikendalikan dan dimitigasi sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.

Kerangka manajemen risiko Bank dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang ada di dalam operasional Bank, untuk menentukan batasan dan pengendalian risiko yang sesuai serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan.

Budaya Risiko

Bank mendefinisikan budaya risikonya sebagai sikap bersama, nilai-nilai dan norma yang membentuk perilaku organisasi. Pendekatan dalam pengelolaan budaya risiko dibangun atas serangkaian prinsip perubahan budaya dan perilaku. Namun demikian, budaya tidaklah statis. Saat tantangan dan kesempatan baru muncul, budaya harus beradaptasi untuk membantu bank mencapai hasil strategis.

Bank menganggap budaya risiko sebagai cara melihat bagaimana budaya mendukung kemampuannya mengelola risiko. Budaya yang efektif dalam mengelola risiko dan mengarahkan pada hasil perilaku yang wajar adalah budaya yang mendukung dan mendorong perilaku Pertimbangan yang Baik, Berbicara terus terang, dan Akuntabilitas (*Good Judgement, Speaking Up and Accountability)*

Tiga Lini Pertahanan

Untuk memperkuat budaya risiko ("*Risk Culture*"), bank memperkenalkan konsep kerangka manajemen risiko operasional dengan konsep '*Three Lines of Defence*' pada tahun 2013, dengan fokus utama pada perkuatan lini pertama (bisnis dan fungsi) dengan kesadaran atas tanggung jawab mereka untuk melakukan manajemen risiko yang memadai.

Model tiga lini pertahanan yang meliputi unit Bisnis dan Fungsi sebagai Lini Pertahanan Pertama, unit-unit *Risk Stewards* (yang membuat kebijakan manajemen risiko dan melakukan fungsi pengawasan atas risiko tertentu termasuk Fungsi Risiko Operasional dan Risiko Ketahanan) sebagai Lini Pertahanan Kedua, dan Fungsi Audit Internal sebagai Lini Pertahanan Ketiga. Seluruh unit yang ada di setiap lini bersinergi dalam upaya-upaya penerapan manajemen risiko, termasuk di dalamnya memastikan pemenuhan aspek kepatuhan yang ada di unit kerja terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Lini Pertahanan Pertama adalah unit-unit bisnis dan fungsi yang memiliki tanggung jawab menjadi pemilik risiko dan kontrol, serta menerapkan manajemen risiko yang tepat dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran Lini Pertahanan Pertama tentang peran penting mereka dalam mengelola risiko operasional saat menjalankan aktivitas sehari-hari Bank.

Lini Pertahanan Kedua adalah semua unit fungsi yang memiliki kebijakan terkait manajemen risiko dan melakukan pengawasan menyeluruh atas risiko tertentu, contohnya adalah unit *Operational and Resilience Risk, Financial Crime Compliance, Legal, Regulatory Compliance*, dan unit lainnya seperti *Wholesale and Market Risk, Retail Credit Risk.* Lini Pertahanan Kedua juga dapat terdiri dari unit yang melaksanakan fungsi sehari-hari, namun memiliki cakupan pengelolaan risiko tertentu, contohnya

adalah *Human Resources* (untuk risiko Sumber Daya Manusia). Lini Pertahanan Kedua berfungsi untuk memberikan masukan dan mempertanyakan kepada unit Lini Pertahanan Pertama dalam pengelolaan risiko yang mereka lakukan, serta memastikan agar pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan kontrol masing-masing.

Lini Pertahanan Ketiga adalah unit SKAI (Satuan Kerja Audit Internal), di mana unit SKAI memberikan keyakinan secara independen kepada manajemen bahwa Lini Pertahanan Pertama dan Kedua telah melakukan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Bank juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merupakan suatu unit yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking units) dan satuan kerja lain yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

SKMR mengawasi Manajemen Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Stratejik, Kepatuhan, Hukum, Reputasi, dan Intra-Group.

Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank, SKMR melakukan kajian dan analisa risiko untuk mendukung strategi-strategi bisnis. Fungsi utama unit ini adalah untuk menjalankan pemantauan risiko dan menyampaikan hasilnya kepada Komite Manajemen Risiko dan melakukan penyusunan profil risiko Bank beserta rekomendasi terkait kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan SKMR melapor kepada Direktur Risiko.

Sosialisasi Manajemen Risiko

Bank senantiasa melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran akan risiko kepada seluruh unit kerja dan kantor cabang. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara menyeluruh kepada karyawan dalam bentuk pelatihan *e-learning* maupun pelatihan di ruang kelas yang juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajemen risiko. Termasuk di dalam pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi manajemen risiko yaitu Program Sertifikasi Manajemen Risiko serta Program Pemeliharaan/Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dan pelatihan *e-learning* wajib terkait dengan kesadaran risiko seperti: Risiko Non-Finansial, Risiko Keamanan *Cyber*, Risiko Kejahatan Finansial termasuk *Anti Money Laundering & Sanction, Anti Bribery & Corruption*, serta Risiko Kepatuhan dan Reputasi.

D. RUANG LINGKUP DAN FITUR UTAMA SISTEM PENGUKURAN RISIKO.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk: secara proaktif mencakup seluruh aktivitas fungsional, menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber yang tersedia, dan menganalisa probabilitas timbulnya risiko dan konsekuensinya.

Pengukuran Risiko

Pelaksanaan pengukuran risiko ditujukan untuk mengukur profil risiko Bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Hal-hal yang diukur meliputi sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor risiko secara individual, dan eksposur risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan korelasi risiko.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan limit-limit risiko baik pada saat ditetapkan maupun dalam pemantauan, telah mempertimbangkan pengalaman kerugian, kemampuan modal menyerap kerugian/eksposur, dan untuk memastikan agar posisi yang telah melampaui limit yang telah ditetapkan segera mendapatkan perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi.

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Bank memiliki sistem informasi manajemen risiko untuk memastikan:

- Eksposur risiko diukur secara tepat.
- Kepatuhan implementasi manajemen risiko terhadap kebijakan terkait.
- Tersedianya realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset

Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Pelaksanaan sistem pengendalian intern harus sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

E. PROSES PELAPORAN INFORMASI RISIKO

Informasi risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi berupa *Enterprise Risk Report* yang terdiri dari:

- Laporan *Risk Appetite Statement*,
- Peta Risiko (*Risk Map*) dan
- Risiko-Risiko *Top* dan *Emerging*

yang disampaikan setiap bulan kepada Komite Manajemen Risiko dan triwulanan kepada Komite Pemantau Risiko.

F. *STRESS TESTING*

Bank secara teratur melakukan proses *stress test* untuk menilai ketahanan neraca dan kecukupan modal Bank, serta untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang bagaimana elemen penting dan portofolio Bank selama krisis. Bank menggunakan hasilnya untuk mengkalibrasi *risk appetite* dan untuk meninjau kekuatan strategi dan keuangan Bank, membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Analisis *stress test* membantu manajemen dalam memahami sifat dan kerentanan yang ada di mana Bank terekspos. Hasil *stress test* juga mendorong adanya rencana pemulihan dan resolusi untuk meningkatkan stabilitas keuangan.

G. STRATEGI DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Strategi dan proses tertentu untuk mengelola, melakukan lindung nilai dan memitigasi risiko yang timbul dari model bisnis Bank digunakan secara strategis dalam pengelolaan portfolio yang dikelola oleh *Global Banking* dan *Commercial Banking*, namun hanya *Global Markets* yang memerlukan penggunaan mitigasi risiko kredit dan pasar di tingkat portofolio. Batasan risiko dan penggunaan batasan risiko, *maturity profiles* dan kualitas risiko dipantau dan dikelola secara aktif oleh *Global Markets*. Proses ini adalah kunci untuk menerapkan selera risiko untuk kelompok nasabah yang lebih besar dan lebih kompleks. Meskipun bentuk utama manajemen risiko tetap pada titik awal eksposur, melalui proses pengambilan keputusan pemberian pinjaman, aktivitas lindung nilai dilakukan dalam parameter kredit yang telah disepakati, dan tunduk pada batasan risiko pasar dan struktur kelola yang kuat.

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan Delapan Jenis Risiko Utama

Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi delapan risiko utama yang dihadapi oleh Bank, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

Berikut ini adalah delapan jenis risiko yang dihadapi Bank beserta cara pengawasan dan pengelolannya:

(i) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul dari kegagalan peminjam atau pihak rekanan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam mengelola risiko kredit, Bank menerapkan kebijakan dan pedoman untuk segmen bisnis masing-masing, baik untuk ritel maupun korporasi.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko kredit dilakukan oleh seluruh unit yang terkait dengan proses kredit, melalui berbagai tingkatan dari tingkat Bisnis, Operasional, sampai dengan tingkat Manajemen Senior di antaranya melalui forum Komite Manajemen Risiko dan Komite Kredit.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Identifikasi risiko kredit dilakukan baik oleh pihak Bisnis, *Wholesale Credit Approver* dan *Wholesale Credit Risk*. Bank telah membuat "*Operating Framework*", untuk *Wholesale Credit Risk*, dimana modus operandi lebih disesuaikan dengan POJK and SEOJK yang mengatur tatanan manajemen risiko kredit, yaitu untuk melakukan fungsi identifikasi risiko, fungsi pengukuran risiko, fungsi *monitoring* dan fungsi pengelolaan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Kredit

a. Pengawasan

Pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh portofolio kredit dijalankan secara rutin, termasuk di antaranya rapat bulanan Komite Manajemen Risiko yang dipimpin langsung oleh Direktur Risiko, serta komite-komite dewan lainnya yang mendukung proses manajemen risiko di Bank.

Sebagai proses manajemen risiko berkelanjutan maka Bank juga memiliki forum yang bernama *Portfolio Oversight Council (POC)* yang akan membantu Bank dalam mengawasi portofolio kredit pada segmen *"Wholesale Banking"* yang dapat digunakan oleh Bank sebagai acuan untuk menentukan kebijakan mitigasi risiko kredit yang menyeluruh.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Batas

Kebijakan kredit disusun oleh unit yang independen untuk memastikan kebijakan yang ada mendukung proses kredit yang berjalan di Bank. Secara khusus, masing-masing unit kerja juga memiliki peranan untuk memastikan ketersediaan prosedur untuk meyakinkan standardisasi proses kredit serta tersedianya suatu prosedur teknis untuk mempermudah proses kerja masing-masing unit yang terlibat dalam proses kredit.

Kebijakan kredit yang merupakan pedoman yang digunakan dalam proses kredit disusun oleh unit kebijakan kredit, di mana kebijakan ini selalu dikaji ulang dan diperbarui secara berkala.

Salah satu kebijakan kredit yang diterapkan dan wajib dilakukan oleh unit bisnis adalah terkait dengan proses kajian tahunan. Unit bisnis diharuskan untuk melakukan kajian tahunan atas debitur secara disiplin minimal satu tahun sekali. Dengan adanya kajian tahunan tersebut, unit bisnis dapat memantau dan memastikan bahwa usaha debitur masih berjalan dengan baik. Selain itu, jika terdapat perubahan kondisi usaha dapat dilakukan upaya antisipasi untuk memitigasi memburuknya kualitas kredit.

Selain penetapan kebijakan dan prosedur, Bank juga menerapkan batas yang terkait dalam proses kredit sesuai dengan *risk appetite* Bank. Batas yang ditetapkan antara lain terkait dengan batas kewenangan pejabat pemutus kredit, batas pemberian kredit kepada debitur (sesuai BMPK), batas industri, dan sebagainya.

c. Kecukupan Proses Identifikasi Risiko Kredit

Debitur yang berpotensi bermasalah dapat diidentifikasi lebih dini oleh Bank ketika terdapat peringatan dini adanya penurunan pada tingkat kesehatan keuangan dari debitur. Peringatan dini dapat diidentifikasi melalui sistem Bank, perilaku debitur, aktivitas bisnis, dan interaksi antara debitur dengan pihak Bank, dan informasi dari eksternal (seperti *rating agency*, berita dan media).

Unit bisnis memiliki tanggung jawab utama untuk dapat mengidentifikasi debitur yang berisiko tinggi secara tepat dan menempatkan debitur tersebut sebagai *watchlist* sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku. Pemutus kredit dan unit *Wholesale Credit Risk* memiliki peran yang krusial dalam melakukan *review* dan mempertanyakan proses *watchlist* dan dapat memberikan saran untuk memasukkan (atau mengeluarkan) debitur dari daftar *watchlist* atau melakukan penilaian ulang mengenai *watchlist status* agar sesuai dengan perubahan dari profil risiko. Hal ini untuk memastikan debitur *watchlist* yang membutuhkan tindakan perbaikan, penyesuaian *rating* kredit, dan/atau penurunan kolektibilitas menjadi dalam perhatian khusus dapat dilakukan dengan tepat, pada status *watchlist* yang sesuai, dan kapanpun dirasa tepat untuk debitur tersebut dialihkan ke *Loan Management Unit* untuk mendapatkan tindakan penyelamatan.

Watchlist adalah perangkat manajemen risiko yang mengidentifikasi hal untuk perhatian manajemen, hubungan debitur dengan berbagai tingkat keparahan untuk ditinjau dan merupakan tambahan terhadap proses normal dalam hal persetujuan kredit.

d. Kecukupan Proses Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pengukuran risiko dilakukan secara berkala melalui penyusunan rencana tahunan Bank yang dimulai dengan penentuan "*Risk Appetite Statement*" sebagai koridor minat risiko dan toleransi risiko yang dapat diterima oleh Bank pada tahun berjalan. Proposal atas rancangan "*Risk Appetite Statement*" akan diajukan untuk memperoleh rekomendasi Komite Manajemen Risiko setiap tahunnya sebelum diajukan untuk persetujuan Dewan Komisaris. Beberapa indikator penting seperti rasio-rasio yang terkait dengan pendapatan, profitabilitas, permodalan, kualitas portofolio, likuiditas, NPL dan beberapa kategori risiko Bank lainnya dipantau setiap bulan dalam pertemuan Komite Manajemen Risiko.

Kinerja risiko diukur dan dievaluasi setiap bulan dengan membandingkan antara kondisi aktual risiko dengan *Risk Appetite Statement*, yang memungkinkan dilakukannya pendeteksian yang lebih dini dan untuk menentukan langkah mitigasi yang diperlukan. Langkah pencegahan dan korektif dibahas dalam komite termasuk kemajuan yang telah dicapai selama ini.

Bank telah memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan *appetite*, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan.

Salah satu aspek yang dikaji secara berkala dan disetujui oleh Direksi adalah penentuan sektor/*industry appetite*

yang memberikan arahan dalam pengembangan portofolio kredit.

Secara berkala, *stress test* terhadap portofolio dilakukan untuk merespons dampak faktor eksternal yang sedang terjadi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi portofolio kredit. Hasil kajian ini dipresentasikan ke bagian bisnis untuk dilakukan langkah-langkah antisipatif.

Bank telah melakukan *stress testing* untuk mengukur kondisi keuangan dan kemampuan manajemen Bank untuk terus beroperasi secara efektif pada kondisi perekonomian ekstrem.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit
Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah terlibat dalam kegiatan bisnis yang sama atau serupa atau melakukan bisnis di wilayah geografis yang sama, atau ketika nasabah memiliki karakteristik serupa yang berdampak pada kemampuan kolektif mereka untuk memenuhi kewajiban kontrak serupa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi atau kondisi lainnya.

Kewenangan persetujuan kredit untuk nasabah ditentukan berdasarkan jumlah eksposur per grup. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya konsentrasi kredit yang melampaui batas pada satu grup debitur dapat dihindari. Bank juga mengacu dan memenuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan OJK.

Selain itu pada tahun ini Bank telah memiliki limit industry Cap untuk industry-industri yang termasuk dalam industri yang berisiko tinggi.

Kebijakan, Prosedur, dan Proses untuk Menilai dan Mengelola agunan
Saat ini Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengelolaan dan penilaian jaminan. Dimana Bank akan terus memperbaharui kebijakan terkait sesuai dengan ketentuan dari POJK. Selain itu dalam setiap pengajuan kredit maka Bank telah melakukan penilaian terhadap jaminan yang diterima oleh Bank untuk memastikan jaminan yang diterima telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.

Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit
HSBC mengukur risiko kredit dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Surat Edaran OJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang 'Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar' yang mensyaratkan bahwa seluruh bank harus melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar. Untuk keperluan *internal*, Bank menggunakan pengukuran berdasarkan *internal rating* yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan kredit.

Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR risiko kredit hanya digunakan untuk jenis tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Bank, dan, Korporasi.

Tagihan yang Jatuh Tempo dan Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai/*Impairment*
Tagihan yang jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai/ *impairment* adalah asset keuangan yang memiliki nilai signifikan secara individual dan terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai individual terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Pembentukan CKPN Individual dan Kolektif
Bank sudah menerapkan pembentukan CKPN individual dan kolektif sesuai dengan PSAK 71, Bank mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD *(Probability of Default*), LGD *(Loss Given Default)* dan EAD *(Exposure at Default)* yang digunakan sebagain komponen dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian/CKPN.

PSAK 71 mensyaratkan Bank untuk mengelompokkan Aset Keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage* 1, *stage* 2 dan *stage* 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (*stage* 1) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit (SICR) yang signifikan (*stage* 2) serta aset keuangan yang mengalami kredit memburuk dan gagal bayar dengan disertai riwayat keterlambatan pembayaran (*stage* 3).

Dalam menghitung CKPN, Bank menerapkan beberapa skenario makro ekonomik yang ditentukan dengan melakukan proyeksi beberapa variabel makroekonomik. Selain itu, Bank juga menentukan pembobotan untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro ekonomik tersebut. Berbagai variabel makroekonomik (MEV) digunakan dalam permodelan

PSAK 71 tergantung pada hasil analisis statistik dan kesesuaian MEV dengan data histori pembuatan model *impairment*. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan proyeksi variabel makro ekonomik tersebut di *review* oleh Bank secara berkala.

Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada *internal capital* untuk *counterparty credit exposures* dan untuk eksposur CCP;
Bank berpartisipasi dalam transaksi yang membuat Bank menghadapi risiko kredit dengan pihak lawan (*counterparty risk)*. Risiko kredit dengan pihak lawan adalah risiko kerugian finansial jika pihak lawan transaksi gagal bayar sebelum menyelesaikan transaksi dengan memuaskan. Ini muncul terutama dari derivatif *over-the-counter* ('OTC') dan transaksi pembiayaan sekuritas dan dihitung dalam *trading book* dan *non-trading book*. Nilai transaksi bervariasi dengan mengacu pada faktor pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga aset. *Counterparty risk* dari transaksi derivatif diperhitungkan saat melaporkan nilai wajar posisi derivatif. Penyesuaian nilai wajar ini dikenal sebagai penyesuaian penilaian kredit ('CVA')

Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait *counterparty risk*, termasuk eksposur *towards* CCP
Bank mengelola eksposur pihak lawan pada kontrak derivatif OTC Bank dengan menggunakan perjanjian jaminan dengan pihak lawan. Saat ini, Bank tidak secara aktif mengelola eksposur *counterparty* derivatif OTC Bank di pasar kredit, meskipun Bank dapat mengelola eksposur individu dalam keadaan tertentu. Bank menerapkan batasan kebijakan yang ketat pada jenis agunan dan sebagai konsekuensinya, jenis agunan yang diterima dan dijaminkan, menurut nilainya, sangat likuid dan berkualitas kuat, sebagian besar berupa uang tunai. Jika jenis jaminan harus disetujui di luar kebijakan jaminan, diperlukan persetujuan dari komite perwakilan senior dari Pasar, Hukum, dan Risiko.

Kebijakan terkait eksposur *wrong way risk*
Wrong way risk adalah korelasi merugikan antara probabilitas gagal bayar pihak lawan dan nilai *mark-to-market* dari transaksi yang mendasarinya. Risikonya bisa bersifat umum, mungkin terkait dengan mata uang negara penerbit, atau khusus untuk transaksi yang bersangkutan. Ketika ada *wrong way risk* yang signifikan, pendekatan khusus perdagangan diterapkan untuk mencerminkan risiko ini dalam penilaian.

(ii) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

Risiko pasar ini dikelola oleh unit kerja yang independen dari bisnis dan merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risko pada Bank.

Dalam rangka proses penerapan Manajemen Risiko, Bank menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advanced* (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan perbankan pada masa mendatang.

Penerapan internal model telah memperhatikan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya. Untuk kepentingan perhitungan Risiko Pasar yang terkait dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Bank mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bank mengukur risiko potensi kerugian yang dapat dihasilkan dari kemungkinan terjadinya pergerakan yang kurang menguntungkan dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang dengan menggunakan metode *Value at Risk* (VaR). Bank juga melakukan *stress test* risiko pasar, pengendalian dan pemantauan utilisasi batas risiko pasar secara harian dan posisi devisa neto setiap posisi akhir hari sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Dalam mengelola risiko pasar, Bank membaginya ke dalam risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko tingkat bunga timbul dari memegang aset dan kewajiban - aktual atau nosional - dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda atau tanggal penetapan harga kembali, menciptakan eksposur atas perubahan tingkat suku bunga. Posisi pinjaman berlebihan – di mana penetapan harga aset lebih lambat dari kewajiban – akan menguntungkan jika suku bunga turun dan rugi jika suku bunga naik. Posisi yang dipinjam berlebihan – di mana kemampuan menentukan harga kembali dari aset - akan menguntungkan jika suku bunga naik dan rugi jika suku bunga turun. Sementara, nilai tukar mata uang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang memengaruhi posisi terbuka Bank.

Bank memisahkan eksposur risiko pasar antara portofolio yang diperdagangkan (*trading*) dan yang tidak diperdagangkan *(accrual*). Portofolio yang diperdagangkan meliputi posisi yang timbul dari pembentukan pasar, *position-taking*, dan lainnya yang ditetapkan pada nilai pasar. Portofolio yang tidak diperdagangkan meliputi posisi yang timbul terutama dari manajemen tingkat suku bunga atas aktiva berbunga dan kewajiban berbunga, dan aktiva yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Bank melakukan pengawasan maksimum risiko pasar sesuai batas yang telah disetujui secara harian termasuk devisa neto monitor posisi akhir hari sesuai dengan peraturan BI. Bank juga melakukan pengelolaan dengan melihat net risiko dari aktiva dan pasiva sebagai sisa risiko suku bunga. Bank menyetujui maksimum limit untuk risiko bunga dalam bentuk PVBP (*Present Value Basis Point*) untuk masing-masing buku: *trading, banking* dan total keseluruhan posisi bank.

Bank mengukur potensi kerugian dengan menggunakan sensitivitas portfolio terhadap perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga; menggunakan *Value at Risk* ('VaR') dan *stress testing*, yang memberikan gambaran secara detail atas potensi keuntungan/kerugian dan juga adanya risiko bila terjadi kondisi pasar yang tidak normal dalam periode waktu tertentu.

Limit Risiko Pasar dikelola dan dikontrol melalui penetapan *market risk limits* yang disetujui oleh Direksi atas rekomendasi Komite Manajemen Risiko.

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Bank tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, atau memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan biaya yang tinggi, dimana risiko timbul dari ketidakselarasan waktu dari arus kas. Dalam mengelola likuiditasnya, selain menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) primer dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Bank juga melakukan pengawasan secara harian terhadap laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Bank secara berkala juga melakukan *stress testing* terhadap kondisi likuiditas dengan menggunakan asumsi skenario yang mungkin terjadi pada sistem perbankan Indonesia.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas bertujuan untuk memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi normal maupun untuk tujuan antisipasi kondisi stres. Kerangka kerja likuiditas dibentuk sedemikian rupa agar dapat beradaptasi terhadap perubahan model bisnis, kondisi pasar dan regulasi. Bank mempertahankan berbagai sumber dana yang tersedia, terdiversifikasi dari simpanan nasabah ritel inti dan simpanan nasabah korporasi serta memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian atas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), di mana di dalamnya mencakup pengawasan harian atas jumlah aset likuid Bank dan arus kas keluar maupun masuk harian Bank.
2. Bank membentuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain dengan menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
3. Menetapkan kebijakan batas *Cash Holding* pada kantor-kantor cabang Bank.
4. Melaksanakan fungsi ALCO untuk mengatur tingkat bunga dalam meningkatkan/mengurangi sumber dana tertentu terkait dengan ketidaksesuaian jatuh tempo, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menetapkan batas toleransi atas risiko likuiditas dan pendanaan yang diatur dalam *Risk Appetite Statement* (RAS).
5. Menerapkan Rencana Pendanaan Kontinjensi (CFP) beserta mekanismenya, termasuk membentuk tim penanggulangan krisis guna mengantisipasi krisis likuiditas dan secara singkat menguraikan tanggung jawab dan tindakan yang dapat diterapkan dalam skenario stres likuiditas dan menetapkan tahapan-tahapan spesifik selama skenario stres tersebut berlangsung.

Dalam proses pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menggunakan parameter pengukuran yang sesuai dengan standar Basel III, dengan rambu-rambu yang telah dijalankan selama ini menjadikan posisi likuiditas Bank selama ini selalu terjaga dalam posisi yang aman.

(iv) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang dapat terjadi dari proses internal yang tidak memadai dan/atau tidak efektif, kesalahan manusia yang disengaja atau kelalaian, kegagalan sistem teknologi informasi dan faktor-faktor eksternal seperti penipuan dan tindakan ilegal lainnya.

Bank memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berkoordinasi dengan unit terkait diluar SKMR untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko

Operasional yang mengacu pada standar penerapan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Unit-unit terkait tersebut merupakan *Subject Matter Expert* (SME) untuk masing-masing jenis risiko yang harus di analisa dalam memastikan penerapan Manajemen Risiko Operasional. SKMR juga memberikan masukan dalam analisa risiko operasional atas aktivitas dan produk baru.

Bank menetapkan *Risk Appetite* sebagai acuan dan menggunakan sistem komprehensif yang terdiri dari *Risk Control Assessment,* Indikator Risiko Utama, *Loss Event Database and Management* dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko operasional.

Pelaksanaan pengelolaan risiko akan dibantu dengan fungsi tambahan yang dikembangkan oleh manajemen, yaitu fungsi CCO (*Chief Control Officer*) yang diharapkan dapat melakukan pemantauan melekat atas pengelolaan risiko di unit masing-masing, serta menjembatani antara Lini Pertahanan Pertama dengan Lini Pertahanan Kedua. Manajemen diharapkan akan lebih menyadari tanggung jawabnya dalam mengelola risiko dengan adanya konsep ini.

Beberapa metode atau alat bantu untuk manajemen risiko operasional diperkenalkan kepada masing-masing unit untuk melakukan pengelolaan risiko di area masing-masing.

Metode yang telah diperkenalkan mencakup penilaian sendiri atas risiko dan kontrol, pelaksanaan pemeriksaan pengendalian berbasis risiko yang dilakukan oleh CCO, implementasi *Key Indicator* untuk memperbaiki proses pemantauan kontrol, identifikasi risiko atau permasalahan yang ada diikuti dengan adanya pemantauan atas tindak perbaikan yang telah disepakati, dan manajemen atas insiden risiko operasional yang terjadi. Diharapkan Bank akan terus mengembangkan konsep tersebut agar dapat meningkatkan manajemen risiko secara berkelanjutan.

(v) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Untuk menangani risiko ini divisi Legal Bank, antara lain, senantiasa melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru, melakukan kaji ulang terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain.

Organisasi manajemen risiko hukum yang dilakukan oleh Bank adalah dengan memiliki satuan kerja, yaitu divisi Legal, yang berfungsi sebagai *legal watch*. Secara garis besar, divisi Legal Bank memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan advis dan opini hukum kepada Direksi dan/atau unit Bank lainnya atas hal-hal yang menyangkut bisnis, strategi operasi, inisiatif dan permasalahan hukum.
- Memberikan advis dan opini hukum kepada anggota senior manajemen dalam membuat sistem dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum.

Divisi Legal memiliki beberapa mekanisme dalam pengendalian risiko hukum, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

1. Memiliki kebijakan hukum tertulis.
2. Melaksanakan analisis aspek hukum terhadap produk, aktivitas bisnis baru atau yang sedang berjalan, jika diperlukan.
3. Menilai dampak perubahan ketentuan dan peraturan terhadap risiko hukum.
4. Kajian atas dokumen standar akad, kontrak dan dokumen hukum Bank lainnya dengan pihak lain dalam hal efektivitas mitigasi risiko hukum yang mungkin ditimbulkan oleh dokumen-dokumen tersebut.
5. Memantau perkara pengadilan yang sedang berlangsung.
6. Memiliki panel *external legal counsel* untuk hukum korporasi dan litigasi yang membantu Bank untuk pengendalian risiko hukum. Saat ini terdapat 16 *external legal counsel* dalam panel Bank.

(vi) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang terkait dengan persepsi negatif dari kebijakan, prosedur, atau masalah Bank yang dapat merusak kepercayaan para pemangku kepentingan Bank.

Risiko reputasi dikoordinasikan oleh Departemen Komunikasi sebagai penjaga risiko reputasi. Untuk mengelola risiko ini baik secara internal maupun eksternal, departemen Komunikasi bekerja sama dengan bagian Penanganan Keluhan baik di sisi nasabah korporat maupun ritel, serta bagian HR.

Faktor pembentuk persepsi tersebut yang senantiasa dimonitor mencakup:
a. Pengaruh reputasi pemilik Bank dan perusahaan terkait.
b. Pelanggaran etika bisnis.
c. Kompleksitas produk dan kerja sama bank.
d. Frekuensi, intesitas, dan skala eksposur pemberitaan negatif Bank.
e. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah

Bank dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dari Risiko Reputasi antara lain secara eksternal: pemberitaan media massa, situs *web* Bank, hasil analisis jejaring sosial; pengaduan nasabah, dan secara internal melalui program *Exchange* dan *Snapshot Survey*.

Satuan kerja yang berkoordinasi dalam mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi adalah tim Komunikasi, Penanganan Keluhan, *Marketing* dan HR. Seluruh unit ini berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, yang meliputi: Masyarakat, nasabah, kreditur, asosiasi, dan karyawan.

Tim Komunikasi memiliki kewenangan dalam memberikan opini terkait fitur, program maupun produk yang akan diluncurkan, serta keluhan nasabah. Tim Komunikasi juga bekerja sama dengan Marketing untuk memantau percakapan di media sosial, serta dengan pihak eksternal untuk memantau setiap pemberitaan di media setiap hari. Hasilnya akan menjadi bahan tinjau ulang strategi komunikasi secara periodik untuk menciptakan persepsi positif di masyarakat.

Mekanisme pelaporan keluhan yang juga mengandung risiko reputasi, dicatat oleh departemen Penanganan Keluhan melalui sistem CMS yang secara otomatis mengeskalasi kepada Direksi (*Senior Management*) untuk pantauan proses penanganan. Keluhan yang tercatat, akan dibahas rutin setiap bulan di forum rapat *Complaint Handling*.

Secara internal, bagian HR senantiasa melakukan sosialisasi ke seluruh karyawan untuk memastikan pemahaman manajemen risiko termasuk Etika Bekerja (*Conduct*) yang dapat menyebabkan risiko reputasi. Selain itu, untuk memantau kepedulian karyawan terhadap risiko reputasi, HR juga mengadakan *Snapshot Survey* dua kali setahun serta program Exchange yang dilakukan secara berkala di tiap lini bisnis.

Kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan *stakeholders* lainnya dibuat oleh masing-masing unit kerja terkait. Khusus untuk unit kerja Komunikasi sudah terdapat kebijakan dan prosedur tertulis terkait standar operasional komunikasi yang tertuang dalam SE No. 054/SK/DIR/VII/2017 perihal Panduan Instruksi Komunikasi.

Dalam menangani krisis, Bank memiliki protokol khusus pengelolaan reputasi sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan Risiko Reputasi di saat krisis. Penilaian atas faktor ini mencakup (a) *Crisis Management Structure*, dan (b) *Crisis Management Procedures/Manual*. Hal ini tertuang melalui SE No. 054/SK/DIR/VII/2017 perihal Panduan Instruksi Komunikasi.

Panduan tersebut juga mencakup mekanisme *early warning system* untuk memberikan peringatan kepada manajemen sehingga dapat dilakukan tanggapan dan mitigasi yang dibutuhkan.

(vii) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan dramatis dalam lingkungan eksternal dan internal yang tidak dapat ditampung atau diantisipasi oleh Bank, menggunakan strategi dan kebijakan yang ada. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memantau pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang sudah tertera di dalam rencana strategi bank.

Bank menyusun Kebijakan umum untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Dalam rangka proses identifikasi atas risiko dan merespons perubahan faktor eksternal dan internal lingkungan bisnis. Kebijakan umum dirumuskan Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Korporasi Bank (RKB) 2021-2025 sebagai pedoman rencana pertumbuhan Bank jangka pendek, menengah dan hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko stratejik dilakukan dengan cara:
- Melaksanakan pengawasan atas pencapaian rencana kerja secara berkala.

- Melakukan evaluasi atas hasil interim yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank dan mitigasi risiko
- Memperbaiki rencana kerja semula, jika diperlukan, untuk mencapai target.

(viii) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan yang berlaku.

HBID mengendalikan risiko kepatuhannya dengan mendirikan satuan kerja yaitu divisi Kepatuhan, yang berfungsi sebagai lini pertahanan kedua dan berperan sebagai pemegang kendali dan *risk steward*.

HBID memiliki Komite Pemantau Risiko pada level Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko pada level Direksi. Komite tersebut melakukan pertemuan secara regular melalui rapat rutin bulanan Komite Manajemen Risiko dan rapat berkala Komite Pemantau Risiko. Direktur Kepatuhan merupakan anggota tetap yang hadir di kedua Komite tersebut.

HBID juga bertanggung jawab untuk memastikan terciptanya Budaya Kepatuhan Bank serta memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha Bank termasuk ketentuan internal Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Satuan Kepatuhan memantau dan menyampaikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan otoritas pengawas lainnya yang diterbitkan dan terkait dengan aktivitas operasional HBID kepada manajemen senior serta unit kerja terkait.

Dalam rangka memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Unit Kepatuhan melakukan antara lain:

a. Secara konsisten melakukan penilaian atas ketentuan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk Debitur Besar dan Pihak Terkait melalui Opini Kepatuhan (*Compliance Checklist*) guna menghindari pelanggaran ketentuan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kebijaksanaan Perkreditan Bank, Penilaian Kualitas Aset Bank, Larangan Pemberian Kredit kepada Pihak Asing maupun ketentuan lain yang berlaku.

b. Unit Kepatuhan menghadiri rapat Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, *Assets and Liabilities Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko dan *IT, Operational and Services Steering Committee*.

c. Penilaian atas risiko kepatuhan di masing-masing lini bisnis dan fungsi sesuai dengan kerangka manajemen risiko dan kontrol di HBID, termasuk penilaian atas risiko inheren, penerapan kontrol dan risiko residual yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

d. Satuan Kerja Kepatuhan dari WPB Advisory, WSB Advisory, FC dan Conduct Compliance secara aktif melakukan sosialisasi dan memastikan implemementasi *Conduct* di HBID diterapkan secara baik, untuk menerapkan aspek *fair customer* sebagai bagian dari budaya yang melekat di HBID.

Unit Kepatuhan memantau untuk memastikan Bank mematuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya, melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari temuan audit dan memantau kelanjutan dari pemenuhan komitmen tersebut.

PENGUNGKAPAN INFORMASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

1. Umum - Ukuran Utama

No	Deskripsi
	Modal yang Tersedia (Nilai)
1	Modal Inti Utama (CET1)
2	Modal Inti (*Tier* 1)
3	Total Modal
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR
5	Rasio CET1 (%)
6	Rasio Tier 1 (%)
7	Rasio Total Modal (%)
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR
8	*Capital conservation buffer* (2,5% dari ATMR) (%)
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2,5% dari ATMR) (%)
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2,5%) (%)
11	Total CET1 sebagai *buffer* (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)
12	Komponen CET1 untuk *buffer*
	Rasio pengungkit sesuai Basel III
13	Total Eksposur
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transactions* (SFT) secara *gross* (%)
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* (%)
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)
17	LCR (%)
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)
20	NSFR (%)
	Analisis Kualitatif
	Modal inti utama, modal inti dan total modal Bank serta posisi likuiditas dan pendanaan untuk lima triwulan terakhir berada di atas batas pemenuhan minimum tingkat rasio kepatuhan yang diwajibkan.

*) Untuk poin nomor 14, 14b, 14c, dan 14d berdasarkan POJK No. 31/POJK.03/2019 dengan pelaporan pertama pada 31 Maret 2020.

(dalam juta Rp)

31-Des-20	30-Sep-20	30-Jun-20	31-Mar-20	31-Des-19
18.910.895	18.872.082	18.183.654	18.384.506	17.733.746
18.910.895	18.872.082	18.183.654	18.384.506	17.733.746
20.764.533	20.773.097	20.068.041	20.617.137	19.667.473
77.755.638	80.629.722	84.309.636	100.107.784	83.146.577
24,32%	23,41%	21,57%	18,36%	21,33%
24,32%	23,41%	21,57%	18,36%	21,33%
26,70%	25,76%	23,80%	20,59%	23,65%
2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%
17,70%	16,77%	14,80%	11,59%	14,66%
129.428.490	123.759.564	124.836.599	152.629.157	n/a *)
14,61%	15,25%	14,57%	12,05%	n/a *)
14,61%	15,25%	14,57%	12,05%	n/a *)
14,69%	15,22%	14,47%	12,25%	n/a *)
14,69%	15,22%	14,47%	12,25%	n/a *)
36.997.022	33.739.328	29.262.602	32.374.624	26.584.001
5.870.205	5.398.174	6.543.947	6.203.196	5.412.136
630,25%	625,01%	447,17%	521,90%	491,19%
67.287.019	66.303.098	67.325.448	67.086.852	64.673.430
40.806.923	39.582.027	41.811.840	53.763.046	42.368.760
164,89%	167,51%	161,02%	124,78%	152,64%

2. Umum - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan *Mapping* pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (LI1)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	
Aset			
Kas	627.207	627.207	
Penempatan pada Bank Indonesia	5.404.452	5.404.452	
Penempatan pada bank lain	14.395.054	14.395.054	
Tagihan spot dan derivatif/*forward*	671.498	671.498	
Surat berharga yang dimiliki	19.762.791	19.762.791	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	9.292.848	9.292.848	
Tagihan akseptasi	2.047.057	2.047.057	
Kredit yang diberikan	58.394.171	58.394.171	
Pembiayaan syariah	-	-	
Penyertaan modal	-	-	
Aset keuangan lainnya	-	-	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.092.308)	(3.092.308)	
Aset tidak berwujud	332.147	332.147	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(243.026)	(243.026)	
Aset tetap dan inventaris	1.485.633	1.485.633	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(915.017)	(915.017)	
Aset non produktif			
a. Properti terbengkalai	-	-	
b. Agunan yang diambil alih	142.149	142.149	
c. Rekening tunda	-	-	
d. Aset antarkantor	-	-	
Aset lainnya	4.296.399	4.296.399	
Total aset	**112.601.055**	**112.601.055**	
Liabilitas			
Giro	35.871.111	35.871.111	
Tabungan	15.281.272	15.281.272	
Deposito	21.007.448	21.007.448	
Uang elektronik	-	-	
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	
Liabilitas kepada bank lain	4.491.715	4.491.715	
Liabilitas *spot* dan derivatif/*forward*	659.526	659.526	
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji diberli kembali (*repo*)	-	-	
Liabilitas akseptasi	2.047.057	2.047.057	
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	8.570.500	8.570.500	
Setoran jaminan	709.733	709.733	
Liabilitas antarkantor	-	-	
Liabilitas lainnya	4.664.158	4.664.158	
Kepentingan minoritas (*Minority interest*)	-	-	
Total liabilitas	**93.302.520**	**93.302.520**	

(dalam jutaan Rupiah)

Nilai tercatat masing-masing risiko				
Sesuai kerangka risiko kredit	**Sesuai kerangka *counterparty credit risk***	**Sesuai kerangka sekuritisasi**	**Sesuai kerangka risiko pasar**	**Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal**
627.207	-	-	292.913	-
5.404.452	-	-	2.121.550	-
14.395.054	-	-	14.194.214	-
-	671.498	-	-	-
19.762.791	-	-	562.051	-
-	-	-	-	-
9.292.848	-	-	-	-
2.047.057	-	-	1.407.813	
58.394.171	-	-	20.508.095	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(3.092.308)	-	-	(1.416.865)	-
332.147	-	-	-	332.147
(243.026)	-	-	-	(243.026)
1.485.633	-	-	-	-
(915.017)	-	-	-	-
-	-	-	-	-
142.149	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.033.071	-	-	46.146	265.832
111.666.229	**671.498**	**-**	**37.715.917**	**354.953**
-	-	-	11.508.614	35.871.111
-	-	-	8.674.766	15.281.272
-	-	-	3.784.580	21.007.448
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	27.696	4.491.715
-	-	-	-	659.526
-	-	-	-	-
-	-	-	1.407.813	2.047.057
-	-	-	-	-
-	-	-	8.570.500	8.570.500
-	-	-	-	709.733
-	-	-	-	-
-	-	-	1.764.295	4.664.158
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**35.738.264**	**93.302.520**

3. Umum - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (LI2)

(dalam jutaan Rupiah)

		a	b	c	d	e
		Total	Item sesuai:			
			Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka *Counterparty credit risk*	Kerangka risiko pasar
1	Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	112.601.055	111.666.229	-	671.498	37.715.917
2	Nilai tercatat liabilitas sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel LI1)	93.302.520	-	-	-	35.738.264
3	Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	19.298.535	111.666.229	-	671.498	1.977.653
4	Nilai rekening administratif	88.094.092	8.046.449	-	-	(2.221.173)
5	Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
6	Perbedaan karena *netting rules*, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
7	Perbedaan provisi	317.083	317.083	-	-	-
8	Perbedaan karena adanya *prudential filters*	1.038.066	-	-	1.038.066	-
	Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan ketentuan kehati-hatian	108.747.776	120.029.761	-	1.709.564	(243.520)

4. Umum - Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan OJK (LIA)

Bank HSBC Indonesia tidak memiliki anak usaha berupa perusahaan asuransi sehingga nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam Laporan Publikasi Keuangan.

Sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan

Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal provisi sebagai nilai bersih dari nilai tercatat/*outstanding*, dimana berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan merupakan nilai tercatat/ outstanding adalah setelah dikurangi dengan total provisi/total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) stage 1, 2, dan 3, sedangkan sesuai kerangka risiko kredit merupakan nilai tercatat/ *outstanding* setelah dikurangi provisi/CKPN stage 2 dan 3 saja.

Untuk kerangka *counterparty credit risk*, nilai tercatat pada laporan publikasi keuangan berbeda dengan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan. Nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan adalah sebesar *replacement cost*. Sedangkan untuk kerangka risiko kredit selain *replacement* cost diperhitungkan juga potensial *future exposure* dan kemudian dikalikan 1,4.

Bank mengukur nilai wajar menggunakan hierarki di bawah ini:

- Level 1: Kuotasi harga pasar: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian (tanpa disesuaikan) dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: Teknik penilaian menggunakan input yang dapat diobservasi: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian untuk instrumen serupa dalam pasar aktif atau harga kuotasian untuk instrumen serupa atau identik dari pasar yang dipertimbangkan sebagai kurang aktif dan instrumen keuangan yang diukur menggunakan model dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.
- Level 3: Teknik penilaian menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi: instrumen keuangan dinilai menggunakan teknik penilaian dimana satu atau lebih input signifikan tidak dapat diobservasi. Kategori ini termasuk instrumen yang diukur berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi diperlukan untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Bank menggunakan model valuasi mengacu pada model diskonto arus kas setelah melalui proses validasi oleh unit yang independen dan proses persetujuan oleh Komite Valuasi.

Sumber data pasar yang digunakan dalam model valuasi melalui proses verifikasi oleh unit independen sebelum digunakan sejak dari penentuan sumber data pasar. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan pada penginputan data pasar, meliputi pemeriksaan *stale* and *variance*, dan *outliers* atas data-data pasar tersebut setiap hari.

5. Permodalan - Komposisi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC1)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Publikasi
	Modal Inti Utama (*Common Equity Tier* I) /CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1	Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	10.844.005	A
2	Laba ditahan	7.934.728	B
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	551.698	C
4	Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	N/A	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	N/A	
6	**CET1 sebelum *regulatory adjustment***	19.330.431	
	CET 1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)		
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	
8	*Goodwill*	-	
9	Aset tidak berwujud lain (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	89.122	D
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	N/A	
11	*Cash-flow hedge reserve*	N/A	
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	N/A	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	N/A	
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Investasi signifikan pada saham biasa bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
20	*Mortgage servicing rights*	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	
23	investasi signifikan pada saham biasa *financials*	N/A	
24	*mortgage servicing rights*	N/A	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
	a. Selisih PPKA dan CKPN	-	
	b. PPKA atas aset non produktif	64.582	
	c. Aset Pajak Tangguhan	265.832	E
	d. Penyertaan	-	
	e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
	f. Eksposur sekuritisasi	-	
	g. Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET 1	419.536	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	18.910.895	

5. Permodalan - Komposisi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC1)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Publikasi
	Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen		
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk *stock surplus*)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang yang termasuk *phase out* dari AT1	N/A	
34	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A	
36	**Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment***	-	
	Modal Inti Tambahan Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)		
37	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	N/A	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
40	Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)	N/A	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
	a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT1**	-	
44	**Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang**	-	
45	**Jumlah Modal Inti (*Tier* 1) (CET1 + AT 1)**	18.910.895	
	Modal Pelengkap (*Tier* 2): Instumen dan cadangan		
46	Instrumen T2 yang diterbitkan oleh bank (termasuk *stock surplus*)	1.053.750	
47	Modal yang yang termasuk *phase out* dari *Tier* 2	N/A	
48	Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	799.888	
51	**Jumlah Modal Pelengkap (*Tier* 2) sebelum faktor pengurang**	1.853.638	
	Modal Pelengkap (*Tier* 2): Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)		
52	Investasi pada instrumen *Tier 2* sendiri	N/A	
53	Kepemilikan silang pada instrumen *Tier 2* pada entitas lain	N/A	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan *threshold* 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (net posisi *short* yang diperkenankan)	N/A	

5. Permodalan - Komposisi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC1)

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Publikasi
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
	a. *Sinking fund*	-	
	b. Penempatan dana pada instrumen *Tier 2* pada Bank lain	-	
57	**Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap**	-	
58	**Jumlah Modal Pelengkap (T2) setelah *regulatory adjustment***	1.853.638	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	20.764.533	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	77.755.638	
	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (*Capital Buffer*)		
61	**Rasio Modal Inti Utama (CET1) – persentase terhadap ATMR**	24,32%	
62	**Rasio Modal Inti (*Tier* 1) – persentase terhadap ATMR**	24,32%	
63	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR	26,70%	
64	**Tambahan modal (*buffer*) – persentase terhadap AMTR**	3,50%	
65	*Capital Conservation Buffer*	2,50%	
66	*Countercyclical Buffer*	0,00%	
67	*Capital Surcharge untuk Bank Sistemik*	1,00%	
68	Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (*Buffer*) – persentase terhadap ATMR	17,70%	
	***National minimal* (jika berbeda dari Basel 3)**		
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	Rasio terendah *Tier* 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)		
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	*Mortgage servicing rights* (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	
	***Cap* yang dikenakan untuk provisi pada *Tier* 2**		
76	Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)	N/A	
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)	N/A	
79	*Cap* atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A	
	Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 sampai 1 Jan 2022)		
80	*Cap* pada CET 1 yang temasuk *phase out*	N/A	
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A	
82	*Cap* pada AT1 yang temasuk *phase out*	N/A	
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A	
84	*Cap* pada *Tier* 2 yang temasuk *phase out*	N/A	
85	Jumlah yang dikecualikan dari *Tier* 2 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah r*edemptions* dan *maturities*)	N/A	

6. Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	Laporan Publikasi posisi Keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No referensi
		31 Desember 2020	31 Desember 2020	
	ASET			
1.	Kas	627.207	627.207	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.404.452	5.404.452	
3.	Penempatan pada Bank Lain	14.395.054	14.395.054	
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	671.498	671.498	
5.	Surat Berharga yang dimiliki	19,762,791	17,883,726	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-	-	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	9.292.848	9.292.848	
8.	Tagihan akseptasi	2.047.057	2.047.057	
9.	Kredit yang diberikan	58.394.171	58.394.171	
10.	Pembiayaan syariah	-	-	
11.	Penyertaan modal	-	-	
12.	Aset keuangan lainnya	-	-	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			
	a. Surat berharga yang dimiliki	(6.843)	(6.843)	
	b. Kredit yang diberikan	(3.059.585)	(3.059.585)	
	c. Lainnya	(25.880)	(25.880)	
14.	Aset tidak berwujud	332.147	332.147	D
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(243.026)	(243.026)	D
15.	Aset tetap dan inventaris	1.485.633	1.485.633	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(915.017)	(915.017)	
16.	Aset non produktif			
	a. Properti terbengkalai	-	-	
	b. Aset yang diambil alih	142.149	142.149	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor			
17.	Aset pajak tangguhan	265.832	265.832	E
18.	Aset lainnya	4.030.567	4.030.567	
	TOTAL ASET	**112.601.055**	**112.601.055**	

6. Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	Laporan Publikasi posisi Keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No referensi
		31 Desember 2020	31 Desember 2020	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1.	Giro	35.871.111	35.871.111	
2.	Tabungan	15.281.272	15.281.272	
3.	Simpanan berjangka	21.007.448	21.007.448	
4.	Uang Elektronik	-	-	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	
6.	Liabilitas kepada Bank Lain	4.491.715	4.491.715	
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	659.526	659.526	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	
9.	Liabilitas akseptasi	2.047.057	2.047.057	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11.	Pinjaman yang diterima			
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	1.053.750	1.053.750	
	b. pinjaman yang diterima lainnya	7.516.750	7.516.750	
12.	Setoran jaminan	709.733	709.733	
13.	Liabilitas antar kantor			
14.	Liabilitas lainnya	4.664.158	4.664.158	
	TOTAL LIABILITAS	**93.302.520**	**93.302.520**	

6. Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan per 31 Desember 2020 (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	Laporan Publikasi posisi Keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No referensi
		31 Desember 2020	31 Desember 2020	
EKUITAS				
16.	Modal disetor			
	a. Modal dasar	20.000.000	20.000.000	A
	b. Modal yang belum disetor -/-	(9.413.605)	(9.413.605)	A
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	-	
17.	Tambahan modal disetor			
	a. Agio	257.610	257.610	A
	b. Disagio -/-	-	-	
	c. Dana setoran modal	-	-	
	d. Lainnya	15.602	15.602	
18.	Penghasilan (kerugian) komprehensif lain			
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	627.849	627.849	C
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	
	e. Bagian Pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(78.621)	(78.621)	
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain:			
	g.1. Terkait perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(125.570)	(125.570)	C
	g.2. Terkait pengukuran kembali atas program imbalan pasti	15.724	15.724	
	h. Lainnya	15.399	15.399	
19.	Cadangan			
	a. Cadangan umum	49.419	49.419	C
	b. Cadangan tujuan	-	-	
20.	Laba/rugi			
	a. Tahun-tahun lalu	7.260.976	7.260.976	B
	b. Tahun berjalan	1.309.994	1.309.994	B
	c. Dividen yang dibayarkan	(636.242)	(636.242)	
	TOTAL EKUITAS	**19.298.535**	**19.298.535**	B
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**112.601.055**	**112.601.055**	

7. Permodalan - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)

No	Pertanyaan	Jawaban	Jawaban
1	Penerbit	PT Bank HSBC Indonesia	PT Bank HSBC Indonesia
2	Nomor identifikasi	-	-
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
	a. Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	Setelah masa transisi	CET 1	Tier 2
6	Apakah instrumen *eligible* untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu	Individu
7	Jenis instrumen	Saham Biasa	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	10.844.005	1.053.750
9	Nilai Par dari instrumen	10.586.395	1,053,750 (USD 75 juta)
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Liabilitas - *Amortised Cost*
11	Tanggal penerbitan	13/04/2017	10-Apr-17
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Tidak ada jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	N/A	10-Apr-27
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	N/A	N/A
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada)	N/A	N/A
16	*Subsequent call option*	N/A	N/A
	Kupon		
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau *floating*	N/A	Floating
18	Tingkat dari kupon *rate* atau *index* lain yang menjadi acuan	N/A	USD LIBOR 3 bulan +407 bps
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	Tidak	Tidak
20	*Fully discretionary*; *partial* atau *mandatory*	N/A	Mandatory
21	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	N/A	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	N/A	*Cummulative*
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	N/A	*Non Convertible*
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya	N/A	N/A
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana *rate* konversinya	N/A	N/A
27	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau optional	N/A	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*	N/A	N/A
30	Fitur *write-down*	N/A	Ya
31	Jika *write-down*, sebutkan *trigger*-nya	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
32	Jika *write down*, apakah penuh atau sebagian	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
33	Jika *write down*; permanen atau temporer	N/A	Mengikuti ketentuan OJK
34	Jika *write down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up*	N/A	N/A
	a. Tipe Subordinasi	Tidak	Ya
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	N/A	Subordinasi
36	Apakah transisi untuk fitur yang *non-compliant*	N/A	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur *non-complaint*	N/A	N/A

8. Rasio Pengungkit - Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit dan Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

A. Laporan Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit

(dalam juta Rupiah)

No	Keterangan	Per 31 Desember 2020
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN).	115.704.318
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidari berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	1.038.066
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi *reverse repo.*	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	16.266.119
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(3.580.012)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	**Total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit.**	**129.428.490**

Catatan: Perhitungan rasio pengungkit mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

B. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	Periode	
		Des 2020	Sep 2020
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	105.739.972	104.071.087
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(3.107.708)	(2.743.011)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(354.954)	(194.585)
7	**Total eksposur aset dalam laporan posisi keuangan** Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	**102.277.310**	**101.133.491**
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus untuk memenuhi persyaratan tertentu	940.098	527.150
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	769.466	993.445
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui *central counterparty* (CCP))	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	**Total eksposur transaksi derivatif** Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	**1.709.564**	**1.520.595**
Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	9.292.848	5.876.534
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan *current exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	**Total Eksposur SFT** Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	**9.292.848**	**5.876.534**
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	88.094.092	85.208.673
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(71.827.974)	(69.946.777)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(117.350)	(32.951)
22	**Total eksposur TRA** Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	**16.148.769**	**15.228.944**
Modal dan Total Eksposur			

B. Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

(dalam juta Rupiah)

No.	Keterangan	Periode	
		Des 2020	Sep 2020
23	Modal inti	18.910.895	18.872.082
24	**Total Eksposur** Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	**129.428.490**	**123.759.564**
Rasio Pengungkit (*Leverage*)			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14,61%	15,25%
25a	Nilai rasio pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14,61%	15,25%
26	Nilai minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A
Pengungkapan nilai rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	8.571.478	6.143.292
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	9.292.848	5.876.534
30	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	128.707.120	124.026.322
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	128.707.120	124.026.322
31	Nilai rasio pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	14,69%	15,22%
31a	Nilai rasio pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	14,69%	15,22%

Catatan: Perhitungan rasio pengungkit mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

9. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020				
		Tagihan bersih berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
		Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	34.156.166	-	-	-	34.156.166
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	9.216.824	-	-	-	9.216.824
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	17.701.195	9.880	49.581	-	17.760.656
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	376.122	-	4.595	502	381.219
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.485.655	183.544	320.583	181.359	4.171.141
9	Tagihan kepada Korporasi	42.282.815	3.438.868	3.957.198	694.791	50.373.672
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	528.650	75.510	159.535	38.572	802.267
11	Aset Lainnya	4.633.201	113.453	114.157	16.570	4.877.381
	Total	**112.380.628**	**3.821.255**	**4.605.649**	**931.794**	**121.739.326**

10. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020					
		Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
		≤ 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	17.502.961	5.872.592	5.323.358	1.205.116	4.252.139	34.156.166
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.709.580	1.062.348	-	444.896	-	9.216.824
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	13.031.766	835.475	80.530	72.146	3.740.739	17.760.656
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.661	24.010	27.945	327.603	-	381.219
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.317.337	1.107.146	1.145.796	600.862	-	4.171.141
9	Tagihan kepada Korporasi	42.977.349	5.185.676	2.079.456	131.191	-	50.373.672
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	650.028	67.193	67.126	17.920	-	802.267
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	4.877.381	4.877.381
	Total	**83.190.682**	**14.154.440**	**8.724.211**	**2.799.734**	**12.870.259**	**121.739.326**

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019				
	Tagihan bersih berdasarkan Wilayah				
	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
	Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	26.886.578	-	-	-	26.886.578
	7.052.099	-	-	-	7.052.099
	-	-	-	-	-
	12.797.304	9.509	76.493	7.675	12.890.981
	293.203	-	10.505	651	304.359
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	4.483.368	182.981	288.774	187.664	5.142.787
	51.929.143	3.361.893	6.126.308	936.090	62.353.434
	371.689	108.583	251.245	85.626	817.143
	5.056.346	111.829	93.127	29.611	5.290.913
	108.869.730	**3.774.795**	**6.846.452**	**1.247.317**	**120.738.294**

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019					
	Tagihan bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu					
	≤ 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	5.288.795	10.746.383	1.903.769	1.603.843	7.343.788	26.886.578
	6.783.088	269.011	-	-	-	7.052.099
	-	-	-	-	-	-
	9.609.633	898.694	66.745	54.774	2.261.135	12.890.981
	370	21.185	20.558	262.246	-	304.359
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2.813.554	1.061.600	710.415	557.218	-	5.142.787
	59.208.077	2.747.267	158.845	239.245	-	62.353.434
	710.202	92.932	3.520	10.489	-	817.143
	-	-	-	-	5.290.913	5.290.913
	84.413.719	**15.837.072**	**2.863.852**	**2.727.815**	**14.895.836**	**120.738.294**

11. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	31 Desember 2020						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	2.164.920	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	4.593.764	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	714.401	-	-	-	
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.429.804	1.743.739	-	17.760.656	-	
12	Real estat	-		-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	28.726.362	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	6.496	
23	Lainnya	-	-	-	-	374.723	
	Total	**34.156.166**	**9.216.824**	**-**	**17.760.656**	**381.219**	

(Dalam Jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiun	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	11.757	612.039	2.604	-
	-	-	-	1.286.737	-	-
	-	-	107.576	26.003.096	239.713	-
	-	-	5.241	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	52.180	836.546	5.882	-
	-	-	550.207	8.081.207	427.687	-
	-	-	61.739	5.494.620	47.422	-
	-	-	12.586	69.509	9.014	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-		2.334.825	-	-
	-	-	29.583	3.329.044	37.433	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	20.645	2.325.284	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.854	-	1.048	-
	-	-	3.317.773	765	31.464	4.877.381
	-	**-**	**4.171.141**	**50.373.672**	**802.267**	**4.877.381**

11.Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	31 Desember 2019						
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	2.421.793	-	-	-	
4	Industri pengolahan	-	2.337.844	-	-	-	
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	1.518.017	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-	
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	671.888	-	-	-	
10	Perantara keuangan	3.047.388	102.556	-	12.890.981	-	
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	23.839.190	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	22.507	
20	Lainnya	-	-	-	-	281.852	
	Total	**26.886.578**	**7.052.098**	**-**	**12.890.981**	**304.359**	

(Dalam Jutaan Rupiah)

	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiun	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	8.916	1.361.586	1.783	-
	-	-	3.671	-	-	-
	-	-	-	1.831.572	374	-
	-	-	88.858	31.216.044	469.322	-
	-	-	3.872	299	-	-
	-	-	44.212	3.462.170	9.510	-
	-	-	511.111	11.302.065	211.406	-
	-	-	7.224	96.661	31.713	-
	-	-	44.549	4.283.006	18.603	-
	-	-	-	5.352.439	-	-
	-	-	25.026	3.267.793	55.213	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	10.577	-	-
	-	-	3.457	16.623	-	-
	-	-	6.413	146.710	1.231	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	413	-	17	-
	-	-	4.395.064	5.889	17.971	5.290.913
	-	**-**	**5.142.786**	**62.353.434**	**817.143**	**5.290.913**

12. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2020				
		Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
		Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	95.815.624	3.772.229	4.829.467	1.048.373	105.465.692
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)					
	a. belum jatuh tempo	10.653.664	932.786	2.298.803	286.217	14.171.470
	b. telah jatuh tempo	1.406.342	160.114	491.165	197.924	2.255.545
3	CKPN - *Stage* 1	262.770	20.177	23.721	36.829	343.497
4	CKPN - *Stage* 2	558.954	47.786	55.954	33.281	695.975
5	CKPN - *Stage* 3	1.440.388	85.005	354.973	172.471	2.052.837
6	Tagihan yang dihapus buku	480.045	31.384	16.174	25.626	553.229

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2019				
		Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Total
		Jakarta	Sumatera Utara dan sekitarnya	Jawa Tengah dan Jawa Timur dan sekitarnya	Lainnya (Sumatera Selatan dan Jawa Barat)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	101.010.806	3.605.106	6.897.327	1.254.581	112.767.819
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (*Stage* 2 dan *Stage* 3)					
	a. belum jatuh tempo					
	b. telah jatuh tempo					
3	CKPN - *Stage* 1					
4	CKPN - *Stage* 2					
5	CKPN - *Stage* 3					
6	Tagihan yang dihapus buku	176.439	126.619	67.639	15.130	385.827

13. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	31 Desember 2020							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	638.948	129.154	15.610	2.903	291	13.006	-
2	Pertambangan dan Penggalian	1.210.870	79.368	-	6.542	157	-	-
3	Industri pengolahan	25.012.643	6.988.479	671.500	116.633	295.523	704.701	189.515
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	5.241	-	-	30	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	5.358.831	1.707.691	75.263	24.875	18.422	71.260	3.554
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	9.789.339	2.765.427	1.010.887	91.445	75.612	741.470	61.479
8	Pengangkutan dan Pergudangan	6.224.493	633.752	392.688	31.121	13.581	414.411	2.192
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	105.607	16.562	23.710	376	615	14.695	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	24.158.326	209.133	-	21.396	455	-	-
12	Real estat	3.057.539	268.257	52.432	15.811	165	14.999	801
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	19.433.514	-	-	8.199	2.263	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.496.182	75.763	-	-	-	-	481
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	9.398	-	-	268	-	-	-
23	Lainnya	8.964.761	1.240.437	13.455	23.898	288.891	78.295	295.207
	Total	**105.465.692**	**14.171.470**	**2.255.545**	**343.497**	**695.975**	**2.052.837**	**553.229**

13. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	31 Desember 2019							
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	1.386.472						
2	Perikanan	3.671						-
3	Pertambangan dan Penggalian	4.051.086						-
4	Industri pengolahan	29.665.577						248.093
5	Listrik, Gas dan Air	4.171						-
6	Konstruksi	4.879.306						3.837
7	Perdagangan besar dan eceran	12.693.033						116.915
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	145.559						-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	4.580.013						-
10	Perantara keuangan	18.495.424						-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	3.345.016						3.071
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	23.335.191						-
13	Jasa pendidikan	10.577						-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	20.080						-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	137.972						11.973
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-						-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-						-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-						-
19	Bukan Lapangan Usaha	5.313.850						-
20	Lainnya	4.700.821						1.938
	Total	**112.767.819**						**385.827**

14. Risiko Kredit - Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Keterangan ***)	31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo awal CKPN*)	280.332	279.819	1.431.069
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	20.211	573.254	1.123.669
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	-	-	(553.229)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan **)	75.381	(101.577)	96.129
Saldo akhir CKPN		**375.924**	**751.496**	**2.097.638**

*) Setelah dikurangi dampak awal penerapan PSAK 71
**) Efek Diskonto, Selisih Kurs, dan transfer antar *staging* CKPN
***) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai termasuk CKPN untuk komitmen dan kontijensi dan aset-aset untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

15. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

No.	Kategori Portofolio	Peringkat Jangka Panjang					
		Lembaga Pemeringkat					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 sd AA3	A1 sd A3	Baaa1 sd Baa3	
		PT Fitch Rating Indonesia	AAA	AA+(idn) sd. AA- (idn)	A+ (idn) sd A-(idn)	BBB+ (idn) sd BBB- (idn)	
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	(Idr) AA+ sd (Idr) AA-	(Idr) A+ sd (Idr) A-	(Idr) BBB+ sd (Idr) BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	ID AAA	idAA+ sd id AA-	idA+ sd id A-	id BBB+ sd id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	34.156.166	
2	Tagihan kepada Emiten Sektor Publik		551.185	196	4.626.105	200.000	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		169.594	15.299.674	726.218	962.234	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai / Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		2.054.266	263.841	1.243.267	507.067	
10	Tagihan yang telah jatuh tempo						
11	Asset lainnya						
	Total		**2.775.045**	**15.563.711**	**6.595.590**	**35.825.467**	

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2020									
				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 sd Ba3	B1 sd B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+ (idn) sd BB- (idn)	B+ (idn) sd B-(idn)	Kurang dari B- (idn)	F1+ (idn) sd F1 (idn)	F2 (idn)	F3 (idn)	Kurang dari F3 (idn)		
	(Idr) BB+ sd (Idr) BB-	(Idr) B+ sd (Idr) B-	Kurang dari (Idr) B-	(Idr) A1+ sd (Idr) A1	(Idr) A2+ sd (Idr) A2	(Idr) A3+ sd (Idr) A4	Kurang dari (Idr) A3		
	id BB+ sd id BB	idB+ sd id B-	Kurang dari id B-	id A1	id A2	id A3 sd A4	Kurang dari id A4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	-	34.156.166
				-	-	-	-	3.839.338	9.216.824
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.089	14.774	4.961	-	-	-	-	553.112	17.760.656
								381.219	381.219
								-	-
								-	-
								4.171.141	4.171.141
	1.670.560	179.683	-	-	-	-	-	44.454.988	50.373.672
								802.267	802.267
								4.877.381	4.877.381
	1.700.649	**194.457**	**4.961**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.079.446**	**121.739.326**

15. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio Dan Skala Peringkat

No.	Kategori Portofolio	Peringkat Jangka Panjang					
		Lembaga Pemeringkat					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ sd AA-	A+ sd A-	BBB+ sd BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 sd AA3	A1 sd A3	Baaa1 sd Baa3	
		PT Fitch Rating Indonesia	AAA	AA+(idn) sd. AA- (idn)	A+ (idn)sd A-(idn)	BBB+ (idn) sd BBB- (idn)	
		PT ICRA Indonesia	(Idr) AAA	(Idr) AA+ sd (Idr) AA-	(Idr) A+ sd (Idr) A-	(Idr) BBB+ sd (Idr) BBB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	ID AAA	idAA+ sd id AA-	idA+ sd id A-	id BBB+ sd id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	26.886.578	
2	Tagihan kepada Emiten Sektor Publik		945.178	-	1.190.283	3.365.813	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		362.634	11.236.724	266.175	269.205	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal						
6	Kredit Beragun Properti Komersial						
7	Kredit Pegawai / Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portfolio Ritel		-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi		1.286.276	2.688.962	5.406.617	541.871	
10	Tagihan yang telah jatuh tempo						
11	Asset lainnya						
	Total		**2.594.088**	**13.925.686**	**6.863.075**	**31.063.467**	

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2019									
				Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ sd BB-	B+ sd B-	Kurang dari B-	F1+ sd F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 sd Ba3	B1 sd B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+ (idn) sd BB- (idn)	B+ (idn) sd B-(idn)	Kurang dari B- (idn)	F1+ (idn) sd F1 (idn)	F2 (idn)	F3 (idn)	Kurang dari F3 (idn)		
	(Idr) BB+ sd (Idr) BB-	(Idr) B+ sd (Idr) B-	Kurang dari (Idr) B-	(Idr) A1+ sd (Idr) A1	(Idr) A2+ sd (Idr) A2	(Idr) A3+ sd (Idr) A4	Kurang dari (Idr) A3		
	id BB+ sd id BB	idB+ sd id B-	Kurang dari id B-	id A1	id A2	id A3 sd A4	Kurang dari id A4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	-	26.886.578
	-	-	-	-	-	-	-	1.550.825	7.052.099
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38.432	-	3.121	-	-	-	-	714.690	12.890.981
								304.359	304.359
								-	-
								-	-
	-	-	-					5.142.787	5.142.787
	907.340	810.385	-	-	-	-	-	50.711.983	62.353.434
								817.143	817.143
								5.290.913	5.290.913
	945.772	**810.385**	**3.121**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.532.700**	**120.738.294**

16. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan		
		0%	20%	25%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	**Eksposur Neraca**			
1	Tagihan kepada Pemerintah	24.837.966	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	551.381	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	14.886.515	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	189.808	118.478
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	2.006.243	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
11	Aset Lainnya	627.207		
	Total Eksposur Neraca	**25.465.173**	**17.633.947**	**118.478**
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**			
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	950.723	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	310.523	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif	**-**	**1.261.246**	**-**
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**			
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.318.200	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	225.218	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	1.343	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**9.318.200**	**226.561**	**-**

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2020								
	Dampak Mitigasi Risiko Kredit						ATMR	Beban Modal
	35%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	-	-		-	-
	-	7.418.971	-	-	-		3.819.762	
	-	-	-	-	-		-	-
	-	419.208	-	-	1.444		3.189.073	255.126
	72.933	-	-	-	-		93.108	7.449
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	4.000.555	-	-		3.000.416	240.033
	-	1.237.460	-	39.584.507	179.683		40.874.011	3.269.921
	-	-	-	4.394	797.461		1.200.586	96.047
				4.108.025	142.149		4.321.248	345.700
	72.933	**9.075.639**	**4.000.555**	**43.696.926**	**1.120.737**	**-**	**56.498.204**	**4.519.856**
	-	-	-	-	-		-	-
	-	1.246.472	-	-	-		623.236	49.859
	-	-	-	-	-		-	-
	-	264.142	-	-	-		322.216	25.777
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	3.504	-	-		2.628	210
	-	-	-	5.270.673	-		5.332.778	426.622
	-	-	-	-	412		619	50
	-	**1.510.614**	**3.504**	**5.270.673**	**412**	**-**	**6.281.477**	**502.518**
	-	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-		-	-
	-	1.013.406	-	-	-		551.747	44.140
	-	-	-	-	-		-	-
	-	5.808	-	438.437	-		441.610	35.329
	-	**1.019.214**	**-**	**438.437**	**-**	**-**	**993.357**	**79.469**

16. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan				
		0%	20%	25%	35%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	**Eksposur Neraca**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.382.579	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	945.179	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	10.167.980	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	164.226	87.412	52.721	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	3.545.151	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	696.281	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	**27.078.860**	**14.822.536**	**87.412**	**52.721**	
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	1.128.603	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	303.020	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	Total Eksposur Rekening Administratif	**-**	**1.431.623**	**-**	**-**	
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	503.999	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	664.924	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	127.067	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**503.999**	**791.991**	**-**	**-**	

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2019									
	Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	5.712.475	-	-	-		3.045.273	243.622
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	334.800	-	-	3.121		2.205.678	176.454
	-	-	-	-	-	-		73.151	5.852
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	4.983.353	-	-		3.737.515	299.001
	-	-	5.401.975	-	45.062.586	810.385		49.688.181	3.975.054
	-	-	-	-	11.131	805.620		1.219.561	97.565
	-	-	-	-	4.452.352	142.280		4.665.772	373.262
	-	**-**	**11.449.250**	**4.983.353**	**49.526.069**	**1.761.406**	**-**	**64.635.130**	**5.170.810**
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	394.445	-	-	-		197.223	15.778
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	234.661	-	-	-		343.051	27.444
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	1.548	-	-		1.161	93
	-	-	1.688	-	5.273.886	-		5.335.334	426.827
	-	-	-	-	-	392		588	47
	-	**-**	**630.794**	**1.548**	**5.273.886**	**392**	**-**	**5.877.357**	**470.189**
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	332.263	-	24.628	-		323.744	25.900
	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	2.954	-	345.633	-		372.523	29.802
	-	**-**	**335.217**	**-**	**370.261**	**-**	**-**	**696.268**	**55.701**

17. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2020							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	24.837.966	-	-	-		24.837.966
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.970.352	-	-	-		7.970.352
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	15.307.167	-	-	-		15.307.167
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	381.219	-	-	-		381.219
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.167.637	167.082	-	-		4.000.555
9	Tagihan kepada Korporasi	44.346.888	1.338.996	-	-		43.007.892
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	801.855	-	-	-		801.855
11	Aset Lainnya	4.877.381	-	-	-		4.877.381
	Total Eksposur Neraca	**102.690.465**	**1.506.078**	**-**	**-**	**-**	**101.184.387**
B	**Eksposur Rekening Administratif**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1.246.472	-	-	-		1.246.472
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.214.865	-	-	-		1.214.865
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.504	-	-	-		3.504
9	Tagihan kepada Korporasi	5.581.196	-	-	-		5.581.196
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	412	-	-	-		412
	Total Eksposur Rekening Administratif	8.046.449	-	-	-	-	8.046.449
C	**Eksposur *Counterparty Credit Risk***						
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.318.200	-	-	-		9.318.200
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.238.624	-	-	-		1.238.624
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	445.588	-	-	-		445.588
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**11.002.412**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.002.412**
Total (A+B+C)		**121.739.326**	**1.506.078**	**-**	**-**	**-**	**120.233.248**

17. Risiko Kredit - Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Desember 2019							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	26.382.579	-	-	-		26.382.579
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6.657.654	-	-	-		6.657.654
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	10.505.902	-	-	-		10.505.902
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	304.359	-	-	-		304.359
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.141.239	157.886	-	-		4.983.353
9	Tagihan kepada Korporasi	56.299.186	1.479.088	-	-		54.820.098
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	816.751	-	-	-		816.751
11	Aset Lainnya	5.290.913	-	-	-		5.290.913
	Total Eksposur Neraca	**111.398.583**	**1.636.974**	**-**	**-**	**-**	**109.761.609**
B	**Eksposur Rekening Administratif**						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-				-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	394.445	-	-	-		394.445
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.363.264	-	-	-		1.363.264
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.548	-	-	-		1.548
9	Tagihan kepada Korporasi	5.578.595	-	-	-		5.578.595
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	392	-	-	-		392
	Total Eksposur Rekening Administratif	7.338.244	-	-	-	-	7.338.244
C	**Eksposur *Counterparty Credit Risk***						
1	Tagihan kepada Pemerintah	503.999	-	-	-		503.999
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	1.021.815	-	-	-		1.021.815
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi	475.653	-	-	-		475.653
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**2.001.467**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.001.467**
Total (A+B+C)		**120.738.294**	**1.636.974**	**-**	**-**	**-**	**119.101.320**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	24.837.966	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.970.352	3.819.762	3.819.762
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	14.899.155	2.985.067	2.985.067
	b. Tagihan Jangka Panjang	408.012	204.006	204.006
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	381.219	93.108	93.108
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.167.637	3.125.728	3.000.416
9	Tagihan kepada Korporasi	44.346.888	42.213.006	40.874.011
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	4.394	4.394	4.394
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	797.461	1.196.192	1.196.192
11	Aset Lainnya			
	a. Uang tunai, emas, dan *commemorative coin*	627.207	-	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)			
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	-	-	-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	570.616	-	570.616
	d. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	142.149	-	213.223
	e. Antar kantor neto	-	-	-
	f. Lainnya	3.537.409	-	3.537.409
	TOTAL	**102.690.465**	**53.641.263**	**56.498.204**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

1. Eksposur Aset di laporan posisi keuangan, kecuali eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	26.382.579	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	6.657.654	3.045.273	3.045.273
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	10.180.556	2.043.005	2.043.005
	b. Tagihan Jangka Panjang	325.346	162.673	162.673
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	304.359	73.151	73.151
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.141.239	3.855.929	3.737.515
9	Tagihan kepada Korporasi	56.299.186	51.167.270	49.688.182
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	11.131	11.131	11.131
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	805.620	1.208.429	1.208.429
11	Aset Lainnya			
	a. Uang tunai, emas, dan *commemorative coin*	696.281		-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)			
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	-	-	-
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	716.157	-	716.157
	d. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	142.280	-	213.420
	e. Antar kantor neto	-	-	-
	f. Lainnya	3.736.195	-	3.736.195
	TOTAL	**111.398.583**	**61.566.861**	**64.635.131**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	1.246.472	623.236	623.236
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.214.865	322.216	322.216
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.504	2.628	2.628
9	Tagihan kepada Korporasi	5.581.196	5.332.778	5.332.778
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	412	619	619
	TOTAL	**8.046.449**	**6.281.477**	**6.281.477**

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	9.292.848	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
	TOTAL	**9.292.848**	**-**	**-**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	394.445	197.223	197.223
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	27.765	5.553	5.553
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.335.499	337.498	337.498
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.548	1.548	1.548
9	Tagihan kepada Korporasi	5.578.595	5.335.335	5.335.335
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo			
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	392	588	588
	TOTAL	**7.338.244**	**5.877.745**	**5.877.745**

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	464.945	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
	TOTAL	**464.945**	**-**	**-**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

Bank tidak memiliki eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

5. Eksposur Sekuritisasi

Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

6. Eksposur Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	25.352	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	47.993	9.599	9.599
	b. Tagihan Jangka Panjang	1.190.631	542.148	542.148
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	445.588	441.610	441.610
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA)	-	218.015	218.015
	TOTAL	**1.709.564**	**1.211.372**	**1.211.372**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah			
	a. Tagihan kepada Pemerintah Indonesia	39.054	-	-
	b. Tagihan kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank			
	a. Tagihan Jangka Pendek	72.005	15.706	15.706
	b. Tagihan Jangka Panjang	949.810	308.038	308.038
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
6	Tagihan kepada Korporasi	475.653	372.523	372.523
7	Eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment* (CVA)	-	209.054	209.054
	TOTAL	**1.536.522**	**905.321**	**905.321**

18. Risiko Kredit - Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar

7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	63.991.053	71.418.197
"FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit"	(B)	(11.963)	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	63.979.090	71.418.197
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	(11.963)	-

19. Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)

Untuk lebih detailnya, silakan melihat halaman 89.

20. Risiko Kredit - Analisis Eksposur *Counterpary Credit Risk* (CCR1)

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2020					
		Replacement cost (RC)	*Potential future exposure* (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	671.498	549.618		1,4	1.709.564	993.356
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
6	Total						993.356

21. Risiko Kredit - *Capital Charge* untuk *Credit Valuation Adjustment* (CCR2)

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2020	
		Tagihan Bersih	ATMR
	Total portfolios berdasarkan *Advanced CVA capital charge*	N/A	N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3× *multiplier*)		N/A
2	(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3× multiplier)		N/A
3	Semua Portofolio sesuai *Standardised* CVA *Capital Charge*	1.709.521	218.015
4	Total sesuai CVA *Capital Charge*	1.709.521	218.015

22. Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

Kategori Portofolio \ Bobot Risiko	0%	10%	20%	
Indonesia				
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	18.108	-	-	
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	160.870	
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	
Tagihan kepada Korporasi	-	-	959	
Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	
Aset lainnya	-	-	-	
Total	**18.108**	**-**	**161.829**	

23. Risiko Kredit - Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Bank tidak memiliki eksposur tagihan bersih derivatif kredit

24. Eksposur Sekuritisasi- Pengungkapan Kualitatif mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

Bank tidak mempunyai eksposur sekuritasi pada laporan *banking book* dan *trading book*.

25. Risiko Kredit - Eksposur pada Banking Book (SEC1)

Bank tidak bertindak sebagai originator, sponsor maupun sebagai investor eksposur sekuritisasi.

26. Risiko kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Trading Book (SEC2)

Bank tidak bertindak sebagai originator, sponsor maupun sebagai investor eksposur sekuritisasi.

27. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor) (SEC3)

Bank tidak bertindak sebagai originator maupun sebagai sponsor eksposur sekuritisasi.

28. Risiko Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)

Bank tidak bertindak sebagai Investor eksposur sekuritisasi.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020						
	25%	50%	75%	100%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
	-	-	-	-	-	25.352
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
		723.861	-	-	-	1.238.623
	-	-	-	-	-	-
	-	4.148	-	313.169	-	445.588
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	**728.009**	**-**	**313.169**	**-**	**1.709.564**

29. Risiko Pasar - Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
		Individual		Individual	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	90.060	1.125.750	150.271	1.878.388
2	Risiko Nilai Tukar	48.583	607.288	101.326	1.266.575
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
5	Risiko Option	-	-	-	-
TOTAL		**138.643**	**1.733.038**	**251.597**	**3.144.963**

* Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (IRRBB)

Dalam penerapan Manajemen Risiko IRRBB, Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang yang mempengaruhi nilai ekonomis dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih.

Dalam hal pengendalian Risiko, Bank menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* atas pengukuran IRRBB berdasarkan skenario *stress*. HBID menggunakan data historis dan asumsi hipotetis dalam menentukan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*. Hasil pengukuran IRRBB akan dibahas dan di monitor dalam rapat ALCO dan RMC.

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB diterapkan oleh HBID sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, strategi dan kompleksitas usaha Bank yang dimana meliputi Pengawasan Aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris; Penetapan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Limit Risiko; Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; Sistem Pengendalian Intern.

Perhitungan IRRBB dilakukan setiap triwulanan sesuai dengan arahan OJK.
Dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB, Bank menggunakan 2 metode:

a). pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (EVE) adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
b). pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (NII) adalah suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (earnings) Bank.

Dalam perhitungan IRRBB dengan metode EVE, HBID menerapkan skenario *shock* suku bunga yang mencerminkan profil risiko bank, mengacu kepada 6 standar skenario seperti yang diwajibkan oleh OJK. Dalam perhitungan IRRBB dengan metode NII, HBID menerapkan volatilitas kenaikan/penurunan suku bunga 200bps atas Neraca statis bank.

Bank menggunakan asumsi permodelan yang sesuai dengan metode yang terdapat dalam Surat Edaran OJK untuk perhitungan EVE *sensitivity*. Sedangkan asumsi permodelan yang digunakan dalam perhitungan NII *sensitivity*, Bank menggunakan internal model dan hal ini sesuai dengan Surat Edaran OJK.

Pada saat ini HBID tidak melakukan lindung nilai terhadap IRRBB.

a) margin komersial dan spread components lainnya dikeluarkan dalam perhitungan dengan menggunakan metode EVE. Bunga yang diperhitungkan adalah suku bunga berdasarkan Risk Free.
b) Bank menggunakan data historis selama satu tahun terakhir untuk melihat frekuensi perubahan bunga (repricing tenor) atas produk NMD yang memiliki bunga. Sedangkan untuk NMD tanpa suku bunga, bank menggunakan theoretical tenor berdasarkan Risk Appetite Bank. Setelah itu, Bank akan mempertimbangkan kemampuan Balance Sheet Management (BSM) untuk melakukan hedging terhadap NMD tersebut. Nilai terakhir yang digunakan sebagai repricing maturities adalah setelah mempertimbangkan unsur kemampuang BSM dalam melakukan hedging terhadap interest rate risk.
c) Saat ini Bank tidak mempertimbangkan prepayment rate dan early withdrawal rate, hal ini dikarenakan eksposur terhadap prepayment rate dan early withdrawal tidak material.
d) Bank tidak memiliki asumsi opsi perilaku yang dikeluarkan dalam perhitungan EVE dan NII Sensitivity.
e) Mata uang yang signifikan yang berlaku pada HBID adalah Rupiah dan USD. Bank menggunakan metode standar sesuai dengan SE OJK dalam melakukan stress skenario dan agregasi dampak dari mata uang yang signifikan terhadap stress skenario.

Pelaporan EVE dan NII Sensitivity dengan menggunakan posisi triwulanan dengan menggunakan metode standar yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan metodologi perhitungan bank per bulan Desember 2020, ΔEVE terhadap Modal Tier 1 berada pada 8.75% (Low) dan ΔNII terhadap Proyeksi Pendapatan berada pada 10.66% (Low), yang keduanya menunjukkan tingkat sensitivitas yang rendah. Tidak terdapat variasi yang signifikan pada tingkat IRRBB yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelum nya di bulan September 2020.

Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga yang diterapkan untuk NMD adalah satu tahun untuk mata uang Rupiah, dimana berlaku untuk produk NMD korporasi tanpa suku bunga dana NMD ritel. Sedangkan untuk NMD mata uang USD, rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga adalah tiga bulan.

30. Laporan Perhitungan *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

(dalam jutaan Rupiah)

No.		31 Desember 2020			
		△ EVE		△ NII	
	Periode	T	T-1	T	T-1
1	*Parallel up*	1.450.216	1.497.378	(452.253)	(358.485)
2	*Parallel down*	(1.660.131)	(1.716.854)	451.646	300.336
3	*Steepener*	(200.201)	(199.359)		
4	*Flattener*	521.667	530.083		
5	*Short rate up*	1.064.295	1.092.671		
6	*Short rate down*	(1.137.574)	(1.168.596)		
7	Nilai Maksimum Negatif (absolut)	1.660.131	1.716.854	452.253	358.485
8	Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	18.970.464	18.872.082	4.242.716	3.951.927
9	Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk ΔNII)	8,75%	9,10%	10,66%	9,07%

31. Risiko Likuiditas - Laporan Perhitungan - Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan

No	Komponen	Triwulan IV 2020
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual
1	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR	
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)		
2	Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)	
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)		
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	588.897
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	20.735.865
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	-
	a. Simpanan operasional	21.572.120
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	26.349.016
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (*unsecured debt*)	-
5	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)	
6	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	124.922
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	8.708.623
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya	101.038.153
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-
7	**TOTAL ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOWS*)**	
ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOWS*)		
8	Pinjaman dengan agunan *Secured lending*	-
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	24.611.952
10	Arus kas masuk lainnya	358
11	**TOTAL ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOWS*)**	24.612.310
12	**TOTAL HQLA**	
13	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**	
14	**LCR (%)**	

Keterangan:
[1] *Adjusted value* dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Analisa

Tingkat LCR pada triwulan keempat 2020 meningkat dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020 sebesar 5,24%. Hal ini disebabkan peningkatan rata-rata HQLA sebesar 9,66% yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Total Arus Kas Keluar Bersih sebesar 8,74%.

Kenaikan rata-rata HQLA terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata saldo Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dibandingkan dengan kuartal ketiga 2020. Di sisi lain, kenaikan rata-rata Total Arus Kas Keluar Bersih sejalan dengan kenaikan arus kas keluar yang terutama berasal dari kenaikan rata-rata pendanaan nasabah korporasi dibandingkan kuartal ketiga 2020.
Penurunan Arus Kas Masuk tidak memberikan dampak dikarenakan telah melebihi ambang batas atas arus kas masuk yang dapat diperhitungkan, yaitu 75% dari Total Arus Kas Keluar.

Komponen HQLA Bank terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia dan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia. Sedangkan komponen utama dari Arus Kas Keluar Bersih adalah dana pihak ketiga. Sumber utama pendanaan Bank adalah dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL			
	Triwulan III 2020		
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*), *outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*).
	59 hari		62 hari
	36.997.022		33.739.328
	29.445	651.437	32.572
	2.073.586	21.425.235	2.142.524
	-	-	-
	4.945.793	20.870.266	4.772.283
	15.139.514	22.439.628	13.476.422
	-	-	-
	124.922	245.482	245.482
	-	-	-
	-	-	-
	870.470	6.091.534	608.879
	-	-	-
	297.088	100.125.561	314.535
	-	-	-
	23.480.818		21.592.695
	-	-	-
	18.961.958	24.356.372	17.064.778
	358	-	-
	18.962.316	24.356.372	17.064.778
	TOTAL ADJUSTED VALUE[1]		TOTAL ADJUSTED VALUE[1]
	36.997.022		33.739.328
	5.870.205		5.398.174
	630,25%		625,01%

32. Risiko Likuiditas - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September / 2020)			
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)			
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	
1	Modal	19.851.683	-	-	
2	Modal sesuai POJK KPMM	19.851.683	-	-	
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	15.534.171	9.424.722	570.754	
5	Simpanan dan Pendanaan stabil	458.947	160.133	17.472	
6	Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	15.075.224	9.264.589	553.282	
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	37.655.808	8.493.304	146.373	
8	Simpanan operasional	20.092.534	-	-	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	17.563.273	8.493.304	146.373	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:				
12	NSFR Liabilitas Derivatif		20.366	78.382	
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	-	5.122.548	-	
14	**Total ASF**				

		Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember / 2020)				Total Nilai Tertimbang
			Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun	
	1.116.000	20.967.683	20.065.738	-	-	1.053.750	21.119.488
	1.116.000	20.967.683	20.065.738	-	-	1.053.750	21.119.488
	-	-	-	-	-	-	-
	-	23.008.511	16.092.441	9.289.618	308.650	-	23.156.106
	-	604.725	454.897	218.044	16.418	-	654.892
	-	22.403.786	15.637.544	9.071.574	292.232	-	22.501.214
	-	14.366.105	39.551.656	11.330.904	78.276	-	16.197.175
	-	10.046.267	20.985.170	-	-	-	10.492.585
	-	4.319.838	18.566.485	11.330.904	78.276	-	5.704.590
	-	-	-	-	-	-	-
	68.600			4.597	-	20.476	
	7.960.800	7.960.800	-	5.373.890	1.405.000	6.111.750	6.814.250
		66.303.098					**67.287.019**

32. Risiko Likuiditas - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)

No.	Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (September / 2020)			
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)			
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR				
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	3.246.590	-	-	
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*) dan surat berharga	-	50.779.610	7.722.343	
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	6.614.773	-	
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	42.719.250	6.684.483	
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	730.603	1.036.429	
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:	-	-	-	
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	167	1.431	
24	Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	714.816	-	
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	
26	Aset lainnya:	-	-	-	
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-			
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)		-	-	
29	NSFR aset derivatif		-	-	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation margin*		-	108.777	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	2.737.834	2.471.649	12.166	
32	Rekening Administratif		61.975.950	11.936.264	
33	Total RSF				
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))				

Analisis

Persentase NSFR untuk kuartal keempat tahun 2020 adalah 164,89%, mengalami penurunan sebesar 2,62% dibandingkan kuartal ketiga 2020. Hal ini terutama dikarenakan kenaikan nilai tertimbang komponen kebutuhan pendanaan stabil (RSF) sebesar 3,09% melebihi kenaikan nilai tertimbang komponen ketersediaan pendanaan stabil (ASF) yang sebesar 1,48%.

Kenaikan nilai tertimbang komponen ASF terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah korporasi terutama dalam bentuk deposito dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan kenaikan nilai tertimbang komponen RSF disebabkan oleh kenaikan pinjaman kepada lembaga keuangan dan surat berharga.

Persentase NSFR Bank berada di atas ketentuan minimum sebesar 100% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

		Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember / 2020)				Total Nilai Tertimbang
			Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				
	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun	
		1.358.179					953.927
	-	1.623.295	3.740.633	-	-	-	1.870.316
	5.665.413	31.679.668	-	60.906.938	4.527.644	10.213.533	32.786.765
	-	-	-	9.292.848	-	-	929.285
	-	992.216	-	13.771.721	347.970	-	2.239.743
	5.306.718	29.212.577	-	35.052.958	4.178.628	9.839.596	27.979.449
	-	883.516	-	1.870.414	-	-	935.207
	-	-	-	-	-	-	-
	358.695	233.951	-	597	1.045	373.937	243.880
	-	357.408	-	918.401	-	-	459.201
	-	-	-	-	-	-	-
	-	4.302.577	-	-	-	-	4.416.577
		-	-				-
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	37.043	-	37.043
	-	108.777		-	5.381	-	131.906
	987.624	4.193.800	2.770.401	1.496.340	46.759	1.095.454	4.247.628
	11.296.459	618.307	-	67.036.021	7.486.435	13.571.636	779.337
		39.582.027					40.806.922
		167,51%					164,89%

33. Risiko Likuiditas - Aset Terikat (*Encumbrance*) (ENC)

	31 Desember 2020			
	Aset Terikat (*Encumbered*)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (*unencumbered*)	Total
Kas	-	-	627.207	627.207
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	5.404.451	5.404.451
Surat berharga yang dimiliki	-	-	19.078.540	19.078.540
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-	9.292.848	9.292.848
TOTAL	**-**	**-**	**34.403.047**	**34.403.047**

Analisis

- Aset terikat (*encumbered assets*) adalah aset bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi *stress*. *Encumbered assets* tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
- Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi kualifikasi sebagai *High Quality Liquid Assets* (HQLA) sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
- Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia, namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang kewajiban pemenuhan LCR bagi Bank Umum.
- Per 31 Desember 2020, Bank tidak memiliki posisi HQLA yang dikategorikan sebagai aset terikat (*encumbered*).

34. Risiko Operasional - Perhitungan Risiko Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakahir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	6.423.205	963.481	12.043.510
Total		**6.423.205**	**963.481**	**12.043.510**

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2019		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakahir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	4.578.029	686.704	8.583.805
Total		**4.578.029**	**686.704**	**8.583.805**

ATMR risiko operasional diukur berdasarkan pendekatan standar dimana ATMR untuk risiko operasional adalah 12,5 kali dari beban modal. Beban modal dihitung sebesar 15% dari rata-rata pendapatan bruto selama tiga tahun terakhir. Kenaikan ATMR untuk risiko operasional disebabkan oleh kenaikan rata-rata pendapatan bruto Bank untuk tiga tahun terakhir.

PROSPEK USAHA

Perekonomian global diharapkan akan membaik di tahun 2021 setelah mengalami sebuah tahun yang tidak terduga akibat pandemi COVID-19 di 2020. Dimulainya peredaran vaksin COVID-19 dan kebijakan stimulus serempak di berbagai negara memberikan harapan akan prospek perekonomian yang lebih cerah di tahun 2021.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global mencapai 4% di tahun 2021, walaupun perbaikan ekonomi tidak akan merata di negara-negara berkembang karena lamanya pandemi telah mengakibatkan konsumsi dan investasi tertahan. India, Tiongkok, Singapura, Vietnam, dan Filipina diperkirakan akan membukukan pertumbuhan kuat di atas 6% di tahun 2021, menurut Riset Global HSBC.

Namun, prospek pertumbuhan masih terus dibayangi ketidakpastian mengingat adanya keterlambatan vaksinansi serta meningkatnya kasus di beberapa negara, yang memunculkan dugaan adanya jenis virus baru yang kebal terhadap vaksin yang ada. Lemahnya perekonomian dalam jangka lama dapat menyebabkan kebangkrutan dan berdampak pada neraca perbankan. Pemerintah juga mungkin tidak bisa terus menerus memberi stimulus kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

Indonesia, yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tahun 2020, juga diperkirakan akan membaik. Pertumbuhan PDB diperkirakan akan meningkat di antara 4,3% dan 5,3% di tahun 2021. HSBC sendiri memiliki proyeksi yang lebih konservatif di angka 4% mengingat tantangan distribusi vaksin dan jumlah kasus yang tinggi. Pemerintah akan terus mendorong ekonomi melalui stimulus dan mempercepat distribusi vaksin menjangkau mayoritas populasi sesegera mungkin.

Menurut Bank Indonesia, ekspektasi konsumen, penjualan eceran, dan PMI manufaktur juga menunjukkan perbaikan di awal tahun. Inflasi masih tercatat rendah di awal 2021 dan diharapkan akan tetap berada di antara 2% sampai 4% sepanjang tahun ini.

Bank sentral telah memotong suku bunga acuan 7-*Day Reverse Repo Rate* sebesar 25 bps menjadi 3,5% tahun ini. Secara total, suku bunga acuan telah dipotong 150 bps sejak Januari 2020. Namun, perbankan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memotong suku bunga karena kondisi dunia usaha masih belum mendukung seiring dengan lemahnya permintaan di kala pandemi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,5% di tahun 2021, setelah tercatat negatif 2,4% di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Rencana Bisnis Perbankan Indonesia yang diajukan ke OJK yang menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 7,13%. Sementara dana pihak ketga diharapkan tumbuh sebesar 10% sampai 12%.

Namun demikian, perbankan harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena potensi gagal bayar meningkat di saat-saat yang tidak terduga ini. Jumlah *outstanding* restrukturisasi kredit di Indonesia mencapai 15,32% atau Rp825,8 triliun per Januari 2021, mewakili 6,06 juta debitur.

/05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

150 Dasar Penerapan Tata Kelola
150 Pernyataan Tata Kelola
151 Prinsip Tata Kelola
151 Tujuan Penerapan Tata Kelola
151 Penilaian Tata Kelola
152 Struktur Tata Kelola
152 Rapat Umum Pemegang Saham
153 Dewan Komisaris
163 Direksi
170 Pelaksanaan Konglomerasi Keuangan
171 Sekretaris Perusahan
172 Fungsi Kepatuhan
173 Permasalahan Hukum
173 Opsi Saham
173 Kepemilikan Saham Komisaris dan Direksi
173 Hubungan Afiliasi
173 Penilaian oleh Pihak Internal (*Self–Assessment*)
174 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
174 Audit Eksternal
174 Penerapan Manajemen Risiko
176 Penyediaan Dana Besar Secara Rinci
176 Pengungkapan Remunerasi 2020
180 *Internal Fraud*
180 Penanganan Pengaduan Nasabah

TATA KELOLA PERUSAHAAN

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Berawal dari tahun 1990-an, konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) muncul sebagai akibat dari krisis moneter di Kawasan Asia dan Amerika Latin. Banyak ahli berpendapat bahwa krisis tersebut terjadi karena kegagalan penerapan GCG oleh perusahaan-perusahaan. Beberapa penyebabnya antara lain adalah sistem hukum yang buruk, tidak adanya standar akuntansi dan audit, praktik-praktik perbankan yang lemah, dan kurangnya perhatian terhadap pemegang saham minoritas.

Mengikuti kegagalan tersebut, tuntutan-tuntutan agar GCG ditetapkan secara konsisten dan komprehensif muncul. Prinsip-prinsip dasar GCG seperti Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi *(Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*), juga *stakeholder concern* dianggap dapat membantu perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional.

Di awal tahun 1999, GCG mulai mendapatkan perhatian. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri No. KEP.31/M.EKUIN/08/1999 mengeluarkan Pedoman GCG yang pertama kalinya di Indonesia.

Lingkup kerja KNKCG telah diperluas dengan memasukkan isu *public governance*, sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-49/M.EKON/11/Tahun 2004 dan terakhir diperbarui dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 117 Tahun 2016.

Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan penerapan GCG melalui PBI No. 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Di akhir tahun 2016, PBI dan SEBI tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan berhasilnya integrasi Bank dengan Kantor Cabang Bank Asing Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, Bank telah mengkaji dan melakukan beberapa penyesuaian serta penyempurnaan terhadap struktur dan infrastruktur antara lain dengan menetapkan Bank sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan HSBC di Indonesia.

PERNYATAAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola Bank sebagai Perseroan Terbatas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), yang terdiri dari tiga organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambil keputusan tertinggi bagi pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Bank menyadari penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional Perusahaan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah organisasi yang sehat dan terus berkembang. Di tahun 2020, Bank tetap berkomitmen untuk menyempurnakan penerapan nilai-nilai GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, Bank akan mampu meningkatkan kinerja keuangan dan

melindungi kepentingan pemegang saham baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Bank senantiasa mengarahkan struktur dan prosedur tata kelola agar sesuai dengan peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai Perusahaan, kapasitas sumber daya dan pendekatan terhadap risiko.

PRINSIP TATA KELOLA

Untuk mencapai visi dan misi Bank di masa mendatang, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi kunci. Penerapan GCG Bank diwujudkan melalui penerapan lima prinsip dasar GCG, yaitu:

1. **Keterbukaan**
   Keterbukaan (*Transparency*) berhubungan dengan kualitas informasi yang diberikan oleh Bank. Prinsip keterbukaan ini juga menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan secara terbuka (*disclosure*). Selain itu, Bank secara terus menerus menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Keterbukaan juga diperlukan untuk menjadi acuan Bank dalam menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan berpihak kepada konsumen.

2. **Akuntabilitas**
   Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan di Bank, termasuk ukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Agar Bank dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel, pengelolaan secara sehat, terukur, dan profesional adalah prasyarat yang harus dimiliki.

3. **Pertanggungjawaban**
   Tanggung jawab (*Responsibility*) terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah wujud komitmen tinggi Bank untuk selalu mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, Bank juga terus menerapkan pengelolaan Bank secara sehat dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. **Independensi**
   Independensi (*Independency*) adalah prinsip Bank yang menjunjung tinggi pengelolaan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap badan Bank beserta seluruh jajaran di bawahnya bersikap independen agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

5. **Kewajaran**
   Asas kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh Bank berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk perlakuan dan kesempatan yang adil dengan proporsi yang seimbang kepada segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Untuk memperkuat posisi daya saing, Bank senantiasa menerapkan strategi yang sesuai dengan rencana bisnis dan melaksanakannya secara konsisten. Keunggulan yang didapat dari peningkatan daya saing ini pada akhirnya akan mampu menarik minat dan kepercayaan nasabah. Hal ini bisa membantu Bank untuk tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Melalui penerapan GCG, Bank bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan organisasi agar tercipta kesejahteraan bagi pemegang saham, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya, yang merupakan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjaga dan melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan nilai Perusahaan dan para pemegang saham.
5. Meningkatkan mutu efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen Perusahaan.

PENILAIAN TATA KELOLA

Penilaian GCG yang dilakukan oleh Bank bertujuan untuk mengukur keberhasilan penerapan GCG dalam kinerja Bank yang dibandingkan dengan *best practice*. Selain itu, penilaian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik GCG yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki sehingga dapat mencapai kondisi penerapan GCG yang ideal. Setiap semester, Bank melakukan *self-assessment* GCG, lalu hasilnya disampaikan ke regulator.

Pada periode Juni dan Desember 2020, penilaian GCG Bank termasuk dalam komposit "2", kategori "Baik". Hal ini menggambarkan bahwa peringkat pelaksanaan tingkat kesehatan bank menunjukkan bahwa secara garis besar Bank telah melakukan penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola. Bank telah melaksanakan tata kelola secara baik dan memadai namun senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan untuk memastikan tata kelola yang lebih sempurna sesuai prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Perbaikan tersebut ditindaklanjuti dan diperbaiki secara efektif dan efisien oleh manajemen.

Bank telah dijalankan dengan praktik-praktik yang sehat. Hasil penilaian *self-assessment* GCG menjadi bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara menyeluruh dan telah didiskusikan bersama Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat beberapa kelemahan minor dalam penerapan GCG di Bank yang tidak berdampak signifikan dan dapat segera diperbaiki.

STRUKTUR TATA KELOLA

Untuk memastikan penerapan prinsip GCG berjalan dengan baik, Bank telah menyusun Struktur GCG. Dalam menyusun Struktur GCG, Bank berusaha untuk melengkapi seluruh elemen yang dibutuhkan agar penerapan GCG memberikan dampak positif. Struktur tersebut memiliki beberapa aspek penting yang berperan untuk penguatan kontrol dan pengelolaan Bank.

Struktur ini terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung yang meliputi *Internal Audit*, Sekretaris Perusahaan, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris di antaranya Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam penerapan tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan HSBC di Indonesia, dan komite-komite di bawah Direksi seperti Komite Kredit, Komite Aset & Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services*, Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial dan *People Committee,* serta Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Struktur tersebut telah memenuhi ketentuan atas bentuk hukum badan usaha Perusahaan Terbatas di Indonesia dan peraturan regulator mengenai GCG untuk bank umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi pada Bank. Dalam RUPS, pemegang saham berwenang mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direktur, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. RUPS Tahunan dilangsungkan 1 (satu) kali dalam setahun dan di tahun 2020, Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2020.

RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2020 memiliki agenda, sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2019, termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("*volledig acquit et decharge*") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
4. Persetujuan dan pengesahan paket Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas Buku dan Catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Penetapan Honorarium yang relevan serta persyaratan lainnya yang berkenaan dengan penunjukan tersebut;
6. Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Perseroan, untuk memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017; dan
7. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan, untuk memenuhi Pasal 6 POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Bank telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali RUPS Luar Biasa, yaitu pada tanggal 27 Februari 2020, 13 April 2020, 17 April 2020, 4 Juni 2020, 8 Oktober 2020, 16 November 2020, dan 30 Desember 2020 dengan agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. RUPS Luar Biasa pada tanggal 27 Februari 2020 menyetujui agenda Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 April 2020 menyetujui agenda Perubahan Tanggal Efektif Pengunduran Diri Presiden Direktur dan Direktur Perseroan.
3. RUPS Luar Biasa pada tanggal 17 April 2020 menyetujui agenda Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
4. RUPS Luar Biasa pada tanggal 4 Juni 2020 menyetujui agenda Perubahan Tanggal Efektif Pengunduran Diri Presiden Direktur Perseroan dan Persetujuan dan Ratifikasi Kehadiran Komisaris Independen dalam Rapat Dewan Komisaris yang Diadakan secara Video Telekonferensi.
5. RUPS Luar Biasa pada tanggal 8 Oktober 2020 menyetujui Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. RUPS Luar Biasa pada tanggal 16 November 2020 menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
7. RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Desember 2020 menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan dan Perubahan Alamat Perseroan.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam segala hal mengenai kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris menjalankan haknya untuk memantau dan mengkaji kinerja Direksi.

Berdasarkan Tata Tertib Dewan Komisaris yang tertulis pada surat keputusan Dewan Komisaris nomor 010/SK/KOM/V/2019 yang telah dikaji ulang setiap tahun dan disetujui untuk dipergunakan kembali di rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Agustus 2020, tugas dan tanggung-jawab Dewan Komisaris di antaranya:

a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perusahaan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Bank, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
c. Melakukan tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris yang dimaksud di atas, Komisaris berkewajiban untuk:

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perusahaan.
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank dan dalam hal Bank menunjukkan gejala penurunan yang mencolok, segera melaporkan hal ini kepada RUPS disertai dengan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Bank.
d. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan RUPS.
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi yang dipersyaratkan dari waktu ke waktu mengenai perkembangan Bank.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Bank per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Matthew Kneeland Lobner
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Hanny Wurangian
Komisaris Independen	Hariawan Pribadi*
Komisaris	Mark Thomas McKeown
Komisaris Independen	Umar Juoro
Komisaris Independen	Catherinawati Hadiman Sugianto**
Komisaris	Mark Trevor Surgenor***

*) Masa jabatan beliau sebagai Anggota Dewan Komisaris Bank telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank sejak tanggal 7 Oktober 2020
***) Akan efektif menjabat sebagai Komisaris Bank jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengadakan 11 (sebelas) kali Rapat, yaitu Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 10 Februari 2020, 2 Maret 2020, 18 Mei 2020, 27 Agustus 2020 dan 26 November 2020, dan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 2 Maret 2020, 18 Mei 2020, 24 Juni 2020, 6 Agustus 2020, 27 Agustus 2020 dan 26 November 2020. Persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah Rapat sesuai dengan Masa Efektif Jabatan	Kehadiran	% Kehadiran
1	Matthew Kneeland Lobner	11	11	100%
2	Hanny Wurangian	11	11	100%
3	Hariawan Pribadi *	6	6	100%
4	Mark Thomas McKeown	11	11	100%
5	Umar Juoro	11	11	100%
6	Catherinawati Hadiman Sugianto **	2	2	100%

*) Masa jabatan beliau sebagai anggota Dewan Komisaris telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank sejak tanggal 7 Oktober 2020

Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan sekurangnya beranggotakan 2 (dua) orang pihak independen yang berasal dari luar Perusahaan dengan keahlian tertentu yang dipersyaratkan dalam peraturan.

Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Tata Tertib Komite Audit yang tertulis pada surat keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK.DEKOM/III/2020 dan merujuk pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Audit wajib melakukan paling sedikit:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:

a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.
c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Merujuk pada penerapan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
b. Mengevaluasi kinerja SKAI.
c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
d. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
h. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait Laporan Keuangan sebagai berikut:
a. Melakukan pemantauan atas integritas laporan keuangan dan secara kritis menilai laporan keuangan Perusahaan, pengungkapan Pilar 3 (jika berlaku), dan setiap informasi resmi dan peraturan tambahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan Perusahaan.
b. Meninjau, dan mempertimbangkan perubahan pada, kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk kebijakan dan praktik pengungkapan Pilar 3, sebagaimana yang berlaku.
c. Meninjau, dan melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang, penilaian justifikasi dan penyesuaian akuntansi yang signifikan.
d. Mengkaji atas asumsi keberlanjutan dan kualifikasi apa pun.
e. Melakukan *review*, sebagaimana berlaku, kepatuhan terhadap standar akuntansi, peraturan pasar modal, persyaratan pengungkapan Pilar 3 dan ketentuan lainnya.
f. Meninjau pengungkapan yang menggambarkan pekerjaan Komite dan bidang-bidang yang memerlukan perhatian khusus.
g. Melakukan *review* atas surat tanggapan dari regulator.
h. Melakukan *review* sebagaimana masukan dari Internal Audit dan fungsi lainnya atau eksternal auditor.
i. Mengkaji setiap hal-hal penting atau tidak biasa yang mungkin perlu diperhatikan dalam laporan tahunan, oleh auditor ekstern.
j. Meninjau kecukupan sumber daya dan keahlian Fungsi *Finance* serta perencanaan peralihan/ suksesi.
k. Menginformasikan kepada Dewan Komisaris bahwa laporan tahunan diambil secara keseluruhan, adil, seimbang, dan dapat dimengerti serta memberikan informasi yang diperlukan bagi pemegang saham untuk menilai posisi dan kinerja Perusahaan, model dan strategi bisnis.
l. Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang kepatuhan Perusahaan terhadap semua kode atau standar tata kelola perusahaan yang berlaku terkait dengan pelaporan keuangan.
m. Memberikan kepastian kepada Dewan Komisaris tentang kepatuhan oleh Perusahaan dengan peraturan yang relevan terkait dengan pelaporan keuangan.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan SKAI sebagai berikut:
a. Memberikan pertimbangan atas temuan utama investigasi internal dan respons manajemen, untuk membantu Dewan Komisaris dan manajemen melindungi aset, reputasi, dan keberlanjutan Grup, serta memastikan efektivitas manajemen risiko dan proses tata kelola yang relevan;
b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dan manajemen dalam memastikan keselarasan rencana audit tahunan dengan risiko utama bisnis dan alokasi anggaran;
c. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;

d. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam menerima piagam SKAI;
e. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam penunjukan pihak eksternal yang independen untuk melakukan kaji ulang kinerja SKAI secara periodik.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan audit eksternal sebagai berikut:
a. Meninjau ketentuan penunjukan, penunjukan kembali, atau pemindahan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan ketentuan pengikatannya, tunduk pada pengakuan oleh Dewan Komisaris dan persetujuan oleh pemegang saham Perusahaan.
b. Meninjau dan memantau independensi, objektivitas, dan efektivitas proses audit eksternal auditor, dengan mempertimbangkan persyaratan profesional, peraturan, dan lainnya yang relevan.
c. Mengawasi perubahan/rotasi mitra audit/auditor ekstern.
d. Meninjau laporan auditor ekstern tentang kemajuan audit, surat manajemen, pertanyaan material yang diajukan oleh auditor ekstern kepada manajemen (dan tanggapan mereka). Segala risiko material atau masalah pengendalian internal harus dirujuk ke Komite Pemantau Risiko, sebagaimana diperlukan.
e. Berdiskusi dengan auditor ekstern pendekatan, sifat, dan ruang lingkup audit dan kewajiban pelaporan mereka selama proses audit.
f. Mengawasi penerapan oleh manajemen kebijakan Grup HSBC mengenai adanya keterlibatan eks-karyawan/kontraktor auditor ekstern.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan Pengendalian Internal sebagai berikut:
a. Meninjau efektivitas pengendalian keuangan internal Bank.
b. Mempertimbangkan temuan investigasi yang berdampak besar atas pengendalian internal mengenai masalah pelaporan keuangan, respons manajemen, dan kesimpulan pengujian apa pun yang dilakukan oleh SKAI atau audit eksternal.
c. Mengkaji setiap laporan tahunan, dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dari Presiden Direktur dan Direktur Keuangan yang diungkapkan oleh orang-orang tersebut kepada Komite Audit dan kepada auditor ekstern semua kekurangan dan kelemahan material yang signifikan dalam desain atau operasi internal mengendalikan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan Bank untuk merekam dan melaporkan data keuangan dan segala kecurangan, baik yang material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau karyawan lain yang memiliki peran signifikan dalam pengendalian keuangan internal.
d. Memberikan persetujuan konten pernyataan yang berkaitan dengan kontrol keuangan internal dalam laporan tahunan, atau yang setara, untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait dengan *Whistleblowing* sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan dan prosedur dari Grup sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku untuk mengidentifikasi dan menanggapi masalah pelapor.
b. Mengawasi pelaksanaan prosedur yang sesuai untuk memastikan kerahasiaan, perlindungan dan perlakuan yang adil dari pelapor.
c. Secara rutin meninjau kembali laporan yang timbul dari pengoperasian kebijakan dan prosedur *whistleblowing*.
d. Memastikan bahwa pengaturan telah ada untuk melakukan penyelidikan yang cukup dan independen dari hal-hal tersebut dan untuk tindak lanjut.

Melakukan *review* atas pelaksanaan dan keefektifan ketentuan secara tahunan di mana staf dapat menyampaikan kekhawatirannya secara rahasia.

Tanggung Jawab Komite Audit Lainnya

1. Sertifikasi Tengah Tahunan kepada Audit Komite Grup
   Untuk memberikan sertifikat tengah tahunan dalam bentuk yang ditentukan oleh Komite Audit Grup ke Komite Audit *Principal Subsidiary* di regional yang memantau Bank dengan memberikan dokumentasi atau memberikan jaminan seperti yang diminta oleh Komite Audit Grup dan/atau Komite Audit *Principal Subsidiary* di regional yang mengawasi bank dari waktu ke waktu, termasuk: sertifikasi berkala, mengadopsi praktik terbaik, terbuka dalam berbagi informasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku, dan berinteraksi dengan Komite Audit Grup dan/atau Komite Audit *Principal Subsidiary* di regional yang memantau bank dan/atau ketua komite secara berkala.

2. *Review* Tahunan Tata Tertib dan Efektifitas Komite
   Komite Audit melakukan *review* atas tata tertib ini setiap tahun dan efektivitasnya dan menyampaikan rekomendasi atas perubahan yang diperlukan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris bagaimana Komite Audit melaksanakan tanggung jawabnya dan akan membuat rekomendasi atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan.

3. Penyimpangan yang Materil
   Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, Komite Audit regional (*Principal Subsidiary*) yang memantau bank, akan diminta untuk melakukan *review* dan memberikan saran mengenai perbedaan yang materil dari *core terms of reference*.

4. Laporan kepada Dewan Komisaris
   Komite Audit menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal yang diatur dalam tata tertib ini dan akan memberikan pengawasan tambahan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan efektivitas fungsi *finance* dan audit.

5. Tanggung jawab yang tumpang tindih
   Jika terdapat tanggung jawab yang dirasakan tumpang tindih antara Komite Audit dan komite lain dari Dewan Komisaris, maka masing-masing Ketua Komite memiliki keleluasaan untuk menyetujui komite mana yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban apa pun. Kewajiban berdasarkan Tata Tertib komite mana pun akan dianggap oleh Dewan Komisaris telah dipenuhi, sepanjang ditangani oleh komite lain tersebut.

Komposisi Anggota Komite Audit
Komite Audit Komite terdiri dari empat (4) anggota independen. Per 31 Desember 2020, komposisi Komite Audit adalah

No	Nama	Jabatan
1	Hanny Wurangian	Ketua Komite Audit (Komisaris Independen)
2	Umar Juoro	Anggota Komite Audit (Komisaris Independen)
3	Yustrida Bernawati	Anggota Komite Audit (Pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi)
4	Ubaidillah Nugraha	Anggota Komite Audit (Pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan)

Rapat
Selama tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali Rapat Komite Audit yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, 18 Mei 2020, 5 Juni 2020, 27 Juli 2020, 30 Juli 2020, 27 Agustus 2020 dan 26 November 2020. Persentase kehadiran dalam rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Audit		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Hanny Wurangian	7	7	100%
2	Umar Juoro	7	7	100%
3	Yustrida Bernawati	7	7	100%
4	Ubaidillah Nugraha	7	7	100%

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko yang tertulis pada surat keputusan Dewan Komisaris nomor 011/SK/KOM/V/2019 yang telah dikaji ulang setiap tahun dan disetujui untuk digunakan kembali pada rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Agustus 2020 dan merujuk pada Peraturan OJK nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab, wewenang, otoritas, dan kebijakan sebagai berikut:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris dalam hal:

1. Perihal yang terkait Risiko
   a. Memantau dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris mengenai semua perihal yang menunjukkan adanya risiko, termasuk risiko keuangan dan risiko non-keuangan.
   b. Memberikan *review* dan pendapat yang independen atas laporan manajemen risiko, termasuk laporan risiko perusahaan Bank yang memberikan Komite Pemantau Risiko untuk:
      - Menilai profil risiko Bank dan bagaimana risiko yang timbul dari bisnis Bank dikendalikan, dipantau, dan dimitigasi.
      - Memberikan perhatian atas risiko saat ini dan yang mungkin terjadi dan memungkinkan Komite Pemantau Risiko untuk menilai kerentanan Bank terhadap risiko yang tidak teridentifikasi.
      - Mengawasi kerangka kerja dan hasilnya, untuk memastikan Bank memberikan perlakukan yang adil bagi nasabah dan tidak mengganggu operasi pasar keuangan yang tertib dan transparan.
      - Memberikan kepastian tambahan sebagaimana yang diperlukan oleh Dewan Komisaris atas keandalan informasi risiko.

2. *Risk Appetite*
   a. Untuk mendapatkan keyakinan bahwa *risk appetite* menginformasikan strategi dan rencana bisnis Bank dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan keuangan, menggunakan penilaian atas stabilitas keuangan dan sumber-sumber lainnya yang relevan.
   b. Memberi saran kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal terkait dengan *risk appetite* dan *risk tolerance.*
   c. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas *risk appetite* Bank sekurangnya setiap tahun untuk persetujuan Dewan Komisaris.
   d. Menerima laporan yang sesuai, untuk memastikan pendekatan Bank untuk menetapkan *risk appetite* sejalan dengan regulasi yang berlaku.
   e. Bila dan jika diminta oleh Dewan Komisaris, mempertimbangkan dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas risiko-risiko terkait dengan usulan akuisisi/penjualan dan uji tuntas, memberikan perhatian terhadap aspek risiko dan implikasinya untuk *risk appetite* dan *risk tolerance* bagi Bank.
   f. Selama terdapat permintaan Dewan Komisaris atau komite lainnya yang mengawasi remunerasi, memberikan masukan tentang penyelarasan remunerasi dengan *risk appetite*.
   g. Mempertimbangkan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris tentang risiko yang terkait dengan *cyber security* dan keamanan informasi.
   h. Memberikan *review* dan saran kepada Dewan Komisaris tentang risiko yang berkaitan dengan TI dan program ketahanan operasional Bank.

3. *Stress Testing*
   Melakukan *review* dan mendapatkan keyakinan bahwa Bank memiliki kerangka kerja *stress testing*, tata kelola dan pengendalian internal terkait yang kuat.

4. Kerangka *Enterprise Risk Management* dan Sistem Pengendalian Intern
   a. Melakukan *review* tahunan atas kerangka kerja manajemen risiko perusahaan Bank dan memastikan berfungsi dengan efektif di seluruh lini Bank.
   b. Untuk meninjau efektivitas sistem pengendalian internal (selain sistem pengendalian keuangan internal).
   c. Untuk menanamkan dan mempertahankan budaya risiko yang mendukung, yang mencakup lingkungan pengendalian internal yang kuat.

   Dalam melaksanakan hal di atas, Komite Pemantau Risiko akan:
   a. Memastikan adanya pengendalian yang memadai untuk kepatuhan terhadap Grup HSBC dan kebijakan Bank.
   b. Mempertimbangkan temuan yang material dari regulator yang berkaitan dengan tata kelola risiko, pelaksanaan bisnis, penilaian risiko, atau proses manajemen.
   c. Memastikan adanya pengendalian yang memadai atas risiko kepatuhan terhadap peraturan.

5. Direktur Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko
   a. Memantau efektivitas dan independensi Direktur Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan fungsi manajemen risiko, independen terhadap bisnis dan memiliki sumber daya yang memadai.
   b. Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat atau memberhentikan Direktur Manajemen Risiko.

6. Audit Intern
   a. Melakukan *review* atas laporan audit intern untuk mendapatkan keyakinan atas kecukupan proses pengendalian intern.
   b. Untuk memastikan bahwa Komite Audit telah diinformasikan mengenai tugas Komite Pemantau Risiko sehubungan dengan laporan audit intern dan, khususnya, segala hal yang dirasakan berkenaan dengan lingkup atau kecukupan pekerjaan SKAI.

7. Audit Ekstern
   Melakukan *review* atas temuan yang diangkat oleh auditor ekstern sehubungan dengan audit laporan tahunan Bank (dan respons manajemen) yang berkaitan dengan pengelolaan risiko atau sistem pengendalian intern (selain sistem pengendalian keuangan intern).

8. Laporan Tahunan
   Bilamana dapat diterapkan, mengkaji dan mendukung konten laporan atau pernyataan Komite Manajemen Risiko yang dimuat dalam laporan tahunan yang terkait dengan pengendalian internal (selain sistem kontrol keuangan internal) dan kelayakan, termasuk penilaian risiko utama yang dihadapi bank. Perhatian Komite Pemantau Risiko akan berfokus pada hal-hal berikut:
   a. Pengungkapan risiko bank, termasuk strategi dalam konteks manajemen risiko, risiko yang melekat pada strategi bank, *risk appetite* dan *risk tolerance* terkait, dan bagaimana *risk appetite* aktual dinilai setiap saat.
   b. Informasi mengenai dampak dari potensi risiko yang akan dihadapi Bank.
   c. Penjelasan mengenai bagaimana Bank mengelola risiko dan peran Komite Pemantau Risiko dalam memberikan pengawasan.

Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Lainnya

a. Sertifikasi Tengah Tahunan kepada Komite Risiko Grup
   Untuk memberikan sertifikat tengah tahunan dalam bentuk yang ditentukan oleh Komite Risiko Grup kepada komite risiko *Principal Subsidiary* di regional yang memantau bank dengan memberikan dokumentasi atau memberikan jaminan seperti yang diminta oleh Komite Risiko Grup dan/atau komite risiko *Principal Subsidiary* di regional tersebut yang memantau bank dari waktu ke waktu, termasuk: sertifikasi berkala, mengadopsi praktik terbaik, terbuka dalam berbagi informasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku, dan berinteraksi dengan Komite Risiko Grup dan/atau komite risiko *Principal Subsidiary* di regional yang melakukan pemantauan terhadap bank dan/atau ketua secara berkala.

b. *Review* Tahunan Tata Tertib dan Efektivitas Komite
   Komite Pemantau Risiko melakukan *review* atas tata tertib ini setiap tahun dan efektivitasnya dan menyampaikan rekomendasi atas perubahan yang diperlukan kepada Dewan Komisaris.

   Komite Pemantau Risiko melaporkan kepada Dewan Komisaris bagaimana Komite Pemantau Risiko melaksanakan tanggung jawabnya dan akan membuat rekomendasi atas tindakan apa pun yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan.

c. Penyimpangan yang Material
   Komite Risiko regional (*Principal Subsidiary*) yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Bank, akan diminta untuk melakukan *review* dan memberikan masukan mengenai perbedaan yang materil dari *core terms of reference.*

d. Laporan kepada Dewan Komisaris
   Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris perihal yang diatur dalam tata tertib ini dan akan memberikan pengawasan tambahan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan efektivitas fungsi manajemen risiko.

e. Tanggung jawab yang tumpang tindih
   Jika terdapat tanggung jawab yang dirasakan tumpang tindih antara Komite Pemantau risiko dan komite lain dari Dewan Komisaris, maka masing-masing Ketua Komite memiliki keleluasaan untuk menyetujui komite mana yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban apapun. Kewajiban berdasarkan Tata Tertib komite manapun akan dianggap oleh Dewan Komisaris telah dipenuhi, sepanjang ditangani oleh komite lain tersebut.

Komite Pemantau Risiko terdiri dari empat (4) anggota independen. Di periode tahun 2020 komposisi Komite Pemantau Risiko adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Umar Juoro	Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)
2	Hariawan Pribadi*	Anggota Pemantau Risiko (Komisaris Independen)
3	Catherinawati Hadiman Sugianto**	Anggota Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)
4	Yustrida Bernawati	Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan)
5	Ubaidillah Nugraha	Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak independen yang memiliki keahlian di manajemen risiko)

*) Masa jabatan beliau sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank sejak 7 Oktober 2020

Rapat

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Komite Pemantau Risiko yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, 18 Mei 2020, 27 Agustus 2020 dan 26 November 2020. Persentase kehadiran dalam rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Umar Juoro	4	4	100%
2	Hariawan Pribadi*	2	2	100%
3	Catherinawati Hadiman Sugianto**	1	1	100%
4	Yustrida Bernawati	4	4	100%
5	Ubaidillah Nugraha	4	4	100%

*) Masa jabatan beliau sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Bank sejak tanggal 7 Oktober 2020

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas perbankan lainya, Dewan Komisaris Bank bertanggung jawab untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Dalam hal penerapan dari tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki kebijakan internal yang termasuk panduan kerja dan prosedur yang diketahui dan dipatuhi oleh setiap dari anggota Komite.

Tujuan Komite Remunerasi ini untuk mengawasi berbagai hal terkait dengan remunerasi yang berdampak pada Bank, khususnya untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan dan operasional terhadap kebijakan remunerasi Bank;
2. Memastikan kebijakan remunerasi tidak melanggar hukum, aturan atau regulasi apapun;
3. Memastikan remunerasi sejalan dengan *risk appetite*, strategi bisnis, budaya dan nilai-nilai, dan kepentingan jangka panjang Bank;
4. Memastikan kebijakan remunerasi yang tepat untuk menarik talenta terbaik, mempertahankan dan memotivasi mereka dengan kualitas yang dibutuhkan untuk mendukung suksesnya Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Tata Tertib Komite Remunerasi dan yang tertulis pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SK/DEKOM/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tanggung jawab, kewenangan, otoritas dan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan keseluruhan remunerasi Bank dalam konteks kerangka kebijakan, dan memberikan masukan dalam penerapan kebijakan remunerasi Bank sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kondisi pasar;

2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

3. Melakukan proses *pay review* tahunan Bank dengan:
   a. mempertimbangkan hal-hal yang terkait dalam persetujuan pembiayaan remunerasi dan usulan yang relevan untuk Bank, dan melakukan eskalasi atas segala hal dirasa perlu kepada Dewan Komisaris; dan
   b. melakukan tinjauan dan rekomendasi (sebelum, ketika dalam kasus-kasus tertentu, persetujuan akhir oleh Dewan Komisaris) remunerasi yang berdasarkan kinerja dan memberikan umpan balik kepada Dewan Komisaris;

4. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   b. kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

5. Memastikan kebijakan remunerasi, praktik dan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan dan strategi bisnis, sasaran, budaya, tata nilai dan kepentingan jangka panjang Bank;

6. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

7. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

8. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

9. Memastikan setiap pegawai yang bekerja untuk kepentingan Bank mendapatkan remunerasi yang sesuai untuk mendukung manajemen risiko yang sehat dan efektif serta sejalan dengan kepentingan jangka panjang Bank;

10. Memastikan kebijakan remunerasi yang dijalankan oleh Bank tunduk kepada, dan dikaji sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku;

11. Meninjau remunerasi berbasis kinerja dengan mengacu kepada tujuan Bank yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan, jika ada, yang berkaitan dengan persetujuan atas remunerasi dan usulan-usulan yang relevan bagi Bank untuk menyempurnakan proses *pay review* tahunan dari Bank.

Tanggung Jawab Khusus Terkait Kebijakan, Risiko, dan Audit

1. Meninjau segala hal terkait remunerasi yang perlu dilaporkan kepada Dewan Komisaris pemegang saham dan regulator, dan memberikan penilaian terhadap penerapan kontrol yang efektif untuk memastikan kebijakan, praktik dan prosedur remunerasi:
   a. Dengan jelas sejalan dengan *risk appetite* Bank;
   b. Konsisten dalam mempromosikan manajemen risiko Bank yang efektif;
   c. Menghindari pengambilan risiko yang melebihi tingkat toleransi risiko Bank;
   d. Menghindari pengambilan risiko yang dapat mengakibatkan Bank melanggar regulasi dan kewajiban legislatif lainnya

   Hal ini termasuk peninjauan dan pemberian persetujuan terhadap:
   a. isi dari laporan remunerasi (jika ada) pada laporan tahunan dan termasuk di dalamnya pelaporan (yang setara) Bank kepada Dewan Komisaris secara keseluruhan; dan
   b. laporan yang sifatnya material yang diperlukan oleh regulator mewakili Komite Remunerasi dan Nominasi terkait pendekatan remunerasi Bank;

2. Mendapatkan konfirmasi dan usulan dari Komite Manajemen Risiko Bank atau Direktur Manajemen Risiko, jika dibutuhkan, terkait keselarasan risiko dan remunerasi, serta penyesuaian risiko sebagaimana dibutuhkan, untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan *variable pay pool* dan keputusan remunerasi. Dalam hal perbedaan sudut pandang, penerapan penyesuaian risiko yang berbeda wajib disampaikan oleh Presiden Komisaris untuk pertimbangan lebih lanjut;

3. Memastikan kebijakan remunerasi, praktik dan prosedur:
   a. konsisten dengan dan mempromosikan manajemen risiko Bank yang sehat dan efektif;
   b. tidak mendorong adanya *risk-taking* yang melebihi tingkat toleransi risiko Bank;
   c. tidak mendorong adanya pengambilan risiko yang dapat menyebabkan ketidakmampuan Bank untuk mematuhi peraturan yang berlaku;

Pelaksanaan Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib untuk meninjau setiap tahunnya mengenai tata

tertib Komite Remunerasi dan Nominasi dan efektivitasnya dan memberikan rekomendasi perubahan yang dianggap perlu untuk persetujuan Dewan Komisaris dan dalam hal penyimpangan yang signifikan dari kerangka tata tertib yang digariskan, dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2. Dalam periode tahunan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaporkan dan menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang bagaimana Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tanggung jawabnya dan akan merekomendasikan terkait hal-hal yang diperlukan untuk penyelesaian masalah atau untuk perbaikan.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat meminta pendapat dan masukan dari para ahli atau konsultan lainnya dari waktu ke waktu untuk membantu Komite Remunerasi dan Nominasi dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dalam memenuhi tanggung jawabnya. Komite Remunerasi dan Nominasi dapat memperoleh nasihat dari eksternal yang profesional yang dianggap sesuai dengan mempertimbangkan pengalaman, analisis dan penilaian dari eksternal yang relevan di luar Bank. Setiap penunjukan wajib dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan, yang akan bertanggung jawab, atas nama Komite Remunerasi dan Nominasi, untuk pengaturan kontrak dan pembayaran biaya oleh Bank.

4. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau duplikasi tanggung jawab antara Komite Remunerasi dan Nominasi dengan komite lainnya, Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk komite yang paling tepat untuk memenuhi kewajiban tertentu. Kewajiban di bawah kerangka acuan komite manapun akan dianggap telah dipenuhi oleh Dewan Komisaris, apabila telah dilakukan oleh komite lain.

Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:
Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari lima (5) anggota. Di periode tahun 2020 Komposisi Komite adalah:

No	Nama	Jabatan
1	Umar Juoro	Ketua Komite (Komisaris Independen)
2	Hariawan Pribadi*	Anggota Komite (Komisaris Independen)
3	Mark Thomas McKeown	Anggota Komite (Komisaris Independen)
4	Matthew Kneeland Lobner	Anggota Komite (Komisaris Independen)
5	Catherinawati Hadiman Sugianto**	Anggota Komite (Komisaris Independen)
6	Heni T Budisetio	Anggota Komite (Pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia)

*) Masa jabatan beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sejak tanggal 7 Oktober 2020

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 5 (lima) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu pada tanggal 10 Februari 2020, 2 Maret 2020, 18 Mei 2020, 27 Agustus 2020 dan 26 November 2020.

Persentase kehadiran dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1	Umar Juoro	5	5	100%
2	Hariawan Pribadi*	2	2	100%
3	Mark Thomas McKeown	5	5	100%
4	Matthew Kneeland Lobner	5	5	100%
5	Heni T Budisetio	5	5	100%
6	Catherinawati Hadiman Sugianto**	1	1	100%

*) Masa jabatan beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020
**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sejak tanggal 7 Oktober 2020

DIREKSI

Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank sesuai dengan Anggaran Dasar. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab kolektif terkait pengelolaan Bank untuk menghasilkan nilai tambah dan memastikan keberlangsungan bisnisnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Berdasarkan Tata Tertib Direksi yang tertulis pada surat keputusan Direksi nomor 023/SK/DIR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah dikaji ulang setiap tahun dan disetujui untuk digunakan kembali di rapat Direksi tanggal 26 agustus 202, tugas utama Direksi di antaranya:

1. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Bank sesuai dengan tujuan Bank dan berupaya secara konsisten meningkatkan efisiensi dan efektivitas Bank.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus harta kekayaan Bank.
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang mencakup anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.

Merujuk pada POJK NO. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, Direksi wajib sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Membentuk paling sedikit:
   a. SKAI.
   b. Satuan kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
   c. Satuan kerja kepatuhan.
6 Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
   a. Untuk proyek bersifat khusus.
   b. Didasarkan pada kontrak kerja yang jelas.
   c. Merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
2. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
3. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
4. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan maupun mewakili dalam semua hal yang berkaitan, untuk mengikatkan Bank dengan pihak lain dan mengikatkan pihak lain dengan Bank, dan untuk mengambil segala tindakan, yang berhubungan dengan manajemen dan kepemilikan saham, dibatasi dengan ketentuan dalam paragraf berikut, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jajaran Direksi didukung oleh satuan-satuan kerja di bawahnya serta komite-komite yang dibentuk oleh Direksi dalam melaksanakan GCG yang baik dalam kegiatan operasionalnya. Direksi memantau pelaksanaan penerapan GCG oleh satuan kerja tersebut antara lain melalui pertemuan berkala seperti Komite Kredit, Komite *Aset & Liabilitas*, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services*, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial, *People Committee* dan *Head of Business*.

Komposisi Direksi

Adapun komposisi Direksi Bank per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Sumit Dutta[1]
Presiden Direktur	Francois de Maricourt[2]
Direktur	Dio Alexander Samsoeri
Direktur	John Peter Watt Rosie[3]
Direktur	Blake Digney Philip Hellam[4]
Direktur	Tripudjo Putranto Soemarko[5]
Direktur Kepatuhan	Yessika Effendi[5]
Direktur	Caecilia Pudji Widyarti[6]
Direktur	Stephen Whilton Angell
Direktur	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo[7]
Direktur	Eri Budiono[7]
Direktur	Riko Adythia[8]
Direktur	Nisha Asha Bhambhani[9]
Direktur	James Rex Elwes[10]

1 Masa jabatan beliau sebagai Presiden Direktur Bank telah berakhirpada tanggal 30 Juni 2020
2 Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Bank sejak tanggal 17 Agustus 2020
3 Mengundurkan diri sebagai Direktur Bank efektif pada tanggal 20 November 2020
4 Mengundurkan diri sebagai Direktur Bank efektif pada tanggal 26 Juni 2020
5 Masa jabatan beliau sebagai anggota Direksi Bank telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
6 Telah diangkat sebagai Direktur yang melaksanakan tugas sementara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada RUPS Tahunan Bank Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan HBID yang baru efektif jika dan atas persetujuan OJK untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan memperhatikan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7 Efektif menjabat sebagai anggota Direksi Bank sejak tanggal 26 Juni 2020
8 Efektif menjabat sebagai Direktur Bank sejak tanggal 10 November 2020
9 Akan efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10 Akan efektif menjabat sebagai Direktur Bank jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (*Fit and Proper Test*) atau tanggal diterbitkannya izin kerja, yang mana yang lebih lama terjadi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat Direksi

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh keputusan Direksi diambil berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat Direksi yang dilaksanakan secara berkala, minimal setiap 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2020, Direksi telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 20 (dua puluh) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2020, 22 Januari 2020, 25 Februari 2020, 24 Maret 2020, 22 April 2020, 6 Mei 2020, 20 Mei 2020, 2 Juni 2020, 15 Juni 2020, 23 Juni 2020, 10 Juli 2020, 16 Juli 2020, 24 Juli 2020, 3 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, 24 September 2020, 26 Oktober 2020, 16 November 2020, 25 November 2020 dan 18 Desember 2020.

Persentase kehadiran dalam Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Direksi					
		Jumlah Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	Kehadiran Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	% Kehadiran Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	Jumlah Rapat Direksi tambahan	Kehadiran Rapat Direksi tambahan	% Kehadiran Rapat Direksi tambahan
1	Sumit Dutta[1]	6	6	100%	4	4	100%
2	Francois de Maricourt[2]	5	5	100%	1	1	100%
3	John Peter Watt Rosie[3]	10	10	100%	8	8	100%
4	Blake Digney Philip Hellam[4]	6	6	100%	4	3	75%
5	Tripudjo Putranto Soemarko[5]	6	6	100%	4	3	75%

No	Nama	Rapat Direksi					
		Jumlah Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	Kehadiran Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	% Kehadiran Rapat Direksi yang sudah dijadwalkan	Jumlah Rapat Direksi tambahan	Kehadiran Rapat Direksi tambahan	% Kehadiran Rapat Direksi tambahan
6	Yessika Effendi[5]	6	6	100%	4	4	100%
7	Caecilia Pudji Widyarti[6]	12	10	83%	8	7	88%
8	Stephen Whilton Angell	12	9	75%	8	6	75%
9	Dio Alexander Samsoeri	12	11	92%	8	8	100%
10	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo[6]	6	6	100%	4	4	100%
11	Eri Budiono[7]	6	5	83%	4	4	100%
12	Riko Adythia[8]	2	1	50%	1	1	100%

1) Masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Bank telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2020
2) Efektif menjabat sebagai Presiden Direktur Bank sejak tanggal 17 Agustus 2020
3) Mengundurkan diri sebagai Direktur Bank efektif pada tanggal 20 November 2020
4) Mengundurkan diri sebagai Direktur Bank efektif pada tanggal 26 Juni 2020
5) Mengundurkan diri sebagai anggota Direksi Bank efektif pada tanggal 30 Juni 2020
6) Telah diangkat sebagai Direktur yang melaksanakan tugas sementara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada RUPS Tahunan Bank Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank yang baru efektif jika dan atas persetujuan OJK untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan memperhatikan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7) Efektif menjabat sebagai anggota Direksi Bank sejak tanggal 26 Juni 2020
8) Efektif menjabat sebagai Direktur Bank efektif sejak tanggal 10 November 2020

Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh 6 (enam) Komite Eksekutif yakni Komite Kredit, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services*, Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial, dan *People Committee*.

A. Komite Kredit

Komite Kredit dibentuk untuk menyetujui proposal pemberian kredit, termasuk seluruh proses yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah.

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit berwenang untuk menyetujui seluruh hal yang berkaitan dengan *wholesale credit*, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Memberikan keputusan atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/ pengusul.
2. Menyetujui seluruh aplikasi kredit dalam jumlah yang tidak terbatas dengan mengacu pada ketentuan dan tata kelola yang berlaku.
3. Menyetujui seluruh aplikasi kredit sindikasi selama kondisi Bank tidak lebih lemah dari bank lain
4. Menyetujui *Loan Sales* dalam jumlah berapapun selama transakti tersebut bersifat *arm's length*.

Anggota Komite Kredit

Komite Kredit Bank terdiri dari:
Ketua: Presiden Direktur
Anggota:

1. Direktur Keuangan
2. Direktur *Commercial Banking*
3. *Global Banking Director*
4. *Deputy to Commercial Banking Director*
5. *Head of Department* dari GB dan CMB
6. *Head of Wholesale Credit Approval*
7. *Wholesale Credit Approver Team Leader*

Setiap keputusan Komite Kredit *Wholesale* wajib dituangkan secara tertulis dan diputuskan secara bersama-sama oleh paling tidak 3 (tiga) anggota Komite Kredit sebagai berikut:

- *Head of Wholesale Credit Approval*; dan
- Salah satu dari Direktur *Commercial Banking* ATAU *Deputy to Commercial Banking Director* ATAU Direktur *Global Banking* ATAU delegasi mereka; dan
- 1 anggota Komite Kredit lainnya.

Dalam hal rapat Komite tidak dapat dilakukan, maka dapat digantikan dengan persetujuan dari 3 (tiga) anggota Komite Kredit dengan sirkulasi dokumen atau dengan sirkulasi email; dengan ketentuan sama dengan di atas.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dari salah satu anggota Komite Kredit termasuk dari *Head of Wholesale Credit Approval* atau *Wholesale Credit Approvals Team Leader*, yang didokumentasikan dan disediakan kepada Komite Kredit; keputusan Komite Kredit harus diperoleh dengan persetujuan dari 3 (tiga) anggota Komite Kredit yang terdiri dari dua Direksi yang merupakan anggota Komite Kredit dan satu anggota Komite Kredit lainnya.

Setiap proposal kredit yang akan diajukan ke Komite Kredit harus sebelumnya mendapatkan opini dari Direktur Manajemen Risiko atau *Head of Risk Management & Risk Regulatory Engagement* bila Direktur Manajemen Risiko berhalangan.

Dalam hal *Head of Wholesale Credit Approval* berhalangan maka kewenangan pada Komite Kredit secara otomatis didelegasikan kepada *Wholesale Credit Approval Team Leader*.

Dalam hal Direktur *Commercial Banking* atau *Deputy to Commercial Banking Director* atau *Global Banking Director* berhalangan maka kewenangan pada Komite Kredit secara otomatis didelegasikan kepada *Head of Department* di GB atau CMB.

Rapat:
Rapat-rapat yang diadakan Komite Kredit adalah meliputi persetujuan kredit proposal.

Dalam hal rapat Komite tidak dapat dilakukan, maka dapat digantikan dengan dengan sirkulasi dokumen atau dengan sirkulasi *email*.

B. Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas adalah komite di bawah Direksi yang bertujuan untuk mengelola secara keseluruhan aset dan liabilitas dari Bank untuk memaksimalkan pengembalian, meningkatkan profitabilitas, mengelola modal dan pendanaan, dan untuk melindungi Bank atas konsekuensi keuangan yang parah yang timbul dari risiko likuiditas, risiko suku bunga, modal dan pendanaan, peraturan dan lingkungan pasar.

Tanggung Jawab Komite Aset dan Liabilitas

1. Mengelola neraca dengan tujuan untuk mencapai alokasi yang efisien dan pemanfaatan semua sumber daya, meningkatkan keuntungan ekonomi dengan meningkatkan laba bersih dan mempromosikan efisiensi dalam penggunaan modal dan pendanaan dengan meningkatkan laba atas aset berisiko dalam konteks kebijakan pertumbuhan yang jelas dan meninjau semua risiko dan memastikan manajemen yang berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk memasukkan risiko struktural suku bunga, risiko nilai tukar struktural, risiko likuiditas dan risiko pendanaan.

2. Memberikan arahan dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur neraca yang berubah untuk mencapai target kinerja di dalam parameter risiko yang ditentukan.

3. Memonitor lingkungan eksternal dan mengukur dampak pada profitabilitas masa depan, strategi dan faktor-faktor neraca seperti: volatilitas suku bunga, likuiditas pasar, volatilitas nilai tukar, kebijakan moneter dan fiskal, perilaku nasabah dan tindakan Bank pesaing, dan dampak dari perubahan akuntansi dan peraturan.

4. Memahami interaksi antara lini bisnis yang berbeda-beda dan portofolio dalam posisi keuangan dan isu-isu yang mempengaruhi seperti *transfer pricing*, pola perilaku dan alokasi sumber daya.

5. Menyediakan sebuah forum untuk membahas isu-isu Komite Aset dan Liabilitas dan memfasilitasi kerja sama antara bisnis/departemen yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah antar departemen seperti *transfer pricing*.

6. Meninjau keseluruhan sumber dan alokasi dana.

7. Melihat ke depan dan menentukan lingkungan perbankan yang paling memungkinkan untuk perencanaan aset/liabilitas dan tinjauan skenario kontinjensi.

8. Mengevaluasi alternatif suku bunga, harga dan skenario kombinasi portofolio, meninjau distribusi aset/ liabilitas dan jatuh tempo dan rasionalisasi Bank.

Anggota Komite Aset dan Liabilitas
Komite Aset dan Liabilitas terdiri dari:
Ketua: Presiden Direktur
Sekretaris: ALCM
Undangan tetap: Sekretaris Perusahaan
Anggota :
1. Direktur Keuangan
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur *Commercial Banking*
4. Direktur *Wealth & Personal Banking*
5. Direktur *Global Banking*
6. *Head of Global Markets and HSS*
7. Direktor Manajemen Risiko
8. Direktur *Operations & IT*
9. *Head of Asset Liability and Capital Management*
10. *Head of Balance Sheet Management*
11. *Head of Risk Management and Risk Regulatory Engagement*

Rapat
Selama tahun 2020, rapat ALCO telah dilaksanakan 12 kali yaitu pada tanggal 22 Januari, 25 Pebruari, 24 Maret, 22 April, 20 Mei, 23 Juni, 22 Juli, 26 Agustus, 23 September, 21 Oktober, 25 November dan 18 Desember.

C. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan mitigasi yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

Tujuan dan Ruang Lingkup Rapat Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai badan pengendali atas keseluruhan manajemen risiko perusahaan dengan fokus pada kultur risiko, minat risiko, profil risiko, dan keselarasan manajemen risiko dalam tujuan strategis Bank. Komite Manajemen Risiko diharapkan dapat memenuhi tujuan berikut:

- Untuk mempertimbangkan isu utama/tema umum terkait manajemen risiko yang diidentifikasi dari berbagai laporan risiko perusahaan.
- Untuk melakukan kajian dan memberi rekomendasi kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris meliputi kebijakan dan strategi manajemen risiko, penyempurnaan implementasi manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi, serta keputusan bisnis.
- Mengkaji dan memutuskan hal untuk eskalasi lanjut.
- Mempromosikan dan menurunkan budaya yang mendukung manajemen risiko dan pengendalian, dan juga memastikan praktik manajemen risiko bank mendukung hasil berperilaku.

Anggota Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko Terdiri dari:
Ketua: Direktur Risiko
Anggota:

1. Presiden Direktur
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Operasional dan IT
4. Direktur *Global Banking*
5. *Head of Global Markets & HSS*
6. Direktur *Commercial Banking*
7. Direktur *Wealth & Personal Banking*
8. Direktur SDM
9. Direktur Kepatuhan
10. Kepala SKMR
11. *General Legal Counsel*

Rapat
Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu pada 22 Januari, 25 Februari, 24 Maret, 22 April, 23 Juni, 22 Juli, 26 Agustus, 23 September, 21 Oktober dan 25 November.

D. Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan Services

Deskripsi
Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* adalah komite yang memonitor aktivitas-aktivitas Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* adalah:

1. Merencanakan strategi Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama, seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank;
3. Menetapkan prioritas proyek Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* yang bersifat kritikal dan memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut;
4. Memantau risiko pada sektor Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* dan berupaya untuk mengurangi paparannya;
5. Memantau kinerja Teknologi Informasi, Operasi dan *Services*, dan berfungsi sebagai katalisator dalam peningkatan teknologi, produktivitas dan pelayanan Operasi;
6. Memantau biaya aktual atas aktivitas dan proyek Teknologi Informasi, Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* terhadap rencana biaya dan sasaran kinerja keuangan.
7. Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* juga bertindak sebagai forum wajib untuk menyetujui proyek Teknologi Informasi

Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan Services
Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* terdiri dari:
Ketua: Direktur yang membawahi satuan kerja Teknologi Informasi, Operasi, dan *Services*
Anggota :

1. Direktur *Commercial Banking*
2. Direktur *Wealth & Personal Banking*
3. Direktur Keuangan
4. Direktur Manajemen Risiko
5. Direktur Kepatuhan
6. Direktur *Human Resources*
7. *Head of Global Market and HSS*
8. *Head of Global Banking*

Rapat
Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Operasi dan *Services* telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat yaitu pada tanggal 24 Februari, 21 April, 22 Juni, 25 Agustus dan 20 Oktober.

E. Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial

Deskripsi
Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial adalah sebuah komite tata kelola formal yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko kejahatan keuangan secara menyeluruh di Bank dan untuk membantu Presiden Direktur dalam memenuhi tanggung jawab terhadap risiko kejahatan finansial.

Tujuan dan Ruang Lingkup
Otoritas Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial mengenai hal-hal sehubungan dengan manajemen risiko kejahatan finansial diturunkan dari Komite Manajemen Risiko Bank. Ruang lingkup Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial meliputi semua aktivitas bisnis, produk dan layanan perbankan Bank, dan juga memonitor manajemen risiko kejahatan finansial pada entitas HSBC yang lain di Indonesia. Ini termasuk semua aktivitas *outsourced* yang didelegasikan kepada bagian lain dari Bank atau kepada pihak ketiga seperti disyaratkan dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 mengenai Pelaksanaan Tata Kelola untuk Perbankan.

Hasil *output* dari komite ini dapat berupa aksi atau rekomendasi untuk *Lines of Business* dan/atau tim *Financial Crime Risk* di Bank ataupun entitas HSBC yang lain di Indonesia selama diperbolehkan secara hukum, termasuk juga rekomendasi untuk eskalasi ke Komite Manajemen Risiko, ataupun eskalasi untuk pencatatan ke *Regional Executive Committee and Financial Crime Risk Management Meeting* ('FCRMM") atau komite-komite tata kelola lain yang relevan. Komite harus meninjau ulang *term of reference* dan keefektifannya setiap 12 bulan dan merekomendasikan perubahan yang diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial di Bank, termasuk di entitas PT HSBC Sekuritas Indonesia selama sesuai hukum yang berlaku, meliputi (tetapi tidak terbatas pada):

1. Meninjau, membahas, menangani dan menyetujui risiko dan permasalahan kejahatan finansial, sehubungan dengan pencucian uang (termasuk penggelapan pajak), sanksi, suap dan korupsi serta penipuan.
2. Meninjau, mendiskusikan dan menangani segala permasalahan risiko reputasi yang material (seperti diidentifikasi oleh *Line of Business Risk Reputational Client Selection Committee* atau oleh tim risiko reputasi) dan menerima sebuah "*Special Presentation*" tentang risiko reputasi terhadap *Line of Business* setiap kuartal.
3. Meninjau, membahas dan menangani laporan-laporan internal dan eksternal Risiko Kejahatan Finansial. Antara lain, *The Annual Enterprise Wide Risk Assessment Country Report* yang dipresentasikan, dibahas dan aksi-aksi yang diperlukan disetujui pada Komite Manajemen Risiko Kejahatan Financial.
4. Memonitor dan menganalisis *AML, Sanctions and AB&C*, Penipuan, dan Pengelakan Pajak serta lingkungan regulator eksternal.
5. Meninjau dan mendiskusikan perubahan penting dari Kebijakan Risiko Kejahatan Finansial dan akibat yang dihasilkan.
6. Meninjau, mendiskusikan dan menangani agenda-agenda transformasi dan remediasi.
7. Meninjau, mendiskusikan dan menangani isu-isu sehubungan dengan *Transaction Monitoring*, yang dieskalasikan dari Bank *Transaction Monitoring Working Group*.
8. Meninjau, membahas dan menangani isu-isu sehubungan dengan *Affiliates Risk Management* dan *Client Selection* serta *Exit Management,* jika perlu.
9. Meninjau, mendiskusikan dan menangani data yang material sehubungan dengan elemen-elemen data Risiko Kejahatan Finansial yang kritikal, meliputi tetapi tidak terbatas pada pengukuran kualitas data dan isu-isu.
10. Mempromosikan, memonitor dan menangani budaya Risiko Kejahatan Finansial.
11. Menjaga kepentingan para nasabah, dengan memastikan bahwa di dalam rapat Komite Manajemen Risiko Kejahatan Financial mempertimbangkan secara konsisten dampak pada nasabah dari setiap keputusan penting yang diambil, dan pengambilan keputusan tersebut memberikan hasil yang adil bagi nasabah dan Bank mampu menjaga integritas pasar
12. Melakukan pertukaran Informasi yang berkaitan dengan Risiko Kejahatan Finansial
13. Meninjau dan membahas solusi inovatif yang relevan untuk manajemen risiko kejahatan finansial.

Anggota Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial
a. Ketua: Presiden Direktur
b. Anggota :

1. *Head of Financial Crime Compliance*
2. *Head of Financial Crime Threat Mitigation*
3. Direktur *Operations and Information Technology*
4. Direktur Manajemen Risiko
5. Direktur *Kepatuhan*
6. Direktur *Wealth & Personal Banking*
7. Direktur *Commercial Banking*
8. Direktur *Global Banking*
9. *Head of Global Markets*
10. *Head of Operational Risk*

Rapat:
Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Kejahatan Finansial telah mengadakan 11 (sebelas) kali rapat yaitu pada tanggal 27 Januari, 24 Februari, 23 Maret, 28 April, 27 Mei, 30 Juni, 27 Juli, 25 Agustus, 29 September, 27 Oktober dan 24 November.

F. *People Committee*

People Committee dibentuk untuk melakukan kajian dan penerapan strategi, kebijakan, dan inisiatif mengenai sumber daya manusia Bank, dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan Badan-badan Regulator dan Pemerintah. *People Committee* memastikan dipenuhinya kebutuhan pemegang saham dan menjaga konsisten kegiatan karyawan dalam cakupan yang lebih luas. *People Committee* mendukung dan memastikan berlangsungnya aktivitas sumber daya manusia yang strategis dan obyektif, mulai dari rekrutmen, motivasi dan retensi karyawan yang berkualitas.

People Committee membantu Jajaran Direksi Bank dalam mengkaji dan memantau strategi, kebijakan, dan inisiatif sumber daya manusia yang penting yang timbul dan diajukan oleh para pemegang saham untuk diterapkan di Bank dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

People Committee mendorong penerapan perencanaan Sumber Daya Manusia yang berlaku di segenap Bank, yakni perencanaan dalam hal *Talent & Development*, Retensi, Remunerasi, *Pay Review*, Hubungan dan Transformasi Industrial Karyawan, yang mendasari nilai-nilai HSBC, prinsip bisnis, serta peraturan perundang-undang.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite *People Committee*
Tugas dan tanggung jawab *People Committee* adalah:

- Mengkaji dan memantau penerapan Strategi Sumber Daya manusia di Bank, misalnya strategi mengenai keberagaman, *International Mobility*, *Employee Engagement*, perekrutan, pengembangan karyawan, dan lain-lain.
- Mengkaji dan memantau penerapan Strategi Sumber Daya Manusia bagi Bisnis dan Fungsi untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di Indonesia.
- Mengkaji dan memantau risiko yang terkait Sumber Daya Manusia (termasuk *Personal Conduct Case* (PCC), penerapan inisiatif dalam hal manajemen perilaku, statistik karyawan yang mengundurkan diri dan hasil *Global People Survey* (GPS) serta program perubahan yang kemudian disarankan).
- Meninjau penerapan strategi Grup HSBC mengenai talenta di Indonesia untuk adaptasi lokal, termasuk pendekatan dan anggota talenta di Indonesia.
- Mengkaji penerapan strategi talenta di Bank untuk diterapkan di Indonesia, termasuk pendekatan dan pemetaan personel yang termasuk di dalam *Country Talent Pool*.
- Menyusun Rencana Suksesi Tahunan untuk peranan antar bisnis dan memberikan rekomendasi kepada jajaran Direksi Bank, khususnya mengenai posisi pejabat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank mengenai posisi Direktur.
- Mengkaji dan memantau perkembangan kemajuan dibandingkan dengan target yang sudah disebutkan dalam *scorecard* Presiden Direktur mengenai Sumber Daya Manusia.
- Melakukan kajian tahunan penerapan strategi *Performance & Reward*. Hal ini termasuk matriks proses Penilaian Kinerja, proses Penilaian Potensi dan *Reward and Recognition*, serta penerapan kebijakan dan strategi *reward* penting lainnya.
- Mengkaji perubahan struktur organisasi dan keputusan terkait rancangan organisasi.
- Mencatat *Diversity Committee* dan kajian aktivitas terkait bila diperlukan.

Anggota *People Committee*
People Committee terdiri dari:
a. Ketua: Presiden Direktur
b. Wakil Ketua: Direktur *Human Resources*
c. Anggota:

1. Direktur *Wealth & Personal Banking*
2. Direktur *Commercial Banking*
3. Direktur *Global Market*
4. Direktur *Operations and Information Technology*
5. Direktur Manajemen Risiko
6. Direktur Keuangan
7. Direktur Kepatuhan
8. *Head of Global Markets &* HSBC *Securities Services*
9. *Head of Communication*
10. *Head of Corporate Secretary*
11. *SVP HR Talent and Development*

Rapat
Selama tahun 2020, telah diadakan 11 (sebelas) kali pertemuan dengan tanggal sebagai berikut:
- 21 Januari 2020
- 24 Februari 2020
- 23 Maret 2020
- 21 April 2020
- 19 Mei 2020
- 22 Juni 2020
- 21 Juli 2020
- 25 Agustus 2020
- 23 September 2020
- 20 Oktober 2020
- 24 November 2020

PELAKSANAAN KONGLOMERASI KEUANGAN

Dengan adanya pencabutan izin usaha Kantor Cabang The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited di Jakarta oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka terdapat perubahan anggota Tata Kelola Konglomerasi Keuangan HSBC di Indonesia sejak tanggal 8 April 2019 di mana PT Bank HSBC Indonesia sebagai Entitas Utama dengan PT HSBC Sekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Terelasi yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank sebagai Entitas Utama senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam POJK tersebut. Sebagai Entitas Utama, Bank telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

A. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama sebagaimana diatur dalam suatu Surat Keputusan Edaran Dewan Komisaris Bank sebagai Entitas Utama tanggal 8 Agustus 2017, Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang tertulis pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 024//SK/KOM/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
5. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
1. Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
   a. seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai ketua merangkap anggota
   b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota
   c. seorang pihak independen, sebagai anggota.

2. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

3. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap.

Rapat
Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, yaitu pada tanggal 14 Februari 2020 dan 12 Agustus 2020.

No	Nama	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah Rapat sesuai dengan Masa Efektif Jabatan	Kehadiran	% Kehadiran
1	Hanny Wurangian	2	2	100%
2	Suliasan*	1	1	100%
3	Ubaidillah Nugraha	2	2	100%
4	Krishna Suparto**	1	1	100%

*) Masa jabatan beliau sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah berakhir sejak tanggal 27 Februari 2020
**) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 27 Februari 2020

B. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dibentuk untuk memberikan rekomendasi kebijakan manajemen risiko terintegrasi kepada Direksi dari Entitas Utama.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Bank, dalam rangka:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Tugas Pokok Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi:

a. Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari:

a. Direktur Manajemen Risiko sebagai ketua merangkap anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
b. Direktur Keuangan
c. Direktur Kepatuhan
d. Direktur/wakil yang ditunjuk dari PT HSBC Sekuritas Indonesia
e. *Head of Risk Management & Risk Regulatory Engagement*
f. Pejabat Eksekutif

Rapat

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan 2 (dua) kali rapat, masing-masing pada 13 Februari dan 11 Agustus 2020.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank dijabat oleh Uliya Ariani, Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank sejak bulan Agustus 2017, beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karir sebagai Penasehat Hukum pada tahun 2000, beliau mulai mendalami karir pada industri perbankan di PT Bank OCBC NISP Tbk pada tahun 2003 dan telah memegang berbagai posisi antara lain sebagai *Corporate Legal Head*, sebagai Sekretaris Perusahaan pada tahun 2008 hingga 2013 dan sebagai Asisten Eksekutif Dewan Komisaris pada akhir tahun 2013 hingga tahun 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Hukum Perusahaan di PT Bank QNB Indonesia Tbk pada tahun 2013, dan sebagai Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Hukum Perusahaan di PT Bank Mayora pada bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Juli 2017.

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab menyampaikan semua informasi yang bersifat material mengenai Bank kepada para pemangku kepentingan tepat pada waktunya dan dengan akurat. Pengumuman mengenai kondisi dan kinerja Bank dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

a. Memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank melalui Presiden Direktur dan/atau Presiden Komisaris perihal tata kelola perusahaan.
b. Memberikan dukungan langsung kepada Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Komisaris (Komite), dan Direksi mengenai Tata Kelola Perusahaan dan peraturan pasar modal jika diperlukan.
c. Memahami dan bertindak atas perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan urusan Sekretaris Perusahaan.

FUNGSI KEPATUHAN

Bank selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan mengembangkan budaya kepatuhan di setiap level organisasi dan aktivitas bisnis. Supervisi aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi sangat penting untuk memastikan fungsi kepatuhan berjalan. Bank menetapkan salah satu dari Direksi sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk mengawasi Fungsi Kepatuhan. Dalam mendukung tugasnya sebagai Direktur Kepatuhan, Unit Kepatuhan dibentuk.

Unit Kepatuhan terdiri dari *Regulatory Compliance* (RC), *Financial Crime Compliance* (FCC), *Financial Crime Threat and Mitigation* (FCTM), *Compliance Assurance* (CA) dan *Business Management*.

Regulatory Compliance bekerja sama dengan seluruh lini bisnis dan fungsi lainnya di Bank dalam mengidentifikasi dan menjalankan risiko kepatuhan, serta mengawasi secara independen dan objektif.

FCC adalah unit kerja khusus terkait yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT), Sanksi, dan Anti Penyuapan dan Korupsi dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penerapan program tersebut di Bank.

Sebagai usaha untuk untuk menghadirkan proses dan mekanisme investigasi, intelijen dan analisis yang mumpuni agar dapat secara proaktif mengidentifikasi masalah kejahatan keuangan dan perkembangan risiko kejahatan keuangan, Bank telah memposisikan tim *Financial Crime Threat and Mitigation* (FCTM) atau Mitigasi Ancaman Kejahatan Keuangan di bawah unit Kepatuhan.

FCTM memiliki fungsi strategi *Anti-Fraud*, yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur melalui *Fraud Panel*. Strategi *Anti-Fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Sebagai lini pertahanan kedua di bawah Fungsi Kepatuhan, *Compliance Assurance* (CA) melakukan pengujian berdasarkan risiko kepatuhan atas aktivitas risiko dan kontrol *Regulatory Compliance* (RC) dan *Financial Crime. Compliance Assurance* memberikan jaminan dari sisi *Compliance* bahwa *Business* serta *Function* berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan dari regulator yang berlaku dan dikelola sesuai dengan Standar Prosedur Bank.

Business Management di dalam Unit Kepatuhan mendukung Unit Kepatuhan dalam hal anggaran, kebutuhan informasi manajemen dan penerjemah.

Fungsi Kepatuhan PT Bank HSBC Indonesia (Bank) meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh HBID kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Terkait dengan pengawasan tata kelola terintegrasi, dengan ditunjuknya Bank sebagai entitas utama dari konglomerasi keuangan HSBC Indonesia, maka unit kepatuhan di Bank membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi untuk memastikan penerapan fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik di Entitas Utama dan juga di anggota konglomerasi lainnya yaitu PT HSBC Sekuritas Indonesia.

Setiap satuan kerja kepatuhan menjadi anggota serta menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan terintegrasi serta menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan memitigasi potensi risiko kepatuhan, regulasi dan reputasi yang berhubungan dengan ketidakpatuhan atas kebijakan APU PPT, regulasi kejahatan keuangan lainnya, Bank menetapkan Kebijakan APU PPT yang telah disesuaikan dengan regulasi OJK, Bank Indonesia dan undang-undang lainnya. Selain memastikan kepatuhan atas regulasi lokal, Bank juga mengadaptasi kebijakan yang berlaku sesuai dengan Standar Grup yang berlaku selama tidak kontradiktif dengan regulasi lokal. Sesuai dengan Standar Grup yang terkini, kebijakan APU telah dilakukan revisi dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK/DEKOM/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 mengenai Perubahan atas Kebijakan Implementasi APU.

Kepatuhan terhadap kebijakan ini dan pedoman lainnya yang terkait merupakan hal mutlak untuk memastikan bahwa Bank tunduk kepada undang–undang dan peraturan yang terkait Anti Pencucian Uang, memelihara efektivitas dan pertahanan Program

APU PPT dan mengelola risiko APU PPT secara baik. Diharapkan semua karyawan Bank mematuhi kebijakan ini dan undang-undang, ketentuan dan peraturan APU PPT yang berlaku di Indonesia. Untuk memastikan hal ini, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan APU PPT dilaksanakan dari awal karyawan masuk di Bank, secara berkesinambungan dan juga dilaksanakan khusus bagi karyawan yang memiliki eksposur tinggi terhadap pelaksanaan APU PPT di dalam tugas dan tanggung- jawabnya.

Unit Kepatuhan terus mengembangkan kualitas penerapan program APU PPT dengan memperbaharui sistem pemantauan transaksi dan fokus dalam pengembangan investigasi kasus yang kompleks.

PERMASALAHAN HUKUM

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat 10 (sepuluh) perkara yang melibatkan Bank. Selanjutnya, sampai dengan 31 Desember 2020, gugatan Bank terhadap kantor pajak masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

OPSI SAHAM

Bank tidak memiliki program opsi saham selama periode pelaporan tahun 2020. Bank juga tidak memiliki rencana di tahun 2021 untuk memperkenalkan skema opsi saham berdasarkan saham Bank kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

KEPEMILIKAN SAHAM KOMISARIS DAN DIREKSI

Tidak ada Dewan Komisaris maupun Direksi, baik secara individu atau bersama-sama, yang memiliki saham mencapai 5% (lima per seratus) dari modal disetor Bank.

HUBUNGAN AFILIASI

Informasi terkait Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Bank di antaranya sebagai berikut:

Nama	Memiliki hubungan afiliasi dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Matthew Kneeland Lobner	-	√	-	√	√	-
Hanny Wurangian	-	√	-	√	-	√
Hariawan Pribadi	-	√	-	√	-	√
Umar Juoro	-	√	-	√	-	√
Mark Thomas Mckeown	-	√	-	√	√	-
Catherinawati Hadiman Sugianto	-	√	-	√	-	√
Sumit Dutta	-	√	-	√	√	-
Francois de Maricourt	-	√	-	√	√	-
John Peter Watt Rosie	-	√	-	√	√	-
Blake Digney Philip Hellam	-	√	-	√	√	-
Edhi Tjahja Negara Darmohusolo	-	√	-	√	-	√
Eri Budiono	-	√	-	√	-	√
Caecilia Pudji Widyarti	-	√	-	√	-	√
Tripudjo Putranto Soemarko	-	√	-	√	-	√
Stephen Whilton Angell	-	√	-	√	√	-
Dio Alexander Samsoeri	-	√	-	√	-	√
Riko Adythia	-	√	-	√	-	√
Yessika Effendi	-	√	-	√	-	√

PENILAIAN OLEH PIHAK INTERNAL (*SELF–ASSESSMENT*)

Manajemen Bank melaksanakan penilaian mandiri secara berkala atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang hasilnya diserahkan ke OJK. Penilaian terakhir menunjukkan peringkat "2" yaitu baik.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

SKAI merupakan bagian integral dari kerangka tata kelola dan pengendalian Bank. Tugas utama SKAI adalah membantu Dewan Komisaris dan Manajemen Eksekutif dalam mengamankan aset, reputasi, dan kelangsungan organisasi.

SKAI memberikan penilaian yang independen dan objektif mengenai kecukupan rancangan dan penerapan manajemen risiko, pengendalian risiko, dan proses tata kelola, sebagaimana dirancang oleh manajemen.

PT Bank HSBC Indonesia (Bank) telah menerapkan struktur pengelolaan risiko dan pengendalian intern yang disebut dengan "*Three Lines of Defence*", guna memastikan bahwa Bank dapat mencapai tujuan komersial yang telah ditetapkan, memenuhi peraturan dan hukum yang berlaku, dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan. Dalam konteks kerangka manajemen risiko, SKAI Bank bertindak sebagai Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line of Defence*) dan bertindak sebagai fungsi yang independen dari Lini Pertahanan Pertama dan Kedua (*First Line of Defence* dan *Second Line of Defence*).

Secara organisasi, SKAI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan memiliki akses kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit apabila diperlukan dan melaporkan kepada Komite Audit mengenai kondisi pengelolaan risiko dan pengendalian intern yang diterapkan di keseluruhan Bank. Untuk menjaga independensi dan objektivitas audit, SKAI harus independen terhadap aktivitas operasional.

SKAI, dalam kaitan pelaksanaan kegiatan audit, memiliki akses tidak terbatas kepada semua catatan, karyawan, properti dan kegiatan operasional Bank. SKAI juga berwenang untuk melakukan koordinasi dengan auditor ekstern dan mengikuti rapat yang bersifat strategis seperti Rapat Direksi dan rapat Manajemen Risiko, untuk menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dan mendapatkan informasi terkini mengenai berbagai permasalahan yang timbul dan perkembangan strategis Bank.

SKAI juga memberikan jaminan yang independen kepada manajemen mengenai efektivitas proses-proses yang dijalankan dalam mencegah terjadinya fraud. Jika terjadi kasus *fraud* yang bersifat material, SKAI dapat melakukan pengkajian atas insiden tersebut dan menilai apakah terdapat kelemahan-kelemahan pengendalian yang menyebabkan timbulnya kesempatan untuk melakukan *fraud* seharusnya dapat terdeteksi.

SKAI melakukan penelaahan atas rencana perbaikan manajemen terkait temuan audit dan memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian yang diterapkan (*mitigating controls*) sebelum menutup temuan audit tersebut.

AUDIT EKSTERNAL

Bank menjalin hubungan kerja sama yang transparan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Bank menunjuk KAP yang mempunyai kapasitas baik sesuai standar profesional akuntan publik serta berafiliasi dengan KAP internasional. Legalitas perjanjian kerja dan ruang lingkup audit telah tercakup dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) yang ditandatangani oleh pihak Bank dan KAP setiap tahun sebelum audit tahunan dimulai. KAP dan Akuntan Publik (AP) yang ditunjuk Bank, sebagai auditor ekstern yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan komunikasi langsung dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proses audit.

Penunjukan KAP untuk Bank telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan oleh RUPS untuk menunjuk KAP yang telah terdaftar di OJK, Dewan Komisaris kemudian menunjuk Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik independen Bank untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2020 berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan telah menyelesaikan audit atas laporan keuangan Bank tahun 2020 dan menyampaikan laporan audit kepada Bank pada tanggal 19 Maret 2021 dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank melakukan upaya Manajemen Risiko untuk memenuhi persyaratan penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan OJK no. 18 /POJK.03/2016 dan SE OJK No 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Sesuai dengan aturan tersebut, Bank telah menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan. Pada akhirnya, manajemen risiko ini

akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang. Hal ini termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang kini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.

Bank terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem Manajemen Risiko melalui peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) guna mengantisipasi risiko secara lebih dini serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalisasi dampak risiko. Dengan demikian, pemanfaatan berbagai cara untuk mengetahui secara dini termasuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilakukan serta dilaporkan secara konsisten. Pengembangan kerangka yang lebih luas dalam hal pengelolaan risiko itu sendiri dilakukan dengan pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Saat ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memastikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko berjalan lancar dan memberikan gambaran profil risiko kepada manajemen.

Tugas dari Satuan Kerja Manajemen Risiko mencakup hal sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi manajemen risiko yang diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko atau yang telah disetujui oleh Direksi.
- Melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas usaha atau fungsional.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko.
- Menerapkan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.
- Melakukan pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada. Pengkajian difokuskan pada aspek kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas/produk baru tersebut dari sisi keandalan sistem dan keamanan prosedur serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank.
- Memberikan rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada Komite Manajemen Risiko
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk keperluan pengukuran risiko.
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada Direktur Bidang yang membawahi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko secara triwulanan, atau lebih cepat untuk jenis risiko tertentu yang dapat berubah dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi usaha.

Sebagai bagian dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Bank, Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang independen terhadap kegiatan operasional dan bertanggung jawab kepada Direksi, serta membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Profil Risiko

Secara keseluruhan, penilaian peringkat risiko Bank per posisi 31 Desember 2020 adalah berada pada Peringkat 2. Semua peringkat risiko inheren berada pada tingkat risiko *Low to Moderate*, kecuali Risiko Kredit dan Kepatuhan berada pada peringkat *Moderate*.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank telah mengikutsertakan pejabat dan karyawan Bank dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap. Pada tahun 2020 jumlah pejabat dan karyawan yang telah mengikuti ujian dan penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebanyak 917 peserta, yang mana terjadi peningkatan sebesar 45,14% dibandingkan tahun sebelumnya.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan OJK.

Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi delapan risiko utama yang dihadapi oleh Bank, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

PENYEDIAAN DANA BESAR SECARA RINCI

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar posisi 31 Desember 2020

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait *)	65	13.437.129
2	Kepada Debitur Inti		
	1. Individu	7	5.635.674
	2. Grup	18	24.827.509

*) Termasuk penyediaan dana kepada pihak terkait *prime bank*

PENGUNGKAPAN REMUNERASI 2020

Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada halaman 162.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris Independen atau Pejabat Eksekutif.

Penyusunan kebijakan Remunerasi

Di HSBC, strategi remunerasi kami dirancang untuk membantu menarik, mempertahankan, dan memotivasi orang-orang terbaik, terlepas dari jenis kelamin, etnis, usia, kondisi fisik, atau faktor lain yang tidak terkait dengan kinerja atau pengalaman. Dengan strategi ini Bank menghargai orang-orang yang berkomitmen terhadap kinerja jangka panjang yang berkelanjutan demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan kami.

Remunerasi karyawan ditinjau setiap tahun selama proses *'on-cycle'*, yang juga dikenal sebagai *Annual Pay Review*, termasuk *review* yang dilakukan untuk Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Aktivitas yang berdampak pada remunerasi di luar proses ini dikenal sebagai *'off-cycle'*

Remuneration key principles

Prinsip-prinsip Remunerasi	Pendekatan di Tahun 2020
Penyelarasan Kinerja di semua tingkatan	• Kami menilai kinerja Bank, bisnis dan individu, dengan mempertimbangkan 'apa' yang telah dicapai dan 'bagaimana' cara mencapainya. • 'Bagaimana' membantu memastikan bahwa kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang dan mempertimbangkan keselarasan dengan nilai-nilai HSBC dan kepatuhan terhadap standar risiko/kepatuhan
Menggunakan informasi dari praktik di pasar dan posisi pasar	• Diinformasikan, tetapi tidak didorong oleh, posisi dan praktik pasar. Tolok ukur pasar, bersumber dari spesialis yang independen yang memberikan indikasi kisaran tingkat gaji dan tunjangan karyawan yang diberikan oleh pesaing kami • Menargetkan tingkat gaji untuk karyawan sesuai dengan kisaran pasar tergantung pada kinerja individu serta relativitas dengan posisi yang setara. Posisi individu dalam kisaran pasar ini juga akan bervariasi bergantung pada kinerja mereka di tahun tertentu • Tolok ukur harus dilakukan dengan cara yang konsisten sesuai dengan persyaratan peraturan
Kepatuhan pada peraturan-peraturan yang berlaku	• Patuh pada peraturan-peraturan dan memastikan dijalankan dengan standar yang tinggi baik secara Grup maupun di Indonesia. • Sebagai entitas lokal, OJK merupakan regulator utama bagi Bank.

Kajian Remunerasi secara Independen

Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC) mengevaluasi remunerasi karyawan secara agregat, remunerasi setiap individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS Tahunan.

Lingkup dan implementasi kebijakan remunerasi 2020
Kebijakan remunerasi berlaku untuk semua karyawan di seluruh unit bisnis dan fungsi; dan kami memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara adil, tepat, dan tidak bias.

Remunerasi Terkait Risiko
Bank telah menerapkan penyelarasan risiko dan reward, serta menanamkan perilaku dan nilai nilai yang diharapkan oleh HSBC melalui sejumlah kebijakan dan program penghargaan, sebagai berikut:

- Kewajiban menyertakan sasaran risiko di dalam *scorecard* semua karyawan.
- Kerangka Pengakuan dan Perilaku Karyawan. Di dalam kerangka kerja ini, manajer dapat membuat penyesuaian positif atau negatif untuk variabel gaji (di samping setiap perubahan tahun ke tahun yang normal terkait dengan kinerja) untuk mencerminkan perilaku.
- *At Our Best Recognition* (AOBR) memungkinkan sesama karyawan untuk mengenali perilaku positif, mendorong pemahaman bersama tentang nilai-nilai HSBC dalam praktiknya. Pada tahun 2020, kami menjalankan 'Spotlight on Our People' melalui AOBR untuk mengenali tindakan luar biasa karyawan kepada pelanggan, kepada sesama karyawan, dan komunitas selama pandemi COVID-19.
- Insiden dan peristiwa pelanggaran yang dilaporkan diidentifikasi dan ditinjau sebagai bagian dari kepatuhan dan dilaporkan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
- *Material Risk Takers* (MRTs) 2020 diidentifikasi dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan oleh Bank berdasarkan regulasi di mana sebagian *variable* remunerasi akan ditangguhkan selama 3 tahun.
- Malus dan Clawback dari variabel remunerasi yang ditangguhkan dan belum jatuh tempo berlaku untuk staf yang diidentifikasi dan MRTs diperbolehkan untuk mengembalikan penghargaan yang telah jatuh tempo dan sudah dibayarkan.

Pengukuran Kinerja
Fokus pengelolaan kinerja Bank secara keseluruhan sedang ditransformasikan dari *cycle-based performance management* menuju kultur *Everyday Performance and Development* (EPD) melalui percakapan rutin antara karyawan dan manajer.

Semua karyawan mendapatkan penilaian perilaku - untuk memastikan mereka dinilai tidak hanya berdasarkan apa yang mereka capai, tetapi juga bagaimana mereka mencapainya.

Sasaran risiko wajib disertakan dalam penilaian kinerja untuk semua karyawan dan risiko tertentu serta tujuan kepatuhan disertakan dalam *Scorecard* bagi para Direktur.

Evaluasi kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan rekomendai dari Presiden Direktur. Hasil dari evaluasi kinerja akan menentukan remunerasi dan nominasi Direksi tertentu, dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham pada RUPS.

Penyesuaian remunerasi sehubungan dengan kinerja dan risiko
Sejalan dengan penerapan remunerasi berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015, tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum, Bank telah menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk *Material Risk Takers* (MRTs), porsi remunerasi variabel mereka akan ditangguhkan dari 40% jika total kompensasi lebih besar dari jumlah setara dengan GBP 500.000 atau remunerasi variabel lebih dari 33% dari total kompensasi.

b. Untuk pegawai yang tidak termasuk MRTs, sebagian dari remunerasi variabel mereka akan ditunda mulai dari 10% jika total penghargaan mereka melebihi jumlah yang setara dengan USD75.000, diberikan dalam waktu 3 tahun

c. *Malus* dan *Clawback* berlaku untuk semua penghargaan yang dibuat untuk Staf yang Diidentifikasi dan "*Material Risk Takers*" (MRTs).

Konsultan Eksternal
Bank telah menjalin kerja sama dengan Willis Towers Watson untuk mendapatkan data remunerasi dari industri perbankan berdasarkan dari *peer group* yang kami pilih, termasuk kompensasi tetap dan variabel dan juga tunjangan posisi.

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket kebijakan yang diperoleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- Remunerasi: Gaji, bonus dan tunjangan tetap.
- Fasilitas lainnya: kendaraan perusahaan dan biaya pemeliharaannya, penggantian biaya pengobatan, *medical check-up*, keanggotaan klub, dan lain-lain.

Pengungkapan paket kebijakan remunerasi di atas ditetapkan dalam RUPS.

Rincian Remunerasi dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	7	64.333	3*	8.212
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya)	7	10.459	3*	241
TOTAL		**7**	**74.792**	3*	**8.453**

* Jumlah Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi

Jumlah anggota Direksi/Dewan Komisaris Bank yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	7	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	3*
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel yang terdiri dari bonus dan insentif diberikan untuk mendorong dan menghargai kinerja berdasarkan ukuran finansial dan non-finansial yang konsisten dengan strategi jangka menengah dan panjang, kepentingan pemegang saham, dan kepatuhan pada nilai-nilai HSBC. Penghargaan bervariasi sesuai dengan pencapaian kinerja dan Bank memiliki keleluasaan penuh untuk menilai sejauh mana kinerja telah dicapai.

Penghargaan dapat berbentuk uang tunai dan/atau saham. Sebagian dari penghargaan tahunan dapat ditangguhkan dan diberikan selama tiga sampai lima tahun.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
TOTAL	7	11.189	3*	-	3.471	154.999

* Jumlah Dewan Komisaris yang mendapatkan remunerasi

Jabatan yang menjadi *Material Risk Takers* 2020

Posisi *Material Risk Taker* yang diidentifikasi pada tahun 2020 berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif terdiri dari 6 (enam) individu, sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
2. Direktur Manajemen Risiko
3. *Head of Global Market and HSS*
4. *Wealth and Personal Banking Director*
5. *Commercial Banking Director*
6. *Global Banking Director*

Rasio gaji tertinggi dan terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	123 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio honorarium Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,04 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	0,9 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank

Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan Bank	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta	Jumlah Orang	Rp Juta
TOTAL	-	-	-	-	1	700

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan 2020

Terdapat 252 pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan total uang pesangon yang dibayarkan sejumlah Rp60.292 juta sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	11
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	18
Di bawah Rp500 juta	223
TOTAL	252

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

	2020	2019
Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (dalam Jutaan Rupiah)	9.767	12.376

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun untuk MRT

	2020
A. Remunerasi yang bersifat Tetap (Jutaan Rupiah)	
1. Tunai	35.225
2. Saham atau instrumen berbasis saham	-

	Tidak ditangguhkan	Ditangguhkan
B. Remunerasi yang bersifat Variabel (Jutaan Rupiah)		
1. Tunai	8.541	2.889
2. Saham atau instrumen berbasis saham	4.334	3.357

Informasi kuantitatif mengenai Remunerasi Variabel untuk MRT

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel		Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Penyesuaian Selama Periode Laporan		
			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1.	Tunai (Jutaan Rupiah)	4.833	-	-	-
2.	Saham atau instrumen berbasis saham	6.571	-	-	-
Total (dalam Jutaan Rupiah)		**11.404**	**-**	**-**	**-**

INTERNAL FRAUD

Selama tahun 2020, tidak ada kasus *internal fraud*, dengan dampak keuangan lebih besar dari Rp100 juta, yang dilakukan oleh manajemen, karyawan permanen maupun karyawan non-permanen, terkait dengan proses dan operasional bisnis Bank.

PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Bank memiliki sistem pencatatan dan penanganan keluhan yaitu CMS (*Complaint Management System*) untuk memastikan pengaduan yang diterima ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi dengan harapan dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan Bank serta mengelola risiko reputasi terkait dengan pengaduan yang disampaikan.

Sepanjang tahun 2020, Bank telah menerima 4.265 pengaduan, dimana pengaduan terbanyak yang diterima, terkait dengan sistem pembayaran kartu kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2020, dari total pengaduan yang diterima, sebanyak 98,01% telah berhasil diselesaikan oleh Bank, sementara sisanya 1,99% masih dalam proses penanganan.

Penanganan Pengaduan Nasabah

Periode Januari - Desember 2020

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses *		Tidak Selesai		Total Pengaduan
		Total	%	Total	%	Total	%	
1	Penghimpunan Dana – Giro	2	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2
2	Penghimpunan Dana – Tabungan	2	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2
3	Penghimpunan Dana – Deposito	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4	Penghimpunan Dana – Antar Bank	11	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	11
5	Penghimpunan Dana - Lainnya	18	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	18
6	Penyaluran Dana - Kredit/ Pembiayaan - Investasi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
7	Penyaluran Dana - Kredit/ Pembiayaan – Modal Kerja	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8	Penyaluran Dana - Kredit/ Pembiayaan - Konsumsi (diluar Kartu Kredit)	22	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	22
9	Penyaluran Dana - Antar Bank	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
10	Penyaluran Dana - Lainnya	57	98,28%	1	1,72%	-	0,00%	58

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses *		Tidak Selesai		Total Pengaduan
		Total	%	Total	%	Total	%	
11	Sistem Pembayaran - ATM dan/ atau Kartu Debit	630	95,17%	32	4,83%	-	0,00%	662
12	Sistem Pembayaran - Kartu Kredit	1.570	97,76%	36	2,24%	-	0,00%	1.606
13	Sistem Pembayaran - Kartu Pra Bayar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14	Sistem Pembayaran – *Direct Debit*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
15	Sistem Pembayaran – *Standing Instruction*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
16	Sistem Pembayaran – *Travelers' Cheque*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
17	Sistem Pembayaran - Kliring	3	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3
18	Sistem Pembayaran - RTGS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
19	Sistem Pembayaran - *Electronic Banking*	314	99,05%	3	0,95%	-	0,00%	317
20	Sistem Pembayaran - *Remittance*	12	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	12
21	Sistem Pembayaran – Lainnya	94	98,95%	1	0,05%	-	0,00%	95
22	Produk Kerjasama - *Bancassurance*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
23	Produk Kerjasama – Reksa Dana	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
24	Produk Kerjasama - Lainnya	18	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	18
25	Produk Lainnya – Bank Garansi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
26	Produk Lainnya - *Trade Finance*	6	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	6
27	Produk Lainnya - Derivatif	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
28	Produk Lainnya - *Wealth Management*	7	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	7
29	Produk Lainnya – *Safe Deposit*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
30	Produk Lainnya - Lainnya	1.414	99,16%	12	0,84%	-	0,00%	1.426
TOTAL		4.180	98,01%	85	1,99%	-	0,00%	4.265

* Data diambil per 31 Desember 2020. Pada saat publikasi dilakukan, keseluruhan pengaduan nasabah telah diselesaikan dengan waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

/06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

184 Keberlanjutan

187 Rencana, Fokus, dan Program di 2021

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KEBERLANJUTAN

PT Bank HSBC Indonesia telah menerapkan program keuangan berkelanjutan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Grup HSBC dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Layanan Keuangan, Penerbit, dan Perusahaan Publik.

Melalui Visi Bank untuk "Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan," Bank senantiasa berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Selain itu, Bank juga turut serta dalam melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui keuangan berkelanjutan.

Untuk menuju perusahaan yang berkelanjutan, Bank mempunyai fokus untuk berinvestasi pada lingkungan dan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, Bank berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program sosial terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan program Perusahaan Berkelanjutan, Bank mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank bekerja sama dengan mitra lokal yang memiliki kompetensi dan akses langsung ke masyarakat dan daerah yang membutuhkan sehingga program tersebut dijalankan secara tepat sasaran.

Program yang telah dijalankan pada tahun 2020 antara lain adalah:

Pendidikan

Pada tahun 2020, Bank melakukan program sosial pendidikan untuk berbagai kelompok sosial yang mencakup keterampilan keuangan dan keterampilan bisnis, serta keterampilan kerja.

Literasi keuangan dan program pendidikan bisnis sejalan dengan arahan dari OJK tentang Cetak Biru Strategi Nasional Indonesia untuk Literasi Keuangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang produk dan layanan keuangan. Melalui pendidikan bisnis, siswa diperkenalkan ke dunia bisnis melalui Kompetisi Kasus Bisnis HSBC, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas analitis siswa dan intuisi bisnis.

Sasaran literasi keuangan dan pendidikan bisnis adalah siswa (dari tingkat dasar hingga universitas), guru/dosen, ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis skala rumah tangga serta masyarakat umum.

Untuk keterampilan kerja, Bank memperkenalkan konsep Keterampilan Inti, juga dikenal sebagai Keterampilan Abad ke-21, yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam pekerjaan.

Program	Kegiatan	Capaian Program	Alokasi Dana (IDR)
HSBC Business Case Competition	HSBC Business Case Competition adalah program edukasi yang unik yang bertujuan untuk menumbuhkan talenta bisnis generasi muda di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuan kuantitatif, kualitatif dan keterampilan berkomunikasi. Mahasiswa akan berkompetisi dalam tim yang beranggotakan empat orang dalam bidang strategi bisnis dan presentasi. Tim pemenang dari Indonesia berhak untuk mengikuti kompetisi regional di Hong Kong. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk menjajaki kemampuan inovasi dan analisis dari mahasiswa, mendapatkan paparan dari dunia bisnis yang sesungguhnya, memperluas profesionalisme dan jejaring sosial serta membangun portofolio pribadi.	Serangkaian kegiatan edukasi telah dilaksanakan di empat kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya yang melibatkan lebih dari 500 mahasiswa dan 15 universitas.	948.563.000

Lingkungan Hidup

Bank memiliki komitmen untuk mendukung transisi global menuju ekonomi rendah karbon. Ini dilakukan melalui kegiatan operasional yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mendorong nasabah dan rantai pasokan untuk bersama-sama mendukung pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bank terus berpartisipasi aktif dalam program konservasi lingkungan yang berkelanjutan sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Capaian Program	Alokasi Dana (IDR)
Menuju Sertifikasi – Memperkuat Peran Petani Sawit Swadaya dalam Implementasi Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan	Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan petani sawit swadaya dalam mendapatkan sertifikasi dari RSPO/ ISPO, dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka melalui penciptaan sebuah model yang mampu memberikan pendapatan alternatif yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dalam pengembangan bisnis dan manajemen ekonomi yang kreatif.	Kegiatan yang dilakukan antara lain melengkapi standar sertifikasi RSPO/ISPO seperti *training*, audit, dan memperkuat rencana bisnis dan pemasaran komoditi alternatif serta pengembangan *database* dengan sistem *online*.	1.435.000.000

Program Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana COVID-19

Di tahun 2020, Bank melaksanakan program tanggap darurat dan pemulihan bencana COVID-19 sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat rentan yang berfokus pada penyediaan perlengkapan kesehatan, akses terhadap kebutuhan pokok, dan ketahanan ekonomi berbagai wilayah di Indonesia.

No.	Program	Kegiatan	Capaian Program	Alokasi Dana (IDR)
1	Bersama Hadapi COVID-19 – Bantuan Tanggap Darurat	Bantuan tanggap darurat berupa alat proteksi diri bagi tenaga kesehatan dan paket sembako bagi masyarakat.	Kegiatan bantuan ini menyediakan 500 paket alat proteksi diri bagi tenaga kesehatan dan 15.500 paket sembako bagi masyarakat di 11 lokasi di Jakarta dan luar Jakarta.	2.400.695.000
2	Respon Terhadap COVID-19 – Bantuan Tanggap Darurat	Bantuan tanggap darurat berupa alat proteksi diri bagi tenaga kesehatan dan bantuan tunai berupa *voucher* bagi masyarakat, termasuk kampanye 3M.	Bantuan diberikan bagi 600 tenaga kesehatan di 20 puskesmas di Kalimantan Barat dan Jawa Timur, serta bantuan tunai bagi 525 rumah tangga di Jakarta.	2.400.000.000
3	Percepatan Penanganan COVID-19 – Bantuan Tanggap Darurat	Bantuan tanggap darurat penanganan COVID-19 yang ditujukan bagi tenaga dan relawan kesehatan berupa alat proteksi diri, disinfektan fasilitas umum, dan distribusi paket kesehatan keluarga.	Bantuan diberikan kepada 1.000 tenaga dan relawan kesehatan, penyemprotan disinfektan di lebih dari 600 titik fasilitas umum serta 7.200 unit paket kesehatan keluarga.	1.750.035.000
4	Ketahanan bagi Perempuan Usaha Kecil dan Petani – Bantuan Pemulihan Bencana COVID-19	Pandemi COVID-19 tidak saja berpengaruh negatif terhadap kesehatan tetapi juga berdampak besar secara ekonomi dan sosial. Masyarakat rentan adalah yang paling terdampak, dan kebijakan PSBB juga mengganggu pengusaha mikro dan industri pertanian.	Program ini membantu 250 pengusaha mikro perempuan untuk mampu menciptakan lini baru penghasilan dan memperoleh keterampilan baru untuk dapat bertahan dari goncangan di masa depan, dan juga pemberdayaan bagi 150 petani untuk memastikan pasokan kebutuhan makanan pokok.	2.083.000.000

Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat

Bank berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif yang mampu mewujudkan potensi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Program pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk membentuk kelompok masyarakat menjadi lebih mandiri, lebih bermartabat dengan kualitas hidup yang lebih baik. Program ini berfokus pada penyediaan keterampilan baru dan akses informasi demi terciptanya peluang baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Di tahun 2020, Bank melaksanakan program untuk mendukung anak-anak dan remaja yang tidak memiliki orang tua dan keluarga dalam pendidikan mereka, menyiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja dan kondisi kesehatannya.

Program	Kegiatan	Capaian Program	Alokasi Dana (IDR)
Menyiapkan Generasi Muda untuk Dunia Kerja Nanti Saat Ini	Kegiatan program ini meliputi implementasi dari kegiatan belajar secara daring, pendampingan termasuk fasilitasnya, yaitu pelatihan kewirausahaan dan berbagai kegiatan kesehatan.	Kegiatan ini diadakan di Aceh, Meulaboh, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Flores yang menjangkau sekitar 1.500 anak-anak dan remaja.	1.004.020.000

RENCANA, FOKUS, DAN PROGRAM DI 2021

Bank di tahun 2021 kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan program-program keberlanjutan di Indonesia. Penerapan strategi keberlanjutan diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Prioritas pelaksanaan program keberlanjutan di tahun 2021 meliputi:

1. Menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak muda sehingga mereka dapat sukses bersaing di ekonomi global.
   - Literasi keuangan: Mendidik anak muda mengenai dunia bisnis dan kemampuan mengelola uang.
   - *Employability*: Membantu generasi masa depan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk sukses bersaing di ekonomi global.
2. Mendukung pengembangan bisnis baru dan pertumbuhan internasional yang berkelanjutan.
   - Kewirausahaan: Mendukung pebisnis muda melalui pelatihan dan dukungan keuangan.
   - Rantai pasokan berkelanjutan: Membantu pelanggan mewujudkan kegiatan perdagangan dan bisnis internasional serta meningkatkan kualitas rantai pasokan mereka.
3. Mendukung transisi bisnis menuju ekonomi rendah karbon (*low carbon economy*).
   - *Sustainable finance*: Berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan membantu klien mengelola risiko transisi.
   - HSBC *carbon footprint*: Mengurangi dampak langsung HSBC bagi lingkungan.

Setiap prioritas ini akan didukung oleh berbagai aktivitas komersial, kemitraan, investasi komunitas, dan pelibatan karyawan. Bank berharap dengan menjalankan semua prioritas ini dapat menjadikan Bank sebagai institusi terdepan yang menjalankan dan mempromosikan bisnis berkelanjutan.

/07

DATA PERUSAHAAN

190 Profil Pejabat Eksekutif

191 Alamat Kantor & Cabang

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

ALI SETIAWAN
Head of Global Markets & HSS

Menjabat sebagai *Head of Global Markets* & HSS PT Bank HSBC Indonesia pada 17 April 2017 Memperoleh gelar *Master of Commerce* bidang Ekonomi dan Keuangan, serta gelar Sarjana bidang Akuntansi dan Keuangan dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

KUSNIAH PRIMAYANTI
Head of Communications

Menjabat sebagai *Head of Communications* PT Bank HSBC Indonesia pada 17 April 2017. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Komunikasi dari Universitas Indonesia.

WIWIEN WIDYANTARI
Head of Internal Audit

Bergabung sebagai *Head of Internal Audit* PT Bank HSBC Indonesia pada 25 November 2019. Memperoleh gelar *Master of Commerce* dalam bidang Perbankan dan Keuangan dari University of New South Wales, Australia.

ULIYA ARIANI
Head of Corporate Secretary

Menjabat sebagai *Head of Corporate Secretary* PT Bank HSBC Indonesia pada 7 Agustus 2017. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum dari Universitas Indonesia.

SARIANI SADIKUN
Head of Wholesale Credit Approval

Menjabat sebagai *Head of Wholesale Credit Approval* PT Bank HSBC Indonesia pada 27 Juni 2019. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Sistim dan Aplikasi Komputer dari California State University of Fresno, Amerika Serikat.

ASRI TRIWAHYUNI SUTYOKO
Head of Corporate Sustainability

Menjabat sebagai *Head of Corporate Sustainability* PT Bank HSBC Indonesia pada 17 April 2017. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Bahasa dan Budaya Inggris dari Universitas Indonesia.

GRACE ROSALIE PAPILAYA
General Legal Counsel

Menjabat sebagai *General Legal Counsel* PT Bank HSBC Indonesia pada 3 Juli 2017. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum dari Universitas Indonesia.

ALAMAT KANTOR & CABANG

Balikpapan
- Jl. Jendral Sudirman No. 9, Balikpapan, 76112

Bandar Lampung
- Jl. Ikan Bawal No. 79 -81, Bandar Lampung, 35223

Bandung
- Wisma HSBC, Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung, 40261
- Jl. Buah Batu No. 238, Bandung, 40265
- Flamboyan Square Unit F1, Lantai 1 - 2, Jl. Sukajadi 232, Bandung, 40153
- Jl. Ir. H. Djuanda No. 74, Bandung, 40132

Banyumas
- Jl. S. Parman No. 84, Purwokerto, 53141

Batam
- Komplek Sumber Jaya Blok A No. 1 – 3, Jl. Raden Patah, Batam, 29444

Bekasi
- Kawasan Industri Jababeka II, Ruko Kapitol Blok 2I & 2G, Jl. Niaga Raya, Bekasi, 17530
- Komplek Sentral Niaga Kalimalang Blok A8 No. 10 , Jl. Ahmad Yani, Bekasi, 17141

Bogor
- Jl. Raya Pajajaran No.84 Ruko C - D, Bogor, 16143

Denpasar
- Ruko Sudirman Panjer, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar

Jambi
- Jl. Hayam Wuruk No. 46 - 47, Jambi, 36125

Jakarta Barat
- Wisma AKR, Lantai Dasar, Jl. Panjang No. 5, Jakarta, 11520
- Graha Antero, Jl. Tomang Raya No. 27, Jakarta, 11440
- Ruko Puri Kencana Niaga, Jl. Puri Kencana Blok J1 No. 2O - P, Jakarta, 11610
- Jl. Hayam Wuruk No. 106D, Kel. Maphar Kec. Taman Sari, Jakarta 11160
- Jl. K.H. Mansyur No. 120 G-H, Jakarta, 11250
- Jl. Tanjung Duren Raya Blok A 11 No. 6A - B, Jakarta, 11470

Jakarta Pusat
- Komplek Ruko Bahan Bangunan, Blok F4 No. 6 - 7 , Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta, 10730
- Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 2/5, Jakarta, 11160
- Gedung Sentral Senayan I, Lantai Dasar, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Jakarta 10270
- Wisma BNI 46 - Kota BNI, Lantai Dasar, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220
- Jl. Kopi No. 2K, Jakarta, 11230

Jakarta Selatan
- Wisma Pondok Indah 2 Suite G01, Jl. Sultan Iskandar Muda V TA, Jakarta, 12310
- Jl. Melawai Raya No. 26, Jakarta , 12160
- Talavera Office Park, Lantai Dasar Suite 1-01 & Mezzanine Suite 2-01 & 2-02, Jl. Letjen TB Simatupang No. 22 - 26, Jakarta, 12430
- Jl. Kemang Raya No. 7, Jakarta, 12730
- Komplek Grand ITC Permata Hijau Blok Emerald Persil No. 34, Jl. Arteri Permata Hijau, Jakarta, 12210
- World Trade Center 1, Lantai 1, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 - 31 Jakarta, 12920
- Plaza Kuningan Menara Utara, Lantai Dasar Suite 102, Jl. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta, 12940
- Gedung Menara Dea I, Lantai Dasar Zona A, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E 4.3 No. 1, Jakarta, 12950

Jakarta Timur
- Jl. Pemuda Blok W Kav. 706, Jakarta, 13220

Jakarta Utara
- Jl. Muara Karang Blok B8 No. 1, Jakarta, 14440
- Jl. Boulevard Barat Blok LC 6 Kav. 39-40, Jakarta, 14240
- Komplek Puri Mutiara Blok A Kav. 93 - 95, Jl. Griya Utama, Jakarta, 14350
- Jl. Boulevard Blok FY-1 No. 7 - 8, Jakarta, 14250
- Jl. Pluit Kencana No. 85 C - D Blok B Kav. 6, Jakarta, 14450
- Rukan Exclusive Mediterania, Pantai Indah Kapuk Blok B No. 27B, Jakarta, 14470

Makassar
- Jl. Dr. W. Sudirohusodo No. 42, Makassar, 90174
- Jl. Boulevard Ruko Jasper II F No. 30, Makassar, 90213

Malang
- Jl. Pasar Besar 99, Malang, 65118

Manado
- Komplek Ruko Mega Mas Blok C1 No. 15 - 16, Jl. Pierre Tendean Boulevard, Manado, 95111

Medan
- Wisma HSBC, Lantai Dasar, Jl. Diponegoro 11, Medan, 20152
- Komplek Centre Point Business Park Blok G10 - 11, Jl. Jawa, Medan, 20412
- Jl. Perintis Kemerdekaan No. 9, Medan, 20234
- Glugur Golden Trade Center No.8, Jl. Glugur, Medan, 20111
- Jl. Cirebon No. 19 - 21, Medan, 20212
- Jl. Asia No. 170 A, Medan, 20214

Palembang
- Jl. Basuki Rahmat No. 24, Palembang, 30125

Pangkal Pinang
- Jl. Soekarno Hatta No 17, Pangkal Pinang, 33684

Pekanbaru
- Jl. Riau No. 2 A - C, Pekanbaru, 28291

Pontianak
- Jl. Ir. Juanda No. 37 - 39, Pontianak, 78117

Samarinda
- Jl. Imam Bonjol No. 8, Samarinda, 75112

Semarang
- Wisma HSBC, Jl. Gajah Mada 135, Semarang, 50134
- Jl. Sisingamangaraja no.27, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Semarang 50253.

Surabaya
- Graha HSBC, Jl. Jendral Basuki Rachmat No. 58 - 60, Surabaya, 60271
- Darmo Park I Blok IA No.1 - 2, Jl. Mayjen Sungkono No.118 - 118A, Surabaya, 60256
- Jl. Manyar Kertoarjo 31A - G, Surabaya, 60285
- Ruko Office Park 2, Jl. Bukit Darmo Boulevard Blok B2 No. 29, Surabaya, 60162
- Jl. Coklat No. 29, Surabaya, 60161
- Jl. Raya Jemursari No. 240B - 242, Surabaya, 60237

Solo
- Jl. Slamet Riyadi No. 73, Solo, 57112

Tangerang
- Cluster Rodeo Drive Boulevard Blok A No. 1, Jl. Gading Serpong Boulevard, Tangerang, 15138
- Jl. Pahlawan Seribu No. 8 A - B, Tangerang, 15321
- Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera 29D No. 47, Tangerang, 15326
- Jl. Merdeka Blok A-12 No. 92, Tangerang, 15114
- Kebayoran Arcade Blok KA/B1 No. 23, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

Yogyakarta
- Jl. Pangeran Mangkubumi No. 63, Yogyakarta ,55232

LAPORAN KEBERLANJUTAN 2020

IKHTISAR **KEBERLANJUTAN**

Sebagai bagian dari kepatuhan, PT Bank HSBC Indonesia selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk berkenaan dengan kebijakan keuangan berkelanjutan seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Penerapan kebijakan berkelanjutan ini juga telah lama menjadi bagian dari komitmen Grup HSBC secara global.

ASPEK **EKONOMI**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank tidak hanya memberikan manfaat kepada organisasi, tetapi juga para pemangku kepentingan lain, termasuk perekonomian nasional. Distribusi manfaat tersebut, terutama berkenaan dengan fungsi intermediasi Bank yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit untuk mendukung dunia usaha maupun individu.

Distribusi Manfaat pada Ekonomi Indonesia (Rp miliar)

Pembayaran kepada penyandang dana (biaya bunga pinjaman)

246

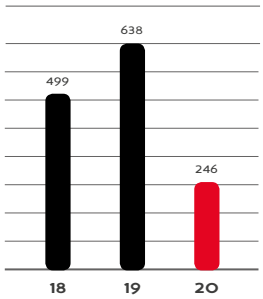

Kinerja Produk Perbankan (Rp miliar)

Kredit yang Diberikan - Bruto

58.394

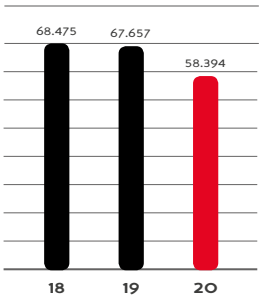

Dana Pihak Ketiga

72.160

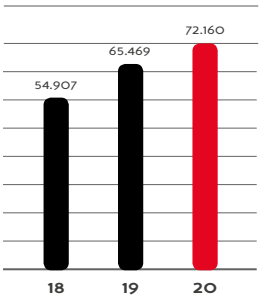

Kinerja Ekonomi (Rp miliar)

Pendapatan Operasional

5.112

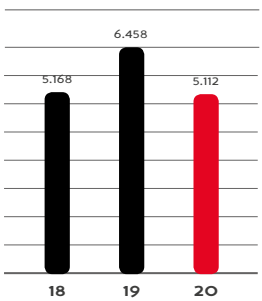

Laba sebelum Pajak

1.774

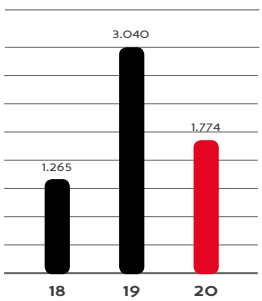

Laba Bersih

1.310

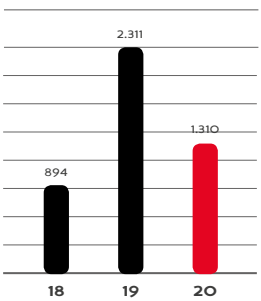

ASPEK **LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan usaha Bank tidak terkait langsung dengan lingkungan hidup. Kendati demikian, Bank tetap menjalankan komitmen di bidang pelestarian lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Efisiensi Operasional

44%

Melalui pengembangan otomasi proses internal yang dilaksanakan secara berkesinambungan, Bank mampu menurunkan penggunaan kertas sekitar 4,4 juta lembar yang berasal dari komunikasi nasabah dan model kerja berbasis digital, seperti kebijakan *work from home*.

Efisiensi Energi Listrik

1,5 Juta KwH

Bentuk kepedulian Bank terhadap penyelamatan lingkungan, antara lain ditunjukkan melalui penurunan penggunaan energi listrik yang saat ini menggunakan bahan bakar primer yang tak dapat diperbarui. Pada 2020, Bank berhasil menurunkan konsumsi listrik sebanyak 1,5 juta Kilo Watt Hour (KwH).

Jejak Karbon

1.141 ton

Bank berhasil menurunkan jejak karbon atau *carbon foot print*, yang antara lain dari operasional Data Center dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan listrik. Hal ini menjadi bagian dari kontribusi Bank dalam merawat lingkungan hidup.

ASPEK **SOSIAL**

Bank senantiasa memegang prinsip tidak adanya diskriminasi dalam organisasi Bank, sejak dari rekrutmen maupun pengembangan karier. Komitmen tersebut, antara lain ditunjukkan melalui komposisi dalam gender serta pengembangan kompetensi.

Kesetaraan Gender

57,07%

Jumlah Karyawan Wanita
Bank telah mempraktikkan kesetaraan gender dalam rekrutmen karyawan serta pengembangan karier, sebagai komitmen adanya kesempatan yang sama tanpa memandang gender di lingkungan Bank. Hingga akhir tahun 2020, komposisi jumlah karyawan pria dan wanita: 44,93% dan 55,07%.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

3.773
Peserta Pelatihan

Pengembangan Kompetensi Karyawan
Sepanjang 2020, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 3.773 peserta. Total alokasi anggaran yang direalisasikan mencapai Rp34.789 juta.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BERKELANJUTAN

Pelaksanaan kegiatan program keuangan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain itu, Bank juga mengadopsi ketetapan yang dibuat oleh perusahaan induk, yaitu HSBC Holdings Plc.

Sedangkan strategi pelaksanaannya, mengacu pada visi dan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB). Visi keberlanjutan yang telah ditetapkan Bank adalah "Membangun Masa Depan Berkelanjutan." Melalui pedoman tersebut, Bank yang beroperasi secara global, menjadi bagian dari institusi yang membantu melayani kebutuhan dunia yang terus berubah.

Bank menyadari bahwa sektor keuangan memiliki peran penting dalam menangani perubahan iklim. Hingga saat ini, Grup HSBC secara global telah diakui sebagai mitra utama dalam transisi menuju dunia rendah karbon. Karena itu, Bank berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan menjalankan transisi rendah karbon melalui keuangan berkelanjutan.

Bank mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai segala bentuk layanan keuangan yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam keputusan bisnis atau investasinya. Pendanaan berkelanjutan mencakup pembiayaan dan kegiatan investasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan PBB (SDGs), terutama tindakan untuk menangani perubahan iklim.

Sejak 2019, Bank telah menjadi bagian dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Keterlibatan tersebut merupakan salah satu indikasi penting dari upaya Bank sebagai lembaga keuangan untuk menjadi bagian penting dari transisi masa depan dunia yang rendah karbon. Hal ini sejalan dengan sifat bisnis Bank terkait pemberian pinjaman maupun investasi kepada perusahaan lintas sektor dan wilayah.

Inisiatif Strategis Tahun 2020

Pada tahun 2020 Bank fokus pada prioritas strategis untuk tumbuh secara berkesinambungan:

- Meningkatkan fokus terhadap nasabah untuk bertumbuh di segmen, sektor, wilayah dan industri yang dituju.
- Membantu nasabah terdampak COVID-19 dan terus memetakan dan memitigasi risiko terkait untuk menjaga kesehatan portofolio Bank.
- Memanfaatkan jaringan internasional untuk memaksimalkan peluang bisnis lintas batas.
- Memperkuat proposisi produk untuk menarik lebih banyak rekening operasional untuk mendukung portofolio DPK yang lebih kuat.
- Berinvestasi di bidang digital untuk memacu bisnis ritel, termasuk jumlah nasabah, kartu kredit, *wealth*, dan *Retail Business Banking*.
- Menarik, mendidik, dan menjaga talenta yang ada di samping merampingkan operasi dan meningkatkan pengawasan.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Bank telah memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dimulai sejak tahun 2019. RAKB tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut ini ringkasan dari RAKB.

Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Bank mendefinisikan kegiatan keuangan sebagai layanan perbankan yang berkaitan dengan lingkungan, tanggung jawab sosial maupun kriteria dalam pengelolaan bisnis atau pengambilan keputusan berinvestasi. Kegiatan keuangan yang berkelanjutan mencakup pembiayaan dan kegiatan investasi yang diperlukan untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan khususnya fokus pada upaya memerangi ancaman perubahan iklim.

Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tujuan utama Bank adalah menyediakan pembiayaan yang memungkinkan terjadinya transisi menuju ekonomi rendah karbon dan membantu klien mengelola risiko yang disebabkan oleh transisi tersebut. Kegiatan pembiayaan yang berkelanjutan termasuk menyediakan fasilitas kredit dan pinjaman, serta layanan konsultasi atau akses pada pasar modal.

Kegiatan keuangan yang berkelanjutan membantu terjadinya transisi bisnis dari kegiatan-kegiatan yang padat karbon, serta mengembangkan sumber energi baru, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih bersih. Hal tersebut juga berarti menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membantu pelanggan ritel agar menjadi hemat energi di rumah mereka atau berinvestasi dalam sumber energi yang terbarukan.

Rencana Aksi 2020-2023

Bank telah menyusun rencana aksi untuk keuangan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang dimulai sejak tahun lalu. Fokus yang telah ditetapkan adalah:

1. Pelatihan dan pendidikan.
2. Memimpin dan membentuk forum debat seputar kegiatan keuangan dan investasi yang berkelanjutan.
3. Risiko terjadinya peralihan (*transition risk*).
4. Kegiatan operasional yang berkelanjutan (*sustainable operations*).
5. Meningkatkan dan mempromosikan produk investasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Bank secara aktif terlibat dengan klien yang bergerak di sektor karbon tinggi. Bank mendukung dan mendorong strategi transisi para nasabah serta ikut meninjau pendekatannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emission*).

Secara rinci, rencana tersebut telah berjalan satu tahun. Sedangkan 4 (tahun) sisanya dirumuskan sebagai berikut:

Tahun	Target Kegiatan Prioritas
2020	• Risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis bank.
2021	Melakukan kajian terkait: • Permintaan pasar terkait produk, dan atau jasa keuangan berkelanjutan. • Kesesuaian produk dan atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan. • Pengembangan produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan. • Integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis bank.
2022	Menyediakan pembiayaan dan investasi berkelanjutan di semua kelompok pelanggan dan produk.
2023	Sejak tahun pertama implementasi, portofolio berkelanjutan mengalami peningkatan.

Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Kelompok kerja kegiatan keuangan yang berkelanjutan mengembangkan metodologi dan sarana yang efektif serta sesuai dengan tujuan mekanisme pengukuran penilaian kemajuan dan dampak inisiatif keuangan yang berkelanjutan. Metodologi dan sarana tersebut meliputi:

- Melakukan analisa pendekatan dan indikator yang saat ini digunakan untuk mengukur implementasi dan dampak dari kegiatan keuangan yang berkelanjutan.
- Memberikan pilihan rancangan kerangka kerja pengukuran yang tepat untuk menilai kemajuan dalam bidang seperti: pengutamaan pertimbangan lingkungan dan sosial ke dalam manajemen risiko dan operasi bisnis, arus keuangan ke proyek-proyek keberlanjutan (*green projects*), dampak lingkungan dan sosial, serta efektivitas pilihan strategi yang berbeda.

Realisasi Program Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah merealisasikan rencana yang tercantum dalam RAKB. Penjelasannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Program	Realisasi/Aktivitas
1	Peningkatan pemahaman dan *refresher* tentang kebijakan manajemen risiko.	Telah dilaksanakan *Transition Risk Training* di bulan Maret yang diikuti oleh sekitar 30 *Sustainable Finance Champion* di regional.
		Telah dikeluarkan *Pedoman Green Loan* bagi *relationship manager* di bulan Mei
		Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan terkait *Transition Risk Policy*.
		Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan terkait risiko dan kredit.

No.	Program	Realisasi/Aktivitas
2	Peningkatan pengetahuan dan berbagi informasi tentang praktik-praktik keuangan berkelanjutan yang terbaik.	*Green Champion* secara berkala telah melakukan pertemuan dan *update* tentang *sustainable finance* termasuk dampak COVID-19 *dan sustainability linked loan*.
		Sirkulasi bulanan mengenai informasi terkini dari *sustainable finance* termasuk informasi tentang *deal*/inisiatif, *event*/inspirasi/*awards*, pasar, iklim dan laporan ESG bagi *relationship managers, team leaders*, dan karyawan.
3	Peningkatan pemahaman tentang keuangan berkelanjutan	*Workshop* dan *training* dilaksanakan pada bulan Agustus dan November
		Pelaksanaan kegiatan dan konferensi *Sustainable Finance* diadakan pada bulan Agustus dan November.
		Memasukkan aspek keuangan berkelanjutan dalam rencana bisnis bulanan nasabah. Diskusi tentang *Sustainable Finance* telah dilakukan oleh *relationship manager* baik berupa kunjungan lapangan, telepon dan rapat yang diselenggarakan berkala setiap bulan.
		Telah dilakukan pelatihan dan diluncurkannya Kerangka Kerja
		Mengikuti sesi webinar tentang energi terbarukan, keuangan sosial syariah dan *climate bond initiatives.*
4	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman berbagai pemangku kepentingan terhadap keuangan berkelanjutan	Berpartisipasi dalam seri webinar Indonesia *Sustainable Finance Initiative*.
		Berpartisipasi dalam seri webinar Indonesia *Sustainable Finance Initiative* – Kelas Keuangan Berkelanjutan, Transisi Energi dan Investasi Energi Terbarukan.
5	Meningkatkan pemahaman, identifikasi dan upaya mendukung bisnis pelanggan dalam transisi ke ekonomi rendah karbon.	Bank telah memasukkan isu s*ustainability* dan *sustainable finance* ke dalam catatan perencanaan pelanggan secara bulanan.
6	Monitor kinerja lingkungan	*Scorecard* dan target lingkungan telah dilaksanakan semenjak awal tahun.
		Target kinerja lingkungan terkait penggunaan energi, manajemen limbah dan kertas telah ditetapkan dan dilakukan *monitoring* secara berkala untuk memastikan efektivitas program terkait.

Profil Singkat

Sebagai pelopor perbankan modern di negara-negara Asia, Grup HSBC yang beroperasi secara global memiliki sejarah panjang di Indonesia. HSBC membuka kantor pertamanya di Indonesia pada 1884 di Jakarta (Batavia) untuk memfasilitasi perdagangan gula, yang merupakan perdagangan penting saat itu. Pada 1896, operasional Bank diperluas ke Surabaya.

Selama perang dunia ke-2, HSBC menutup kegiatan operasionalnya di Indonesia. Pada 1968, HSBC kembali mendapat izin perbankan baru dan sejak itu terus bertumbuh sebagai salah satu bank asing terkemuka yang beroperasi di Indonesia.

Pada Mei 2009, HSBC resmi mengakuisisi PT Bank Ekonomi Raharja Tbk dengan tujuan untuk meningkatkan bisnis perbankan komersial HSBC di Indonesia, memperluas bisnis ritel di sektor perbankan, dan melipat-gandakan jaringan HSBC di Indonesia. Pada Oktober 2016, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk berubah nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia.

Pada 17 April 2017, Grup HSBC mengintegrasikan seluruh kantor cabang bank asingnya ke dalam PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") sebagai bentuk dukungan kepada agenda konsolidasi perbankan Pemerintah Republik Indonesia. Bank merupakan institusi keuangan perbankan internasional pertama yang mendapatkan izin untuk mengintegrasikan kantor cabang asing.

Hingga tahun buku 2020, Bank telah melayani nasabahnya melalui 69 kantor di 24 kota di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 3.000 karyawan, Bank menjangkau nasabah dengan beragam layanan perbankan: *Wealth and Personal Banking*, *Commercial Banking*, dan *Global Banking and Markets*.

VISI DAN MISI KEBERLANJUTAN

Visi dan Misi Berkelanjutan

HSBC mendefinisikan kegiatan keuangan yang sebagai bentuk apa pun dari layanan perbankan yang berkaitan dengan lingkungan, tanggung jawab sosial maupun kriteria dalam pengelolaan bisnis atau pengambilan keputusan berinvestasi. Kegiatan keuangan yang berkelanjutan mencakup pembiayaan dan kegiatan investasi yang diperlukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Develepoment Goals*) dan khususnya fokus pada upaya memerangi ancaman perubahan iklim.

Nilai-nilai

Nilai-nilai kami menggambarkan karakter HSBC sebagai organisasi dan menunjukkan keunikan kami.

TERBUKA

Kami menghargai keragaman

- Kami dilahirkan dalam beragam bahasa. Kami berdiri di atas kekuatan beragam pengalaman, sifat, dan suara; itulah jati diri kami seutuhnya dan cara kami bekerja.
- Semakin besar empati dan keragaman kami, semakin baik kami mencerminkan dunia para nasabah dan komunitas kami – dan semakin baik pula kami dapat melayani mereka.
- Jadi, kami memperjuangkan keterbukaan. Kami mau mendengar. Kami melenyapkan hambatan. Kami mencari pandangan yang berbeda dari pandangan kami sendiri.

TERHUBUNG

Kami sukses bersama

Kami menawarkan rangkaian peluang luas yang tak tertandingi bagi nasabah kami.

Namun, kami hanya dapat menggenapi seluruh janji ini dengan keterhubungan erat lintas-batas. Bersama nasabah dan mitra kami. Bersama sebagai mitra dan dalam kesatuan organisasi.

Jadi, kami berkolaborasi lintas-batas. Kami melenyapkan hambatan. Kami saling mendukung bahkan, tanpa saling menghambat.

Bersama, kami mewujudkan yang tidak mungkin kami lakukan sendiri.

Andal

Tindakan kami berdampak nyata pada dunia dan kehidupan masyarakat. Kami mengemban tanggung jawab ini sungguh-sungguh.

Kami menetapkan standar tinggi bagi diri sendiri dan kami bertanggung jawab atas setiap tindakan kami. Kami senantiasa mengedepankan penilaian objektif. Untuk tiap hal yang terasa tidak pada tempatnya kami akan angkat bicara dan bertindak.

Masa depan kami bangun di hari ini. Kesuksesan hanya dapat kami raih dengan pandangan jangka panjang yang menikberatkan keberlanjutan bagi nasabah, investor dan planet kita bersama

Kami menuntaskan

Kami menciptakan nilai bagi nasabah dengan senantiasa bergerak maju dan mewujudkan sesuatu.

Kami memiliki semangat wirausaha: Kami mencoba hal baru. Kami belajar dan berkembang. Kami mengambil risiko cerdas.

Kami dinamis: Kami tidak mau biasa-biasa saja. Kami bergerak cepat.

Kami tegas: Kami membuat pilihan jelas dan berani bertindak.

Terakhir, kami menepati janji: Kami selalu menuntaskan apa yang kami janjikan.

Building a Sustainable Culture

Bank berkomitmen untuk membangun budaya keberlanjutan dengan para pemangku kepentingan. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, Bank telah melakukan upaya yang mendukung, misalnya pengembangan pengetahuan dan kemampuan karyawan melalui pelatihan, seminar, serta secara sukarela mendukung kegiatan perubahan iklim.

Bank juga mendukung nasabah melalui layanan konsultasi untuk mengelola risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim. Adapun untuk pemangku kepentingan lainnya, Bank berbagi pemikiran melalui pertemuan, forum dan konferensi sebagai pembicara.

Skala Usaha

(Rp Miliar)

Uraian	2020	2019	2018
Aset	112.601	111.860	108.961
Liabilitas	93.303	93.724	93.305
Ekuitas	19.298	18.136	15.656

Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan Grup HSBC secara global adalah 226.000 orang. Sedangkan di Indonesia, per akhir tahun 2020, total karyawan Bank berjumlah 3.419 orang. Dari jumlah tersebut, 55,07 % adalah perempuan dan sisanya 44,93 % laki-laki.

Lebih rinci tentang demografi karyawan Bank disajikan di halaman 72-73.

Keanggotaan pada Asosiasi

Bank bergabung dalam berbagai organisasi atau asosiasi yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan. Berikut adalah rincian asosiasi tersebut hingga akhir tahun buku 2020.

Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi dalam Asosiasi
IBCSD - Indonesian Business Council for Sustainable Development	Memiliki komitmen untuk bertindak dan tujuan untuk berbagi pengalaman, tujuan kami adalah untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan mendapatkan informasi tentang wawasan bisnis. Kami juga mencari jaringan bisnis untuk membangun strategi keberlanjutan dan kemungkinan perusahaan sejawat untuk dampak kolektif yang lebih besar.	Anggota
IKBI – Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia	Asosiasi yang dipimpin industri bertujuan menciptakan solusi keuangan yang tahan iklim dan ekonomi yang efisien serta menangkap peluang bisnis baru dan juga untuk dapat terhubung dengan dana hijau/ berkelanjutan, iklim dan SDG's terkait.	Anggota
MVB – Most Valued Business Indonesia	Untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pendidikan, kolaborasi dan promosi tanggung jawab perusahaan dimulai dengan nilai-nilai inti perusahaan dengan peluang untuk memperoleh pengetahuan, hubungan dan platform.	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)	Forum untuk komunikasi dan konsultasi antara Direktur Kepatuhan dalam industri perbankan Indonesia.	Anggota
Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina)	Asosiasi untuk menyalurkan aspirasi bank internasional kepada pemerintah, Parlemen, dan regulator industri perbankan (OJK & BI).	Anggota
Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	Asosiasi untuk menyalurkan aspirasi perbankan kepada pemerintah, Parlemen dan regulator industri perbankan (OJK & BI).	Anggota
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)	Asosiasi untuk membangun industri kartu kredit yang sehat dan bertanggung jawab untuk penerbit kartu kredit, pemegang kartu, pedagang, pelaku utama (American Express, JCB International, MasterCard International, dan Visa International) dan pihak terkait lainnya.	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Asosiasi untuk mengakomodasi perkembangan terbaru dalam penerapan sistem pembayaran dari berbagai sisi, baik bisnis maupun teknis.	Anggota

Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi dalam Asosiasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	Asosiasi untuk mengakomodasi, pada awalnya, masalah yang berkaitan dengan urusan industri dan sekarang diperluas ke urusan industri dan nasional.	Anggota
British Chamber of Commerce (Britcham)	Mewakili kepentingan bersama komunitas bisnis Inggris dalam mempromosikan perdagangan bilateral, layanan dan investasi antara Inggris dan Indonesia, serta kawasan.	Anggota
European Chamber of Commerce (EuroCham)	Mewakili kepentingan bersama komunitas bisnis Eropa dalam mempromosikan perdagangan bilateral, layanan dan investasi antara Eropa dan Indonesia, serta kawasan.	Anggota
American Chamber of Commerce (AmCham)	Mewakili kepentingan bersama komunitas bisnis Amerika dalam mempromosikan hubungan komersial US-Indonesia dan menjadi sumber utama untuk informasi dan jaringan bisnis bagi anggotanya.	Anggota
German-Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID)	Mewakili kepentingan bersama komunitas bisnis Jerman dalam mempromosikan hubungan komersial Jerman dan Indonesia, bertindak sebagai jembatan penghubung strategis antara ekonomi Jerman dan Indonesia, mewakili kepentingan bisnis bilateral para anggota perusahaan dan institusi, menyediakan platform untuk transfer pengetahuan secara internasional serta membuka peluang dagang dan investasi.	Anggota
Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)	Asosiasi bank pengelola reksa dana di Indonesia untuk membahas masalah-masalah terkait industri serta berfungsi sebagai suara kolektif untuk membuat perwakilan atas nama industri.	Anggota
Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI)	Asosiasi bank kustodian di Indonesia untuk membahas isu-isu terkait industri serta berfungsi sebagai suara kolektif untuk mewakili atas nama industri.	Anggota
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Asosiasi untuk meningkatkan profesionalisme Sekretaris Perusahaan di Indonesia dan untuk mendukung upaya pengembangan tata kelola perusahaan yang baik, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan, pertukaran informasi dan forum komunikasi antara Sekretaris Perusahaan, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.	Sekretaris Perusahaan sebagai Anggota
Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)	Komite untuk membahas isu-isu terkait pengembangan pasar keuangan Indonesia, antara pelaku pasar, asosiasi yang terkait pasar keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat integritas dan reputasi pasar keuangan Indonesia, serta mendukung perekonomian nasional.	Co Chairman
ACI Financial Market Association of Indonesia	Institusi profesional yang memberi nilai lebih kepada industri keuangan di Indonesia dan Global, institusi-institusi, anggota individu dan masyarakat pada umumnya melalui pendidikan, sosialisasi dan pembentukan Praktik Pasar yang profesional dan bertanggung jawab pada Pasar Keuangan.	Anggota
Indonesia Country Program (ICP)	Forum untuk dialog dan bertukar pandangan dengan direktur-direktur dan para country manager dari berbagai bidang industri dengan beragam bisnis objektif.	Anggota

Nama Asosiasi	Tujuan	Posisi dalam Asosiasi
Tenggara Strategics	Institusi riset dan penasihat bidang bisnis dan investasi yang menyediakan intelijensi bisnis yang lengkap dan memadai kepada komunitas bisnis mengenai hal-hal yang dapat membantu para pemuka bisnis mengambil keputusan strategis.	Anggota

Perubahan Signifikan

Sepanjang 2020, Bank tidak mengalami perubahan yang bersifat signifikan, baik terkait dengan pembukaan maupun penutupan cabang baru serta struktur kepemilikan saham.

Informasi lebih lengkap tentang Bank disajikan pada bagian "Ikhtisar Keuangan" dan "Profil Perusahaan" yang terdapat pada Laporan Tahunan ini di halaman: 5 dan 26-43.

LAPORAN DIREKSI

Laporan Direksi tentang komitmen dan pelaksanaan keuangan berkelanjutan PT Bank HSBC Indonesia disampaikan bersamaan dengan Laporan Direksi tentang Laporan Tahunan yang ada di halaman 14-21.

TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Tata Kelola Berkelanjutan

Praktik bisnis yang dijalankan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") senantiasa berpedoman pada standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Karena itu, Bank menjadikan penerapan prinsip kepatuhan dan praktik bisnis terbaik yang berlaku di industri sebagai pedoman dalam kegiatan usaha dan operasional Bank.

Tata kelola tersebut dipraktikkan untuk memastikan agar kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank dapat tumbuh berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, aktivitas usaha Bank tidak menimbulkan dampak negatif bagi para pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, Bank merealisasikannya melalui beragam kegiatan, antara lain keterbukaan informasi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Bank juga menyadari, dalam kegiatan usahanya perlu melindungi penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta memenuhi standar etika yang berlaku di dunia internasional di lingkungan kerja dan rantai pasok.

Selain itu, Bank juga menyadari kewajiban yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Karena itulah, Bank berupaya menciptakan berbagai program agar dapat membantu masyarakat mengakses layanan keuangan.

Untuk mendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan, Bank juga didukung oleh *Centre of Sustainable Finance*. Unit yang berada di Grup HSBC yang beroperasi secara global ini menerbitkan laporan penelitian terkait prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, antara lain evolusi energi dan perubahan iklim.

Sebagai acuan, dalam penerapan keuangan berkelanjutan Bank berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta regulasi terkait. Bank juga telah mengadopsi pedoman yang telah ditetapkan oleh induk usaha secara global.

Selain itu, laporan ini juga mengacu pada Standar Pelaporan Keberlanjutan dan *Financial Services Sector Disclosure* (FSSD) yang dikeluarkan *Global Reporting Initiative* (GRI).

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Bank secara berkesinambungan menanamkan komitmen penerapan keuangan berkelanjutan pada seluruh organisasi di lingkungan Bank. Secara umum, Dewan Komisaris dan Direksi mendorong terciptanya keberhasilan Bank dalam jangka panjang serta mewujudkan nilai berkelanjutan kepada para pemegang saham.

Terkait dengan pelaksanaan inisiatif dalam pengintegrasian lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), Dewan Komisaris melaksanakan sistem pengawasannya; sementara Direksi bertanggung jawab atas penyampaian laporan pelaksanaannya.

Direksi Bank maupun Dewan Komisaris menerima pembaruan kegiatan inisiatif berkelanjutan setiap semester. Pemutakhiran informasi tersebut berkenaan dengan pelaksanaan program terkait tiga pilar: *people, planet* dan *profit* serta pengembangan hubungan atau interaksi dengan pemangku kepentingan terkait, misalnya lembaga swadaya masyarakat.

Bank juga telah membentuk kelompok kerja kegiatan keuangan yang berkelanjutan (*Sustainable Finance*). Kelompok kerja ini bertugas mengkoordinasikan unit bisnis dan unit pendukung dalam pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan lengkap terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris pada bagian "Tata Kelola Perusahaan" yang terdapat pada Laporan Tahunan ini di halaman 150-181.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, komite, karyawan dan lainnya disampaikan secara lengkap pada bagian "Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi" yang terdapat pada Laporan Tahunan ini di halaman 75-76.

Penerapan Manajemen Risiko Berkelanjutan

Bank telah memiliki prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Termasuk di dalamnya, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko perusahaan.

Penerapan manajemen risiko Bank, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18 /POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

Sesuai dengan aturan tersebut, Bank telah menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan. Pengelolaan manajemen risiko ini akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja di masa mendatang.

Penerapan manajemen risiko sangat bermanfaat dalam menekan potensi kerugian yang terjadi. Selain itu, manajemen risiko mampu meningkatkan kinerja dan daya saing Bank serta pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Terkait dengan kebijakan risiko berkelanjutan, Bank telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah sektor yang mendapatkan perhatian. Di antaranya mencakup komoditas pertanian, bahan kimia, pertahanan, energi, kehutanan, pertambangan dan logam, Situs Warisan Dunia UNESCO, dan lahan basah yang ditetapkan oleh Konvensi Ramsar atau *Convention on Wetlands of International Importancem Especially as Waterfowl Habitat.*

Kerangka manajemen risiko berkelanjutan Bank juga mengadopsi Prinsip Ekuator (*Equator Principles*) sektor keuangan. Prinsip Ekuator ini menyediakan kerangka kerja bagi lembaga keuangan untuk menilai dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar yang diberikan dukungan pembiayaan.

Bank senantiasa meningkatkan kebijakan penerapan manajemen risiko tersebut seiring perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, atau harapan masyarakat. Karenanya, Bank berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan dan mengandalkan umpan balik mereka untuk mengidentifikasi berbagai perbaikan yang dapat dilakukan.

Dengan demikian, pemanfaatan berbagai cara untuk mengetahui secara dini termasuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko telah dilakukan serta dilaporkan secara konsisten. Pengembangan kerangka lebih luas dalam hal pengelolaan risiko itu sendiri dilakukan dengan pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Bahkan secara berkala, Bank juga memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait dengan manajemen risiko guna memastikan risiko berkelanjutan dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara konsisten.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank senantiasa melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku Kepentingan dimaksud adalah Nasabah, Pemegang Saham, Regulator dan Pemerintah, Masyarakat, Pemasok, dan Karyawan.

Bank bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses keterlibatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dan dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk mengidentifikasi isu utama dari masing-masing pemangku kepentingan dan memberikan solusinya. Bank meyakini bahwa hubungan saling percaya dengan beragam pemangku kepentingan akan menghasilkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat, dan dalam jangka panjang mampu menciptakan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Harus diakui, bahwa keberlanjutan Bank sebagian bergantung pada keterlibatan Bank dengan para pemangku kepentingan.

Interaksi dan kerja sama yang dilakukan Bank dengan para pemangku kepentingan, secara rinci dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Pemangku Kepentingan	Pendekatan
Nasabah	Nasabah Bank dapat memberikan masukan, keluhan, atau sekadar permintaan informasi terkait dengan produk dan layanan Bank setiap saat. Selain itu, Bank juga menghimpun harapan nasabah yang berubah sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kepuasan nasabah. Ruang interaksi antara Bank dan nasabah dilakukan melalui: • Kantor Cabang • *Internet Banking* dan *Mobile Banking* • *Call Center* • *Website* • Survei Kepuasan Nasabah • Acara *Gathering* dengan Nasabah Sarana komunikasi tersebut merupakan upaya Bank untuk menyediakan akses komunikasi yang lebih mudah, lebih efektif dan lebih sederhana bagi para nasabah, dengan tetap memperhatikan keamanan dan privasi data mereka.

Pemangku Kepentingan	Pendekatan
Pemegang Saham	Bank menyampaikan laporan secara berkala kepada para pemegang saham terkait dengan kinerja keuangan dan operasional, pelaksanaan strategi Bank, aksi dan strategi korporasi, informasi perusahaan terkini. Laporan-laporan tersebut disampaikan Bank melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS (RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa), laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan. Interaksi antara pemegang saham dengan Bank dilakukan sesuai dengan hak-hak pemegang saham yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Regulator dan Pemerintah	Regulator dan Pemerintah terkait dengan industri perbankan, terutama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik Bank senantiasa memberikan laporan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada regulator, antara lain terkait dengan pelaporan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, pelaporan mengenai pelaksanaan kepatuhan. Selain itu, Bank juga senantiasa menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh regulator pada waktu tertentu antara lain dalam rangka membahas pemenuhan kepatuhan Bank, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komunikasi dengan regulator dilaksanakan secara efektif dan efisien, misalnya berkonsultasi secara aktif baik dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh regulator maupun diskusi yang di-inisiasi oleh Bank.
Masyarakat	Pendekatan kepada masyarakat, antara lain dilakukan dalam bentuk keterbukaan informasi. Publik dapat berinteraksi dengan Bank terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip transparansi. Selain itu, Bank juga melakukan hubungan langsung dengan masyarakat, antara lain melalui program tanggung jawab sosial perusahaan dan literasi keuangan. Kegiatan tersebut secara konsisten dilaksanakan setiap tahun, sejalan dengan komitmen Bank untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan kepedulian Bank terhadap masyarakat.
Pemasok	Hubungan yang saling menguntungkan antara Bank dengan pemasok sebagai mitra kerja Bank difasilitasi melalui pengembangan kerja sama penyediaan barang dan jasa yang adil dan transparan.
Karyawan	Hubungan Bank dengan karyawan, antara lain difasilitasi melalui dialog antara manajemen dengan serikat pekerja. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak dan kewajiban karyawan, dilakukan melalui beberapa sarana komunikasi atau pertemuan secara reguler, antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, HR Info melalui email, acara kebersamaan karyawan serta pertemuan antara manajemen dan karyawan /townhall, dan *e-mail*.

Tantangan yang Dihadapi

Bank menyadari bahwa penerapan keuangan berkelanjutan bagi perbankan, masih menghadapi banyak hambatan. Terutama berkaitan dengan terbitnya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang juga didukung POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Keduanya menjadi dasar untuk penerapan keuangan berkelanjutan.

Kendati demikian, Bank saat ini telah menjadi salah satu bank yang terlibat dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Bank meyakini bahwa platform IKBI dapat memanfaatkan keuangan swasta untuk mengurangi risiko terkait dengan persoalan lingkungan hidup, sosial dan tata kelola. Selanjutnya, bersama-sama mendukung dunia yang beralih ke ekonomi rendah karbon.

Sektor keuangan juga perlu dilengkapi dan diyakinkan dengan bahan berbasis ilmiah yang kuat agar siap dalam mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan. Bank berkontribusi terhadap studi, penelitian, dan para ahli yang akan disediakan IKBI untuk industri perbankan.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Membangun Budaya Berkelanjutan

Terciptanya budaya berkelanjutan merupakan modal penting untuk menciptakan kinerja usaha yang berkelanjutan. Untuk itulah, PT Bank HSBC Indonesia memiliki komitmen untuk membangun budaya tersebut, tidak hanya di lingkungan organisasi Bank, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan. Strategi pencapaian tersebut, antara lain dilakukan melalui sosialisasi kebijakan kinerja berkelanjutan Bank.

Realisasi program peningkatan budaya berkelanjutan tersebut dilakukan melalui beragam insiatif. Kepada karyawan misalnya, Bank berupaya mengembangkan pengetahuan dan pengalaman terkait prinsip-prinsip kerja berkelanjutan. Bentuk kegiatannya berupa pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang relevan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Melalui upaya tersebut, Bank berharap memiliki fundamental budaya berkelanjutan yang kuat. Dengan demikian, Bank dapat mendukung para mitra dan nasabah untuk merespons fenomena perubahan iklim, baik dari sisi risiko maupun peluangnya.

Sedangkan bagi pemangku kepentingan lain, Bank menyiapkan saluran komunikasi untuk mendiskusikan beragam masalah terkait perubahan iklim. Kebijakan ini merupakan bagian dari sosialisasi dan *engagement* untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menuju dunia rendah karbon.

Selain itu, Bank melakukan kampanye yang melibatkan karyawan sebagai relawan dalam kegiatan terkait perubahan iklim hingga melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan lain.

HSBC

ASPEK EKONOMI

Pendekatan

Bank mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai segala bentuk layanan keuangan yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) ke dalam keputusan bisnis atau investasi. Karena itu, pendanaan berkelanjutan mencakup pembiayaan dan kegiatan investasi yang diperlukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditentukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa dan khususnya tindakan untuk memerangi perubahan iklim.

Selain itu, Bank juga berkomitmen dalam mendukung pembiayaan yang berkaitan dengan tujuan SDGs lainnya, antara lain dalam konteks pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Bank. Upaya ini merupakan bagian dari skema untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sebagai perwujudannya, antara lain, Bank bekerja sama dengan debitur bisnis untuk membantu mereka memahami serta mengelola dampak lingkungan dan sosial mereka. Bank juga memiliki kebijakan khusus risiko keberlanjutan yang mencakup sektor komoditas agrikultur, kimia, pertahanan, energi, kehutanan, pertambangan dan logam, dan UNESCO *World Heritage Sites* dan R*amsar-designated wetlands*. Bank juga menerapkan Prinsip *Equator* ketika memberi pendanaan proyek.

Bank memastikan kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dengan memberikan pelatihan kepada para manajer risiko dan *relationship manager* mengenai kebijakan risiko keberlanjutan dan tanggung jawab mereka untuk memberi arahan berkenaan dengan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Inisiatif tersebut memainkan peranan yang penting dalam proses persetujuan dalam hubungan bisnis atau transaksi berisiko tinggi.

Bank mengajak debitur untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan. Jika debitur tidak berniat atau tidak dapat mematuhi standar keberlanjutan, maka Bank akan memutuskan hubungan bisnis dengan debitur terkait.

Komitmen inilah yang menjadi pendekatan Bank dalam merealisasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Kinerja Umum

Pencapaian kinerja PT Bank HSBC Indonesia merupakan bagian dari penerapan praktik berkelanjutan yang telah dijalankan pada kegiatan bisnis dan operasinya. Karena itu, Bank meyakini bahwa pencapaian finansial Bank merupakan cerminan dari praktik berkelanjutan tersebut.

Pada 2020, Bank membukukan total aset mencapai Rp112.601 miliar, tumbuh 0,7% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp111.860 miliar. Aset Bank pada tahun buku tersebut didominasi oleh kredit yang diberikan kepada nasabah-bersih, efek-efek untuk tujuan investasi, dan penempatan pada bank-bank lain - bersih masing-masing tercatat sebesar Rp55.335 miliar, Rp17.861 miliar, dan Rp10.654 miliar.

Sedangkan laba bersih yang dicatatkan Bank mencapai Rp1.310 miliar, lebih rendah 43,3% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp2.311 miliar. Penurunan laba tersebut disebabkan oleh peningkatan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penurunan pendapatan bunga bersih serta pendapatan non bunga sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pembahasan lengkap tentang kinerja Bank sepanjang tahun 2020 disampaikan di Laporan Tahunan ini halaman 56-71.

Nilai Ekonomi Diterima Bank dan Didistribusikan

Pengembangan dan penawaran produk jasa keuangan Bank, antara lain bertujuan bukan sekadar demi mencapai keuntungan bagi Bank. Demi terciptanya kesinambungan, Bank juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangannya serta mendorong terciptanya dampak positif bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Pendapatan aktivitas bisnis tersebut merupakan nilai ekonomi yang diterima Bank atas kegiatan usaha yang dijalankan sepanjang tahun buku. Sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan, nilai yang diterima tersebut juga didistribusikan demi terciptanya nilai-nilai berkelanjutan.

Pada tahun 2020, manfaat ekonomi yang didistribusikan oleh Bank kepada karyawan dan beban operasional mencapai Rp3.341 miliar. Dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp3.425 miliar, mengalami penurunan 2,5%.

Dalam kegiatan operasi tersebut, antara lain digunakan untuk implementasi program keuangan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui pengembangan sistem. Melalui inisiatif tersebut, tercipta efisiensi di bidang operasional yang antara lain berupa penghematan penggunaan kertas maupun energi listrik.

Pengembangan pegawai merupakan bagian penting dari prinsip berkelanjutan, antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Pada 2020, total biaya yang dikeluarkan untuk biaya pegawai mencapai Rp1.730 miliar, lebih rendah 11,2% dibandingkan realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp1.949 miliar

Dalam rangka kepatuhan, antara lain diwujudkan melalui pembayaran pajak penghasilan dan lainnya. Sepanjang 2020, total pajak yang dibayarkan Bank kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp464 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp729 miliar.

Pembayaran pajak ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Bank memberikan kontribusi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan pembangunan.

Berikut ini kinerja nilai ekonomi yang diterima dan didistribusikan oleh Bank dalam tiga tahun terakhir.

Tabel Distribusi Nilai Ekonomi

Uraian	2020	2019	2018
Nilai Ekonomi Diterima			
Pendapatan Bunga	5.307	6.197	5.976
Pendapatan Provisi dan Komisi	1.567	1.952	1.922
Pendapatan Instrumen yang Diperdagangkan	1.742	1.340	939
Pendapatan Operasional Lainnya	13	504	28
Jumlah Nilai Ekonomi yang Diterima	8.629	9.993	8.865

Uraian	2020	2019	2018
Nilai Ekonomi Didistribusikan			
Biaya Bunga	1.433	2.217	1.796
Biaya Provisi dan Komisi	363	640	521
Biaya Pegawai	1.730	1.949	1.877
Biaya Operasional lainnya*	1.611	1.476	2.090
Pembayaran kepada Pemerintah (pajak, retribusi dan lainnya)	464	729	371
Jumlah Nilai Ekonomi yang Didistribusikan	5.601	7.011	6.655

*) Termasuk beban umum dan administrasi, beban depresiasi aset tetap dan aset hak-guna, beban aset tak berwujud, dan rugi dari aset yang dimiliki untuk dijual

Terkait dengan kinerja produk perbankan, pada tahun 2020 Bank mencatat penyaluran kredit sebesar Rp58.394 miliar, lebih kecil 13,7% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp67.657 miliar. Penyaluran pembiayaan ini merupakan bagian penting dari manfaat ekonomi yang didistribusikan oleh Bank kepada pihak eksternal dalam rangka mendukung keuangan berkelanjutan melalui kegiatan ekonomi.

Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2020	2019	2018
Perindustrian	23.417	27.616	28.557
Perdagangan restoran dan hotel	9.855	12.796	13.681
Pertambangan	1.207	4.043	3.204
Jasa-jasa usaha	6.683	8.303	8.050
Konstruksi	4.967	4.164	3.887
Pengangkutan pergudangan dan jasa komunikasi	6.214	4.563	4.875
Pertanian perkebunan dan sarana perkebunan	632	1.387	1.084
Jasa-jasa sosial dan masyarakat	1.472	89	316
Listrik gas dan air	5	4	3
Lainnya	3.942	4.692	4.818
Total	**58.394**	**67.657**	**68.475**

Sedangkan berkenaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), pada tahun 2020 Bank telah menghimpun dana nasabah senilai Rp72.160 miliar, meningkat 10,2% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp65.469 miliar. Transaksi penghimpunan DPK ini, antara lain menjadi indikator kontribusi Bank terhadap inklusi keuangan kepada masyarakat Indonesia.

Tabel Kinerja Produk Perbankan

Uraian	2020	2019	2018
Total Simpanan Nasabah	72.160	65.469	54.907
- Giro	35.871	27.964	24.961
- Tabungan	15.281	12.399	12.228
- Deposito Berjangka	21.008	25.106	17.718
Total Kredit yang diberikan	58.394	67.657	68.475

Untuk manfaat yang diterima Bank, antara lain lain ditunjukkan melalui laba bersih yang pada tahun 2020 mencapai Rp1.774 miliar. Jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp3.040 miliar, terjadi penurunan 41,6%.

Perubahan perolehan laba bersih tersebut terutama disebabkan oleh oleh peningkatan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan penurunan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel Manfaat Ekonomi Diterima Bank

Uraian	2020	2019	2018
Pendapatan Bunga – net	3.874	3.980	4.180
Laba sebelum Pajak	1.774	3.040	1.265
Laba bersih tahun berjalan	1.310	2.311	894

ASPEK SOSIAL

Komitmen Bank

Bank telah memiliki komitmen untuk menyediakan produk dan memberikan layanan yang setara kepada seluruh nasabah. Kebijakan internal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

Regulasi tersebut juga menekan agar Bank memberikan hasil yang adil kepada para nasabah. Dalam menyampaikan informasi terkait produk dan layanan juga telah dilakukan secara transparan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Bank yang merupakan bagian dari Grup HSBC yang beroperasi secara global, telah mengadopsi kerangka kerja perilaku guna memastikan bahwa setiap karyawan di lingkungan Bank memperlakukan nasabah secara setara serta menerapkan transparansi dalam kegiatan operasional.

5 Pilar Kerangka Kerja Bank

Kesetaraan dalam Lingkungan Kerja

Bagi Bank, karyawan adalah faktor penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan target usaha yang telah ditetapkan. Manajemen senantiasa mendorong karyawan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka terkait dengan kebijakan, kondisi lingkungan kerja, dan gagasan-gagasan baru.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan budaya di lingkungan Bank yang mendukung dan mempromosikan perilaku yang benar: karyawan merasa diberdayakan untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka.

Selain itu, keragaman gender akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karier karyawan. Dengan begitu, Bank dapat memberikan layanan lebih maksimal kepada para nasabah dan para pemangku kepentingan Bank.

Pada tahun 2020, Bank mencatat jumlah karyawan ada 3.419 orang dengan komposisi berdasarkan gender: 55,1% perempuan dan 44,9% laki-laki. Bank senantiasa mempraktikkan kesetaraan dalam kesempatan dan pengembangan karier dengan tidak adanya diskriminasi sejak dari rekrutmen hingga pengembangan karier.

Statistik Karyawan Berdasarkan Gender

Jenis Kelamin	2020	2019	2018
Laki-laki	1.536	1.706	1.910
Perempuan	1.883	2.091	2.390

Tingkat Kesejahteraan Karyawan

Bank telah memiliki sistem remunerasi yang dirancang agar menarik dan dapat memotivasi orang-orang terbaik tanpa perbedaan jenis kelamin, etnik, usia, kondisi fisik atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kinerja atau pengalaman. Selain itu, Bank juga telah menyediakan beragam fasilitas yang melekat dengan remunerasi, sesuai dengan ketetapan regulator.

Bank meyakini bahwa pendekatan dalam penentuan remunerasi telah tepat dan adil dalam memenuhi kesejahteraan karyawan. Bank secara berkala melakukan evaluasi, terutama agar memenuhi prinsip kesetaraan dalam pemberian remunerasi.

Dalam menetapkan remunerasi, Bank telah mempertimbangkan standar upah minimum regional yang berlaku. Setiap karyawan Bank telah menerima penghasilan di atas upah minimum sesuai ketentuan dari pemerintah. Selain itu, sebagai penunjang tingkat kesejahteraan, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan dan lainnya kepada karyawan.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio	2020	2019	2018
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	123 : 1	142 : 1	149 : 1

Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman

Bank selalu berupaya menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan seluruh karyawan dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian, menjaga kesehatan mental karyawan menjadi sangat penting dengan mendukung kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan kerja. Hal itu, antara lain dilakukan dengan pemberian pendidikan kesehatan mental, sehingga dapat membantu karyawan mengatasi masalah serta mendukung pengembangan ke arah yang tepat.

Untuk mendukung keseimbangan antara kehidupan pribadi dan dunia kerja, Bank juga telah memberlakukan kebijakan cuti jangka panjang, seperti cuti sabatikal. Kebijakan tersebut akan memberikan kenyamanan bagi karyawan, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas dan loyalitas dalam lingkungan kerja yang nyaman.

Karena itulah, demi menciptakan kenyamanan, Bank menawarkan lingkungan kerja ruang terbuka yang lengkap, antara lain mencakup ruang kolaborasi untuk mengakomodasi kerja tim dan keterlibatan karyawan serta dukungan teknologi demi menciptakan efektivitas kerja.

Lebih lengkap tentang pembahasan sumber daya manusia disampaikan pada halaman 72-79 yang terdapat di Laporan Tahunan ini.

Tingkat Perpindahan Karyawan

Uraian	2020	2019	2018
Total Pergantian	18,4%	30,0%	33,5%
Kecuali Kontrak Langsung	12,5%	20,3%	31,0%

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Bank berupaya menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan semua orang dapat mengembangkan dan mewujudkan potensi yang dimiliki. Karena itu, kegiatan pengembangan kompetensi melalui beragam pelatihan telah direalisasikan secara berkesinambungan di lingkungan Bank.

Untuk mendukung komitmen tersebut, Bank juga telah menganggarkan kegiatan pengembangan kompetensi setiap tahun, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi karyawan dan mendukung pencapaian strategis Bank.

Program latihan dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sangat beragam. Dari keterampilan teknis, kepemimpinan, hingga bidang pelatihan khusus yang dibutuhkan oleh Bank. Program pelatihan tersebut dikelompokkan menjadi: kompetensi bisnis, kompetensi kepemimpinan, sertifikasi peraturan serta kompetensi umum.

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, pada tahun 2020 Bank melaksanakan program pengembangan kepada 3.773 pegawai dengan total partisipasi pelatihan sebanyak 60.789 peserta.

Pelaksanaan Pelatihan Tahun 2020

Tahun	Jumlah Karyawan	Jumlah Jam Pelatihan	Jam Pelatihan Per Karyawan	Jumlah Peserta Pelatihan	Jumlah Staf Terlatih
2020	3.443	59.706	17,34	60.789	3.773
2019	3.977	98.403	24,74	69.177	4.811
2018	4.496	107.199	23,80	64.852	5.470

ASPEK KEMASYARAKATAN

Bank berkomitmen untuk mendukung komunitas di lingkungan operasional Bank khususnya, serta masyarakat pada umumnya. Di antara wujudnya adalah berkontribusi terhadap badan amal dan organisasi nirlaba yang menjalankan proyek komunitas di seluruh negeri.

Selain itu, sebagian besar pendanaan Bank digunakan untuk program-program yang selaras dengan tema dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung bisnis yang bertanggung jawab. Bank berkomitmen untuk memberikan bantuan keuangan dan bentuk bantuan lainnya dalam merespons tantangan yang tak terduga, seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Sejalan dengan amanat dalam ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan didirikannya Bank adalah untuk melaksanakan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hingga tahun buku 2020, kegiatan usaha Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat; menyalurkan kredit; menerbitkan surat utang; membeli, menjual, atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

Dengan demikian, kegiatan usaha Bank memberikan dampak positif bagi wilayah, baik di tingkat regional maupun nasional. Setidaknya, hal itu dapat dilihat dari sisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan.

Lebih lengkap tentang pembahasan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada halaman 184-187 yang terdapat di Laporan Tahunan ini.

Realisasi Anggaran Kemasyarakatan

Realisasi	2020	2019	2018
Anggaran	25.568	16.334	23.207

Mekanisme Pengaduan

Bank telah memiliki prosedur standar operasi penanganan pengaduan untuk memastikan layanan yang sigap, efisien, akurat, dan menjaga kesopanan kepada nasabah. Penanganan pengaduan ini juga harus melindungi Bank dari kerugian potensial yang dapat timbul dari pengaduan nasabah, yaitu melalui manajemen penanganan pengaduan secara berhati-hati, kohesif, dan efektif.

Bank telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pengaduan yaitu melalui Contact Centre, Kantor Cabang, Internet Banking HSBC, Online dan Sosial Media. Setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi.

Informasi rinci dapat merujuk kepada *website* dengan tautan berikut: http://www.hsbc.co.id/1/2/id/hubungi-kami

Jumlah Pengaduan

Seluruh pengaduan masyarakat ditangani oleh masing-masing unit di Bank. Laporan lengkap terkait dengan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut, disampaikan pada bagian "Tata Kelola Perusahaan" di halaman 150-181.

Realisasi Program di Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam melakukan aktivitasnya, Bank juga menyeimbangkan dengan kegiatan yang memberikan dukungan bagi masyarakat, baik melalui program yang berkelanjutan maupun seketika. Bantuan seketika tersebut bertujuan membantu masyarakat dalam menanggapi tantangan yang tak terduga dan mendadak, seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan.

Program yang bertujuan memberi masyarakat pengetahuan dan pendidikan dalam bisnis dan keuangan sesuai dengan arahan OJK dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan & Literasi Keuangan. Pemangku kepentingan yang disasar adalah tingkat perguruan tinggi, dosen, guru, siswa, komunitas, serta masyarakat umum.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pada tahun 2020, Bank telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di bidang kemasyarakatan. Program-program tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

No.	Program	Kegiatan	Capaian Program	Kesesuaian dengan SDG's
1	HSBC Business Case Competition	Edukasi dan kompetisi bagi mahasiswa melalui kompetisi dalam tim yang beranggotakan 4 (empat) orang dalam bidang strategi bisnis dan presentasi. Tim pemenang dari Indonesia berhak mengikuti kompetisi regional di Hong Kong.	Serangkaian kegiatan edukasi telah dilaksanakan di empat kota di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya yang melibatkan lebih dari 500 mahasiswa dan 15 universitas.	Tujuan 4: Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
2	Bersama Hadapi COVID-19 – Bantuan Tanggap Darurat	Bantuan tanggap darurat berupa alat proteksi diri bagi tenaga kesehatan dan paket sembako bagi masyarakat.	Telah didistribusikan 500 paket alat proteksi diri bagi tenaga kesehatan dan 15.500 paket sembako bagi masyarakat di 11 lokasi di Jakarta dan luar Jakarta.	Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
3	Percepatan Penanganan COVID-19 – Bantuan Tanggap Darurat	Bantuan tanggap darurat penanganan COVID-19 yang ditujukan bagi tenaga dan relawan kesehatan berupa alat proteksi diri, disinfektan fasilitas umum, dan distribusi paket kesehatan keluarga.	Bantuan diberikan kepada 1.000 tenaga dan relawan kesehatan, penyemprotan disinfektan di lebih dari 600 titik fasilitas umum serta 7.200 unit paket kesehatan keluarga.	Tujuan 3: Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4	Ketahanan bagi Perempuan Usaha Kecil dan Petani – Bantuan Pemulihan Bencana COVID-19	Membantu pengusaha mikro perempuan untuk mampu menciptakan lini baru penghasilan dan memperoleh keterampilan baru untuk dapat bertahan dari guncangan di masa depan, serta pemberdayaan petani untuk memastikan pasokan kebutuhan makanan pokok.	250 pengusaha mikro perempuan dan 150 petani telah menjadi bagian dari program.	Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
5	Menyiapkan Generasi Muda untuk Dunia Kerja Nanti Saat Ini	Implementasi dari kegiatan belajar secara daring, pendampingan termasuk fasilitasnya, yaitu pelatihan kewirausahaan dan berbagai kegiatan kesehatan.	Kegiatan telah terselenggara di Aceh, Meulaboh, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Flores yang menjangkau sekitar 1.500 anak-anak dan remaja.	Tujuan 4: Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank tidak terkait secara langsung dengan isu lingkungan hidup. Kendati demikian, Bank tetap memiliki komitmen tinggi untuk memberikan dukungan terhadap transisi global menuju situasi dunia rendah karbon.

Upaya tersebut, antara lain direalisasikan melalui kegiatan operasional yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Bank ikut mendukung nasabah dan rantai pasok agar bersama-sama mendukung pengurangan dampak buruk terhadap lingkungan.

Bank juga melekatkan prinsip keberlanjutan pada produk dan layanan yang diberikan di lingkungan bisnis Bank, di antaranya terkait pasar modal, pemberian pinjaman, transaksi perbankan, jasa konsultasi, dan investasi. Selain itu, Bank menerapkan manajemen risiko yang ketat terkait kondisi perubahan iklim. Area industri yang menjadi bagian dari penerapan prinsip tersebut, antara lain sektor energi, minyak kelapa sawit, dan kehutanan.

Konservasi Lingkungan Berkelanjutan

Bank telah merealisasikan sejumlah program dalam rangka konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Di antara programnya adalah memperkuat peran petani sawit swadaya dalam implementasi praktik kelapa sawit berkelanjutan.

Realisasi kegiatan tersebut diwujudkan melalui upaya melengkapi standar sertifikasi RSPO/ISPO seperti pelatihan, audit, dan memperkuat rencana bisnis dan pemasaran komoditi alternatif serta pengembangan pusat data dengan sistem *online*. Bank mengalokasikan dana Rp1,5 miliar untuk kegiatan tersebut.

Material Ramah Lingkungan

Penggunaan material yang ramah lingkungan telah menjadi bagian penting dalam kegiatan operasional Bank. Komitmen tersebut telah direalisasikan sejak lama dan terus berlangsung di tahun 2020.

Di antara material ramah lingkungan yang digunakan adalah penggunaan produk kertas dengan lisensi *Forest Stewardship Council* (FSC), yaitu kertas yang dibuat dari material kayu dari hutan yang dikelola sesuai standar lokal maupun internasional atau dari hasil daur ulang. Bank juga telah menyediakan tempat sampah khusus agar staf dapat memilah jenis sampah kaleng, kertas, atau plastik.

Efisiensi Penggunaan Energi

Bank terus berupaya mengurangi jejak karbon atau *carbon foot print* dari kegiatan operasional di seluruh properti. Pada tahun 2020, total penurunan jejak karbon tersebut mencapai 1.141 ton dan konsumsi listrik yang lebih rendah sebanyak 1,5 juta *Kilo Watt Hour* (KwH).

Kegiatan efisiensi energi juga dilakukan melalui penggunaan alat penerang ramah lingkungan. Bank terus menggunakan lampu ramah energi seperti LED dan sensor lampu yang mampu mengurangi konsumsi listrik pada 6 (enam) kantor cabang.

Penggunaan kertas terus menurun. Penggunaan kertas untuk komunikasi nasabah berkurang sebanyak 24% atau 0,8 juta lembar melalui kampanye *initiative paperless*, otomasi proses internal dan migrasi ke *channel* digital. *Work from Home* ikut menurunkan jumlah pencetakan sebesar 21% atau 2,6 juta lembar kertas. Pembelian kertas juga turun sebesar 44% sejak tahun lalu.

Rincian realisasi tahun 2020 dibandingkan 2019 untuk sejumlah kegiatan adalah sebagai berikut:

Efisiensi di Bidang Energi dan Kertas

Indikator	Metrik	2020	2019	Perubahan (%)	Kesesuaian dengan SDGs
Carbon Footprint	Kg	6.409.296	7.550.096	-15%	Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Penggunaan listrik	KwH	8.743.924	10.300.268	-15%	
Jumlah kertas printer yang dipakai	Kertas	9.615.831	12.211.946	-21%	
Jumlah kertas yang dibeli	Rim	13.322	23.725	-44%	
Total kertas yang dihilangkan dengan inisiatif *paperless*	Kertas	2.512.973	3.303.913	-24%	

ASPEK PENGEMBANGAN PRODUK

Nasabah merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Karena itu, Bank senantiasa berupaya memberikan produk terbaik bagi para nasabah, sehingga hubungan yang tercipta saling menguntungkan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bank juga berupaya selalu mempertimbangkan manfaat dari produk yang dikeluarkan, baik manfaat secara ekonomi dalam arti sempit, yaitu memberikan manfaat bagi nasabah, maupun dalam arti lebih luas, yaitu bermanfaat bagi negara. Termasuk yang menjadi pertimbangan adalah aspek berkelanjutan, sesuai dengan tujuan pembangunan keberlanjutan yang telah menjadi komitmen masyarakat dunia untuk menciptakan masa depan dunia yang lebih baik.

Bank telah banyak terlibat kegiatan di bidang jasa keuangan yang berkenaan dengan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Bahkan Bank juga telah mengeluarkan sejumlah inovasi produk terkait hal itu.

Green Sukuk Pemerintah

Pada tahun 2020, bekerja sama dengan Bank, Grup HSBC diamanatkan sebagai *Joint Lead Manager* dan sebagai penasihat *Green Structuring*, untuk membantu Pemerintah menerbitkan *144A/Reg S Trust Certificates (the "Wakala Sukuk") triple tranche* untuk Republik Indonesia dengan total nilai USD2,5 miliar: sebesar USD0,75 miliar merupakan Green Sukuk *tranche* dengan maturitas 5 (lima) tahun yang merupakan penawaran ketiga dari Pemerintah Indonesia dalam *Green Bond* dan Kerangka *Green* Sukuk. HSBC berturut-turut selama 3 (tiga) tahun menjadi Green Structuring Advisor untuk Pemerintah Indonesia. Mandat tersebut merupakan pengakuan atas kemampuan dan keahlian Bank dalam keuangan berkelanjutan.

Pinjaman Berwawasan Lingkungan

Sejak tahun 2020, Bank telah menerapkan program Green Loan sebagai komitmen terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Produk dan proses yang dijalankan sesuai dengan yang berlaku selama ini, namun ada tambahan pengecekan komitmen "hijau" atau lingkungan kepada calon nasabah.

Penerapan prinsip-prinsip lingkungan merupakan bagian dari upaya Bank untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Terutama, berkenaan dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, termasuk CO_2.

Obligasi Ritel Pemerintah

Sejak tahun 2019, Bank menjadi salah satu mitra distribusi penjualan elektronik Surat Berharga Negara (e-SBN) untuk memasarkan berbagai seri Obligasi Ritel/Sukuk Ritel yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai program atau proyek berkelanjutan Pemerintah. Hal ini memberi dampak positif bagi keberlanjutan antara lain membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah, memberikan akses Obligasi kepada masyarakat dan meningkatkan jumlah Investor Domestik.

Dampak Positif HSBC Premier Next Gen

Bank memperkenalkan layanan bernama HSBC Premier Next Gen. Produk ini merupakan layanan yang tersedia bagi para putra-putri Nasabah HSBC Premier yang berusia 18 hingga 28 tahun. Melalui produk tersebut, putra-putri nasabah HSBC Premier berhak mendapatkan layanan istimewa yang dinikmati oleh orang tuanya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Dampak positif dari produk ini adalah memberikan kemudahan akses perbankan bagi warna negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di

luar negeri, mengingat jumlahnya sangat banyak. *International capabilities* yang merupakan salah satu pilar keunggulan HSBC Premier memungkinkan nasabah HSBC Premier Next Gen mendapatkan layanan perbankan di cabang-cabang Bank di seluruh dunia. Mereka juga mendapat kemudahan melakukan transaksi di lebih dari 1 juta ATM VISA/Plus di seluruh dunia, serta akses hingga ke 7 (tujuh) rekening tabungan Bank dalam satu kartu.

Mereka juga bisa menikmati fasilitas bebas biaya penarikan mata uang asing di 6.500 ATM HSBC di seluruh dunia tanpa melalui konversi mata uang ke Rupiah. Keistimewaan lainnya yang dapat dinikmati oleh nasabah HSBC Premier Next Gen adalah bebas biaya transfer secara *real-time* hingga US$100.000 per hari ke lebih dari 30 negara di dunia. Bank juga memberikan fasilitas *Emergency Cash* (Darurat Tunai) hingga US$10.000 setiap 48 jam untuk nasabah yang kehilangan ataupun kecurian di luar negeri.

Produk tersebut merupakan komitmen Bank dalam mendukung kemudahan para pelajar Indonesia di luar negeri. Mereka kelak, akan menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkesinambungan bagi Indonesia.

Informasi Produk Ditarik

Pada tahun buku 2020, tidak ada produk keuangan dari Bank yang ditarik kembali. Kendati demikian, Bank senantiasa melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ada. Dengan demikian, produk yang dikeluarkan oleh Bank memberikan rasa aman bagi nasabah, sekaligus menguntungkan.

Dengan demikian, Bank tidak dapat menyajikan informasi terkait dengan jumlah produk yang ditarik. Begitu juga dengan alasan-alasan berkenaan dengan penarikan tersebut.

Survei Kepuasan Nasabah

Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, Bank melakukan survei nasabah untuk mengetahui apakah pelayanan yang telah diberikan kepada nasabah selama ini telah sesuai harapan, dan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan nasabah agar dapat dilakukan untuk penyempurnaan oleh Bank.

Sampai dengan tahun 2019, survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon. Responden dipilih secara acak dari *database* nasabah Bank yang baru mengunjungi kantor cabang, menghubungi layanan *Call Center*, atau nasabah yang memiliki *Personal* RM. Responden diminta memberikan nilai skala 0 – 10 atas tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan kantor cabang, *Call Center* atau Personal RM.

Sejak tahun 2020, metode survei nasabah berubah dari survei tingkat kepuasan nasabah menjadi survei tingkat rekomendasi nasabah terhadap HSBC kepada orang lain. Survei tersebut menggunakan metode *Net Promoter Score* (NPS).

Melalui survei itu, nasabah diberikan pertanyaan, dalam skala 0–10: seberapa ingin nasabah merekomendasikan HSBC kepada keluarga dan teman berdasarkan interaksi terakhirnya dengan kanal-kanal di HSBC.

Nasabah yang memberikan nilai 0-6 dikategorikan sebagai *detractor*, nasabah yang memberikan nilai 7-8 dikategorikan sebagai pasif, dan nasabah yang memberikan nilai 9-10 dikategorikan sebagai *promoter*. Nilai NPS didapat dari persentase *promoter* yang dikurangi dengan persentase *detractor*, sehingga skalanya adalah dari -100 (jika semua responden adalah *detractor*) hingga +100 (jika semua responden adalah *promoter*).

Berikut ini hasil survei rata-rata tingkat kepuasan nasabah dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Kanal	Tingkat rekomendasi nasabah (skala -100 sampai +100)	Rata-rata tingkat kepuasan nasabah (skala 0-10)	
	2020	2019	2018
Kantor cabang	+ 38,9	9,0	8,8
Call center	+ 12,9	8,7	8,7
Premier RM	+ 25,7	8,2	8,1
RBB RM*	+ 35,5	-	-
Internet banking**	+ 12,2	+ 6,4**	-

* Kanal RBB RM baru dimasukkan sebagai salah satu kanal yang disurvei sejak tahun 2020.
** Survei untuk nasabah pengguna *internet banking* baru dimulai di tahun 2019 dan sudah langsung menggunakan metode *Net Promoter Score* (NPS). Namun survei NPS di tahun 2019 untuk kanal *internet banking* sempat tidak dilakukan di bulan Juni–September 2019 karena adanya pergantian vendor.

LAPORAN KEUANGAN

HSBC

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
PT BANK HSBC INDONESIA

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020
AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
PT BANK HSBC INDONESIA

Kami yang bertandatangan di bawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/*Name* : François-Pascal Marie Jacques du Mesnil de Maricourt
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Center Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 25545800
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Dio Alexander Samsoeri
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung World Trade Center Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
   Nomor Telepon/*Phone Number* : (021) 25545800
   Jabatan/*Position* : Direktur/*Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank HSBC Indonesia ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank HSBC Indonesia (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in the Bank's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 19 Maret/*March 2021*

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of Board of Directors*

François-Pascal Marie Jacques du Mesnil de Maricourt	**Dio Alexander Samsoeri**
Direktur Utama/ *President Director*	Direktur/ *Director*

PT Bank HSBC Indonesia
Kantor Pusat – World Trade Centre 1, Lantai 3, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790-4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BANK HSBC INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank HSBC Indonesia (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank HSBC Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank HSBC Indonesia as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
19 Maret/*March* 2021

Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP. 0734

PT BANK HSBC INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN / ***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
31 DESEMBER 2020 / ***31 DECEMBER 2020***
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
ASET				***ASSETS***
Kas	6,27	627.207	696.281	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7,27	4.252.139	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 107 pada 31 Desember 2020.	8,27,36	3.740.633	2.261.135	*Demand deposits with other banks - net of allowance for impairment losses of Rp 107 on 31 December 2020*
Penempatan pada Bank Indonesia	27	1.152.313	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain- setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 375 pada 31 Desember 2020.	9,27,36	10.653.939	7.696.511	*Placements with other banks- net of allowance for impairment losses of Rp 375 on 31 December 2020*
Efek-efek untuk tujuan investasi	10,27	17.860.822	14.418.802	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	11,27	1.217.717	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	12,27,36	671.498	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	27	9.292.848	464.945	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel ekspor- setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.843 pada 31 Desember 2020	27	921.585	1.434.664	*Export bills - net off allowance for impairment lossess of Rp 6,843 on 31 December 2020*
Tagihan akseptasi- Setelah dikurangi penyisihan kerugian Penurunan nilai sebesar Rp 25.398 Pada 31 Desember 2020.	13,27	2.021.659	2.601.928	*Acceptance receivables - net off allowance for impairment losses of Rp 25,398 31 December 2020*
Kredit yang diberikan kepada nasabah - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.059.585 pada 31 Desember 2020 dan Rp 2.123.183 pada 31 Desember 2019	14,27,36	55.334.586	65.533.877	*Loans to customers - net of allowance for impairment losses of Rp 3,059,585 on 31 December 2020 and Rp 2,123,183 on 31 December 2019*
Aset lain-lain	15,27,36	3.928.540	3.451.068	*Other assets*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 915.017 pada 31 Desember 2020 dan Rp 866.630 pada 31 Desember 2019	16	570.616	716.157	*Properties and equipments - net of accumulated depreciation of Rp 915,017 on 31 December 2020 and Rp 866,630 on 31 December 2019*
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 243.026 pada 31 Desember 2020 dan Rp 184.254 pada 31 Desember 2019	17	89.121	137.065	*Intangible assets - net of accumulated amortisation of Rp 243,026 on 31 December 2020 and Rp 184,254 on 31 December 2019*
Aset pajak tangguhan	34g	265.832	275.182	*Deferred tax assets*
JUMLAH ASET		112.601.055	111.860.378	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2020	31 Desember/ *December* 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Simpanan dari nasabah	18,27,36	72.159.831	65.469.257	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	19,27,36	4.491.715	5.058.515	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	12,27,36	659.526	473.541	*Derivative payables*
Utang akseptasi	13,27,36	2.047.057	2.601.928	*Acceptance payables*
Utang pajak penghasilan	34b	181.688	-	*Income tax payable*
Beban akrual dan provisi	20,27,36	413.742	502.670	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain	21,27,36	4.278.735	2.984.880	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	27,36	7.516.750	15.062.513	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	27,36	1.053.750	1.041.188	*Subordinated debt*
Liabilitas imbalan kerja	23	499.726	529.546	*Employee benefits obligations*
JUMLAH LIABILITAS		93.302.520	93.724.038	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham; Modal dasar - 20.000.000.000 saham; Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.586.394.997 saham	24	10.586.395	10.586.395	*Share capital - nominal value of Rp 1,000 (in Rupiah full amount) per share; Authorised capital - 20,000,000,000 shares; Issued and fully paid-up capital - 10,586,394,997 shares*
Tambahan modal disetor - bersih	25	257.610	257.610	*Additional paid-in capital - net*
Cadangan program kompensasi berbasis saham	22	15.602	14.894	*Share-based payments program reserves*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja		(62.897)	(67.363)	*Remeasurements from post employment benefits obligation*
Perubahan nilai wajar bersih - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10	502.279	133.381	*Net changes in fair value - investment securities at fair value through other comprehensive income*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		15.399	-	*Allowance for expected credit loss - investment securities at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
- Telah ditentukan penggunaannya	26	49.419	26.306	*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya		7.934.728	7.185.117	*Unappropriated -*
JUMLAH EKUITAS		19.298.535	18.136.340	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		112.601.055	111.860.378	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Desember/ December 2020	Desember/ December 2019	
PENDAPATAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME***
Pendapatan bunga	28,36	5.306.862	6.197.205	*Interest income*
Beban bunga	28,36	(1.433.047)	(2.216.617)	*Interest expenses*
Pendapatan bunga bersih		3.873.815	3.980.588	***Net interest income***
Pendapatan provisi dan komisi	29,36	1.567.480	1.952.008	*Fees and commissions income*
Beban provisi dan komisi	29,36	(363.420)	(639.719)	*Fees and commissions expenses*
Pendapatan provisi dan komisi bersih		1.204.060	1.312.289	***Net fees and commissions***
Pendapatan instrumen yang diperdagangkan - bersih	30	1.741.761	1.339.518	*Trading income - net*
Laba atas selisih kurs - bersih		25.262	75.304	*Foreign exchange gain - net*
Rugi dari aset yang dimiliki untuk dijual - bersih		(555)	(7.138)	*Loss from assets held for sale - net*
(Beban)/pendapatan lainnya - bersih	34n,36	(14.646)	429.163	*Other (expense)/income - net*
		1.751.822	1.836.847	
Kerugian penurunan nilai - bersih	31	(1.717.134)	(671.160)	*Impairment losses - net*
Jumlah pendapatan operasional		5.112.563	6.458.564	***Total operating income***
BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING EXPENSES***
Beban karyawan	32,36	(1.730.463)	(1.949.191)	*Employees expenses*
Beban umum dan administrasi	33,36	(1.253.995)	(1.112.188)	*General and administrative expenses*
Beban depresiasi asset tetap dan aset hak-guna		(296.175)	(299.620)	*Depreciation expenses of properties, equipments, and right-on-use assets*
Beban amortisasi aset takberwujud		(57.796)	(57.570)	*Amortization expenses of intangible assets*
Jumlah beban operasional		(3.338.429)	(3.418.569)	***Total operating expenses***
LABA SEBELUM PAJAK		1.774.134	3.039.995	***PROFIT BEFORE TAX***
Beban pajak penghasilan	34c	(464.140)	(728.704)	*Income tax expense*
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		1.309.994	2.311.291	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:*
Efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui laba penghasilan komprehensif lain/tersedia untuk dijual:				*Investments securities at fair value through other comprehensive income/available for sale:*
- Perubahan nilai wajar bersih	10	450.007	261.765	*Gain/(loss) during the period -*
- Cadangan kerugian kredit ekspektasian		11.123	-	*Allowance for expected credit loss -*
- Penyesuaian tarif pajak	34g	17.892	-	*Adjustment on tax rate -*
- Pajak penghasilan terkait	34g	(99.001)	(65.441)	*Related income tax -*
		380.021	196.324	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja:				*Remeasurements from post employment benefits obligation:*
- Laba/(rugi) aktuarial periode berjalan	23	11.197	(37.414)	*Actuarial gain/(loss) - during the period*
- Penyesuaian tarif pajak	34g	(4.267)	-	*Adjustment on tax rate -*
- Pajak penghasilan terkait	34g	(2.464)	9.354	*Related income tax -*
		4.466	(28.060)	
LABA KOMPREHENSIF LAIN, BERSIH SETELAH PAJAK		384.487	168.264	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN BERJALAN		1.694.481	2.479.555	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK HSBC INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor - bersih/ *Additional paid-in capital - net*	Cadangan program berbasis Saham/ *Share-based payment program reserves*	(Rugi)/laba komprehensif lain - bersih setelah pajak/ *Other comprehensive (loss)/income - net of tax*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo, 1 Januari 2019		10.586.395	257.610	13.828	(102.246)	17.361	4.882.771	15.655.719	***Balance, 1 January 2019***
Cadangan umum dan wajib yang telah ditentukan penggunaannya	26	-	-	-	-	8.945	(8.945)	-	*Appropriation for general and legal reserves*
Perubahan cadangan program berbasis saham		-	-	1.066	-	-	-	1.066	*Movement of share-based payment program reserves*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan:									*Total comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	2.311.291	2.311.291	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain, bersih setelah pajak:									*Other comprehensive income, net of tax:*
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja		-	-	-	(28.060)	-	-	(28.060)	*Remeasurements from post-employment benefits obligation*
- Perubahan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual)	5	-	-	-	196.324	-	-	196.324	*Changes in fair value (available-for-sale financial assets)*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	168.264	-	2.311.291	2.479.555	*Total comprehensive income for the year*
Saldo, 31 Desember 2019		10.586.395	257.610	14.894	66.018	26.306	7.185.117	18.136.340	***Balance, 31 December 2019***
Dampak penerapan PSAK 71, bersih		-	-	-	4.276	-	98.972	103.248	*Impact on PSAK 71 implementation, net*
Saldo 1 Januari 2020 setelah dampak penerapan PSAK 71		10.586.395	257.610	14.894	70.294	26.306	7.284.089	18.239.588	*Balance as of 1 January 2020 after impact of PSAK 71 implementation*
Cadangan umum dan wajib yang telah ditentukan penggunaannya	26	-	-	-	-	23.113	(23.113)	-	*Appropriation for general and legal reserves*
Pembayaran dividen	26	-	-	-	-	-	(636.242)	(636.242)	*Dividend payment*
Perubahan cadangan program berbasis saham		-	-	708	-	-	-	708	*Movement of share-based payment program reserves*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan:									*Total comprehensive income for the year:*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.309.994	1.309.994	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain, bersih setelah pajak:									*Other comprehensive income, net of tax:*
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja		-	-	-	8.733	-	-	8.733	*Remeasurements from post - employment benefits obligation*
- Perubahan nilai wajar (efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)	5	-	-	-	351.006	-	-	351.006	*Changes in fair value (investment - securities at fair value through other comprehensive income)*
- Cadangan kerugian kredit ekspektasian (efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain)		-	-	-	11.123	-	-	11.123	*Allowance for expected credit losses - (investment securities at fair value through other comprehensive income)*
- Dampak penyesuaian tarif pajak	34g	-	-	-	13.625	-	-	13.625	*Impact on tax rate adjustment -*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	384.487	-	1.309.994	1.694.481	*Total comprehensive income for the year*
Saldo, 31 Desember 2020		10.586.395	257.610	15.602	454.781	49.419	7.934.728	19.298.535	***Balance, 31 December 2020***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK HSBC INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan bunga		5.238.116	6.148.655	*Receipts from interest income*
Pembayaran beban bunga		(1.490.277)	(2.224.151)	*Payments for interest expenses*
Penerimaan provisi dan komisi		1.520.416	1.936.348	*Receipts from fees and commissions*
Pembayaran provisi dan komisi		(363.420)	(639.719)	*Payments for fees and commissions*
Laba atas selisih kurs - bersih		27.905	30.498	*Realised foreign exchange gain - net*
Hasil penjualan aset yang dimiliki untuk dijual		-	5.188	*Proceeds from sale of assets held for sale*
Penerimaan pendapatan operasional		1.722.738	1.342.540	*Receipts from operating income*
Pembayaran beban operasional		(3.167.946)	(3.353.145)	*Payments for operating expenses*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(486.404)	(841.224)	*Corporate income tax paid*
Pengembalian pajak penghasilan badan		450.381	8.671	*Corporate income tax refund*
Perubahan aset operasi:				*Changes in operating assets:*
Aset yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		1.646.021	40.021	*Asset at fair value through profit or loss*
Tagihan derivatif		(194.767)	65.151	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah		9.249.423	(1.046.070)	*Loans to customers*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(8.827.903)	628.982	*Securities purchased under resale agreements*
Aset lain-lain		544.837	(435.251)	*Other assets*
Perubahan liabilitas operasi:				*Changes in operating liabilities:*
Simpanan dari nasabah		9.233.440	11.320.737	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain		(566.800)	(3.718.258)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif		185.985	(350.657)	*Derivative payables*
Beban akrual dan provisi		(31.699)	(272.256)	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain		819.196	(585.164)	*Other liabilities*
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		15.509.242	8.060.896	***Net cash provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengalihan aset dan liabilitas pajak dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta	34r	-	(679.915)	*Transfer of tax assets and liabilities from the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch*
Pengembalian (termasuk pembayaran) atas aset dan liabilitas pajak yang dialihkan dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta		-	285.612	*Refund (including payment) of tax assets and liabilities transferred from the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch*
Pembelian efek-efek untuk tujuan investasi		(6.191.632)	(11.011.589)	*Purchase of investment securities*
Hasil maturitas efek-efek untuk tujuan investasi		3.199.619	9.454.370	*Proceed from maturity of investment securities*
Hasil penjualan aset tetap		21.694	6.972	*Proceed from sale of properties and equipments*
Perolehan aset hak-guna		(106.785)	(117.282)	*Acquisition of properties and Acquisition of right of use assets*
Perolehan aset tetap		(62.769)	(247.277)	*equipments*
Perolehan aset takberwujud		(9.870)	(16.949)	*Acquisition of intangible assets*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(3.149.743)	(2.326.058)	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
(Pembayaran)/penerimaan pinjaman dan pinjaman subordinasi		(7.916.625)	(4.294.760)	*(Payment)/proceed from borrowings and subordinated debts*
Pembayaran dividen kas		(636.242)	-	*Payments for cash dividend*
Pembayaran kewajiban sewa		(150.500)	(93.169)	*Payments for lease liabilities*
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(8.703.367)	(4.387.929)	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		3.656.132	1.346.909	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
PENGARUH SELISIH KURS MATA UANG ASING PADA KAS DAN SETARA KAS		(2.715.640)	(146.704)	***EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATION ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS, 1 JANUARI		19.486.221	18.286.016	***CASH AND CASH EQUIVALENTS, 1 JANUARY***
KAS DAN SETARA KAS, 31 DESEMBER		20.426.713	19.486.221	***CASH AND CASH EQUIVALENTS, 31 DECEMBER***
Kas dan setara kas terdiri dari:				***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas	6	627.207	696.281	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7	4.252.139	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	8	3.740.740	2.261.135	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia - jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan	27	1.152.313	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia - mature within 3 months from the date of acquisition*
Penempatan pada bank-bank lain - jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan	9	10.654.314	7.696.511	*Placements with other banks - mature within 3 months from the date of acquisition*
		20.426.713	19.486.221	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi tambahan arus kas:
Rekonsiliasi utang bersih

Supplemental cash flows information:
Net debt reconciliation

	31 Desember/ *December* 2019	**Arus kas/ *Cash flows***	**Perubahan non-kas/ *Non-cash changes***	**31 Desember/ *December* 2020**	
Kas dan setara kas	19.486.221	3.656.132	(2.715.640)	20.426.713	*Cash and cash equivalents*
Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:					*Reconciliation of liabilities arising from financing activities:*
- Pinjaman yang diterima	(15.062.513)	7.916.625	(370.862)	(7.516.750)	*Borrowings -*
- Pinjaman subordinasi	(1.041.188)	-	(12.562)	(1.053.750)	*Subordinated debt -*
- Liabilitas sewa	(372.374)	150.500	(56.693)	(278.567)	*Lease liabilities -*
Hutang bersih	3.010.146	11.723.257	(3.155.757)	11.577.646	*Net debt*

	31 Desember/ *December* 2018	**Dampak implementasi PSAK 73/ *Impact of SFAS 73 implementation***	**Arus kas/ *Cash flows***	**Perubahan non-kas/ *Non-cash changes***	**31 Desember/ *December* 2019**	
Kas dan setara kas	18.286.016	-	1.346.909	(146.704)	19.486.221	*Cash and cash equivalents*
Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:						*Reconciliation of liabilities arising from financing activities:*
- Pinjaman yang diterima	(19.973.820)	-	4.294.760	616.547	(15.062.513)	*Borrowings -*
- Pinjaman subordinasi	(1.078.500)	-	-	37.312	(1.041.188)	*Subordinated debt -*
- Liabilitas sewa	-	(363.597)	93.169	(101.946)	(372.374)	*Lease liabilities -*
Hutang bersih	(2.766.304)	(363.597)	5.734.838	405.209	3.010.146	*Net debt*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") didirikan dengan akta No. 31 tanggal 15 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., selaku pengganti dari Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan akta No. 29 tanggal 8 September 1989 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta, nama Bank diubah menjadi PT Bank Ekonomi Raharja. Kedua akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Surat Keputusan No. C2-8787.HT.01.01.TH'89 tanggal 18 September 1989 dan diumumkan dalam Tambahan No. 2573 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1989.

Sesuai dengan akta No. 101 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nama Bank menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Perubahan nama Bank ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014340.AH.01.02. tanggal 10 Agustus 2016 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Dewan Komisioner OJK No. 15/KDK.03/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Ekonomi Raharja menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank HSBC Indonesia.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan dengan akta No. 57 tanggal 12 April 2017 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta sehubungan dengan penambahan modal saham Bank (lihat Catatan 24).

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Maret 1990. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan didirikannya Bank adalah:

1. Menjalankan usaha di bidang bank umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain: menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual atau memberikan jaminan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, melaksanakan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, melakukan transaksi dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, melakukan penyertaan modal pada bank atau lembaga keuangan lainnya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Bank HSBC Indonesia (the "Bank") was established based on the notarial deed No. 31 dated 15 May 1989 of Winnie Hadiprodjo, S.H., substitute of Kartini Muljadi, S.H., notary public in Jakarta. Based on notarial deed No. 29 dated 8 September 1989 of Kartini Muljadi, S.H., notary public in Jakarta, the Bank's name was changed to PT Bank Ekonomi Raharja. Both notarial deeds were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Minister of Law and Human Rights) in the Decision Letter No. C2-8787.HT.01.01.TH'89 dated 18 September 1989 and published in the Supplement No. 2573 to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 84 dated 20 October 1989.

According to notarial deed No. 101 dated 10 August 2016 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary public in Jakarta, the shareholders approved the change of the Bank's name to PT Bank HSBC Indonesia. The change of Bank's name has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0014340.AH.01.02. dated 10 August 2016 and has been approved by Financial Service Authority (FSA) through the Board Commissioner Decision No. 15/KDK.03/2016 dated 4 October 2016 on The Confirmation to Use The Bank's Business License from PT Bank Ekonomi Raharja to PT Bank HSBC Indonesia.

The Bank's articles of association have been amended several times, the latest amendment was effected by notarial deed No. 57 dated 12 April 2017 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary in Jakarta in relation to increase the Bank's share capital (see Note 24).

The Bank started its commercial operations on 8 March 1990. In accordance with article 3 of the Bank's articles of association, the aims and objectives for the establishment of the Bank are as follows:

1. *To carry out general banking business.*
2. *To achieve its aims and objectives, the Bank undertakes, among other things, the following: taking deposits from the public, granting loans, issuing promissory notes, buying, selling or providing guarantee for its own risk or for the interest of and on customer's order, conducting factoring, credit cards and trust activities, conducting foreign exchange activities that comply with Bank Indonesia regulations, and investing in banks or other financial institutions that comply with Bank Indonesia regulations.*

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Izin usaha Bank diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 104/KMK.013/1990 tanggal 12 Februari 1990. Bank juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/64/KEP/DIR tanggal 16 September 1992.

Kantor pusat Bank berlokasi di World Trade Center I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920. Pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 32 cabang utama (termasuk kantor pusat) dan 37 cabang pembantu di Indonesia (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah karyawan tetap Bank masing-masing sebanyak 3.428 dan 3.797 orang (tidak diaudit).

Induk perusahaan Bank adalah HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited sedangkan pemegang saham pengendali Bank adalah HSBC Holdings plc, yang didirikan di Inggris. HSBC Holdings plc memiliki entitas anak dan perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

The Bank's operating license was granted by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. 104/KMK.013/1990 dated 12 February 1990. The Bank also obtained a license to engage in foreign exchange activities based on the Directors of Bank Indonesia's Decision Letter No. 25/64/KEP/DIR dated 16 September 1992.

The Bank's head office is located at World Trade Center I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920. As of 31 December 2020, the Bank has 32 main branches (including the head office) and 37 sub-branches in Indonesia (unaudited).

As of 31 December 2020 and 2019, the Bank has 3,428 and 3,797 permanent employees, respectively (unaudited).

The Bank's direct holding company is HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited while the ultimate holding company of the Bank is HSBC Holdings plc, which is incorporated in England. HSBC Holdings plc has subsidiaries and affiliates throughout the world.

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	
Komisaris Utama	Matthew Kneeland Lobner	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hanny Wurangian	*Vice-President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Umar Juoro	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Catherinawati Hadiman Sugianto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Mark Thomas McKeown	*Commissioner*
Komisaris	Mark Trevor Surgenor [1)]	*Commissioner*
Direktur Utama	François-Pascal Marie Jacques du Mesnil de Maricourt	*President Director*
Direktur	Caecilia Pudji Widyarti [2)]	*Director*
Direktur	Stephen Whilton Angell	*Director*
Direktur	Dio Alexander Samsoeri	*Director*
Direktur	Edhi Tjahja Negara Darmohusolo	*Director*
Direktur	Eri Budiono	*Director*
Direktur	Riko Adythia	*Director*
Direktur Kepatuhan	Nisha Asha Bhambhani[3)]	*Compliance Director*
Direktur	James Rex Elwes [4)]	*Director*

1) Efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2) Telah diangkat sebagai Direktur yang melaksanakan tugas sementara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan HBID Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan HBID yang baru efektif jika dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan memperhatikan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4) Efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (Fit and Proper Test) atau tanggal diterbitkannya ijin kerja, yang mana yang lebih lama terjadi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1) Effective if and upon the Indonesia Financial Service Authority's (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) approval for fit and proper test with due observance to the prevailing laws and regulations in Indonesia Has been appointed as Director in charge of overseeing

2) Compliance Function temporarily on the Annual General Shareholders Meeting of HBID dated 30 June 2020 until a new HBID Director in charge of overseeing Compliance Function becomes effective if and upon the Indonesia Financial Services Authority's (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) approval for the Fit and Proper Test with due observance to the prevailing laws and regulations in Indonesia.

3) Effective if and upon the Indonesia Financial 3Services Authority's (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) approval for the Fit and Proper Test with due observance to the prevailing laws and regulations in Indonesia

4) Effective if and upon Indonesia Financial Services Authority's (Otoritas Jasa Keuangan) approval for the Fit and Proper Test or upon the issuance date of working permit, whichever comes later, with due observance to the prevailing laws and regulations

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2020 and 2019 are as follows: (continued)

	2019	
Komisaris Utama	Matthew Kneeland Lobner	*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hanny Wurangian	*Vice-President Commissioner and Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Hariawan Pribadi	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Umar Juoro	*Independent Commissioner*
Komisaris	Mark Thomas McKeown	*Commissioner*
Komisaris	Lucia Ka Yee Ku[1)]	*Commissioner*
Direktur Utama	Sumit Dutta	*President Director*
Direktur	John Peter Watt Rosie	*Director*
Direktur	Blake Digney Philip Hellam	*Director*
Direktur	Dio Alexander Samsoeri[2)]	*Director*
Direktur	Caecilia Pudji Widyarti	*Director*
Direktur	Tripudjo Putranto	*Director*
Direktur	Stephen Whilton Angell	*Director*
Direktur Kepatuhan	Yessika Effendi	*Compliance Director*

[1)] Efektif mengundurkan diri sebagai kandidat Komisaris dalam uji kemampuan dan kepatuhan dari OJK sejak tanggal 29 Oktober 2019
[2)] Efektif sejak tanggal 9 September 2019

[1)] Effective resigned as Commissioner candidate in fit and proper test from FSA since 29 October 2019
[2)] Effective since 9 September 2019

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Ketua	Hanny Wurangian[1)]	*Chairperson*
Anggota independen	Umar Juoro	*Independent member*
Anggota independen	Yustrida Bernawati	*Independent member*
Anggota independen	Ubaidillah Nugraha	*Independent member*

[1)] Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

[1)] Vice-President Commissioner and Independent Commissioner

b. Penawaran umum saham dan privatisasi

Sesuai dengan akta No. 140 tanggal 25 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, para pemegang saham mengambil dan menyetujui keputusan-keputusan, antara lain, sebagai berikut:

- Mengubah status Bank dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- Mengubah nama Bank menjadi PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.
- Mengubah nilai nominal saham semula sebesar Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham.
- Menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 270.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham melalui penawaran umum kepada masyarakat.

b. Public offering of shares and privatisation

Based on notarial deed No. 140 dated 25 October 2007 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary public in Jakarta, the shareholders resolved and approved, among others, the following:

- *Change the Bank's status from a private to a public company.*
- *Change the Bank's name to PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.*
- *Change the nominal value of share from Rp 1,000 (in Rupiah full amount) to Rp 100 (in Rupiah full amount) per share.*
- *Issuance of a maximum number of 270,000,000 shares with nominal value of Rp 100 (in Rupiah full amount) per share through initial public offering.*

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan privatisasi (lanjutan)

Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01814.HT.01.04-TH.2007 tanggal 31.Oktober 2007 serta diumumkan dalam Tambahan No. 11468 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 November 2007.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Bank memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui suratnya No.S-6568/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum perdana atas 270.000.000 lembar saham Bank dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham. Harga penawaran saham adalah sebesar Rp 1.080 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Bank mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Januari 2008.

Pada tanggal 16 Februari 2015, Bank mengajukan permohonan kepada BEI untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham Bank sejak sesi perdagangan pertama pada tanggal 17 Februari 2015 sehubungan dengan rencana Bank untuk mengubah statusnya dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (*go private*) dan melakukan *delisting* dari BEI. BEI menghentikan sementara perdagangan efek Bank mulai sesi pertama perdagangan efek tanggal 17 Februari 2015 hingga diselesaikannya proses *delisting*.

Sehubungan dengan rencana *go private* di atas, Bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) pada tanggal 12 Mei 2015 yang memutuskan pokok-pokok sebagai berikut:

- Menyetujui rencana *go private* Bank
- Menyetujui perubahan dalam Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan perubahan status Bank dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Setelah mendapat persetujuan RUPSLB atas rencana *go private*, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK dan dinyatakan efektif berdasarkan Surat OJK No. S-298/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015. HAPH setuju untuk melaksanakan Penawaran Tender atas Saham Publik Bank, yaitu sebanyak-banyaknya 1.718.000 saham yang mewakili 0,06% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Bank dengan harga penawaran sebesar Rp 10.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Public offering of shares and privatisation** (continued)*

The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. C-01814.HT.01.04-TH.2007 dated 31 October 2007 and was published in the Supplement No. 11468 to State Gazette of the Republic of Indonesia No.94 dated 23 November 2007.

On 28 December 2007, the Bank obtained the Effective Notification from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its letter No. S-6568/BL/2007 for the Bank's initial public offering on 270,000,000 shares at nominal value of Rp 100 (in Rupiah full amount) per share. The offering price for the shares was Rp 1,080 (in Rupiah full amount) per share.

The Bank listed its shares at the Indonesia Stock Exchange (IDX) on 8 January 2008.

On 16 February 2015, the Bank submitted a letter to the IDX for temporary suspension of trading of the Bank's shares starting from the first trading session on 17 February 2015 in relation with the Bank's plan to change its status from a public listed company to a private company (go private) and to delist from the IDX. IDX temporarily suspended trading of the Bank's shares starting from the first session on 17 February 2015 until the completion of the delisting process.

In relation with the go private plan above, the Bank held the Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS) on 12 May 2015 which decided the following:

- *Approving the Bank's go private plan*
- *Approving the changes in the Bank's Articles of Association relating to the changes of the Bank's status from a publicly listed company to a private company.*

Subsequent to the EGMS approval on go private plan, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) submitted a Tender Offer Statement to the FSA and was declared effective by the FSA based on its letter No. S-298/D.04/2015 dated 30 June 2015. HAPH agreed to conduct the Tender Offer on the Bank's Shares held by Public shareholders, for a maximum of 1,718,000 shares representing 0.06% of the total issued and paid-up capital of the Bank at an offering price of Rp 10,000 (in Rupiah full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham dan privatisasi (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas No. 97 tanggal 16 November 2015, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0946124.AH.01.02. tahun 2015 tanggal 17 November 2015, Anggaran Dasar Bank telah diubah sehubungan dengan perubahan status Bank dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

c. Integrasi usaha dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Cabang Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja untuk Melaksanakan Integrasi Bisnis Perbankan di Indonesia dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) untuk melaksanakan integrasi usaha dan operasi dengan kantor cabang Jakarta dari HBAP yang dikenal sebagai Indonesia Management Office (IMO). Pada tanggal 13 April 2017, Bank dan IMO menandatangani Perjanjian Pernyataan Kembali dan Perubahan Perjanjian Kerangka Kerja untuk Melaksanakan Integrasi Bisnis Perbankan di Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 2017, OJK menyetujui rencana integrasi usaha Bank dan IMO melalui suratnya No. S-29/D.03/2017.

Bank telah menyelesaikan integrasi usaha dan operasi dengan IMO dengan tanggal efektif integrasi pada 17 April 2017. Pada tanggal efektif integrasi, jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk posisi tutup buku 16 April 2017 yang telah diambil alih masing-masing sebesar Rp 75.181.882 sehingga nilai aset bersih yang dialihkan sama dengan Rp nihil. Bank dan IMO merupakan entitas sepengendali sehingga transaksi integrasi usaha diakui pada nilai tercatatnya berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

2. DASAR PENYUSUNAN

Laporan keuangan Bank telah disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen pada tanggal 19 Maret 2021.

Berikut ini adalah dasar penyusunan laporan keuangan.

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Public offering of shares and privatisation** (continued)*

Pursuant to the Deed of Statement of Resolutions of Limited Corporation Meeting No. 97 dated 16 November 2015, drawn up by Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter of Approval No. AHU-0946124.AH.01.02. year 2015 dated 17 November 2015, Articles of Association of the Bank have been amended in relation to the change in the Bank's status from a publicly listed company to a private company.

c. Business integration with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta Branch

On 18 October 2016, The Bank signed Framework Agreement to Implement the Integration of the Banking Business in Indonesia with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) to implement business and operation integration with Jakarta branches of HBAP, known as Indonesia Management Office (IMO). On 13 April 2017, the Bank and IMO signed the Restated and Amended Agreement to Implement the Integration of the Banking Business in Indonesia. On 22 March 2017, FSA has approved the business integration of the Bank and IMO through its letter No. S-29/D.03/2017.

The Bank has completed the business and operation integration with IMO with the effective date of integration on 17 April 2017. On the effective date of integration, the carrying amount of total assets and liabilties as at 16 April 2017 which have taken over were each Rp 75,181,882 as such, the transferred net asset value is equal to Rp nil. The Bank and IMO are entities under common control therefore, the business integration transaction is recognised at its carrying value under pooling of interest method.

2. BASIS OF PREPARATION

The Bank's financial statements were authorised for issue by the management on 19 March 2021.

The basis of preparation of the financial statements are set out below.

a. Statement of compliance and basis for preparation of financial statements

The Bank's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS).

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun dengan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas dan saldo yang tidak dibatasi penggunaannya di giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan dan penempatan pada bank-bank lain yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

b. Penggunaan pertimbangan, taksiran dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, taksiran-taksiran, dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan.

Walaupun taksiran ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut.

Taksiran-taksiran dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian taksiran dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 5.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***a. Statement of compliance and basis for preparation of financial statements** (continued)*

The financial statements are prepared under the historical cost convention, except where the accounting standards require fair value measurement.

The financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. The statement of cash flows is prepared using the direct method. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and unrestricted balances in demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia mature within three months from the date of acquisition and placements with other banks mature within three months from the date of acquisition.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank's functional and reporting currency. Figures in these financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognised in the financial statements are described in Note 5.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi yang berakhir 31 Desember 2020 telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

c. Changes in accounting policies

Except as described below, the accounting policies applied for the year ended 31 December 2020 are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2019 financial which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting (DSAK-IAI) has issued revision of the following accounting standards which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- *SFAS 71: "Financial Instruments";*
- *SFAS 72: "Revenue from Contracts with Customers";*
- *SFAS 73: "Leases";*
- *Amendment of SFAS 15: "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";*
- *Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";*
- *Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract";*
- *Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";*
- *Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;*
- *Amendment SFAS 102 "Accounting for Murabahah";*
- *Annual improvements 2019 to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";*
- *Amandment to SFAS 1 "Presentation of financial statement" and SFAS 25 "Accounting policies, changes in accounting and errors";*
- *IFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";*
- *IFAS 101 "Recognition of Deferred Murabahah Income without Significant Inventory Ownership Risks";*
- *IFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables";*
- *PPSAK 13 Revocation of SFAS 45 Financial Reporting for Non-profit Organisations; and*
- *Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.*

Except as described below, all the above SFAS and ISFAS had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior years.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit saat peristiwa kerugian kredit terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank memilih penerapan secara restropektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp 98.972 yang berasal dari penurunan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan (lihat Catatan 39).

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Bank dimana saat ini, Bank tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***c. Changes in accounting policies** (continued)*

SFAS 71 replaces SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

In accordance with the transition requirements in SFAS 71, the Bank elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. The Bank has adjusted the beginning 2020 retained earnings amounting to Rp 98,972 which was from the decrease in allowance for losses for financial instruments (refer to Note 39).

Based on business model assessments and contractual cashflow, there is no change to the carrying amount of financial assets and liabilities as of 1 January 2020 due to the adoption of new classification under SFAS 71.

The hedge accounting rules in this standard also had no impact to the Bank as currently the Bank did not enter into transactions related to the hedge accounting.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah sebagai berikut:

a. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, efek-efek untuk tujuan investasi, aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan, tagihan derivatif, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor, tagihan akseptasi, kredit yang diberikan kepada nasabah, dan aset keuangan lainnya yang disajikan sebagai bagian dari aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank-bank lain, liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang akseptasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, beban akrual, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi dan liabilitas keuangan lainnya yang disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies applied in the preparation of the Bank's financial statements are as follows:

a. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, investment securities, financial assets held for trading, derivative receivables, securities purchase with agreement to resell, export bills, acceptance receivables, loans to customers, and other financial assets that are presented as part of other assets.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities at fair value through profit or loss, acceptance payables, securities sold with agreement to repurchase, accruals, borrowings, subordinated debts and other financial liabilities that are presented as part of other liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Bank mengelompokkan aset keuangannya dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
ii. Tersedia untuk dijual;
iii. Dimiliki hingga jatuh tempo;
iv. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

a.1. Klasifikasi

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, dan yang tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Bank mengelompokkan aset keuangannya sesuai dengan PSAK 71 dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

i. Biaya perolehan diamortisasi;
ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL);
iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Financial assets and liabilities** (continued)*

Policy applicable before 1 January 2020

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

i. Fair value through profit or loss, which has 2 sub-classifications, i.e., financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held for trading;

ii. Available-for-sale;
iii. Held-to-maturity;
iv. Loans and receivables.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

i. Fair value through profit or loss, which has 2 sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

ii. Financial liabilities measured at amortised cost.

a.1. Classification

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

In the held-to-maturity category are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Bank has the positive intent and ability to hold to maturity, and which are not designated at fair value through profit or loss or available-for-sale. As of 31 December 2020 and 2019, the Bank does not have any financial assets classified as held-to-maturity.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Policy applicable from 1 January 2020

The Bank classified its financial assets In accordance with SFAS 71 in the following categories on initial recognition:

i. Amortised cost;
ii. Fair value through profit or loss (FVTPL);
iii. Fair value through other (FVOCI).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

a.1. Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*hold to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Financial assets and liabilities *(continued)*

Policy applicable from 1 January 2020 *(continued)*

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities classified as held for trading;

ii. Financial liabilities measured at amortised cost.

a.1. Classification

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- *The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents consideration for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

a.1. Klasifikasi (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Bank mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur leverage; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL, dengan satu pengecualian untuk instrumen ekuitas tertentu yang tidak untuk diperdagangkan dan dimana pilihan telah ditetapkan untuk menyajikan keuntungan dan lerugian dari pergerakan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lainnya tanpa reklasifikasi ke laba rugi saat penghentian pengakuan aset tersebut.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Financial assets and liabilities *(continued)*

Policy applicable from 1 January 2020 *(continued)*

a.1. Classification *(continued)*

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features; and*
- *Prepayment and extension terms*

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (hold to collect and sell); and*
- *The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Unrealised gains or losses of financial assets held at FVOCI are deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL, with one exception for certain equity instruments that are not held for trading and where an election has been taken to present gains and losses of fair value movements in OCI with no reclassification of fair value gains/losses to profit or loss on derecognition.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

a.2. Pengakuan

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurang (untuk *item* yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

a.3. Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Policy applicable from 1 January 2020** (continued)*

a.2. Recognition

The regular way of purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs (if any) that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instrument had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

a.3. Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which the Bank has substantially transfer all the risks and rewards of ownership of the financial asset. Any rights or obligation in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

The Bank derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or canceled or expired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

a.3. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Bank menghapusbukukan saldo kredit dan efek untuk tujuan investasi, dan penyisihan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau efek-efek tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan. Selisih lebih nilai tercatat kredit yang diberikan atas arus kas masuk dari eksekusi jaminan dibebankan sebagai kerugian penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

a.4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

a.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Aset atau liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

a.6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Policy applicable from 1 January 2020** (continued)*

***a.3. Derecognition** (continued)*

The Bank writes off a loan and investment security balance, and any related allowance for impairment losses when the Bank determines that the loan or security is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the debtor's/issuer's financial position such that the debtor/issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. Any excess of loans carrying amount over the cash flow from collateral execution is charged to impairment loss in the current year profit or loss.

a.4. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

a.5. Amortised cost measurement

Financial assets or liabilities measured at amortised cost is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, and minus any reduction for impairment.

a.6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

a.6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasian tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek *(dealer),* perantara efek *(broker),* kelompok industri, badan pengawas *(pricing service* atau *regulatory agency)*, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan atau hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan *input* (sebagai contoh LIBOR *yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Financial assets and liabilities** (continued)*

***Policy applicable from 1 January 2020** (continued)*

***a.6. Fair value measurement** (continued)*

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e, the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instruments which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities, and counterparty spreads) existing at the date of the statement of financial position.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank-bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

d. Kredit yang diberikan kepada nasabah

Kredit yang diberikan kepada nasabah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Kredit yang diberikan kepada nasabah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya atau pendapatan transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung (jika ada), dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Kredit yang diberikan kepada nasabah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya atau pendapatan transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung (jika ada), dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing (Catatan 3.a.1). Untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

Jenis kredit yang diberikan terdiri dari kredit modal kerja, investasi, konsumsi dan karyawan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

b. Demand deposits with Bank Indonesia and other banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are carried at amortised cost using the effective interest method.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs (if any), and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method.

d. Loans to customers

Loans to customers represent provision of cash or cash equivalent based on agreements with debtors, where debtors are required to repay their debts with interest after a specified period.

Policy applicable before 1 January 2020

Loans to customers are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs or income (if any), and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method.

Policy applicable from 1 January 2020

Loans to customers are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs or income (if any), and subsequently measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification (Note 3.a.1). For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

The types of loans consist of working capital, investment, consumer and employee loans.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Kredit yang diberikan kepada nasabah (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi pinjaman debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain melalui perpanjangan jangka waktu pinjaman dan perubahan fasilitas pinjaman.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

e. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dengan janji untuk dijual kembali pada waktu dan harga yang telah ditentukan, bukan dengan tujuan untuk diperdagangkan, disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual yang telah disepakati, dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual yang telah disepakati. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek itu dibeli hingga saat dijual kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Efek-efek yang mendasari transaksi *reverse repo* tidak diakui di laporan posisi keuangan.

f. Aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas untuk diperdagangkan dan derivatif yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko tapi karena beberapa alasan tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai. Aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dan diukur pada nilai wajar di laporan posisi keuangan pada saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal, dengan biaya transaksi yang terjadi diakui langsung di dalam laba rugi. Semua perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui di dalam laba rugi tahun berjalan. Aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Loans to customers** (continued)*

***Policy applicable from 1 January 2020** (continued)*

Syndicated loans are stated at amortised cost in accordance with the risk borne by the Bank.

Loan restructuring for debtors facing difficulties in fulfilling their obligation, is done through extension of loan period and changes of loan facilities.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

e. Securities purchased with agreement to resell

Securities purchased with agreement to resell (reverse repo) which are held by the Bank in order to collect contractual cash flows with a promise of reselling it at a predetermined time and price, rather than intention for trading, are presented as receivable at the agreed resale price less the difference between the purchase price and the agreed resale price. The difference between the purchase price and the agreed resale price is amortised as interest income over the period commencing from the acquisition date to the resale date using the effective interest rate method. The underlying securities on reverse repo transactions are not recognised at the statement of financial position.

f. Assets and liabilities at fair value through profit or loss

Assets and liabilities at fair value through profit or loss consist of assets and liabilities held for trading and derivatives used for risk management purposes but which for various reasons do not meet the qualifying criteria for hedge accounting. Assets and liabilities at fair value through profit or loss are initially and subsequently recognised and measured at fair value in the statement of financial position, with transaction costs recognised directly in profit or loss. All changes in the fair value of assets and liabilities at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss for the year. Assets and liabilities at fair value through profit or loss are not reclassified subsequent to their initial recognition.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Tagihan dan utang akseptasi

Tagihan dan utang akseptasi dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek untuk tujuan investasi

Efek-efek untuk tujuan investasi terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), obligasi pemerintah, dan sukuk.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Efek-efek untuk tujuan investasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi dinyatakan pada nilai wajar.

Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek untuk tujuan investasi diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai investasi tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang belum direalisasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain harus diakui pada laba rugi tahun berjalan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Perubahan nilai wajar aset moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dipisahkan antara selisih penjabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada penghasilan komprehensif lainnya.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Efek-efek untuk tujuan investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada).

Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi dinyatakan pada nilai wajar dimana keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Perubahan pada kerugian kredit ekspektasian diakui laba rugi dan diakumulasi pada ekuitas. Pada saat penghentian pengakuan, akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar bersih, setelah akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai, ditransfer ke laba rugi..

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

g. Acceptance receivables and payables

Acceptance receivables and payables are carried at amortised cost.

h. Investment securities

Investment securities consist of Certificates of Bank Indonesia, Treasury Bills, government bonds, and sukuk.

Policy applicable before 1 January 2020

Investment securities are classified as available-for-sale, and initially measured at fair value plus transaction costs (if any). Subsequent to initial measurement, investment securities are carried at fair value.

Interest income is recognised in the profit or loss using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on investment securities are recognised in the profit or loss for the year.

Other fair value changes are recognised in other comprehensive income until the investment is sold or impaired, where upon the cumulative unrealised gains and losses previously recognised in other comprehensive income are recognised in the profit or loss for the year based on a weighted average method.

Changes in the fair value of monetary assets denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

Policy applicable from 1 January 2020

Investment securities are classified as measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI), and initially measured at fair value plus transaction costs (if any).

Subsequent to initial measurement, investment securities are carried at fair value with all unrealised gains and losses arising from changes in fair value are recognised in other comprehensive income. Changing in expected credit losses recognised in the profit or loss and are accumulated in equity. On derecognition, the cumulative fair value gains or losses, net of cumulative allowance for impairmen losses, are transferred to the profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Efek-efek untuk tujuan investasi (lanjutan)

Investasi pada sukuk

Bank mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 110 (revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan

b. Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, Bank mencatat investasi pada sukuk sebesar biaya perolehan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi pada sukuk. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan sebesar nilai wajar. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

i. Penjabaran transaksi dan saldo dalam valuta asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, mata uang fungsional Bank, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Saldo akhir tahun aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tengah Reuters pukul 16:00 WIB.

Seluruh keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi disajikan bersih dalam laporan laba rugi.

Kurs valuta asing utama pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Investment securities** (continued)*

Investments in sukuk

The Bank classifies all investment in sukuk as measured at fair value through other comprehensive income in accordance with SFAS No. 110 (revised 2015), "Accounting for Sukuk". The investments in sukuk are classified as measured at fair value through other comprehensive income if:

a. Such investment is held in a business model whose objective is to collect contractual cash flows and to sell sukuk; and

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates of payments of principals and/or the margin.

At initial recognition, the Bank records investments in sukuk at acquisition cost plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk measured at fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Difference between acquisition cost and nominal value is amortised using straight line during the sukuk time period and recognised in profit or loss. Gain or loss from fair value changes recognised in other comprehensive income.

i. Foreign currency transactions and balances

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Bank's functional currency, using the spot exchange rate on the date of transaction.

Year-end balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies were translated into Rupiah using the Reuters middle rates at 16:00 Western Indonesian Time.

All foreign exchange gains and losses recognised in the statement of profit or loss are presented net in the statement of profit or loss.

The major rates of foreign exchange used as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Valuta asing		2020 Rupiah penuh/ *Rupiah full amount*	2019 Rupiah penuh/ *Rupiah full amount*	*Foreign currencies*	
1	Pound Inggris (GBP)	19.012,46	18.238,14	*British Pound (GBP)*	1
1	Euro (EUR)	17.234,43	15.570,61	*Euro (EUR)*	1
1	Dolar Amerika Serikat (USD)	14.050,00	13.882,50	*United States Dollar (USD)*	1
100	Yen Jepang (JPY)	13.597,00	12.781,00	*Japanese Yen (JPY)*	100
1	Dolar Singapura (SGD)	10.606,18	10.315,05	*Singapore Dollar (SGD)*	1
1	Dolar Australia (AUD)	10.752,47	9.725,39	*Australian Dollar (AUD)*	1
1	Dolar Hong Kong (HKD)	1.812,30	1.782,75	*Hong Kong Dollar (HKD)*	1

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015) - Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
   iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
   vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   viii. entitas atau bagian dari grup dimana entitas merupakan anggotanya, menyediakan personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada pemegang saham dari entitas pelaporan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

j. Transactions with related parties

The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS 7 (Revised 2015) - Related Party Disclosure, the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity;

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
   iii. both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
   vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
   viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode aset dan liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

l. Sewa

Mulai 1 Januari 2019, Bank menerapkan PSAK 73 Sewa untuk kontrak sewanya.

Bank mengevaluasi pada saat insepsi sebuah kontrak apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa, yaitu jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan perjanjian sewa dimana Bank sebagai penyewa, kecuali untuk sewa jangka pendek (memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Untuk sewa tersebut, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasional dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematik lain yang lebih merepresentasikan pola manfaat penyewa.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

k. Income taxes

The tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the taxes are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Deferred income tax is recognised using the asset and liability method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values in the financial statements. Current enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset arising from temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

l. Leases

Starting 1 January 2019, the Bank adopted SFAS 73 Leases to lease contracts.

The Bank assesses at inception of a contract whether a contract is or contains a lease that is if the contract conveys a right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Bank recognises a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease agreements in which the Bank is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Bank recognises the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the pattern of the lessee's benefit.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Bank menetapkan maksimum masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan ditambah dengan opsi perpanjangan satu masa sewa yang dieksekusi. Bank tidak dapat menentukan masa sewa lebih panjang dari maksimum tersebut karena tidak terdapat opsi kontraktual lebih lanjut yang dapat dievaluasi terhadap insentif ekonominya.

Liabilitas sewa pada tanggal permulaan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Umumnya Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Setelah tanggal permulaan, liabilitas sewa diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa, atau untuk merefleksikan revisi pembayaran sewa tetap secara substansial.

Aset hak-guna pada tanggal permulaan diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, ditambah pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima, ditambah biaya awal langsung yang dikeluarkan dan estimasi biaya dalam membongkar, memindahkan dan merestorasi aset pendasar atau merestorasi tempat dimana aset pendasar berada.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Sesuai PSAK 73, Bank telah memilih menggunakan cara praktis untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.

m. Aset tetap

m.1.Pengakuan dan pengukuran

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut. Perangkat lunak yang dibeli sebagai bagian integral dari fungsi perangkat terkait dikapitalisasi sebagai bagian dari perangkat tersebut.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***l. Leases** (continued)*

The Bank sets a maximum lease period as the non-cancellable period together with the exercise of extension options. The Bank would not determine a longer period, because there are no further contractual options to assess against any economic incentives.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Bank uses its incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate.

After initial recognition, the lease liability is measured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payments made and remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

The right-of-use asset is initially measured at cost which comprises the initial measurement of the lease liability, plus any lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive received, plus any initial direct costs incurred and any estimated cost of dismantling, removing and restoring the underlying asset or restoring the site where the asset is located.

After initial recognition, the right-of-use asset is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

As permitted by SFAS 73, the Bank has elected to use a practical expedient not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement.

m. Properties and equipments

m.1.Recognition and measurement

Properties and equipments are initially recognised at cost. Cost includes its purchase price and any costs directly attributable to the acquisition of the asset. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

m.1. Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Laba atau rugi dari penjualan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dari penjualan dengan nilai tercatat dari aset tetap terkait, diakui sebagai pendapatan/beban lainnya di dalam laba rugi tahun berjalan.

m.2. Pengeluaran selanjutnya

Biaya untuk renovasi dan penambahan yang jumlahnya signifikan dan memperpanjang masa manfaat aset tetap dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

m.3. Penyusutan

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat selama 20 tahun. Instalasi kantor dan aset tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat aset selama 3 sampai dengan 20 tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat dan nilai residu dikaji pada setiap akhir tahun buku dan, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan dari aset tetap tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

n. Aset yang dimiliki untuk dijual

Aset yang dimiliki untuk dijual merupakan agunan berupa aset tidak lancar yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit yang mengalami penurunan nilai.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***m. Properties and equipments** (continued)*

***m.1. Recognition and measurement** (continued)*

After initial measurement, properties and equipments are measured using the cost model, i.e. carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

The carrying amount of an item of properties and equipments is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

The gain or loss on disposal of an item of properties and equipments is determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of the item of properties and equipments, and is recognised as other income/other expenses in the profit or loss for the year.

m.2. Subsequent costs

The cost for renovation and improvements, which are significant and prolong the useful life of properties and equipments, is capitalised to the respective properties and equipments. Normal repair and maintenance expenses are charged to the profit or loss for the year.

m.3. Depreciation

Land is stated at cost and not depreciated.

Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives of 20 years. Leasehold improvements and other properties and equipments are depreciated over their estimated useful life of 3 to 20 years using the straight line method.

The depreciation method applied, useful lives and residual value are reviewed at each financial year-end and, if there is a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the depreciation method is changed to reflect the changed pattern.

n. Assets held for sale

Assets held for sale represent non-current assets which were foreclosed in conjunction with settlement of impaired loans.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset yang dimiliki untuk dijual (lanjutan)

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatat aset tersebut akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan, aset ini harus berada dalam keadaan dapat dijual pada kondisinya saat ini dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi.

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Selisih antara jumlah tercatat dan hasil penjualan dari aset yang dimiliki untuk dijual diakui sebagai laba atau rugi dari aset yang dimiliki untuk dijual pada saat penjualan aset tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

o. Aset takberwujud

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak komputer yang dihasilkan secara internal dan/atau dibeli. Aset takberwujud dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Harga perolehan dari perangkat lunak yang dihasilkan secara internal terdiri atas semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap perancangan, pengembangan dan persiapan hingga perangkat lunak tersebut dapat digunakan sesuai intensi manajemen. Biaya yang terjadi dalam rangka pemeliharaan atas perangkat lunak tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Amortisasi diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat dari perangkat lunak yang bersangkutan, sejak tanggal perangkat lunak tersebut siap untuk digunakan. Taksiran masa manfaat untuk perangkat lunak adalah 3 - 5 tahun.

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***n. Assets held for sale** (continued)*

Non-current assets are classified as held for sale when their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction, they must be available for sale in their present condition and their sale must be highly probable.

Non-current assets held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell.

The difference between the carrying value and the proceeds from selling assets held for sale is recognised as gain or loss from assets held for sale at the time of sale in the current year profit or loss.

o. Intangible assets

Intangible assets represent computer software that was internally generated and/or purchased. Intangible asset is stated at cost less accumulated amortisation. The cost of internally generated software comprises of all directly attributable costs necessary to create, develop and prepare the software to be capable of operating in the manner intended by management. Costs incurred in the ongoing maintenance of software are expensed immediately as incurred.

An intangible asset is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line method over the estimated useful life of the software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is 3 - 5 years.

p. Identification and measurement of impairment of financial assets

Policy applicable before 1 January 2020

At each reporting date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi kredit atau tagihan oleh Bank dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur atau penerbit akan dinyatakan pailit, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur atau penerbit dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank menentukan bukti penurunan nilai atas kredit yang diberikan kepada nasabah, wesel ekspor, efek-efek untuk tujuan investasi dan tagihan akseptasi secara individual dan kolektif. Evaluasi penurunan nilai secara individual dilakukan terhadap semua kredit yang diberikan, efek-efek untuk tujuan investasi dan tagihan akseptasi yang signifikan secara individual.

Semua kredit yang diberikan kepada nasabah, wesel ekspor, efek-efek untuk tujuan investasi dan tagihan akseptasi yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai secara individual dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai yang sudah terjadi namun belum diidentifikasi.

Kredit yang diberikan kepada nasabah, wesel ekspor, efek-efek untuk tujuan investasi dan tagihan akseptasi yang tidak signifikan secara individual akan dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Semua penempatan dan giro pada bank-bank lain dievaluasi penurunan nilainya secara individual.

p.1. Dinilai secara individu

Penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individu ditentukan dengan mengevaluasi eksposur secara satu per satu. Prosedur ini diterapkan atas aset keuangan yang dianggap signifikan secara individu.

Dalam menentukan penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individu, faktor-faktor berikut dijadikan pertimbangan:

- jumlah eksposur Bank terhadap pihak lawan;

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Policy applicable before 1 January 2020** (continued)*

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a debtor, restructuring of a loan or receivable by the Bank on terms that the Bank would not otherwise consider, indications that a debtor or issuer will enter bankruptcy, the disappearance of an active market for a security due to financial difficulties, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of debtors or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.

The Bank considers evidence of impairment for loans to customers, export bills, investment securities and acceptance receivables at both individual and collective level. All individually significant loans, investment securities and acceptance receivables are assessed for individual impairment.

All individually significant loans to customers, export bills, investment securities and acceptance receivables found not to be individually impaired are then collectively assessed for any impairment that has been incurred but not yet identified.

Loans to customers, export bills, investment securities and acceptance receivables that are not individually significant are collectively assessed for impairment by grouping together such financial assets with similar risk characteristics.

All placements and demand deposits with other banks are assessed for individual impairment.

p.1. Individually assessed

Impairment losses on individually assessed financial assets are determined by an evaluation of the exposures on a case-by-case basis. This procedure is applied to financial assets that are considered individually significant.

In determining impairment losses on individually assessed financial assets, the following factors are considered:

- *the Bank's aggregate exposure to the counterparty;*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

p.1. Dinilai secara individu (lanjutan)

Dalam menentukan penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individu, faktor-faktor berikut dijadikan pertimbangan: (lanjutan)

- keandalan bisnis model pihak lawan dan kemampuan mengatasi kesulitan keuangan serta menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi kewajiban terhutang;
- jumlah dan perkiraan waktu penerimaan pembayaran dari debitur dan pemulihan;
- nilai realisasi agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang di diskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

p.2. Dinilai secara kolektif

Kerugian penurunan nilai dievaluasi secara kolektif untuk portofolio aset keuangan berikut ini:

- Aset keuangan yang ditelaah secara individu (lihat Catatan 3p.1 di atas) dalam hal kerugian telah terjadi tetapi belum dapat diidentifikasi; dan
- Kredit homogen yang tidak signifikan secara individu.

Penurunan nilai yang telah terjadi tapi belum diidentifikasi

Untuk aset keuangan yang telah dinilai secara individu dan tidak terdapat bukti penurunan nilai yang dapat diidentifikasi, aset keuangan tersebut dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa untuk tujuan perhitungan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Kerugian tersebut meliputi aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan, tetapi belum dapat diidentifikasi secara individu sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Penurunan nilai kolektif ditentukan setelah mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- pengalaman kerugian historis atas portofolio yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa;
- periode yang diperkirakan antara terjadinya suatu kerugian sampai kerugian tersebut diidentifikasi dan dibuktikan dengan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut; dan

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Policy applicable before 1 January 2020** (continued)*

***p.1. Individually assessed** (continued)*

In determining impairment losses on individually assessed financial assets, the following factors are considered: (continued)

- *the viability of the counter party's business model and capability to overcome financial difficulties and generate sufficient cash flow to service its debt obligations;*
- *the amount and timing of expected payments from debtors and recoveries;*
- *the realizable value of collaterals.*

Impairment loss on financial assets are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate.

p.2. Collectively assessed

Impairment losses are assessed on a collective basis for the following financial assets:

- *Financial assets subject to individual assessment for impairment (see Note 3p.1 above) in respect of losses which have been incurred but have not yet been identified; and*
- *Homogeneous groups of loans that are not considered individually significant.*

Incurred but not yet identified impairment

For financial assets which have been individually assessed and evidence of loss has not been identified, these financial assets are grouped together based on similar credit risk characteristics for the purpose of calculating collective impairment loss. This loss covers financial assets that are impaired at the reporting date but have not been individually identified as such until some time in the future. The collective impairment loss is determined after taking into account the following:

- *historical loss experience in portfolios of similar credit risk characteristics;*
- *the estimated period between the time when a loss occurs and the time when a loss has been identified and evidenced by the establishment of an allowance for impairment loss on an individual financial asset; and*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

p.2. Dinilai secara kolektif (lanjutan)

Penurunan nilai yang telah terjadi tapi belum diidentifikasi (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang telah dinilai secara individu dan tidak terdapat bukti penurunan nilai yang dapat diidentifikasi, aset keuangan tersebut dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa untuk tujuan perhitungan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Kerugian tersebut meliputi aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan, tetapi belum dapat diidentifikasi secara individu sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Penurunan nilai kolektif ditentukan setelah mempertimbangkan hal-hal berikut ini: (lanjutan)

- pertimbangan dan pengalaman manajemen tentang kondisi ekonomi dan kredit saat ini terhadap tingkat aktual kerugian yang terjadi dan apakah akan lebih besar atau lebih kecil dari apa yang disarankan oleh pengalaman historis.

Kredit yang homogen

Untuk kredit homogen yang tidak signifikan secara individu, Bank menggunakan model statistik dari tren kemungkinan gagal bayar, yang ditelaah pada setiap saat di mana pembayaran kontraktual dari nasabah telah lewat waktu. Penentuan kerugian penurunan nilai kolektif tersebut juga mempertimbangkan data historis lain serta evaluasi atas kondisi ekonomi saat ini.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi tahun berjalan dan dicatat pada akun penyisihan atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Policy applicable before 1 January 2020** (continued)*

***p.2. Collectively assessed** (continued)*

***Incurred but not yet identified impairment** (continued)*

For financial assets which have been individually assessed and evidence of loss has not been identified, these financial assets are grouped together based on similar credit risk characteristics for the purpose of calculating collective impairment loss. This loss covers financial assets that are impaired at the reporting date but have not been individually identified as such until some time in the future. The collective impairment loss is determined after taking into account the following: (continued)

- *management's experiences and judgments as to whether the current economic and credit conditions are such that the actual level of incurred losses is likely to be greater or less than that suggested by historical experience.*

Homogeneous loans

For homogeneous groups of loans that are not considered individually significant, the Bank utilizes statistical modeling of historical trends of the probability of default, assessed at each time period for which the customer's contractual payments are overdue. The determination of collective impairment losses also takes into consideration other historical data and evaluation of current economic conditions.

Impairment losses on financial assets carried at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate. Losses are recognised in the profit or loss for the year and reflected in an allowance account against financial assets carried at amortised cost. Interest on the impaired financial asset continues to be recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is reversed through the profit or loss for the year.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas efek-efek untuk tujuan investasi diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lain ke dalam laba rugi tahun berjalan. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laba rugi tahun berjalan merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai yang dapat diatribusikan pada nilai waktu (*time value*) tercermin sebagai komponen pendapatan bunga.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Jika persyaratan kredit, piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Kerugian Kredit Ekspektasian (*'expected credit losses'* atau *ECL*) diakui untuk pinjaman kepada bank dan nasabah, *non-trading reverse repurchase agreements*, aset keuangan lainnya yang dimiliki pada biaya diamortisasi, instrumen-instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya ('FVOCI'), dan komitmen pinjaman tertentu serta kontrak jaminan keuangan. Pada saat pengakuan awal, penyisihan (atau provisi dalam hal komitmen pinjaman dan jaminan keuangan) ECL dibentuk sebagai hasil dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 12 bulan kedepan ('12-bulan ECL'). Dalam hal terjadinya peningkatan risiko kredit yang signifikan, penyisihan (atau provisi) dibentuk untuk ECL yang berasal dari semua peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan ('ECL sepanjang umur'). Aset-aset keuangan dimana 12-bulan ECL diakui dianggap sebagai berada pada 'stage 1'; sementara aset-aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan signifikan dalam risiko kredit dikategorikan pada 'stage 2'; dan aset-aset keuangan yang mana terdapat bukti obyektif penurunan nilai sehingga dianggap sebagai kredit gagal bayar atau kredit memburuk adalah dikategorikan pada 'stage 3'.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Policy applicable before 1 January 2020** (continued)*

Impairment losses on investment securities are recognised by transferring the cumulative loss that has been recognised directly in other comprehensive income to the profit or loss for the year. The cumulative loss that has been removed from equity and recognised in the profit or loss for the year is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortisation, and the current fair value, less any impairment loss previously recognised in the profit or loss. Changes in impairment provisions attributable to time value are reflected as a component of interest income.

If, in a subsequent period, the fair value of an impaired investment securities increase and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised in the profit or loss, the impairment loss is reversed, with the amount of reversal recognised in the profit or loss for the year.

If the terms of a loan, receivable or held-to-maturity investment are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the debtor or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

Policy applicable from 1 January 2020

Expected credit losses ('ECL') are recognized for loans and advances to banks and customers, non-trading reverse repurchase agreements, other financial assets held at amortised cost, debt instrument measured at fair value through other comprehensive income ('FVOCI'), and certain loan commitments and financial guarantee contracts. At initial recognition, allowance (or provision in the case of some loan commitments and financial guarantees) is required for ECL resulting from default events that are possible within the next 12 months ('12-month ECL'). In the event of a significant increase in credit risk, allowance (or provision) is required for ECL resulting from all possible default events over the expected life of the financial instrument ('lifetime ECL'). Financial assets where 12-month ECL is recognised are considered to be 'stage 1'; financial assets which are considered to have experienced a significant increase in credit risk are in 'stage 2'; and financial assets for which there is objective evidence of impairment so are considered to be in default or otherwise credit impaired are in 'stage 3'.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain

Pengukuran ECL

Penilaian risiko kredit, dan estimasi ECL, adalah tidak bias dan probabilitas-tertimbang, dan menggabungkan semua informasi yang tersedia yang relevan terhadap penilaian termasuk informasi tentang peristiwa masa lalu, kondisi terkini dan prakiraan peristiwa masa depan yang wajar dan terdukung dan kondisi ekonomik saat tanggal pelaporan. Sebagai tambahan, estimasi ECL harus memperhitungkan nilai waktu dari uang.

Secara umum, Bank menghitung ECL menggunakan 3 komponen utama: *probability of default ('PD')* - probabilitas gagal bayar, *loss given default ('LGD')* – kerugian akibat gagal bayar, dan *the exposure at default ('EAD')* – eksposur saat gagal bayar

ECL 12-bulan dihitung dengan perkalian PD 12-bulan, LGD dan EAD. ECL sepanjang umur dihitung menggunakan PD sepanjang umur. PD 12-bulan dan PD sepanjang umur merepresentasikan probabilitas terjadinya gagal bayar dalam 12 bulan kedepan dan sisa jangka waktu maturitas instrumen keuangan.

a. Probability of Default (PD)

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage* 1) atau sepanjang umur (*Stage* 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

b. Loss Given Default (LGD)

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Policy applicable from 1 January 2020** (continued)*

For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

Measurement of ECL

The assessment of credit risk and the estimation of ECL are unbiased and probability-weighted, and incorporate all available information that is relevant to the assessment including information about past events, current conditions and reasonable and supportable forecasts of future events and economic conditions at the reporting date. In addition, the estimation of ECL should take into account the time value of money.

In general, the Bank calculates ECL using three main components: a probability of default, a loss given default ('LGD') and the exposure at default ('EAD').

The 12-month ECL is calculated by multiplying the 12-month PD, LGD and EAD. Lifetime ECL is calculated using the lifetime PD instead. The 12-month and lifetime PDs represent the probability of default occurring over the next 12 months and the remaining maturity of the financial instrument respectively.

a. Probability of Default (PD)

The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

b. Loss Given Default (LGD)

The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran ECL (lanjutan)

c. Exposure at Default (EAD)

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar terjadi pada tanggal pelaporan dibandingkan pada saat pengakuan awal, dengan memperhitungkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi tentang peristiwa masa lalu, kondisi terkini dan kondisi ekonomik masa depan. Analisa risiko kredit adalah multifaktor dan penentuan apakah suatu faktor spesifik adalah relevan dan bobotnya dibanding dengan faktor-faktor lain bergantung pada tipe produk, karakteristik instrumen keuangan dan debitur, serta area geografis. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyediakan satu set kriteria yang akan menentukan apa yang dianggap sebagai peningkatan signifikan dalam risiko kredit dan kriteria ini akan berbeda untuk tipe pinjaman yang berbeda, khususnya antara ritel dan *wholesale*. Akan tetapi, kecuali telah diidentifikasi lebih awal, semua aset keuangan dianggap telah mengalami peningkatan signifikan dalam risiko kredit ketika telah 30 hari menunggak.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Measurement of ECL** (continued)*

c. Exposure at Default (EAD)

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a 12-month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default occurring at the reporting date compared to that at initial recognition, taking into account reasonable and supportable information, including information about past events, current conditions and future economic conditions. The analysis of credit risk is multifactor and the determination of whether a specific factor is relevant and its weight compared with other factors depends on the type of product, the characteristics of the financial instrument and the borrower, and the geographical region. Therefore, it is not possible to provide a single set of criteria that will determine what is considered to be a significant increase in credit risk and these criteria will differ for different types of lending, particularly between retail and wholesale. However, unless identified at an earlier stage, all financial assets are deemed to have suffered a significant increase in credit risk when 30 days past due.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2) (lanjutan)

Bank menggunakan berbagai pengukuran kualitatif dan kuantitatif dalam menilai SICR seperti berikut:

Wholesale Banking

a. Kriteria kuantitatif

Peningkatan yang signifikan pada risiko kredit diinstrumen keuangan dikuantifikasi dengan melihat pada perubahan risiko gagal bayar debitur antara penurunan nilai pada tanggal pelaporan dengan tanggal awal mulai instrument. Peningkatan risiko kredit diukur dengan membandingkan estimasi RAT FPD (*Residual Term Average – Forward Probability of Default*) pada instrument awal (RAT FPD awal) dengan RAT FPD pada periode pelaporan (RAT FPD pelaporan) dan menentukan apakah pergerakan antara keduanya melebihi ambang batas peningkatan signifikan dalam risiko kredit.

Perubahan CRR antara tanggal awal dan tanggal pelaporan, untuk melihat apakah perubahannya sudah melebihi ambang batas yang sudah ditentukan.

b. Kriteria kualitatif

Semua debitur yang digolongkan sebagai *Worry* atau *Watch* pada akhir perode pelaporan harus dialokasikan ke stage 2 untuk dilakukan perhitungan ECL sepanjang umur terlepas dari apakah indikator utama yang merupakan peningkatan signifkan dalam ambang batas risiko kredit telah dilanggar atau tidak. Ini juga mencakup semua fasilitas baru yang dapat diberikan kepada debitur setelah dimasukkan dalam daftar WWM *(Watch Worry Monitor)*.

Semua instrument yang menunggak 30 hari pada akhir periode pelaporan harus dialokasikan ke stage 2 untuk dilakukan perhitungan ECL sepanjang umur, terlepas dari apakah indikator utama yang merupakan peningkatan signifikan dalam ambang batas risiko kredit telah dilanggar atau tidak, atau debitur ditempatkan pada daftar *Worry* atau *Watch*.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Significant increase in credit risk (Stage 2)** (continued)*

The Bank uses a number of qualitative and quantitative measures in assessing SICR as follows:

Wholesale Banking

a. Quantitative criteria

The significant increase in Credit Risk of financial instruments is quantified by looking at changes in obligors default risk between the impairment reporting data and the instrument's start data. The increase in credit risk is measured by comparing the RAT FPD (Residual Term Average – Forward Probability of Default) estimated at instrument origination (Origination RAT FPD) against RAT FPD at reporting period (Reporting RAT FPD) and determining if the movement between the two exceeds the significant increase in credit risk threshold.

CRR changes between origination and reporting data, to see whether the movement already exceed the threshold determined.

b. Qualitative criteria

All debtors classified as Worry or Watch at the end of reporting period must be allocated to stage 2 in order to receive a lifetime ECL calculation, irrespective of whether the primary indicator has breached the significant increase in credit risk threshold or not. This will also include any facilities that may be granted to the obligor after being put on the WWM (Watch Worry Monitor) list.

All instruments that are 30 days in arrears at the end of reporting period must be allocated to stage 2 in order to receive a lifetime ECL calculation, irrespective of whether or not the primary indicator has breached the significant increase in credit risk threshold, or the obligor has been placed on the Worry or Watch list.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (*Stage* 2) (lanjutan)

Bank menggunakan berbagai pengukuran kualitatif dan kuantitatif dalam menilai SICR seperti berikut: (lanjutan)

Retail Banking

a. Kriteria kuantitatif

Akun-akun dengan 30 hari tunggakan (DPD) atau yang masuk dalam segmen yang berada di bawah *marginal* segmen dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan. Segmentasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan (namun tidak terbatas pada) DPD, behavior score maupun sisa jangka waktu pinjaman

b. Kriteria kualitatif

Debitur dengan DPD kurang dari 30 hari yang telah di restrukturisasi atau berada dalam indikasi awal Risiko Tinggi pada portofolio Retail dianggap memiliki kenaikan signifikan atas kredit risiko.

Khusus untuk debitur yang terkena dampak COVID-19 dan dalam program restrukturisasi COVID-19, maka untuk perhitungan ECL tidak secara otomatis memicu peningkatan risiko kredit yang signifikan

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage 3*)

Bank menentukan bahwa suatu instrumen keuangan mengalami kredit memburuk dan masuk ke 'stage 3' dengan mempertimbangkan bukti obyektif yang relevan, terutama apakah pembayaran kontraktual pokok ataupun bunga telah menunggak lebih dari 90 hari, apakah ada indikasi lain bahwa peminjam kemungkinan tidak dapat membayar seperti diberikannya konsesi kepada peminjam untuk alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kondisi keuangan peminjam, atau pinjaman dianggap telah gagal bayar. Jika kemungkinan tidak dapat membayar tidak teridentifikasi pada tingkat awal, hal ini dianggap terjadi ketika eksposur telah 90 hari menunggak. Oleh karena itu definisi kredit memburuk dan gagal bayar disesuaikan sejauh mungkin sehingga stage 3 mewujudkan semua pinjaman yang dianggap telah gagal bayar atau kredit memburuk.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Significant increase in credit risk (Stage 2)** (continued)*

The Bank uses a number of qualitative and quantitative measures in assessing SICR as follows: (continued)

Retail Banking

a. Quantitative criteria

Accounts that are 30 days past due (DPD) or accounts below marginal segment are considered to have experienced a significant increase in credit risk. Periodically segmentation performed based on (but not limited to) DPD, behavior score or remaining tenure of the loan.

b. Qualitative criteria

Debtors with DPD less than 30 days which have been restructured or included in High Risk early indicator in Retail portfolio is considered to have a significant increase in credit risk.

Specifically for debtors impacted by COVID-19 and under COVID-19 restructuring program, in term of the ECL calculation, it may not automatically trigger a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

The Bank determines that a financial instrument is credit-impaired and in stage 3 by considering relevant objective evidence, primarily whether contractual payments of either principal or interest are past due for more than 90 days, whether there are other indications that the borrower is unlikely to pay such as that a concession has been granted to the borrower for economic or legal reasons relating to the borrower's financial condition, or the loan is otherwise considered to be in default. If such unlikeness to pay is not identified at an earlier stage, it is deemed to occur when an exposure is 90 days past due. Therefore the definitions of credit impaired and default are aligned as far as possible so that stage 3 represents all loans which are considered defaulted or otherwise credit-impaired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (*Stage 3*) (lanjutan)

Pendapatan bunga diakui dengan mengaplikasikan suku bunga efektif pada jumlah biaya diamortisasi, yaitu jumlah tercatat bruto dikurangi penyisihan ECL.

Periode ECL diukur

Maksimum periode yang dipertimbangkan ketika mengukur ECL (12-bulan ataupun sepanjang umur) adalah periode maksimum kontraktual Bank terekspos risiko kredit. Akan tetapi, dimana instrumen keuangan termasuk komitment yang telah ditarik maupun yang belum ditarik dan kemampuan kontraktual untuk meminta pembayaran kembali dan membatalkan komitmen yang belum ditarik tidak membantu membatasi eksposur Bank atas risiko kredit ke periode notifikasi kontraktual, maka periode kontraktual tidak menentukan periode maksimum yang dipertimbangkan. Melainkan, ECL diukur selama periode Bank tetap terekspos ke risiko kredit yang tidak dimitigasi oleh aksi manajemen risiko kredit.

Input ekonomik *forward-looking*

Bank menerapkan beberapa skenario ekonomik global *forward-looking* yang ditentukan dengan referensi kepada distribusi prakiraan eksternal yang merepresentasikan prakiraan kondisi ekonomi. Pendekatan tersebut dinilai memadai untuk menghitung kerugian ekspektasian yang tidak bias didalam berbagai lingkungan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi tertentu, analisa tambahan diperlukan untuk memperoleh scenario-skenario tambahan, untuk mencerminkan berbagai kemungkinan-kemungkinan keluaran ekonomik yang memadai untuk estimasi yang tidak bias.

Akun kredit bermasalah dikelola oleh unit LMU. Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit *Stage* 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai *Stage* 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan minimum dua skenario (antara lain dari hasil penyelesaian membaik, memburuk, sentral atau perkiraan dasar serta terburuk) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap scenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu. Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika LMU memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukan unsur pertimbangan yang signifikan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

***Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)** (continued)*

Interest income is recognised by applying the effective interest rate to the amortised cost amount, i.e. gross carrying amount less ECL allowance.

Period over which ECL is measured

The maximum period considered when measuring ECL (be it 12-month or lifetime ECL) is the maximum contractual period over which the Bank is exposed to credit risk. However, where the financial instrument includes both a drawn and undrawn commitment and the contractual ability to demand repayment and cancel the undrawn commitment does not serve to limit the Bank's exposure to credit risk to the contractual notice period, the contractual period does not determine the maximum period considered. Instead, ECL is measured over the period the Bank remains exposed to credit risk that is not mitigated by credit risk management actions.

Forward-looking economic inputs

The Bank applies multiple forward-looking global economic scenarios determined with reference to external forecast distributions representative of forecast economic conditions. This approach is considered sufficient to calculate unbiased expected loss in most economic environments. In certain economic environments, additional analysis may be necessary and may result in additional scenarios or adjustments, to reflect a range of possible economic outcomes sufficient for an unbiased estimate.

Credit impaired accounts are managed by LMU unit. Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 2 scenarios (among others typically the upside, downside, central or base case, and worst outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors. The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when LMU estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Komitmen Kredit dan Jaminan Keuangan

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen kredit yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

q. Identifikasi, pengukuran penurunan nilai dan pengukuran nilai wajar aset non-keuangan

Nilai tercatat aset non-keuangan, selain aset pajak tangguhan, ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat terpulihkan. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara jumlah tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan atas sebuah aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas terpisah.

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah kembali untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Jika terjadi pemulihan nilai, maka langsung diakui dalam laba rugi, tetapi pemulihan tersebut tidak boleh menyebabkan nilai aset melebihi nilai tercatat neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya *(highest and best use)* atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***p. Identification and measurement of impairment of financial assets** (continued)*

Loan Commitment and Financial Guarantee

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

q. Identification, measurement of impairment and fair value of non-financial assets

The carrying amount of the Bank's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

Recoverable amount of an asset is the higher of its fair value less cost to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the smallest identifiable group of assets that generates separately identifiable cash flows.

At each reporting date, non-financial assets that suffered impairment are reassessed for possible reversal of the impairment. If there is a reversal of impairment, it shall be recognised immediately to profit or loss, however the reversal amount shall not cause the carrying amount of an asset exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

A fair value measurement of non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Simpanan dari nasabah dan bank-bank lain

Simpanan dari nasabah terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank-bank lain terdiri dari giro, *call money* dan deposito berjangka.

Simpanan pada awalnya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan simpanan, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali jika Bank memilih untuk mencatat liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi.

s. Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi

Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi merupakan dana yang diterima dari pihak berelasi dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman dan pinjaman subordinasi.

Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi pada awalnya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan pinjaman, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif**.**

t. Imbalan kerja

t.1. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan bonus karyawan yang akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diukur berdasarkan jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada saat jasa tersebut diberikan.

Liabilitas diakui untuk jumlah yang akan dibayar sebagai bonus jangka pendek jika Bank memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari jasa masa lalu yang diberikan oleh pekerja dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal.

t.2. Liabilitas pembayaran berbasis saham

Karyawan tertentu berhak atas instrumen ekuitas dari HSBC Holdings plc, pemegang saham pengendali, melalui program imbalan kerja berbasis saham. Transaksi ini diperlakukan sebagai transaksi yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas karena HSBC Holdings plc adalah pihak yang memberikan instrumen ekuitasnya sendiri untuk semua program imbalan kerja berbasis saham dalam grup.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

r. Deposits from customers and other banks

Deposits from customers consist of demand deposits, saving accounts and time deposits.

Deposits from other banks consist of demand deposits, call money and time deposits.

Deposits are initially measured at fair value less directly attributable transaction costs (if any), and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method, except where the Bank chooses to carry the liabilities at fair value through profit or loss.

s. Borrowings and subordinated debts

Borrowings and subordinated debts are funds received from a related party with payment obligation based on the borrowing and subordinated debts agreements.

Borrowings and subordinated debts are initially measured at fair value less directly attributable transaction costs, and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest rate method.

t. Employee benefits

t.1. Short-term employee benefit obligation

Short-term employee benefit obligation represents employees bonus which will be paid within one year.

Short-term employee benefit obligation is measured on an undiscounted basis and is expensed as the related service is provided.

A liability is recognised for the amount expected to be paid under short-term cash bonus if the Bank has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

t.2. Share-based payment liabilities

Certain employees are eligible for equity instruments in HSBC Holdings plc, the ultimate parent entity, under share-based compensation plan. These transactions are accounted as equity settled because HSBC Holdings plc is the grantor of its equity instruments for share-based compensation plans across the group.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

t.2. Liabilitas pembayaran berbasis saham (lanjutan)

Biaya atas program pembayaran berbasis saham diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian. Dikarenakan adanya pengaturan pembebanan kembali antara Bank dan HSBC Holdings plc, liabilitas atas transaksi pembayaran berbasis saham diakui pada saat kewajiban untuk melakukan pembayaran disepakati secara kontraktual.

Liabilitas diukur berdasarkan pengaturan pembayaran berbasis saham. Perubahan atas nilai wajar dari liabilitas setelah pengakuan awal hingga penyelesaian diakui sebagai perubahan kontribusi modal (dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor).

Nilai wajar ditetapkan dengan menggunakan harga pasar atau teknik penilaian, dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas. Kondisi kinerja pasar dipertimbangkan dalam menaksir nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian, sehingga pemberian tersebut dianggap telah memenuhi kondisi *vesting*, tanpa memperhatikan apakah kondisi kinerja pasar tersebut terpenuhi, selama kondisi lainnya terpenuhi.

Kondisi *vesting*, selain dari kondisi kinerja pasar, tidak dipertimbangkan dalam penaksiran awal nilai wajar pada tanggal pemberian. Kondisi tersebut dipertimbangkan dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas yang diperhitungkan dalam pengukuran transaksi, sehingga nilai yang diakui untuk jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan didasarkan pada jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya menjadi *vesting*. Secara kumulatif, tidak ada beban yang diakui untuk instrumen ekuitas yang tidak vesting karena kegagalan dalam memenuhi kondisi kinerja non-pasar atau kondisi pemberian jasa.

Ketika syarat dan ketentuan pemberian instrumen ekuitas dimodifikasi, sekurang-kurangnya, beban dari pemberian awal tetap diakui seolah-olah syarat dan ketentuan tidak dimodifikasi. Jika dampak modifikasi mengakibatkan kenaikan nilai wajar dari instrumen ekuitas yang diberikan atau kenaikan jumlah instrumen ekuitas, kenaikan nilai wajar dari instrumen yang diberikan atau kenaikan nilai wajar dari ekuitas tambahan tersebut diakui sebagai tambahan atas beban pemberian awal yang diukur pada tanggal modifikasi untuk periode *vesting* yang dimodifikasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employee benefits *(continued)*

t.2. Share-based payment liabilities *(continued)*

The cost of the share-based payment arrangement is measured by reference to the fair value of equity instruments at grant date. Since a recharge arrangement exists between the Bank and HSBC Holdings plc, a liability for share-based payment transactions is recognised at the point the obligation to make the payment is contractually agreed.

The liability is measured in accordance with the share-based payment arrangement. Any changes in the fair value of the liability from initial recognition to settlement are recognised as a true-up of capital contribution (which is recorded as part of additional paid-in capital).

Fair value is determined by using market prices or appropriate valuation models, taking into account the terms and conditions upon which the equity instruments were granted. Market performance conditions are taken into account when estimating the fair value of equity instruments at the grant date, so that an award is treated as vested irrespective of whether the market performance condition is satisfied, provided all other conditions are satisfied.

Vesting conditions, other than market performance conditions, are not taken into account in the initial estimate of the fair value at the grant date. They are taken into account by adjusting the number of equity instruments included in the measurement of the transaction, so that the amount recognised for services received as consideration for the equity instruments granted shall be based on the number of equity instruments that eventually vest. On a cumulative basis, no expense is recognised for equity instruments that do not vest because of a failure to satisfy non-market performance or service conditions.

Where an award has been modified, at a minimum, the expense of the original award continues to be recognised as if it had not been modified. Where the effect of a modification is to increase the fair value of an award or increase the number of equity instruments, the incremental fair value of the award or incremental fair value of the extra equity instruments is recognised as an addition to the expense of the original grant measured at the date of modification, for the modified vesting period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

t.3. Liabilitas imbalan pasca-kerja

Sejak Januari 2017, Bank menyelenggarakan program iuran pasti.

Program iuran pasti adalah program pensiun dimana Bank membayar iuran tetap kepada sebuah entitas terpisah. Iuran ini dicatat sebagai biaya karyawan pada saat terutang. Bank tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran lebih lanjut setelah iuran tersebut dibayarkan.

Bank diwajibkan menyediakan jumlah minimum imbalan pensiun berdasarkan Undang – undang Ketenagakerjaan (UUTK) No. 13/2003. Secara substansi program pensiun dalam UUTK No. 13/2003 merupakan program imbalan pasti karena UUTK telah menetapkan formula dalam menentukan jumlah minimum imbalan. Jika porsi program imbalan pensiun yang didanai Bank lebih rendah dari imbalan yang diwajibkan menurut UUTK, Bank akan membentuk penyisihan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial.

Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas estimasi menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporasi berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas pensiun yang bersangkutan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***t. Employee benefits** (continued)*

t.3. Post-employment benefits obligation

Since January 2017, the Bank has defined contribution plan.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity. Contributions are recognised as personnel expense when they are due. The Bank has no further obligations once the contributions have been paid.

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under Labor Law No. 13/2003 represent defined benefit plans. If the Bank funded portion of the pension plan benefit is less than the benefit as required by the Labor Law, the Bank will provide provision for such shortage.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The post-employement benefits liability recognised in the statement of financial position in respect of a defined pension benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the statement of financial position date adjusted for unrecognised actuarial gains or losses.

The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Imbalan kerja (lanjutan)

t.3. Liabilitas imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Pengukuran kembali yang timbul dari perubahan pada asumsi-asumsi aktuarial yang dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain dan disajikan bagian dari penghasilan komprehensif lain di ekuitas.

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi sebagai biaya jasa lalu.

t.4. Provisi pemutusan hubungan kerja

Provisi pemutusan hubungan kerja terutang ketika Bank memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Bank mengakui pesangon pemutusan hubungan kerja pada tanggal yang lebih awal antara: i) ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan ii) ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Ketika Bank menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan hubungan kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

u. Beban akrual dan provisi

Beban akrual dan provisi terdiri dari beban operasional yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar dan provisi untuk biaya restrukturisasi termasuk provisi pemutusan hubungan kerja.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employee benefits *(continued)*

t.3. Post-employment benefits obligation *(continued)*

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Remeasurement arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income and presented as part of other comprehensive income in equity.

Changes in the present value of defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the statement of profit or loss as past service cost.

t.4. Termination provisions

Termination provisions are payable when the Bank terminates employment before the normal retirement date, or when an employee accepts offer of voluntary redundancy with termination benefits. The Bank recognises termination benefits at the earlier of: i) when the Bank can no longer withdraw the offer of the termination benefits and ii) when the Bank recognises costs for restructuring within the scope of SFAS 57 and involves payment of termination benefits.

When Bank provides termination benefits as an offer for voluntary redundancy, termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits due for more than 12 months after the reporting period are discounted to their present value.

u. Accruals and provisions

Accruals and provisions consist of accrued operational expenses, accrued interest expenses and provision for restructuring costs including termination provisions.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

u. Beban akrual dan provisi (lanjutan)

Provisi untuk biaya restrukturisasi diakui hanya jika:
i) Bank memiliki rencana formal rinci untuk restrukturisasi dengan mengidentifikasikan sekurang-kurangnya usaha atau bagian usaha yang terlibat; lokasi utama yang terpengaruh; lokasi, fungsi, dan perkiraan jumlah pegawai yang akan menerima kompensasi karena pemutusan hubungan kerja; pengeluaran yang akan terjadi; dan waktu implementasi rencana tersebut.
ii) Bank menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa Bank akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana.

v. Modal saham

Saham diklasifikasikan sebagai ekuitas karena tidak terdapat kewajiban kontraktual untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

w. Beban emisi

Beban emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

x. Pendapatan dan beban bunga

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam laba rugi tahun berjalan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif. Biaya transaksi meliputi biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi meliputi bunga atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan bunga atas efek-efek untuk tujuan investasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***u. Accruals and provisions** (continued)*

A provision for restructuring costs are recognised only when:
i) the Bank has a detailed formal plan for the restructuring identifying at least the business or part of a business concerned; the principal location affected; the location, function, and approximate number of employees who will be compensated for terminating their services; the expenditures that will be undertaken; and when the plan will be implemented.
ii) the Bank has raised a valid expectation in those affected that it will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected by it.

v. Share capital

Shares are classified as equity as there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

w. Issuance costs

Share issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortised.

x. Interest income and expenses

Policy applicable before 1 January 2020

Interest income and expenses are recognised in the profit or loss for the year using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or liability (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes all fees and points paid or received that are an integral part of the effective interest rate. Transaction costs include incremental costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability.

Interest income and expenses presented in the statement of profit or loss include interest on financial assets and liabilities at amortised cost and interest on investment securities calculated on an effective interest method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

x. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset keuangan diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (Stage 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan Stage 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

y. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif aset keuangan atau liabilitas keuangan dimasukkan ke dalam perhitungan suku bunga efektif.

Provisi dan komisi yang diperoleh atas beragam jasa yang diberikan kepada nasabah umumnya diakui pada saat penyelesaian transaksi. Untuk jasa yang diberikan selama periode waktu tertentu atau periode risiko kredit yang diterima, provisi dan komisi diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktunya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***x. Interest income and expenses** (continued)*

***Policy applicable before 1 January 2020** (continued)*

Interest income on loans or other financial assets that classified as non-performing is recognised at the time the interest is received. When a financial asset is classified as non-performing, any interest income previously recognised but not yet collected is reversed against interest income. The reversed interest income is recognised as a contingent receivable.

Policy applicable from 1 January 2020

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

y. Fees and commissions income and expenses

Fees and commissions income and expenses that are integral to the effective interest rate on a financial asset or liability are included in the measurement of the effective interest rate.

Fees and commissions earned from a range of services rendered to customers are normally recognised upon a completion of a transaction. For services provided over a period of time or credit risk undertaken, fees and commissions are amortised on the straight-line method over the period of the services.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban provisi dan komisi (lanjutan)

Kontrak dengan pelanggan yang menghasilkan pengakuan instrumen keuangan pada laporan keuangan Bank mungkin sebagian dapat merupakan lingkup dari PSAK 72 dan sebagian merupakan lingkup dari Pernyataan lain. Dalam hal dimana kontrak sebagian merupakan lingkup dari Pernyataan lain, maka Bank terlebih dahulu menerapkan pemisahan dan/atau persyaratan pengukuran dari Pernyataan lain tersebut, dan kemudian menerapkan PSAK 72 pada residualnya.

z. Pendapatan bersih instrumen yang diperdagangkan

Pendapatan bersih instrumen yang diperdagangkan terdiri dari laba dikurangi rugi atas aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, dan termasuk perubahan nilai wajar yang sudah ataupun yang belum direalisasi, selisih kurs, serta pendapatan dan beban bunga yang terkait.

aa. Dividen

Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut dideklarasikan dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***y. Fees and commissions income and expenses** (continued)*

A contract with a customer that results in a recognised financial instrument in the Bank's financial statements may fall partially within the scope of SFAS 72 and partially within the scope of another standard. In cases where the contract is partially within scope of another standard, the Bank first applies the separation and/or measurement requirements from that other standard, and then applies SFAS 72 to the residual.

z. Net trading income

Net trading income comprises gains less losses related to financial assets and liabilities held for trading, and includes all realised and unrealised fair value changes, foreign exchange differences, together with the related interest income and expenses.

aa. Dividend

Dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are declared and approved in the General Meeting of the Shareholders.

4. MANAJEMEN RISIKO

a. Pendahuluan dan gambaran umum

Bank memiliki eksposur terhadap risiko-risiko utama sebagai berikut:
- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka manajemen risiko

Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko Bank untuk memastikan bahwa risiko Bank telah dikelola dengan tepat.

Manajemen telah membentuk:
- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- *Assets and Liabilities Committee* (ALCO);
- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Satuan Kerja Manajemen Risiko

4. RISK MANAGEMENT

a. Introduction and overview

The Bank has exposure to the following main risks:
- *Credit risk*
- *Market risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

This note presents information about the Bank's exposure to each of the above risks, the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

Risk management framework

The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Bank's risk management framework to ensure that the Bank's risks are managed in a sound manner.

The Management has established:
- *Audit Committee;*
- *Risk Oversight Committee;*
- *Assets and Liabilities Committee (ALCO);*
- *Risk Management Committee (RMC);*
- *Integrated Risk Management Committee;*
- *Risk Management Working Unit*

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau kebijakan manajemen risiko Bank atas masing-masing areanya. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris, sedangkan ALCO, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Komite Manajemen Risiko melaporkan aktivitas mereka secara berkala kepada Direksi.

Kebijakan manajemen risiko Bank dibentuk untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank, untuk menentukan batasan dan pengendalian risiko yang sesuai dan untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko dikaji secara berkala untuk mencerminkan perubahan pada kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan. Bank melalui berbagai pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang teratur dan konstruktif, dimana seluruh karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab utama antara lain adalah:

(i) melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

(ii) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;

(iii) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Introduction and overview** (continued)*

***Risk management framework** (continued)*

which are responsible for developing and monitoring the Bank's risk management policies in their specified areas. Audit Committee and Risk Oversight Committee report to the Board of Commissioners, while, ALCO, Risk Management Working Unit, and RMC report regularly to the Board of Directors on their activities.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee main responsibilities among others are:

(i) Audit Committee shall be obligated to perform monitoring and evaluation upon the planning and performance of as well as monitoring upon the follow up of result of audit in the framework of assessing the adequacy of internal control, including adequacy of process of financial reporting;

(ii) In the framework of performing the duties as referred to the above paragraph, Audit Committee shall be obligated to perform monitoring and evaluation at least to the:
   a. Performance of duties of internal audit work unit.
   b. Conformity of performance of audit by public accounting firm with audit standards.
   c. Conformity of financial statements with the financial accounting standards.
   d. Performance of follow up by the Board of Directors upon the result of finding of internal audit work unit, public accountant, and result of OJK supervision, in order to provide recommendation to the Board of Commissioners;

(iii) Audit Committee shall be obligated to provide recommendation regarding the appointment of public accountant and public accounting firm to the Board of Commissioners to be submitted to General Meeting of Shareholders.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab utama antara lain adalah:

(i) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.

(ii) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal:
   a. Perihal yang Terkait Risiko
   b. *Risk Appetite*
   c. *Stress Testing*
   d. Kerangka *Enterprise Risk Management* dan Sistem Pengendalian Intern
   e. Direktur Manajemen Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko
   f. Audit Intern
   g. Audit Ekstern
   h. Laporan Tahunan

ALCO merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan dalam mengelola aset, liabilitas dan modal sedemikian rupa dengan memperhatikan risiko terkait untuk tujuan penggunaan secara efisien dan optimum. Tujuan utama dari ALCO adalah:

(i) memberikan arahan dan meyakinkan penerapan strategi untuk mengelola komposisi posisi keuangan dan struktur pendanaan Bank pada kondisi normal dan *stress*;

(ii) memonitor risiko-risiko dan pengaruh dari kondisi pasar;

(iii) menyediakan sarana untuk mendiskusikan masalah ALCO;

(iv) memfasilitasi kerjasama antara bisnis/departemen yang berbeda;

(v) menyelesaikan isu antar departemen seperti *transfer pricing* dan alokasi sumber daya;

(vi) menelaah sumber dan alokasi pendanaan secara keseluruhan;

(vii) melakukan perencanaan ke depan dan menentukan lingkungan perbankan yang paling sesuai untuk perencanaan aset/liabilitas di masa depan dan menelaah skenario kontinjensi; dan

(viii) mengevaluasi skenario alternatif tingkat suku bunga, harga dan kombinasi portofolio; menelaah distribusi aset/liabilitas dan jatuh temponya.

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tanggung jawab mencakup, di antaranya adalah:

(i) Untuk mempertimbangkan materi terkait manajemen risiko, yang mencakup isu utama dan tema umum yang diidentifikasi dari berbagai pelaporan risiko *enterprise*;

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Introduction and overview** (continued)*

***Risk management framework** (continued)*

The Rsk Oversight Committee has main responibilities among others are:

(i) Evaluation to the conformity between policy on risk management and implementation of policies of the Bank.

(ii) Monitoring and evaluation to the performance of duties of risk management committee and risk management work unit in order to provide recommendation to the Board of Commissioners on:
   a. Risk-Related Matter
   b. Risk Appetite
   c. Stress Testing
   d. Enterprise Risk Management Framework and Internal Control System
   e. Risk Management Director and Risk Management Function
   f. Internal Audit
   g. External Audit
   h. Annual Report

The ALCO is the primary vehicle for achieving the objectives of managing assets, liabilities and capital with the consideration of related risks for the purpose of efficient and optimum utilisation. The main purposes of the ALCO are to:

(i) provide direction and ensure tactical follow-through to manage the Bank's balance sheet composition and funding structure under normal and stressed conditions;

(ii) monitor the risks and market influences;

(iii) provide a forum for discussing ALCO issues;

(iv) facilitate teamwork between different businesses/departments;

(v) resolve departmental inter-face issues such as transfer pricing and resource allocation;

(vi) review overall sourcing and allocation of funding;

(vii) plan and determine the most appropriate banking environment for asset/liability forward planning and review contingency scenarios; and

(viii) evaluate alternative rate, pricing and portfolio mix scenarios; review asset/liability distributions and maturities.

The Risk Management Committee is established with having, among others, the following responsibilities:

(i) To consider Risk Management papers, which includes key issues and common themes identified across the enterprise risk reports;

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Komite Manajemen Risiko dibentuk dengan tanggung jawab mencakup, di antaranya adalah: (lanjutan)

(ii) Untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi: a.)penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko beserta perubahannya, b.) perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi, c.) penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dengan deviasi dari prosedur normal;
(iii) Untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang relevan dan informasi terkini terkait isu dan risiko utama Bank juga di seluruh 3 lini pertahanan;
(iv) Mempromosikan dan menurunkan budaya yang mendukung manajemen risiko dan pengendalian, dan juga memastikan praktik manajemen risiko bank mendukung hasil berperilaku.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko yang mencakup:

(i) pengawasan aktif dan manajemen proaktif dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi terhadap profil risiko Bank dan eksposurnya melalui rapat komite secara berkala;
(ii) penetapan kebijakan dan prosedur dan limit risiko termasuk penelaahan berkala ;

(iii) pengimplementasian kerangka kerja manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian risiko untuk menjaga tingkat kerugian risiko Bank berada dalam batasan toleransi dan untuk menjaga Bank dari kemungkinan kerugian yang dapat terjadi; dan
(iv) pengembangan budaya kesadaran risiko dan pengendalian pada seluruh jenjang organisasi melalui komunikasi yang memadai mengenai pentingnya pengendalian internal yang efektif.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Bank. Risiko kredit Bank terutama berasal dari kredit yang diberikan kepada nasabah.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Introduction and overview** (continued)*

***Risk management framework** (continued)*

The Risk Management Committee is established with having, among others, the following responsibilities: (continued)

(ii) To perform assessment and provide recommendation to the BOD with respect to risk management which at least covering: a.)formulation of risk management policy, strategy, and guidance with its amendments, b.) enhancement or improvement of risk management implementation based on evaluation, c.) establish guidelines related to business decisions which deviate from normal procedures;
(iii) To consider relevant reports and updates pertaining to the key risks and issues across the Bank and across all the three lines of defence;
(iv) To promote and cascade supportive culture in relation to risk management and controls as well as to ensure bank's risk management practices support the conduct outcomes.

The Bank's Risk Management Working Unit is responsible for applying risk management which comprises:

(i) active oversight and pro-active management from Board of Commissioners and/or Directors over Bank's risk profiles and its exposures through regular committee meetings;
(ii) establishment of risk policies and procedures and risk appetite including its regular reviews ;
(iii) implementation of risk management framework that comprises the identification, assessment, monitoring, and mitigation of risk so as to maintain losses within acceptable levels and to protect the Bank from foreseeable future losses; and

(iv) development of risk and control awareness culture in all organisational level, through adequate communication regarding the importance of effective internal controls.

b. Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank's customers, clients or counterparties fail to fulfil their contractual obligations to the Bank. Credit risk in the Bank mainly arises from loans to customers.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan mengenai kewenangan persetujuan kredit.
- Menerbitkan laporan pengendalian risiko, yang memungkinkan Bank untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah awal atas timbulnya tanda peringatan awal.
- Melaksanakan fungsi pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui pertemuan membahas risiko secara berkala.
- Fungsi persetujuan kredit dijalankan secara independen dari bagian bisnis dalam melakukan penelaahan dan pengambilan keputusan.
- Pembentukan unit khusus untuk melakukan fungsi penilaian kualitas kredit untuk memastikan bahwa deviasi di dalam proses pemberian kredit bisa diidentifikasi lebih awal.

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian

Umur Aset Keuangan

Kerugian kredit ekspektasian diestimasikan berdasarkan periode dimana Bank terpapar pada risiko kredit. Untuk produk non-revolving, hal ini sama dengan periode kontrak. Untuk produk *revolving*, Bank tidak mengikuti periode kontrak, yang dapat sesingkat satu hari. Oleh karena itu, periode dimana Bank terpapar pada risiko kredit untuk instrumen ini adalah berdasarkan *behavioural life*, yang menggabungkan ekspektasi perilaku nasabah dan/atau sejauh mana tindakan manajemen risiko kredit membatasi periode paparan tersebut. Produk revolving memiliki 12-60 bulan *lifetime* tergantung pada jenis produk.

Variabel Makro Ekonomi ("MEV")

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah Bank untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

The risk management applied by the Bank are as follows:

- *Establishing policies on credit approval authority.*
- *Issuing risk control reports which allow the Bank to identify and take an early action on potential warning signs.*
- *Performing oversight function by Directors and Board of Commissioners through regular risk meetings.*
- *The credit approval function acts independently from business in its review and giving its decision.*
- *Establishment of a team to conduct the credit quality assessment to ensure that deviations in the credit initiation process can be identified at an early stage.*

Key assumptions and judgments in determining expected credit loss

Lifetime of Financial Assets

Expected credit loss is estimated based on the period over which the Bank is exposed to credit risk. For non-revolving product, this equates to the contractual period. For revolving product, the Bank does not follow the contractual period, which can be as short as one day. Therefore, the period over which the Bank is exposed to credit risk for these instruments is based on their behavioural life, which incorporates expectations of customer behaviour and/or the extent to which credit risk management actions curtails the period of that exposure. Revolving products have 12-60 month lifetime, depend on the type of product.

Macro Economic Variable ("MEV")

The developing economic environment is the key determinant of the ability of a Bank's customers to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of SFAS 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Bank was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Bank should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Variabel Makro Ekonomi ("MEV") (lanjutan)

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi forward looking dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali debitur Bank.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Diantaranya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB"), angka pengangguran, pertumbuhan upah, indeks harga rumah, tingkat konsumsi, *fixed investment*, indeks harga saham, dan ekspor.

Bank menggunakan metode pemodelan regresi untuk memproyeksikan hubungan MEV dan tingkat gagal bayar di masa depan. Bank menggunakan 3 skenario MEV, yaitu *upside*, *central*, dan *downside*, namun demikian skenario ekonomi dapat disesuaikan apabila terdapat kondisi yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara signifikan. Dalam hal ini di 2020, Bank menambahkan 1 skenario lagi yaitu *u-shape* karena adanya situasi pandemi yang disebabkan oleh COVID-19, Bank akan memperkirakan proyeksi MEV untuk setiap skenario tersebut dan memberikan bobot pada skenario tersebut dalam perhitungan kerugian kredit ekspektasian. Semua proyeksi diperbarui setiap tiga bulan.

Sensitivitas MEV terhadap ECL

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ("ECL") bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Bank berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, bukan hanya variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

Dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian, Bank telah menggunakan MEV yang terkini, termasuk mempertimbangkan dampak COVID-19 dan berbagai informasi yang relevan termasuk arahan regulator.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

***Key assumptions and judgments in determining expected credit loss** (continued)*

***Macro Economic Variable ("MEV")** (continued)*

To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forward-looking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the Bank's debtors.

Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. Amongst others are Gross Domestic Product ("GDP") growth, unemployment rate, wage growth, house price index, private consumption, fixed investment, stock market index, and export.

The Bank uses regression modeling method to forecast the relationship between MEV and the NPL in the future. The Bank uses 3 MEV scearios, i.e. upside, central, and downside, however the economic scenario can be adjusted if there are conditions that significantly impacting the economic situation. In this case in 2020, the Bank added one more scenario which is "u-shape" scenario due to pandemic situation caused by COVID-19. The Bank will estimate the MEV projection for each of these scenarios and give weighting to these scenarios in calculating the expected credit loss. All projections are updated on a quarterly basis.

Sensitivity of MEV to ECL

The Expected Credit Loss ("ECL") calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Bank believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.

In determining the expected credit loss, the Bank has implemented the updated MEV, including considering the impact of COVID-19 and various relevant information including direction from the regulator.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi dan *irrevocable letter of credit (*L/C) yang diterbitkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi dan *irrevocable* L/C yang diterbitkan terjadi. Untuk komitmen kredit, ekposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas kredit komitmen (*committed*) yang belum digunakan oleh nasabah.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lainnya.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognised on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For bank guarantees and irrevocable letter of credit (L/C) issued, the maximum exposure to credit risk is the amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees and irrevocable L/C issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the unused committed credit facilities granted to customers.

The following table presents the Bank's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the statement of financial position and off-balance sheet accounts net after allowance for impairment losses, without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

	2020	2019	
Laporan posisi keuangan:			***Statement of financial position:***
Giro pada Bank Indonesia	4.252.139	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	3.740.633	2.261.135	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1.152.313	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	10.653.939	7.696.511	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	17.860.822	14.418.802	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	1.217.717	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	671.498	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.292.848	464.945	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel ekspor	921.585	1.434.664	*Export bills*
Tagihan akseptasi	2.021.659	2.601.928	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	55.334.586	65.533.877	*Loans to customers*
Aset lain-lain - pendapatan yang masih akan diterima	639.325	558.313	*Other assets - accrued income*
	107.759.064	107.142.938	
Rekening administratif dengan risiko kredit:			***Off-balance sheet accounts with credit risk:***
L/C yang tidak dapat dibatalkan	2.050.678	2.332.307	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	9.611.269	4.242.629	*Unused credit facilities - committed*
Bank garansi yang diterbitkan	7.908.442	9.294.264	*Bank guarantees issued*
	19.570.389	15.869.200	
Jumlah	127.329.453	123.012.138	***Total***

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit

Sejak tahun 2017, peringkat kualitas kredit ditentukan berdasarkan estimasi internal Bank atas kemungkinan gagal bayar selama setahun dari debitur-debitur atau portofolio tertentu yang dinilai berdasarkan sejumlah faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif.

ii. Distribution of financial assets by their credit quality

Since 2017, the grading of credit quality is determined based on the Bank's internal estimate of probability of default over a one-year horizon, from debtors or portfolios assessed against a range of quantitative and qualitative factors.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Perbaikan peringkat dari yang mengalami penurunan nilai menjadi tidak mengalami penurunan nilai baru dapat dilakukan apabila debitur telah menunjukkan kepastian pemulihan dan kembali ke kondisi normal.

Lima klasifikasi kualitas kredit yang dinyatakan di bawah ini mencakup peringkat kredit internal yang lebih terperinci yang diterapkan pada pinjaman korporasi dan bisnis ritel, termasuk peringkat eksternal yang diterapkan oleh agensi eksternal untuk efek utang.

Peringkat ditentukan berdasarkan estimasi internal Bank atas kemungkinan gagal bayar selama setahun dari debitur-debitur atau portofolio tertentu yang dinilai berdasarkan sejumlah faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

ii. Distribution of financial assets by their credit quality (continued)

Improvement in the grading from impaired to not-impaired can only be made if debtors have shown evidence of recovery and have returned to normal condition.

The five credit quality classifications defined below encompass a range of more granular, internal credit rating grades assigned to wholesale and retail lending business, as well as the external ratings attributed by external agencies to debt securities.

The grading is based on the Bank's internal estimate of probability of default over a one-year horizon, with customers or portfolios assessed against a range of quantitative and qualitative factors.

Klasifikasi kualitas/ ***Quality classification***	**Kredit non-ritel/** ***Non-retail lending[1)]***	**Kredit ritel/** ***Retail lending[2)]***	**Efek-efek utang dan tagihan lain/** ***Debt securities and other bills***
Lancar/*Strong*	CRR 1 - CRR 2	Tunggakan/ Deliquency 0 (Zero DPD)	A- ke atas/*A- and above*
Baik/*Good*	CRR 3	Tunggakan/ Deliquency 1 (1 - 29 DPD)	BBB+ sampai dengan BBB-/ *BBB+ to BBB-*
Cukup/*Satisfactory*	CRR 4 - CRR 5	Tunggakan/ Deliquency 2 (30-59 DPD)	BB+ sampai dengan B, dan tanpa peringkat/ *BB+ to B, and without rating*
Kurang Lancar/*Sub-standard*	CRR 6 - CRR 8	Tunggakan/ Deliquency 3 (60 - 89 DPD)	B- sampai dengan C/ *B-to C*
Penurunan nilai/*Impaired*	CRR 9 - CRR 10	Tunggakan/ Deliquency >= 4 (> 90 DPD)	Gagal bayar/*Default*

[1)] CRR: *Customer Risk Rating*
[2)] Band Internal berdasarkan *bucket* tunggakan dalam jumlah hari tunggakan/
Internal Band based on delinquency bucket where it's driven by Day Past Due (DPD).

Definisi dari kualitas kredit Bank adalah sebagai berikut:

- Lancar: eksposur kredit memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan dengan kemungkinan gagal dan/atau tingkat ekspektasi kerugian yang rendah. Rekening kredit ritel bergerak sesuai pada parameter produknya dan hanya sesekali menunjukkan keterlambatan pembayaran.

- Baik: eksposur kredit memerlukan pengawasan yang lebih dekat dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi komitmen keuangan dengan risiko gagal bayar yang rendah. Rekening kredit ritel umumnya hanya menunjukan tingkat keterlambatan pembayaran yang pendek dengan kerugian, jika ada, dapat diminimalisasi setelah penerapan proses pemulihan.

The Bank's credit quality definitions are as follows:

- *Strong: credit exposures demonstrate a strong capacity to meet financial commitments, with negligible or low probability of default and/or low levels of expected loss. Retail accounts operate within product parameters and only exceptionally show any period of delinquency.*

- *Good: credit exposures require closer monitoring and demonstrate a good capacity to meet financial commitments, with low default risk. Retail accounts typically show only short periods of delinquency, with any losses, if any, expected to be minimal following the adoption of recovery processes.*

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Definisi dari kualitas kredit Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Cukup: eksposur kredit memerlukan pengawasan yang lebih melekat dan menunjukkan kemampuan menengah untuk memenuhi komitmen keuangan dengan tingkat risiko gagal yang moderat. Rekening kredit ritel umumnya hanya menunjukkan tingkat keterlambatan pembayaran yang pendek, dimana kerugian yang terjadi, jika ada, diharapkan kecil setelah penerapan proses pemulihan.

- Kurang Lancar: eksposur kredit memerlukan perhatian khusus dengan tingkat yang bervariasi dan risiko gagal bayar yang meningkat. Rekening kredit ritel menunjukkan ekspektasi kerugian yang lebih tinggi disebabkan oleh menurunnya kemampuan untuk memitigasi risiko tersebut melalui realisasi agunan atau proses pemulihan lainnya.

- Penurunan nilai: eksposur kredit telah dievaluasi sebagai kredit bermasalah. Eksposur - eksposur ini adalah dimana Bank mempertimbangkan bahwa nasabah tidak lagi mempunyai kemampuan membayar seluruh kewajiban kreditnya tanpa merealisasi agunan, jika ada, atau untuk nasabah ritel, pembayaran kewajiban kredit yang material telah terlambat lebih dari 90 hari.

Customer Risk rating (CRR) dengan 10 skala peringkat di atas merupakan ringkasan dan 23 skala peringkat yang lebih terperinci atas probabilitas gagal bayar dari debitur.

Setiap peringkat CRR dikaitkan dengan peringkat eksternal dengan mengacu pada tingkat gagal bayar jangka panjang untuk peringkat tersebut, diwakili oleh rata-rata gagal bayar historis tertimbang. Pemetaan antara penilaian internal dan eksternal merupakan indikasi dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu.

Untuk efek-efek utang dan instrumen keuangan tertentu lainnya, peringkat eksternal telah diselaraskan dengan lima klasifikasi kualitas berdasarkan pemetaan CRR terkait dengan peringkat kredit eksternal.

Untuk kebijakan akuntansi tentang penurunan nilai asset keuangan, lihat Note 3p.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

ii. Distribution of financial assets by their credit quality (continued)

The Bank's credit quality definitions are as follows: (continued)

- *Satisfactory: credit exposures require closer monitoring and demonstrate an average to fair capacity to meet financial commitments, with moderate default risk. Retail accounts typically show only short periods of delinquency, with any losses expected, if any, to be minor following the adoption of recovery processes.*

- *Sub-standard: credit exposures require varying degrees of special attention and increased default risk. Retail accounts show higher expected loss due to a reduced ability to mitigate the risk through collateral realisation or other recovery processes.*

- *Impaired: credit exposures have been assessed as troubled accounts. These are exposures where the Bank considers that either the customer is unlikely to pay its credit obligations in full, without foreclosing the collaterals, if any, or for retail customer is past due more than 90 days on any material credit obligation.*

The Customer Credit Risk Rating (CRR) 10-grade scale summaries a more granular underlying 23-grade scale of obligor probability of default (PD).

Each CRR grade is associated with an external rating grade by referring to long-run default rates for that grade, represented by average of issuer-weighted historical default rates. This mapping between internal and external rating is indicative and may vary over time.

For debt securities and certain other financial instruments, external ratings have been aligned to the five quality classifications based upon the mapping of related CRR to external credit grade.

For details of our impairment policies on financial assets, see Note 3p.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Pembagian aset keuangan berdasarkan staging sesuai PSAK 71 dan kualitas kreditnya pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan di bawah ini:

***4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

ii. Distribution of financial assets by credit quality (continued)

Distribution of financial assets by staging based on SFAS 71 and their credit quality as of 31 December 2020 is summarised as below:

	2020													
	Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	Giro pada bank-bank lain/ *Demand deposits with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	Penempatan pada bank-bank lain/ *Placements with other banks*	Efek-efek untuk tujuan investasi/ *Investment securities*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for trading*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased with agreement to resell*	Wesel ekspor/ *Export bills*	Tagihan akseptasi / *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan kepada nasabah/ *Loans to customers*	Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima/ *Other assets – accrued income*	Jumlah/ *Total*	
Aset pada biaya perolehan diamortisasi														***Assets at amortised cost***
Stage 1														*Stage 1*
Lancar	4.252.139	3.673.820	1.152.313	10.519.314	-	-	-	9.292.848	94.273	274.927	9.575.250	19.477	38.854.361	*Strong*
Baik	-	8.219	-	135.000	-	-	-	-	260.033	217.435	14.185.198	423.810	15.229.695	*Good*
Memuaskan	-	317	-	-	-	-	-	-	425.668	480.363	15.580.773	137.730	16.624.851	*Satisfactory*
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	50.955	3.493	222.387	3.819	280.654	*Sub-standard*
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Impaired financial assets*
Retail - berdasarkan jumlah hari jatuh tempo														***Retail - based on day(s) past due***
0 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.566.533	-	3.566.533	*0 day*
1-89 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.746	-	51.746	*From 1 day to 89 days*
> 90 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.991	-	11.991	*More than 90 days*
	4.252.139	3.682.356	1.152.313	10.654.314	-	-	-	9.292.848	830.929	976.218	43.193.878	584.836	74.619.831	
Stage 2														*Stage 2*
Lancar	-	920	-	-	-	-	-	-	-	108.237	257.414	345	366.916	*Strong*
Baik	-	57.464	-	-	-	-	-	-	21.478	319.234	1.474.586	3.842	1.876.604	*Good*
Memuaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	18.097	281.473	6.584.767	21.646	6.905.983	*Satisfactory*
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	513	339.319	2.642.227	25.125	3.007.184	*Sub-standard*
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Impaired financial assets*
Retail - berdasarkan jumlah hari jatuh tempo														***Retail - based on day(s) past due***
0 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964.521	-	964.521	*0 day*
1-89 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.954	-	131.954	*From 1 day to 89 days*
> 90 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121	-	25.121	*More than 90 days*
	-	58.384	-	-	-	-	-	-	40.088	1.048.263	12.080.590	50.958	13.278.283	

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Pembagian aset keuangan berdasarkan staging sesuai PSAK 71 dan kualitas kreditnya pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan di bawah ini: (lanjutan)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

ii. Distribution of financial assets by credit quality (continued)

Distribution of financial assets by staging based on SFAS 71 and their credit quality as of 31 December 2020 is summarised as below: (continued)

2020 (lanjutan/*continued*)

	Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	Giro pada bank-bank lain/ *Demand deposits with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	Penempatan pada bank-bank lain/ *Placements with other banks*	Efek-efek untuk tujuan investasi/ *Investment securities*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for trading*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali / *Securities purchased with agreement to resell*	Wesel ekspor/ *Export bills*	Tagihan akseptasi / *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan kepada nasabah/ *Loans to customers*	Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima/ *Other assets – accrued income*	Jumlah/ *Total*	
Stage 3														*Stage 3*
Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Strong*
Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Good*
Memuaskan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694	2.694	*Satisfactory*
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Sub-standard*
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	57.411	22.576	2.918.908	837	2.999.732	*Impaired financial assets*
Retail - berdasarkan jumlah hari jatuh tempo														***Retail - based on day(s) past due***
0 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.990	-	93.990	*0 day*
1-89 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.495	-	17.495	*From 1 day to 89 days*
> 90 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.310	-	89.310	*More than 90 days*
	-	-	-	-	-	-	-	-	57.411	22.576	3.119.703	3.531	3.203.221	
	4.252.139	3.740.740	1.152.313	10.654.314	-	-	-	9.292.848	928.428	2.047.057	58.394.171	639.325	91.101.335	
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai														*Less: allowance for impairment losses*
Stage 1	-	(105)	-	(375)	-	-	-	-	(6.442)	(12.112)	(310.774)	-	(329.808)	*Stage 1*
Stage 2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	(401)	(13.006)	(695.975)	-	(709.384)	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(280)	(2.052.836)	-	(2.053.116)	*Stage 3*
	-	(107)	-	(375)	-	-	-	-	(6.843)	(25.398)	(3.059.585)	-	(3.092.308)	
Jumlah nilai tercatat - biaya perolehan diamortisasi	4.252.139	3.740.633	1.152.313	10.653.939	-	-	-	9.292.848	921.585	2.021.659	55.334.586	639.325	88.009.027	*Carrying amount - amortised cost*
Aset pada nilai wajar														*Asset at fair value*
Stage 1	-	-	-	-	17.860.822	1.217.717	601.919	-	-	-	-	-	19.680.458	*Stage 1*
Stage 2	-	-	-	-	-	-	69.570	-	-	-	-	-	69.570	*Stage 2*
Stage 3	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	*Stage 3*
Jumlah nilai tercatat - nilai wajar	-	-	-	-	17.860.822	1.217.717	671.498	-	-	-	-	-	19.750.037	*Carrying amount - fair value*
Jumlah asset keuangan	4.252.139	3.740.633	1.152.313	10.653.939	17.860.822	1.217.717	671.498	9.292.848	921.585	2.021.659	55.334.586	639.325	107.759.064	*Total Financial Assets*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sesuai PSAK 55:

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Distribution of financial assets by credit quality (continued)

The following table presents the impaired financial assets, past due but not impaired financial assets and neither past due nor impaired financial assets in accordance with on SFAS 55:

	2019													
	Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	Giro pada bank-bank lain/ *Demand deposits with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	Penempatan pada bank-bank lain/ *Placements with other banks*	Efek-efek untuk tujuan investasi/ *Investment securities*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for trading*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased with agreement to resell*	Wesel ekspor/ *Export bills*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih/ *Loans to customers - net*	Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima/ *Other assets – accrued income*	Jumlah/ *Total*	
Aset pada biaya perolehan diamortisasi														***Assets at amortised cost***
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.971	2.693.967	177	2.696.115	*Impaired financial assets*
Aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:														*Past due but not impaired financial assets:*
Sampai dengan 29 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.922	-	6.922	*Up to 29 days*
Dari 30 hari sampai dengan 59 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.536	-	82.536	*From 30 days to 59 days*
Dari 60 hari sampai dengan 89 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.993	-	243.993	*From 60 days to 89 days*
Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:														*Neither past due nor impaired financial assets:*
Lancar	4.268.814	2.246.859	1.488.506	7.696.511	-	-	-	464.945	258.940	76.392	15.698.128	322.513	32.521.608	*Strong*
Baik	3.074.974	217	-	-	-	-	-	-	786.485	1.217.928	19.645.741	79.033	24.804.378	*Good*
Cukup	-	14.059	-	-	-	-	-	-	385.241	960.030	26.952.992	142.371	28.454.693	*Satisfactory*
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	3.998	345.607	2.332.781	14.219	2.696.605	*Sub-standard*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.123.183)	-	(2.123.183)	*Less: allowance for impairment losses*
Jumlah nilai tercatat - biaya perolehan diamortisasi	7.343.788	2.261.135	1.488.506	7.696.511	-	-	-	464.945	1.434.664	2.601.928	65.533.877	558.313	89.383.667	*Carrying amount - amortised cost*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai serta aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sesuai PSAK 55: (lanjutan)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

b. Credit risk *(continued)*

ii. Distribution of financial assets by credit quality (continued)

The following table presents the impaired financial assets, past due but not impaired financial assets and neither past due nor impaired financial assets in accordance with on SFAS 55: **(continued)**

2019 (lanjutan/*continued*)

	Giro pada Bank Indonesia/ *Demand deposits with Bank Indonesia*	Giro pada bank-bank lain/ *Demand deposits with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placements with Bank Indonesia*	Penempatan pada bank-bank lain/ *Placements with other banks*	Efek-efek untuk tujuan investasi/ *Investment securities*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for trading*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased with agreement to resell*	Wesel ekspor/ *Export bills*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih/ *Loans to customers - net*	Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima/ *Other assets – accrued income*	Jumlah/ *Total*	
Aset pada nilai wajar														***Assets at fair value***
Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:														*Neither past due nor impaired financial assets:*
Lancar	-	-	-	-	14.418.802	2.863.738	359.383	-	-	-	-	-	17.641.923	*Strong*
Baik	-	-	-	-	-	-	34.667	-	-	-	-	-	34.667	*Good*
Cukup	-	-	-	-	-	-	82.592	-	-	-	-	-	82.592	*Satisfactory*
Kurang lancar	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	89	*Sub-standard*
Jumlah nilai tercatat - nilai wajar	-	-	-	-	14.418.802	2.863.738	476.731	-	-	-	-	-	17.759.271	*Carrying amount - fair value*
Jumlah nilai tercatat	7.343.788	2.261.135	1.488.506	7.696.511	14.418.802	2.863.738	476.731	464.945	1.434.664	2.601.928	65.533.877	558.313	107.142.938	*Total carrying amount*

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Pembagian aset keuangan berdasarkan kualitas kredit (lanjutan)

Eksposur yang telah ditentukan sebagai telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai disajikan pada tabel di atas dalam klasifikasi terpisah sebagai "Aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai". Contoh-contoh eksposur yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai termasuk pinjaman yang terlambat melakukan pembayaran terakhir saat jatuh tempo tetapi tidak terdapat bukti adanya penurunan nilai; pinjaman korporasi yang sepenuhnya dijamin dengan agunan kas; fasilitas perdagangan jangka pendek yang telah jatuh tempo karena alasan-alasan teknis seperti keterlambatan dokumentasi, tetapi tidak merupakan sebuah kekhawatiran atas kemampuan membayar debitur.

iii. Agunan

Agunan digunakan untuk memitigasi eksposur risiko kredit. Kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang dapat diterima. Umumnya jenis agunan yang diterima Bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah kas, giro, tabungan, deposito berjangka, rumah tinggal, properti komersial dan industri, garansi bank dan *letters of credit*. Untuk jenis pembiayaan tertentu, umumnya kredit pemilikan rumah dan pembiayaan aset, adanya hak untuk mengambil alih aset fisik merupakan hal penting dalam penentuan harga dan pemulihan yang dapat diperoleh dalam hal terjadi kegagalan pembayaran kredit.

Agunan dilaporkan sesuai dengan kebijakan mitigasi risiko Bank. Jika diperlukan, nilai agunan disesuaikan guna mencerminkan kondisi pasar terkini, probabilitas pemulihan agunan dan jangka waktu untuk merealisasikan agunan dalam hal terjadi pengambilalihan.

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, di mana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap kredit yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Bank menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

Agunan non-fisik, seperti garansi korporasi dan *letters of comfort* dapat juga dimiliki Bank untuk eksposur korporasi meskipun dampak keuangan untuk jenis agunan ini kurang signifikan dalam hal pemulihan kredit.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

ii. Distribution of financial assets by credit quality (continued)

Exposure designated as past due but not impaired are disclosed in the above table in a separate classification as "Past due but not impaired financial assets". Examples of exposure designated as past due but not impaired include loans that have missed the most recent payment date but on which there is no evidence of impairment; corporate loans fully secured by cash collateral; short-term trade facilities past due for technical reasons such as delays in documentation, but where there is no concern over the creditworthiness of the debtor.

iii. Collaterals

Collateral is held to mitigate credit risk exposures. Risk mitigation policies determine the eligibility of collateral types. Typically the Bank uses cash, current accounts, saving accounts, time deposits, residential, commercial and industrial property, bank guarantee, and letters of credit as eligible collateral to mitigate credit risk. For certain types of lending, typically mortgages and asset financing, the right to repossess the assets is critical in determining appropriate pricing and recoverability in the event of default.

Collateral is reported in accordance with the Bank's risk mitigation policy. Where appropriate, collateral values are adjusted to reflect current market conditions, its probability of recovery and the period of time to realize the collateral in the event of repossession.

The requirement for collateral is not a substitute factor for the debtor's ability to pay, which is the primary consideration for any lending decisions. In determining the financial effect of collateral held against loans that are neither past due nor impaired, the Bank assessed the significance of the collateral held in relation to the type of lending.

Non-tangible collateral, such as corporate guarantees and letters of comfort, may also be held against Bank corporate exposures although the financial effect of this type of collateral is less significant in terms of recoveries.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Agunan (lanjutan)

Untuk jenis eksposur tertentu seperti L/C dan garansi, Bank juga memperoleh agunan seperti kas yang terkait dengan penilaian internal risiko kredit untuk eksposur tersebut. Selain itu, untuk produk *trade finance* seperti *letters of credit*, dalam hal terjadi gagal bayar Bank juga memiliki hak hukum atas aset yang mendasarinya.

Tergantung dari peringkat kredit nasabah dan tipe produk, fasilitas kredit dapat diberikan tanpa agunan. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, derivatif, efek-efek untuk tujuan investasi dari sektor pemerintah, dan pinjaman ritel lainnya yang terdiri dari pinjaman perseorangan, cerukan dan kartu kredit, semuanya adalah pinjaman tanpa agunan. Tetapi untuk pinjaman lainnya agunan umumnya diperlukan dan diperhitungkan dalam menentukan keputusan kredit dan harga.

Dalam hal terjadi kegagalan bayar, Bank dapat menggunakan agunan sebagai sumber pembayaran kembali. Tergantung dari fasilitas kreditnya, agunan dapat memberikan dampak keuangan yang signifikan dalam memitigasi eksposur risiko kredit.

Kredit properti

Khusus untuk Kredit Pemilikan Rumah, Bank wajib menjaga rasio *Loan to Value* (LTV). Rasio LTV dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto dari kredit dan, jika ada, komitmen fasilitas kredit rekening administratif, terhadap nilai agunan. Metodologi untuk memperoleh nilai agunan properti pada umumnya ditentukan melalui kombinasi dari hasil jasa penilai profesional, indeks harga properti atau analisa statistik. Nilai properti harus sering dipantau, minimal setiap tahun untuk komersial dan setiap dua tahun untuk perumahan. Frekuensi penilaian dilakukan lebih sering jika kondisi pasar atau kinerja portofolio mengalami perubahan yang signifikan atau ketika terdapat kredit yang teridentifikasi dan dinyatakan sebagai bermasalah.

Bank mematuhi rasio LTV kredit properti sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia yang terakhir berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.22/21/PADG/2020 tentang rasio *Loan to Value* untuk kredit properti, rasio *Financing to Value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka).

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

iii. Collaterals (continued)

For certain types of exposures such as L/C and guarantees, the Bank also obtains collateral such as cash depending on internal credit risk assessments. In addition, for trade finance products such as letters of credit, the Bank will also hold legal title on the underlying assets should a default take place.

Depending on the customer's credit rating and the type of product, facilities may be provided unsecured. Placements with Bank Indonesia and other banks, derivatives, investment securities from government sectors, and other retail lending which consist primarily of personal lending, overdrafts and credit cards are all unsecured loans. However, for other lending a charge over collateral is normally obtained and considered in determining the credit decision and pricing.

In the event of default, the Bank may utilize the collateral as a source of repayment. Depending on its credit facility, collateral can have a significant financial effect in mitigating exposure to credit risk.

Mortgage lending

Specifically for mortgages, the Bank is required to maintain a Loan to Value (LTV) ratio. The LTV ratio is calculated as the gross on-balance sheet carrying amount of the loans and any off-balance sheet loan commitment at the balance sheet date divided by the value of collateral. The methodologies for obtaining property collateral values are typically determined through a combination of professional appraisals, property price indices or statistical analysis. Property values should be monitored on a frequent basis, at a minimum of yearly for commercial and every two years for residential. Valuations are conducted more frequently when market conditions or portfolio performance are subject to significant change or when a loan is identified and assessed as impaired.

Bank complies with LTV ratio for mortgage lending as governed by Bank Indonesia regulation which the prevailing regulation is the Governor Members Regulation No.22/21/PADG/2020 regarding Loan to Value ratio for mortgage lending, Financing to Value ratio for property lending and down payment for motor vehicle financing or lending (PADG LTV/FTV and Down Payment).

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Agunan (lanjutan)

Kredit korporasi

Pinjaman kepada nasabah korporasi ditentukan atas dasar evaluasi kredit dan pengujian penurunan nilai secara individual. Secara umum kemampuan membayar nasabah korporasi merupakan indikasi yang paling relevan terhadap kualitas kredit dari pinjaman yang diberikan dan merupakan pertimbangan yang utama dalam pengambilan keputusan pemberian kredit korporasi. Namun, agunan merupakan jaminan tambahan dan Bank dapat meminta nasabah korporasi untuk menyediakan agunan. Jenis-jenis agunan yang pada umumnya disyaratkan pada kredit korporasi dapat berupa hak tanggungan pertama atas properti, aset-aset korporasi dengan nilai dan kuantitas bergerak serta jaminan dan garansi lainnya.

Dalam aktivitas pembiayaan terhadap kredit korporasi, nilai agunan tidak berkorelasi langsung terhadap kemampuan membayar nasabah korporasi. Terlebih lagi, untuk beberapa jenis agunan yang umum dijaminkan pada kredit korporasi, seperti jaminan garansi korporasi, letters of comfort dan aset-aset korporasi dengan nilai dan kuantitas bergerak dimana nilai atas agunan tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti.

Ketika kemampuan membayar nasabah korporasi memburuk dan perlu dilakukan evaluasi atas kemampuan pembayaran kembali melalui sumber jaminan lain yang tersedia, penilaian agunan secara umum akan dilakukan dengan frekuensi yang lebih sering. Ketika terdapat kredit korporasi yang teridentifikasi dan dinyatakan sebagai bermasalah, pengkinian nilai agunan kredit bermasalah tersebut dilakukan sedikitnya setiap 3 bulan, kecuali ditentukan lain oleh direktur yang berwenang.

iv. Analisa konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah nasabah menjalankan kegiatan usaha yang sejenis atau menjalankan kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika nasabah memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya secara serupa dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau kondisi lainnya.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

iii. Collaterals (continued)

Corporate lending

Loans and advances to corporate customers are subject to individual credit assessment and impairment testing. General creditworthiness of a corporate customer tends to be the most relevant indicator of credit quality of the loan extended and is the primary consideration for any corporate lending decisions. Collateral however provides additional security and the Bank may request corporate customers to provide collateral. Types of collateral which are commonly taken for corporate lending may be in the form of a first charge of real estate, floating charges over corporate assets and other liens and guarantees.

For financing activities in corporate lending, collateral value is not directly correlated with principal repayment performance. Moreover, for some types of collateral commonly taken in corporate lending, such as corporate guarantees, letters of comfort and floating charges over corporate assets, the assignable value is insufficiently certain.

When a corporate customer's general credit performance deteriorates and it is necessary to assess the likely performance of secondary sources of repayment, the valuation of collateral will generally be conducted on a more frequent basis. When a corporate loan is identified and assessed as impaired, the collateral must be revalued at least every 3 months, unless otherwise determined by authorized director.

iv. Concentration of credit risk analysis

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iv. Analisa konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan konsentrasi aset keuangan berdasarkan debitur:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

iv. Concentration of credit risk analysis (continued)

The following table presents the concentration of financial assets by type of debtors:

	2020				
	Korporasi dan perorangan/ *Corporate and Retail*	**Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia***	**Bank/ *Banks***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	-	4.252.139	-	4.252.139	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain - bersih	-	-	3.740.633	3.740.633	*Demand deposits with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.152.313	-	1.152.313	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain - bersih	-	-	10.653.939	10.653.939	*Placements with other banks - net*
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	17.860.822	-	17.860.822	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	-	1.217.717	-	1.217.717	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	170.818	-	500.680	671.498	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	9.292.848	-	9.292.848	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor - bersih	921.585	-		921.585	*Export Bills - net*
Tagihan akseptasi - bersih	1.667.522	-	354.137	2.021.659	*Acceptance receivables - net*
Kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih	55.274.934	-	59.652	55.334.586	*Loans to customers - net*
Aset lain-lain - pendapatan yang masih akan diterima	258.298	380.999	28	639.325	*Other assets – accrued income*
Rekening administratif dengan risiko kredit	17.291.869	-	2.278.520	19.570.389	*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Jumlah	75.585.026	34.156.838	17.587.589	127.329.453	*Total*
%	59%	27%	14%		*%*

	2019				
	Korporasi dan perorangan/ *Corporate and Retail*	**Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia***	**Bank/ *Banks***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia	-	7.343.788	-	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	-	2.261.135	2.261.135	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.488.506	-	1.488.506	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	-	-	7.696.511	7.696.511	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi		14.418.802	-	14.418.802	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	-	2.863.738	-	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	163.072	-	313.659	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	464.945	-	464.945	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor	1.434.664	-	-	1.434.664	*Export Bills*
Tagihan akseptasi	2.331.295	-	270.633	2.601.928	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih	65.533.877	-	-	65.533.877	*Loans to customers - net*
Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima	290.031	268.282	-	558.313	*Other assets – accrued income*
Rekening administratif dengan risiko kredit	13.313.065	-	2.556.135	15.869.200	*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Jumlah	83.066.004	26.848.061	13.098.073	123.012.138	*Total*
%	67%	22%	11%		*%*

Konsentrasi kredit yang diberikan kepada nasabah berdasarkan jenis kredit dan sektor ekonomi diungkapkan pada Catatan 14.

The concentration of loans to customers by type of loan and economic sector is disclosed in Note 14.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel-variabel pasar seperti perubahan tingkat bunga dan nilai tukar mata uang. Pendapatan Bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari aset dengan bunga yang dibayarkan atas dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bunga, sehingga mempengaruhi kinerja Bank. Selain itu, pendapatan Bank dapat berasal dari selisih kurs mata uang dalam transaksi jual beli valuta asing. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Bank.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan fungsi ALCO untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan tindakan yang akan diambil.
- Memantau dan mengukur tingkat risiko pasar secara harian dan melakukan *stress tests secara berkala*.
- Memantau perubahan tingkat bunga dan kurs mata uang yang berlaku di pasar secara harian.
- Memantau pos-pos aset dan liabilitas sesuai dengan tanggal *re-pricing*.
- Melakukan analisa sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap perubahan tingkat bunga pasar dan kurs mata uang di pasar.
- Melakukan penyesuaian tingkat bunga kredit dan dana terhadap perubahan tingkat bunga pasar sesegera mungkin setelah terjadi perubahan tingkat bunga pasar.
- Mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) selalu berada di bawah level maksimum dan memonitor PDN intra hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara garis besar, risiko pasar dibagi menjadi:

i. Risiko mata uang

Bank memiliki ekposur risiko mata uang melalui transaksi dalam valuta asing. Bank memonitor konsentrasi risiko yang terkait dengan setiap mata uang individual sehubungan dengan penjabaran transaksi, aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing ke dalam mata uang fungsional Bank, yaitu Rupiah.

Posisi Devisa Neto (PDN) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari jumlah modal.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Market risk

Market risk relates to the possibility of losses caused by fluctuations of the market variables, such as changes in interest rates and foreign exchange. The Bank's income is generated from the difference between interest income derived from assets and the interest paid to third party depositors. Changes in interest rates may reduce the interest income and consequently affect the Bank's performance. Likewise, the Bank may earn income from exchange rate differences in foreign exchange transactions. Changes in exchange rates may reduce the Bank's income and thereby affect the Bank's performance.

The risk management applied by the Bank is as follows:

- *Implementing ALCO functions to review market conditions and to determine actions to be taken.*
- *Monitoring and measuring the level of market risk on daily basis and conducting regular stress tests.*
- *Monitoring interest rate and exchange rate movements in the market on a daily basis.*
- *Monitoring maturity of asset and liability accounts in line with re-pricing dates.*
- *Performing sensitivity analysis of net interest income relative to market interest rate and market exchange rate movements.*
- *Adjusting interest rates of credit and funds to promptly counter any changes in market interest rates.*
- *Managing and maintaining a Net Open Position (NOP) to be always below the maximum level and monitoring the NOP at all times (intra-day NOP) in accordance with the prevailing regulations.*

In overall, market risk is divided into the following risks:

i. Currency risk

The Bank is exposed to currency risk through transaction in foreign currencies. The Bank monitors any concentration of risk in relation to any individual currency in regard to the translation of foreign currency transactions and monetary assets and liabilities into the Bank's functional currency, i.e. Rupiah.

The Bank's Net Open Position (NOP) was calculated based on the prevailing Bank Indonesia regulations. In accordance with the regulations, banks are required to maintain its aggregrate net foreign exchange position at a maximum of 20% of its capital.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

i. Risiko mata uang (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Market risk** (continued)*

i. Currency risk (continued)

The Bank's NOP as of 31 December 2020 and 2019 by currencies are as follows:

	2020			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi devisa neto (nilai absolut)/*Net open position (absolute amount)***	
Mata uang				***Currencies***
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (statement of financial position and off-balance sheet accounts)*
Dolar Amerika Serikat	53.379.174	53.574.955	195.781	*United States Dollar*
Dolar Australia	794.631	797.808	3.177	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	643.944	664.770	20.826	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	166.034	166.273	239	*Hong Kong Dollar*
Pound Inggris	815.068	826.928	11.860	*British Pound*
Yen Jepang	793.190	794.464	1.274	*Japanese Yen*
Yuan Cina	300.028	123.876	176.152	*China Yuan*
Yuan Cina Renminbi	24.236	213.649	189.413	*Chinese Yuan Renminbi*
Euro	2.268.305	2.268.351	46	*Euro*
Franc Swiss	50.825	51.568	743	*Swiss Franc*
Baht Thailand	3.063	-	3.063	*Thailand Baht*
Dolar Kanada	87.057	88.161	1.104	*Canadian Dollar*
Krone Denmark	916	-	916	*Danish Krone*
Rupee India	1.296	503	793	*Indian Rupee*
Krona Swedia	316	14	302	*Swedish Krona*
Krone Norwegia	655	-	655	*Norwegian Krone*
Dolar Selandia Baru	20.915	21.848	933	*New Zealand Dollar*
Ringgit Malaysia	-	5	5	*Malaysian Ringgit*
Jumlah			607.282	***Total***
Jumlah modal (Catatan 4f)			20.764.533	***Total capital (Note 4f)***
Posisi Devisa Neto			2,92%	***Net Open Position***

	2019			
	Aset/*Assets*	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi devisa neto (nilai absolut)/*Net open position (absolute amount)***	
Mata uang				***Currencies***
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				*Aggregate (statement of financial position and off-balance sheet accounts)*
Dolar Amerika Serikat	51.905.609	52.818.854	913.245	*United States Dollar*
Dolar Australia	1.040.413	1.041.107	694	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	617.420	617.820	400	*Singapore Dollar*
Dolar Hong Kong	151.473	149.205	2.268	*Hong Kong Dollar*
Pound Inggris	798.566	799.459	893	*British Pound*
Yen Jepang	529.247	531.284	2.037	*Japanese Yen*
Yuan Cina	410.283	242.159	168.124	*China Yuan*
Yuan Cina Renminbi	22.927	193.000	170.073	*Chinese Yuan Renminbi*
Euro	1.450.506	1.452.849	2.343	*Euro*
Franc Swiss	54.561	54.900	339	*Swiss Franc*
Baht Thailand	8.980	6.940	2.040	*Thailand Baht*
Dolar Kanada	68.833	69.268	435	*Canadian Dollar*
Krone Denmark	836	6	830	*Danish Krone*
Rupee India	215	73	142	*Indian Rupee*
Krona Swedia	837	38	799	*Swedish Krona*
Krone Norwegia	789	-	789	*Norwegian Krone*
Dolar Selandia Baru	29.916	31.039	1.123	*New Zealand Dollar*
Ringgit Malaysia	-	1	1	*Malaysian Ringgit*
Jumlah			1.266.575	***Total***
Jumlah modal (Catatan 4f)			19.667.473	***Total capital (Note 4f)***
Posisi Devisa Neto			6,44%	***Net Open Position***

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat bunga

Kegiatan usaha Bank dipengaruhi oleh risiko fluktuasi tingkat bunga sepanjang aset berbunga dan liabilitas berbunga (bukan untuk tujuan diperdagangkan) jatuh tempo atau re-price pada saat yang berbeda-beda atau dalam jumlah yang beragam.

Tabel di bawah ini menyajikan aset berbunga dan liabilitas berbunga (bukan untuk tujuan diperdagangkan) Bank pada nilai tercatat bersih setelah cadangan kerugian penurunan nilai, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Market risk** (continued)*

ii. Interest rate risk

The Bank's operations are subject to the risk of interest rate fluctuations to the extent that interest-earning assets and interest-bearing liabilities (not for trading purpose) mature or re-price at different times or in differing amounts.

The table below summarises the Bank's interest-earning assets and interest-bearing liabilities (not for trading purpose) at carrying amounts net after allowance for impairment losses, categorised by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates:

	2020						
	Jumlah/ *Total*	Hingga 3 bulan/ *Up to 3 months*	>3 - 6 bulan/ *months*	>6 - 12 bulan/ *months*	>1 - 5 tahun/ *years*	>5 tahun/ *years*	
Giro pada Bank Indonesia	4.252.139	4.252.139	-	-	-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	3.740.633	3.740.633	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1.152.313	1.152.313	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	10.653.939	10.653.939	-	-	-	-	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	17.860.822	-	999.312	5.824.680	10.658.149	378.681	*Investment securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9.292.848	9.292.848	-	-	-	-	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel ekspor	921.585	844.382	77.203	-	-	-	*Export bills*
Tagihan akseptasi	2.021.659	1.786.843	234.816	-	-	-	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	55.334.586	55.334.586	-	-	-	-	*Loans to customers*
	105.230.524	87.057.683	1.311.331	5.824.680	10.658.149	378.681	
Simpanan dari nasabah	(72.159.831)	(71.054.609)	(809.273)	(295.949)	-	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(4.491.715)	(4.491.715)	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	(7.516.750)	(7.516.750)	-	-	-	-	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(1.053.750)	-	(1.053.750)	-	-	-	*Subordinated debts*
	(85.222.046)	(83.063.074)	(1.863.023)	(295.949)	-	-	
	20.008.478	3.994.609	(551.692)	5.528.731	10.658.149	378.681	

	2019						
	Jumlah/ *Total*	Hingga 3 bulan/ *Up to 3 months*	>3 - 6 bulan/ *months*	>6 - 12 bulan/ *months*	>1 - 5 tahun/ *years*	>5 tahun/ *years*	
Giro pada Bank Indonesia	7.343.788	7.343.788	-	-	-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	2.261.135	2.261.135	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1.488.506	1.488.506	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	7.696.511	7.696.511	-	-	-	-	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	14.418.802	2.506.514	273.129	399.142	11.240.017	-	*Investment securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	464.945	-	464.945	-	-	-	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel ekspor	1.434.664	856.566	578.098	-	-	-	*Export bills*
Tagihan akseptasi	2.601.928	2.338.028	262.408	1.492	-	-	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	65.533.877	65.533.877	-	-	-	-	*Loans to customers*
	103.244.156	90.024.925	1.578.580	400.634	11.240.017	-	
Simpanan dari nasabah	(65.469.257)	(63.488.316)	(1.160.063)	(643.016)	(177.862)	-	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(5.058.515)	(5.058.515)	-	-	-	-	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	(15.062.513)	(15.062.513)	-	-	-	-	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(1.041.188)		(1.041.188)	-	-	-	*Subordinated debts*
	(86.631.473)	(83.609.344)	(2.201.251)	(643.016)	(177.862)	-	
	16.612.683	6.415.581	(622.671)	(242.382)	11.062.155	-	

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat bunga (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit dengan debitur/ nasabah, Bank berhak mengubah besaran suku bunga sewaktu-waktu atas dasar pertimbangan Bank, kecuali untuk kredit-kredit tertentu yang sudah ditetapkan jangka waktu *re-pricing*.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan suku bunga efektif rata-rata tertimbang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 untuk masing-masing instrumen keuangan.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Market risk** (continued)*

ii. Interest rate risk (continued)

Based on the loan agreement with the debtors/customers, the Bank has the rights to change the interest rates at any time at its discretion, except for certain loans which re-pricing period have been determined.

The tables below summarise the weighted average effective interest rates as of 31 December 2020 and 2019 for each financial instrument.

	2020	2019	
Aset			***Assets***
Rupiah:			***Rupiah:***
Efek-efek untuk tujuan investasi:			*Investment securities:*
Sertifikat Bank Indonesia	4,38%	6,08%	*Certificates of Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara	-	4,90%	*Treasury bills*
Obligasi pemerintah	5,35%	6,95%	*Government bonds*
Obligasi pemerintah – sukuk*)	-	5,90%	*Government bonds – sukuk*)*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3,86%	5,11%	*Securities purchased with agreement to resell*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	8,97%	10,60%	*Loans to customers*
Valuta asing:			***Foreign currencies:***
Penempatan pada bank-bank lain:			*Placements with other banks:*
Call money	0,08%	1,20%	*Call money*
Efek-efek untuk tujuan investasi:			*Investment securities:*
Obligasi pemerintah	1,97%	2,91%	*Government bonds*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	4,45%	5,43%	*Loans to customers*

*) Menunjukkan rata-rata tertimbang dari bagi hasil — *Represent weighted average of revenue sharing *)*

	2020	2019	
Liabilitas			***Liabilities***
Rupiah:			***Rupiah:***
Simpanan dari nasabah:			*Deposits from customers:*
Giro	0,30%	0,79%	*Demand deposits*
Tabungan	0,18%	1,30%	*Saving accounts*
Deposito berjangka dan *deposits on call*	2,10%	3,38%	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain:			*Deposits from other banks:*
Giro	1,26%	1,11%	*Demand deposits*
Call money	-	4,89%	*Call money*
Valuta asing:			***Foreign currencies:***
Simpanan dari nasabah:			*Deposits from customers:*
Giro	0,00%	0,15%	*Demand deposits*
Tabungan	0,00%	0,04%	*Saving accounts*
Deposito berjangka dan *deposits on call*	0,07%	0,90%	*Time deposits and deposits on call*
Simpanan dari bank-bank lain:			*Deposits from other banks:*
Giro	0,00%	0,00%	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima	1,78%	2,43%	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	4,77%	6,76%	*Subordinated debts*

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

iii. *Value at Risk*

Bank memisahkan eksposur risiko pasar antara portofolio yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan. Portofolio yang diperdagangkan meliputi posisi yang timbul dari pembentukan pasar dan position-taking dan lainnya yang ditetapkan pada nilai pasar. Portofolio yang tidak diperdagangkan meliputi posisi yang timbul terutama dari manajemen tingkat suku bunga atas aset berbunga dan liabilitas berbunga, dan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Salah satu alat utama yang digunakan oleh Bank untuk memantau dan membatasi eksposur risiko pasar adalah *Value at Risk* (VaR). VaR adalah teknik yang digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian yang mungkin terjadi atas posisi risiko yang diambil sebagai akibat dari pergerakan suku bunga pasar dalam jangka waktu tertentu dan dengan tingkat keyakinan tertentu.

Metodologi VaR yang digunakan oleh Bank adalah berdasarkan simulasi historis. Simulasi historis merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan, dimana diasumsikan distribusi perubahan faktor risiko pasar masa depan yang diharapkan (seperti nilai tukar mata uang asing dan tingkat bunga) adalah identik dengan distribusi (terpisah) faktor risiko yang sama yang diobservasi selama periode historis yang telah ditentukan sebelumnya.

Meskipun VaR adalah panduan yang berharga untuk pemantauan risiko, akan tetapi VaR harus juga dilihat dalam konteks keterbatasannya, antara lain:

- Penggunaan data historis untuk mengestimasi peristiwa di masa depan mungkin tidak mencakup semua peristiwa yang mungkin terjadi, terutama peristiwa yang ekstrim sifatnya;
- Penggunaan asumsi posisi per hari, mengasumsikan bahwa semua posisi dapat dilikuidasi atau risiko dapat saling hapus dalam jangka waktu satu hari. Hal ini mungkin tidak mencerminkan risiko pasar yang timbul pada saat kondisi likuiditas sangat terbatas, ketika posisi satu hari tidak cukup untuk melikuidasi atau melakukan lindung nilai terhadap semua posisi Bank secara menyeluruh;
- Penggunaan tingkat keyakinan pada tingkat 99 persen, secara definisi, tidak memperhitungkan kerugian yang mungkin terjadi di luar tingkat keyakinan tersebut;

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Market risk** (continued)*

iii. Value at Risk

The Bank separates its exposure to market risk between trading and non-trading portfolios. Trading portfolios include positions arising from market-making and position-taking and others designated as marked-to-market. Non-trading portfolios include positions that primarily arise from the interest rate management of interest-earning assets and interest-bearing liabilities, and investment securities designated as available-for-sale.

One of the principal tools used by the Bank to monitor and limit market risk exposure is Value at Risk (VaR). VaR is a technique that estimates the potential losses that could occur on risk positions as a result of movements in market rates and prices over a specified time horizon and to a given level of confidence.

The VaR methodology used by the Bank is based on historical simulation. Historical simulation is one of the most commonly used method, it assumes the expected distribution of future changes in market risk factors(e.g. foreign exchange rates and interest rates) is identical observed (discrete) distribution of the same risk factors over a pre-specified historical period.

Although VaR is a valuable guidance for risk monitoring, VaR should always be viewed in the context of its limitations, among others:

- *The use of historical data as a proxy for estimating future events may not encompass all potential events, particularly those which are extreme in nature;*
- *The use of position per day assumes that all positions can be liquidated or the risks offset in one-day. This may not fully reflect the market risk arising at times of severe liquidity, when the position per day may be insufficient to liquidate or hedge all positions fully;*
- *The use of a 99 percent confidence level, by definition, does not take into account losses that might occur beyond this level of confidence;*

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko pasar (lanjutan)

iii. *Value at Risk* (lanjutan)

- VaR dihitung berdasarkan atas eksposur yang tercatat pada saat akhir hari dan dengan demikian tidak mencerminkan eksposur intra hari.

VaR dari total portofolio dan portofolio yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:

2020				2019			
Jumlah VaR/ *Total VaR*	VaR untuk portofolio yang diperdagangkan/ *Trading VaR*			Jumlah VaR/ *Total VaR*	VaR untuk portofolio yang diperdagangkan/ *Trading VaR*		
	Risiko Nilai Tukar/ *Foreign Exchange Risk*	Risiko Suku Bunga/ *Interest Rate Risk*			Risiko Nilai Tukar/ *Foreign Exchange Risk*	Risiko Tingkat Bunga/ *Interest Rate Risk*	
Pada 31 Desember 10.562	4.005	10.086		25.808	8.217	24.434	*At 31 December*

Bank melakukan validasi atas keakurasian model VaR dengan melakukan *back-testing* menggunakan hasil laba rugi aktual harian.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Bank tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, atau memenuhi kewajiban tersebut tetapi dengan biaya yang tinggi. Risiko timbul dari ketidakselarasan waktu dari arus kas. Bank mempertahankan basis pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi dari simpanan nasabah ritel inti dan simpanan nasabah korporasi serta portofolio aset yang sangat likuid. Tujuan dari kerangka kerja likuiditas Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank dapat bertahan pada saat krisis likuiditas yang ekstrim. Kerangka kerja likuiditas dibentuk sedemikian rupa agar dapat beradaptasi terhadap perubahan bisnis model, pasar dan regulasi.

Bank mengelola risiko likuiditas dan pendanaan masing-masing dengan menerapkan sebuah kerangka kerja dan struktur limit yang ditetapkan oleh ALCO. Bank diharuskan untuk mempertahankan posisi likuiditas yang kuat dan mengelola struktur likuiditas aset, liabilitas dan komitmen untuk memastikan bahwa sumber likuiditas yang memadai, baik untuk jumlah dan kualitas, untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang signifikan dimana kewajiban tidak dapat dipenuhi saat jatuh tempo, dan untuk memastikan bahwa profil pendanaan struktural yang bijaksana dapat dipertahankan.

Manajemen lokal bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal yang berlaku dan limit yang ditetapkan oleh ALCO. Likuiditas dikelola setiap hari oleh fungsi treasuri.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Market risk** (continued)*

iii. Value at Risk (continued)

- *VaR is calculated on the basis of exposures outstanding at the close of business and therefore does not reflect intra-day exposures.*

VaR of the total and trading portfolios are as follows:

The Bank validates the accuracy of VaR model by performing back-testing using actual daily profit or loss results.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Bank does not have sufficient financial resources to meet its obligations as they fall due, or will have to do so at an excessive cost. The risk arises from mismatches in the timing of cash flows. The Bank maintains a stable and diversified funding base of core retail and corporate customer deposits as well as portfolios of highly liquid assets. The objective of the Bank's liquidity framework is to allow the Bank to withstand very severe liquidity stresses. It is designed to be adaptable to changing business models, markets and regulations.

The Bank manages liquidity and funding risk on a stand alone basis, employing a centrally imposed framework and limit structure set by ALCO. The Bank is required to maintain strong liquidity positions and to manage the liquidity profiles of its assets, liabilities and commitments with the objective of ensuring that liquidity resources are adequate, both as to the amount and quality, to ensure that there is no significant risk that liabilities cannot be met as they fall due, and to ensure that a prudent structural funding profile is maintained.

It is the responsibility of local management to ensure compliance with local regulatory requirements and limits set by ALCO. Liquidity is managed on a daily basis by treasury functions.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Likuiditas dan toleransi risiko pendanaan diatur dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) yang ditetapkan oleh ALCO dan dibahas dalam rapat bulanan *Risk Management Committee* (RMC).

Net Stable Funding Ratio (NSFR) digunakan untuk memantau risiko pendanaan dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) digunakan untuk memantau risiko likuiditas secara harian untuk memastikan posisi NSFR dan LCR berada dalam limit internal.

Giro, tabungan dan deposito berjangka merupakan bagian signifikan dari keseluruhan pendanaan Bank. Bank menempatkan pentingnya stabilitas simpanan ini, yang dicapai melalui kegiatan perbankan ritel Bank dan dengan mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap struktur modal Bank yang kuat. Pasar profesional diakses dengan tujuan untuk menyediakan pendanaan tambahan, mempertahankan keberadaan di pasar uang lokal dan mengoptimalkan jatuh tempo aset dan liabilitas.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Untuk mengendalikan risiko likuiditas, Bank menggunakan skenario untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran yang jatuh tempo dapat dipenuhi. LCR menggunakan skenario bahwa pasar berada dalam keadaan stress selama 30 hari.

Posisi LCR berdasarkan peraturan OJK berdasarkan data 31 Desember dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Liquidity risk** (continued)*

Liquidity and funding risk tolerance is set out in the Risk Appetite Satement (RAS) established by ALCO and discussed in monthly Risk Management Committee (RMC) meeting.

Net Stable Funding Ratio (NSFR) use to monitor funding risk and Liquidity Coverage Ratio (LCR) use to monitor liquidity risk are assessed daily to ensure the positions of NSFR and LCR are within the internal limits.

Demand deposits, saving accounts and time deposits payable form a significant part of the Bank's overall funding. The Bank places considerable importance on the stability of these deposits, which is achieved through the Bank's retail banking activities and by maintaining depositor confidence in the Bank's capital strength. Professional markets are accessed for the purposes of providing additional funding, maintaining a presence in local money markets and optimising asset and liability maturities.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

To control liquidity risk, the Bank uses scenarios to ensure that the payment obligation could be met as they fall due. LCR uses scenario that represents a 30 day severe market stress.

LCR position based on FSA regulations as of 31 December are provided in the following table:

	2020	2019	
Liquidity Coverage Ratio - Dihitung berdasarkan peraturan OJK yang berlaku	649%	517%	*Liquidity Coverage Ratio - Calculated based on the prevailing FSA regulations*

Berdasarkan kebijakan internal, ditetapkan limit sebesar 130% atas *Liquidity Coverage Ratio*, sedangkan limit sebesar 100% ditetapkan berdasarkan peraturan OJK yang berlaku.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Bank menggunakan konsep NSFR dalam mendanai aset pada neraca, dimana Aset yang membutuh dana stabil (*required stable funding*) didukung oleh kewajiban dana stabil yang tersedia (*available stable funding*).

Based on internal policy, a limit of 130% is set for Liquidity Coverage Ratio, whilst a limit of 100% is set based on prevailing FSA regulation.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

The Bank uses NSFR concept in funding assets on balance sheet where assets assessed to require stable funding are supported by liabilities providing stable funding.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (lanjutan)

Posisi NSFR berdasarkan peraturan OJK berdasarkan data 31 Desember dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	2020	2019	
Net Stable Funding Ratio - Dihitung berdasarkan peraturan OJK yang berlaku	165%	153%	*Net Stable Funding Ratio - Calculated based on the prevailing FSA regulations*

Rencana Pendanaan Kontinjensi

Rencana Pendanaan Kontinjensi (CFP) memiliki fokus pada skenario stres *idiosyncratic* dan *market wide*. Skenario stres harus memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi untuk menangani isu-isu yang berkembang dalam rentang waktu tertentu dan dihubungkan dengan kerangka risiko likuiditas dan asumsi stres.

CFP harus membentuk *Early Warning Indicators* dengan *trigger* yang telah ditentukan diawal untuk menginformasikan seluruh penilaian status RAG (*Red/Amber/Green)*. CFP harus menguraikan secara singkat tanggung jawab dan tindakan yang dapat diterapkan dalam skenario stres likuiditas dan menetapkan tahapan-tahapan spesifik selama skenario stres tersebut.

Eksposur risiko likuiditas

Sisa umur atas arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan atas liabilitas keuangan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

4. *RISK MANAGEMENT* *(continued)*

d. Liquidity risk *(continued)*

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (continued)

NSFR position based on FSA regulation as of 31 December are provided in the following table:

Contingent Funding Plan

Contingency Funding Plan (CFP) focus on idiosyncratic and market wide stress scenarios. Stress scenarios should vary in severity, address issues developing over a range of time horizons and be linked to liquidity risk framework and stress testing assumptions.

CFPs should establish a collection of Early Warning Indicators with predetermined warning triggers to inform an overall RAG (Red/Amber/Green) status assessment. CFP should seek to outline at a high level responsibilities and actions that could be applied during liquidity stress scenarios and set out specific stages during a liqudity stress scenario.

Exposure to liquidity risk

Maturity on contractual undiscounted cash flows of financial liabilities as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal inflow/ (outflow)***	**Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month***	**>1 - 3 bulan/ *months***	**>3 bulan/ *months***	
Liabilitas non-derivatif						*Non-derivative payables*
Simpanan dari nasabah	(72.159.831)	(72.740.961)	(69.220.279)	(1.894.152)	(1.626.530)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(4.491.715)	(4.491.770)	(4.491.770)	-	-	*Deposits from other banks*
Utang akseptasi	(2.047.057)	(2.047.057)	(987.334)	(821.957)	(237.766)	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	(7.516.750)	(7.600.502)	-	-	(7.600.502)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(1.053.750)	(1.104.014)	-	-	(1.104.014)	*Subordinated debt*
Liabilitas lainnya	(748.925)	(748.925)	(748.925)	-	-	*Other liabilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(2.050.678)	(428.597)	(1.220.857)	(401.224)	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	-	(9.611.269)	-	-	(9.611.269)	*Unused credit facilities - committed*
	(88.018.028)	(100.395.176)	(75.876.905)	(3.936.966)	(20.581.305)	

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Eksposur risiko likuiditas (lanjutan)

Sisa umur atas arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan atas liabilitas keuangan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Liquidity risk** (continued)*

Exposure to liquidity risk (continued)

Maturity on contractual undiscounted cash flows of financial liabilities as of 31 December 2020 and 2019 are as follows: (continued)

	2020 (lanjutan/*continued*)					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal inflow/ (outflow)***	**Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month***	**>1 - 3 bulan/ *months***	**>3 bulan/ *months***	
Liabilitas derivatif						*Derivative payables*
Diperdagangkan:						*Trading:*
Arus kas keluar	(659.526)	(66.202.228)	(39.797.477)	(13.978.151)	(12.426.600)	*Cash outflow*
Arus kas masuk	-	66.490.004	39.543.431	13.354.231	13.592.342	*Cash inflow*
	(659.526)	287.776	(254.046)	(623.920)	1.165.742	
	(88.677.554)	(100.107.400)	(76.130.951)	(4.560.886)	(19.415.563)	

	2019					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	**Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal inflow/ (outflow)***	**Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month***	**>1 - 3 bulan/ *months***	**>3 bulan/ *months***	
Liabilitas non-derivatif						*Non-derivative payables*
Simpanan dari nasabah	(65.469.257)	(66.005.970)	(60.466.676)	(3.128.815)	(2.410.479)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(5.058.515)	(5.058.708)	(5.058.708)	-	-	*Deposits from other banks*
Utang akseptasi	(2.601.928)	(2.601.928)	(1.140.704)	(1.197.324)	(263.900)	*Acceptance payables*
Pinjaman yang diterima	(15.062.513)	(15.062.513)	-	-	(15.062.513)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	(1.041.188)	(1.041.188)	-	-	(1.041.188)	*Subordinated debt*
Liabilitas lainnya	(770.011)	(770.011)	(770.011)	-	-	*Other liabilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	-	(2.332.307)	(619.342)	(1.430.857)	(282.108)	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	-	(4.242.629)	-	-	(4.242.629)	*Unused credit facilities - committed*
	(90.003.412)	(97.115.254)	(68.055.441)	(5.756.996)	(23.302.817)	
Liabilitas derivatif						*Derivative payables*
Diperdagangkan:						*Trading:*
Arus kas keluar	(473.541)	(71.178.189)	(36.243.567)	(20.212.469)	(14.722.153)	*Cash outflow*
Arus kas masuk	-	71.605.429	35.197.852	20.729.226	15.678.351	*Cash inflow*
	(473.541)	427.240	(1.045.715)	516.757	956.198	
	(90.476.953)	(96.688.014)	(69.101.156)	(5.240.239)	(22.346.619)	

Tabel di atas menyajikan arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan periode jatuh tempo kontraktual yang paling dekat. Arus kas atas instrumen keuangan yang diharapkan Bank bervariasi secara signifikan dari analisa ini. Sebagai contoh, giro dari nasabah diharapkan memiliki saldo yang stabil atau meningkat.

The above table shows the undiscounted cash flows on the Bank's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity. The Bank's expected cash flows on these instruments vary significantly from this analysis. For example, demand deposits from customers are expected to maintain a stable or increasing balance.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Eksposur risiko likuiditas (lanjutan)

Nilai nominal bruto arus kas masuk/(keluar) yang diungkapkan pada tabel di atas menyajikan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan nilai pokok dan bunga dari liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga nilai bruto arus kas masuk dan keluar untuk derivatif yang diselesaikan bruto secara bersamaan (sebagai contoh kontrak berjangka valuta asing). Arus kas liabilitas derivatif seperti yang ditunjukkan di tabel di atas merupakan arus kas berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang menurut Bank adalah penting untuk memahami waktu dari arus kas.

Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan bruto Bank (bukan untuk tujuan diperdagangkan) berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Liquidity risk** (continued)*

Exposure to liquidity risk (continued)

The gross nominal inflow/(outflow) disclosed in the above table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, and a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward). The cash flows of derivative payables as in the above table represent the cash flows based on contractual maturities which the Bank believes is essential for understanding of the timing of the cash flows.

The analysis of maturities of the Bank's gross financial assets and liabilities (not for trading purpose) based on remaining period to contractual maturity as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	>1 - 3 bulan/ *months*	>3 - 12 bulan/ *months*	1 - 5 tahun/ *years*	>5 tahun/ *years*	Nilai tercatat sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Carrying amount before allowance for impairment losses*	
Kas	627.207	-	-	-	-	-	627.207	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4.252.139	-	-	-	-	-	4.252.139	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	3.740.740	-	-	-	-	-	3.740.740	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.152.313	-	-	-	-	1.152.313	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	-	10.654.314	-	-	-	-	10.654.314	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	-	-	6.823.992	10.658.149	378.681	17.860.822	*Investment securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	8.945.892	346.956	-	-	-	9.292.848	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor	-	483.136	367.515	77.777	-	-	928.428	*Export Bills*
Tagihan Akseptasi	-	987.334	821.957	237.766	-	-	2.047.057	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	-	27.606.454	6.714.733	13.110.305	10.962.679	-	58.394.171	*Loans to customers*
Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima	-	639.325	-	-	-	-	639.325	*Other assets - accrued income*
Jumlah aset	8.620.086	50.468.768	8.251.161	20.249.840	21.620.828	378.681	109.589.364	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	(51.152.375)	(18.026.605)	(1.875.629)	(1.105.222)	-	-	(72.159.831)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(4.491.715)	-	-	-	-	-	(4.491.715)	*Deposits from other banks*
Utang akseptasi	-	(987.334)	(821.957)	(237.766)	-	-	(2.047.057)	*Acceptance payables*
Beban akrual dan provisi	-	(76.507)	-	-	-	-	(76.507)	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain	(748.925)	-					(748.925)	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	(1.405.000)	(6.111.750)	-	(7.516.750)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	(1.053.750)	(1.053.750)	*Subordinated debts*
Jumlah liabilitas	(56.393.015)	(19.090.446)	(2.697.586)	(2.747.988)	(6.111.750)	(1.053.750)	(88.094.535)	***Total liabilities***
Selisih	(47.772.929)	31.378.322	5.553.575	17.501.852	15.509.078	(675.069)	21.494.829	***Difference***

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Eksposur risiko likuiditas (lanjutan)

Analisa jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan bruto Bank (bukan untuk tujuan diperdagangkan) berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Liquidity risk** (continued)*

Exposure to liquidity risk (continued)

The analysis of maturities of the Bank's gross financial assets and liabilities (not for trading purpose) based on remaining period to contractual maturity as of 31 December 2020 and 2019 are as follows: (continued)

	2019							
	Tanpa tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	>1 - 3 bulan/ *months*	>3 - 12 bulan/ *months*	1 - 5 tahun/ *years*	>5 tahun/ *years*	Nilai tercatat sebelum dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Carrying amount before allowance for impairment losses*	
Kas	696.281	-	-	-	-	-	696.281	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7.343.788	-	-	-	-	-	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	2.261.135	-	-	-	-	-	2.261.135	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.488.506	-	-	-	-	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	-	7.696.511	-	-	-	-	7.696.511	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	620.795	1.885.719	672.271	11.240.017	-	14.418.802	*Investment securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	464.945	-	-	464.945	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor	-	443.636	412.930	578.098	-	-	1.434.664	*Export Bills*
Tagihan Akseptasi	-	1.140.704	1.197.324	263.900	-	-	2.601.928	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	-	9.567.359	17.989.857	35.539.500	4.560.344	-	67.657.060	*Loans to customers*
Aset lain-lain – pendapatan yang masih akan diterima	-	558.313	-	-	-	-	558.313	*Other assets - accrued income*
Jumlah aset	10.301.204	21.515.824	21.485.830	37.518.714	15.800.361	-	106.621.933	***Total assets***
Liabilitas								***Liabilities***
Simpanan dari nasabah	(40.363.113)	(20.046.153)	(3.079.050)	(1.803.079)	(177.862)	-	(65.469.257)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	(5.058.515)	-	-	-	-	-	(5.058.515)	*Deposits from other banks*
Utang akseptasi	-	(1.140.704)	(1.197.324)	(263.900)	-	-	(2.601.928)	*Acceptance payables*
Beban akrual dan provisi	-	(146.820)	-	-	-	-	(146.820)	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain	(770.011)	-	-	-	-	-	(770.011)	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima	-	-	-	(2.082.375)	(12.980.138)	-	(15.062.513)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	-	(1.041.188)	(1.041.188)	*Subordinated debts*
Jumlah liabilitas	(46.191.639)	(21.333.677)	(4.276.374)	(4.149.354)	(13.158.000)	(1.041.188)	(90.150.232)	***Total liabilities***
Selisih	(35.890.435)	182.147	17.209.456	33.369.360	2.642.361	(1.041.188)	16.471.701	***Difference***

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan karena faktor manusia, kelemahan proses internal dan kejadian eksternal termasuk *fraud*. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada Bank sehingga akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Bank.

Manajemen risiko operasional dan internal kontrol yang kuat adalah elemen inti dari strategi risiko operasional Bank dan semua karyawan bertanggung jawab untuk mengelola dan memitigasi risiko operasional dalam kegiatan sehari-hari. *Non Financial Risk (NFR) Guiding Principles* dan *NFR Technical User Guide* adalah pendekatan menyeluruh yang diterapkan oleh bank untuk mengelola risiko operasionalnya sesuai dengan bisnis dan strategi risiko operasional dan objektif dan juga *appetite* risiko operasional.

e. Operational risk

Operational risk is the potential losses arising from IT system failure, human error, deficiencies in internal process and external event including fraud. These risks may trigger losses for the Bank and consequently affect the Bank's performance and soundness.

Strong operational risk management and internal control are core elements of the Bank's operational risk strategy and all staff are responsible for managing and mitigating operational risks in their day-to-day operations. Non Financial Risk (NFR) Guiding Principles and NFR Technical User Guide is the overarching approach adopted by the Bank to manage its operational risk in accordance with it business and operational risk strategies and objectives and accordingly its operational risk appetite.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

Bank mengelola risiko ini melalui lingkungan berbasis-pengendalian dimana proses didokumentasi, wewenang bersifat independen dan transaksi-transaksi dicocokkan dan dipantau. Hal ini didukung oleh program kajian berkala yang dilaksanakan secara independen oleh audit internal, dan dengan memantau peristiwa eksternal yang terkait dengan risiko operasional, yang memastikan bahwa Bank tetap sejalan dengan *best practice* di industri dan belajar dari kegagalan operasional dalam industri jasa keuangan yang telah dipublikasi.

- Risiko operasional merupakan tanggung jawab seluruh karyawan dan lini manajemen yang didukung oleh *Non Financial Risk (NFR) Guiding Principles* dan *NFR Technical User Guide*;
- Sistem informasi digunakan untuk mencatat pengidentifikasian dan penilaian risiko operasional dan untuk menghasilkan pelaporan manajemen yang tepat secara berkala;
- Penilaian dilaksanakan terhadap risiko operasional yang dihadapi oleh setiap unit bisnis, baik risiko yang melekat dan risiko residual dalam proses, kegiatan dan produk terkait. Penilaian risiko menyertakan kajian berkala atas risiko yang teridentifikasi untuk memantau perubahan signifikan;
- Data kerugian risiko operasional dikumpulkan dan dilaporkan kepada Direksi. Kerugian risiko operasional secara keseluruhan dicatat dan keterangan lengkap mengenai insiden di atas ambang material dilaporkan; dan
- Mitigasi risiko, termasuk asuransi, dipertimbangkan bilamana hal ini dipandang efektif dari segi biaya.

Bank menjaga dan menguji fasilitas kontinjensi untuk mendukung operasionalnya apabila terjadi bencana. Kajian dan uji tambahan dilaksanakan apabila terdapat kantor Bank yang terkena suatu kejadian merugikan, untuk menyertakan pelajaran yang didapat dalam pemulihan operasi dari situasi tersebut.

f. Manajemen modal

Modal yang diwajibkan regulator

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***e. Operational risk** (continued)*

The Bank manages this risk through a control-based environment in which processes are documented, authorisation is independent and transactions are reconciled and monitored. This is supported by an independent programme of periodic reviews undertaken by internal audit, and by monitoring external operational risk events, which ensure that the Bank stays in line with industry best practice and takes account of lessons learnt from publicised operational failures within the financial services industry.

- *Operational risk is primarily the responsibility of all employees and line management, supported by the Non Financial Risk (NFR) Guiding Principles and NFR Technical User Guide;*
- *Information systems are used to record the identification and assessment of operational risks and to generate appropriate, regular management reporting;*
- *Assessments are undertaken of the operational risks facing each business, both inherent and residual risks in its processes, activities and products. Risk assessment incorporates a regular review of identified risks to monitor significant changes;*
- *Operational risk loss data is collected and reported to Directors. Aggregate operational risk losses are recorded and details of incidents above a materiality threshold are reported; and*
- *Risk mitigation, including insurance, is considered where this is cost-effective.*

The Bank maintains and tests contingency facilities to support operations in the event of disasters. Additional reviews and tests are conducted in the event that any Bank office is affected by a business disruption event, to incorporate lessons learnt in the operational recovery from those circumstances.

f. Capital management

Regulatory capital

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Manajemen modal (lanjutan)

Modal yang diwajibkan regulator (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah:

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***f. Capital management** (continued)*

***Regulatory capital** (continued)*

The Capital Adequacy Ratio (CAR) as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	Catatan/ *Notes*	2020	2019	
Modal *tier* 1				***Tier 1 capital***
Modal saham	24	10.586.395	10.586.395	*Share capital*
Tambahan modal disetor	25	257.610	257.610	*Additional paid-in-capital*
Cadangan umum	26	49.419	26.306	*General reserve*
Saldo laba		6.624.734	4.873.826	*Retained earnings*
Laba periode berjalan		1.309.994	2.311.291	*Profit for the period*
Penghasilan komprehensif lain		502.279	133.382	*Other comprehensive income*
Selisih kurang antara penyisihan wajib dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif		-	-	*Negative differences between regulatory provision and allowance for impairment losses on productive assets*
Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non-produktif yang wajib dihitung		(64.583)	(42.815)	*Non-earning asset provision that should be calculated*
Perhitungan pajak tangguhan		(265.832)	(275.182)	*Deferred tax calculation*
Aset tidak berwujud lainnya		(89.121)	(137.065)	*Other intangible assets*
		18.910.895	17.733.748	
Modal *tier* 2				***Tier 2 capital***
Pinjaman subordinasi		1.053.750	1.041.188	*Subordinated debt*
Cadangan umum aset produktif		799.888	892.537	*General allowance for earning assets*
Jumlah modal		20.764.533	19.667.473	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko				*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit		63.979.090	71.417.809	*Credit risk*
Risiko pasar		1.733.038	3.144.963	*Market risk*
Risiko operasional		12.043.510	8.583.805	*Operational risk*
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko		77.755.638	83.146.577	*Total Risk Weighted Assets*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum		26,70%	23,65%	*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1		24,32%	21,33%	*CET 1 Ratio*
Rasio tier 1		24,32%	21,33%	*Tier 1 Ratio*
Rasio tier 2		2,38%	2,33%	*Tier 2 Ratio*
Capital Conservation Buffer		2,50%	2,50%	*Capital Conservation Buffer*
Countercyclical Buffer		0,00%	0,00%	*Countercyclical Buffer*
Domestically Systemically Important Bank		1,00%	1,00%	*Domestically Systemically Important Bank*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan		9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	9% sampai dengan kurang dari 10%/*9% to less than 10%*	*Required Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1 minimum yang diwajibkan		4,50%	4,50%	*Required minimum CET 1 Ratio*
Rasio Tier 1 minimum yang diwajibkan		6,00%	6,00%	*Required minimum Tier 1 Ratio*

Melalui Surat OJK No. S-141/PB.33/2017 tanggal 23 November 2017, OJK telah memberikan persetujuan bagi Bank untuk memperhitungkan pinjaman subordinasi sebesar USD 75 juta dari HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (lihat Catatan 36) sebagai bagian dari komponen modal pelengkap (modal Tier 2) efektif mulai November 2017.

Through its letter No. S-141/PB.33/2017 dated 23 November 2017, the FSA has given their approval for the Bank to include the subordinated loan amounting to USD 75 million from HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (see Note 36) as supplementary capital (Tier 2 capital) component effectively since November 2017.

4. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Manajemen modal (lanjutan)

Modal yang diwajibkan regulator (lanjutan)

Berdasarkan Surat OJK No. SR-91/PB.33/2017 tanggal 23 November 2017, OJK menetapkan Bank sebagai salah satu *Domestically Systematically Important Bank (bucket 1). Capital surcharge* yang dikenakan kepada Bank adalah sebesar 0,50% sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017, 0,75% sejak 1 Januari 2018 dan 1,00% sejak 1 Januari 2019. Surat ini telah diperbaharui beberapa kali, terakhir berdasarkan surat Nomor S-87/PB.33/2020 tertanggal 4 November 2020.

Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2016.

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko untuk posisi 31 Desember 2020 dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi 30 Juni 2020.

Profil risiko merupakan bagian dari tingkat kesehatan bank yang dinilai tiap semester.

Berdasarkan *self-assessment* Bank, profil risiko Bank dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Pada tanggal 31 Desember 2020, KPMM Bank berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 26,70%.

***4. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***f. Capital management** (continued)*

***Regulatory capital** (continued)*

Based on OJK letter No. SR-91/PB.33/2017 dated 23 November 2017, the FSA has determined the Bank as one of the Domestically Systematically Important Bank (bucket 1). The Bank is imposed with 0.50% capital surcharge from 1 January 2017 until 31 December 2017, 0.75% from 1 January 2018 and 1.00% from 1 January 2019. The letter has been amended several times, the recent OJK letter was dated 4 November 2020 Number S-87/PB.33/2020.

Calculation of Capital Adequacy Ratio in compliance with Financial Service Authority Regulation No 11/POJK.03/2016 concerning "Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks" which effective since 2 February 2016 as amended by POJK No. 34/POJK.03/2016.

FSA is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of FSA assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

The Bank calculated the minimum capital requirement based on risk profile on 31 December 2020 by using 30 June 2020 risk profile rating.

The risk profile is part of bank's soundness which is assessed semi-annually.

Based on its self-assessment, the Bank's risk profile is assessed to be in rating 2. Therefore, the Bank is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. As of 31 December 2020, the Bank's CAR was 26.70%, which was higher than the required minimum provision of capital.

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN

Pengungkapan ini merupakan tambahan atas pembahasan tentang manajemen risiko keuangan (lihat Catatan 4).

a. Sumber utama atas ketidakpastian taksiran

a.1. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI) dijelaskan di Catatan 3p.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS

These disclosures supplement the commentary on financial risk management (see Note 4).

a. Key sources of estimation uncertainty

a.1. Allowances for impairment losses of financial assets

Financial assets accounted for at amortised cost and fair value through other comprehensive income (FVOCI) are evaluated for impairment on a basis described in Note 3p.

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

a. Sumber utama atas ketidakpastian taksiran (lanjutan)

a.1. Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan ECL sesuai PSAK 71 memerlukan Bank untuk menggunakan pertimbangan, asumsi dan estimasi. Beberapa yang signifikan antara lain:

- Mendefinisikan peningkatan risiko kredit yang signifikan
- Menentukan saat pengakuan awal dan perkiraan umur instrumen cerukan dan kartu kredit
- Memilih dan mengkalibrasi model PD, LGD dan EAD, yang mendukung perhitungan, termasuk pertimbangan yang wajar dan terdukung tentang bagaimana model bereaksi terhadap kondidis ekonomi saat ini dan masa depan
- Memilih model masukan dan prakiraan ekonomik, termasuk menetapkan apakah prakiraan ekonomik yang memadai dan tertimbang secara wajar dimasukan dalam memperhitungkan kerugian ekspektasi yang tidak bias.

Cadangan kerugian penurunan nilai terkait dengan pihak lawan spesifik dalam seluruh cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas tagihan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual berdasarkan taksiran terbaik manajemen atas nilai tunai arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas ini, manajemen membuat pertimbangan mengenai kondisi keuangan dari pihak lawan dan nilai bersih yang dapat direalisasi dari agunan yang diterima. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dievaluasi, dan strategi penyelesaiannya serta estimasi arus kas yang dinilai dapat diperoleh kembali secara independen disetujui oleh Departemen Kredit.

a.2. Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Bank harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 3a.6. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

a. Key sources of estimation uncertainty *(continued)*

a.1. Allowances for impairment losses of financial assets *(continued)*

The calculation of the Bank's ECL under SFAS 71 requires the Bank to make a number of judgements, assumptions and estimates. The most significant are set out below:

- *Defining what is considered to be a significant increase in credit risk*
- *Determining the lifetime and point of initial recognition of overdrafts and credit cards*
- *Selecting and calibrating the PD, LGD and EAD models, which support the calculations, including making reasonable and supportable judgements about how models react to current and future economic conditions*
- *Selecting model inputs and economic forecasts, including determining whether sufficient and appropriately weighted economic forecasts are incorporated to calculate unbiased expected loss*

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to claims evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the Credit Department.

a.2. Determining fair values

The determination of fair value for financial assets and liabilities for which there is no observable market price requires the use of valuation techniques as described in Note 3a.6. For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank meliputi:

b.1. Penilaian instrumen keuangan

Kebijakan akuntansi Bank untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 3a.6.

Kerangka penilaian

Nilai wajar termasuk dalam kerangka penilaian yang dirancang untuk memastikan bahwa nilai wajar ditentukan dan divalidasi oleh bagian yang independen dari pengambil risiko.

Untuk semua instrumen keuangan dimana nilai wajar ditentukan oleh referensi harga kuotasian secara eksternal atau *input* yang dapat diobservasi yang digunakan di dalam model, penentuan dan validasi harga independen digunakan. Pada pasar yang tidak aktif, Bank akan mencari informasi pasar alternatif untuk melakukan validasi terhadap nilai wajar dari instrumen keuangan, dengan menekankan pada informasi yang dianggap lebih relevan dan andal.

Untuk menentukan kualitas dari *input* data pasar, faktor-faktor seperti sejauh mana harga bisa diharapkan untuk mewakili harga jual-beli sesungguhnya atau harga dimana instrumen dapat diperjualbelikan, tingkat keserupaan antar instrumen keuangan, tingkat konsistensi antar sumber yang berbeda, proses yang digunakan oleh *pricing provider* untuk memperoleh data, jarak antara tanggal data pasar terkait dan tanggal neraca serta bagaimana data tersebut diperoleh harus dipertimbangkan.

Untuk nilai wajar yang ditentukan melalui model penilaian, kerangka penilaian dapat berupa pengembangan atau validasi terhadap logis di dalam model penilaian oleh bagian pendukung yang independen, input untuk model dan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan di luar model penilaian. Model penilaian dikaji secara berkala untuk memastikan bahwa hasil penilaian mencerminkan harga pasar.

Perubahan nilai wajar secara umum dimasukkan ke dalam proses analisa laba dan rugi. Proses ini memisahkan perubahan dalam nilai wajar ke dalam tiga kategori; (i) perubahan portofolio, seperti transaksi baru atau transaksi yang jatuh tempo, (ii) perubahan pasar, seperti perubahan kurs mata uang asing, dan (iii) lainnya, seperti perubahan penyesuaian nilai wajar.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies

Critical accounting judgments made in applying the Bank's accounting policies include:

b.1. Valuation of financial instruments

The Bank's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 3a.6.

Valuation framework

Fair values are subject to a valuation framework designed to ensure that they are either determined or validated by a function independent of the risk-taker.

For all financial instruments where fair values are determined by reference to externally quoted price or observable pricing inputs to model, independent price determination or validation is utilized. In inactive market, the Bank will search alternative market information to validate the financial instrument's fair value, with greater weight given to information that is considered to be more relevant and reliable.

To determine the quality of the market data inputs, factors such as the extent to which prices may be expected to represent genuine traded or tradeable prices, the degree of similarity between financial instruments, the degree of consistency between different sources, the process followed by the pricing provider to derive the data, the elapsed between the date to which the market data relates and the balance sheet date and the manner in which the data was sourced are taken into consideration.

For fair values determined using valuation models, the valuation framework may include development or validation by independent support functions of the logic within valuation models, the inputs to those models and any adjustments required outside the valuation models. Valuation model is regularly reviewed to ensure that the result of the valuation reflects the market prices.

Changes in fair value are generally subject to a profit and loss analysis process. This process disaggregates changes in fair value into three high level categories; (i) portfolio changes, such as new transactions or maturing transactions, (ii) market movements, such as changes in foreign exchange rates, and (iii) other, such as changes in fair value adjustments.

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

b.1. Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

Kerangka penilaian (lanjutan)

Bank mengukur nilai wajar menggunakan hierarki di bawah ini:

- Level 1: Kuotasi harga pasar: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian (tanpa disesuaikan) dalam pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: Teknik penilaian menggunakan input yang dapat diobservasi: instrumen keuangan yang diukur dengan menggunakan harga kuotasian untuk instrumen serupa dalam pasar aktif atau harga kuotasian untuk instrumen serupa atau identik dari pasar yang dipertimbangkan sebagai kurang aktif dan instrumen keuangan yang diukur menggunakan model dimana seluruh *input* signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.
- Level 3: Teknik penilaian menggunakan *input* signifikan yang tidak dapat diobservasi: instrumen keuangan dinilai menggunakan teknik penilaian dimana satu atau lebih *input* signifikan tidak dapat diobservasi. Kategori ini termasuk instrumen yang diukur berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi diperlukan untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada harga kuotasi pasar atau harga kuotasian dari *dealer*. Untuk instrumen keuangan lainnya, Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian termasuk nilai kini bersih dan model arus kas yang didiskonto, perbandingan dengan instrumen serupa dimana harga pasar yang dapat diobservasi tersedia dan model penilaian lainnya. Asumsi dan *input* yang digunakan dalam teknik penilaian termasuk bunga bebas risiko dan bunga acuan (*benchmark*), marjin kredit dan premi lainnya yang digunakan untuk melakukan estimasi suku bunga diskonto, harga obligasi, nilai tukar valuta asing dan volatilitas dan korelasi harga yang diharapkan.

Tujuan dari teknik penilaian adalah menghasilkan penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan, yang mana akan ditentukan oleh pelaku pasar secara wajar (*arm's length*).

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

b.1. Valuation of financial instruments *(continued)*

Valuation framework *(continued)*

The Bank measures fair values using the following hierarchy:

- *Level 1: Quoted market price: financial instruments with quoted prices (unadjusted) in an active market for an identical instrument.*
- *Level 2: Valuation technique using observable inputs: financial instruments valued using quoted prices for similar instruments in active markets or quoted prices for identical or similar instruments in the markets that are considered less than active and financial instruments valued using models where all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.*
- *Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs: financial instruments valued using valuation techniques where one or more significant inputs are unobservable. This category includes instrument that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.*

Fair values of financial assets and liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Bank determines the fair values using valuation techniques.

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison to similar instruments for which the market observable prices exist and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rate, credit spreads and other premiums used in estimating discount rates, bond prices, foreign currency exchange rates and expected price volatilities and correlations.

The objective of valuation technique is to arrive at a fair value determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting date that would have been determined by market participants acting at arm's length.

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

b.1. Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

Kerangka penilaian (lanjutan)

Bank menerapkan model penilaian yang secara umum digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang umum dan tidak kompleks seperti kontrak berjangka valuta asing yang hanya menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan hanya memerlukan sedikit pertimbangan dan estimasi manajemen. Harga yang dapat diobservasi dan *input* dalam model biasanya tersedia di pasar untuk obligasi yang terdaftar di bursa. Ketersediaan harga pasar yang dapat diobservasi dan *input* dalam model mengurangi kebutuhan untuk pertimbangan dan estimasi manajemen, dan juga mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan penentuan nilai wajar. Ketersediaan harga pasar dan *input* bervariasi tergantung pada produk dan pasar, dan sangat dipengaruhi oleh perubahan berdasarkan kejadian tertentu dan kondisi umum pasar keuangan.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini memberikan analisis instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, berdasarkan hirarki nilai wajar:

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

b.1. Valuation of financial instruments *(continued)*

Valuation framework *(continued)*

The Bank uses widely recognised valuation models for determining the fair value of common and more simple financial instruments, like foreign exchange forward contracts that use only observable market data and require little management judgment and estimation. Observable prices and model inputs are usually available in the market for listed debt securities. Availability of observable market prices and model inputs reduces the need for management judgment and estimation and also reduces the uncertainty associated with determination of fair values. Availability of observable market prices and inputs varies depending on the products and markets and is prone to changes based on specific events and general conditions in the financial markets.

Financial instruments measured at fair values

The table below analyses financial instruments measured at fair value at the end of the reporting period, based on fair value hierarchy:

	2020					
	Catatan/ *Notes*	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Jumlah/ *Total***	
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	11	-	1.217.717	-	1.217.717	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	12	6.929	652.602	11.967	671.498	*Derivative receivables*
Efek-efek untuk tujuan investasi	10	-	17.860.822	-	17.860.822	*Investment securities*
		6.929	19.731.141	11.967	19.750.037	
Liabilitas derivatif	12	(3.693)	(648.027)	(7.806)	(659.526)	*Derivative payables*

	2019					
	Catatan/ *Notes*	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Jumlah/ *Total***	
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	11	-	2.863.738	-	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	12	1.342	430.789	44.600	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek untuk tujuan investasi	10	-	14.418.802	-	14.418.802	*Investment securities*
		1.342	17.713.329	44.600	17.759.271	
Liabilitas derivatif	12	(1.727)	(438.607)	(33.207)	(473.541)	*Derivative payables*

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

b.1. Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

b.1. Valuation of financial instruments *(continued)*

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Financial instruments measured at fair values *(continued)*

Tabel di bawah ini memberikan analisis instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, berdasarkan hirarki nilai wajar: (lanjutan)

The table below analyses financial instruments measured at fair value at the end of the reporting period, based on fair value hierarchy: (continued)

	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for sale*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
2020				***2020***
Saldo 1 Januari	-	44.600	33.207	*Balance at 1 January*
Laba/(rugi) diakui:				*Total gains/(losses):*
- Dalam laba rugi	-	(8.183)	(7.000)	*In profit or loss -*
- Dalam laba rugi dari posisi penyelesaian	-	(2.873)	(2.275)	*In profit or loss - from positions settled*
Pembelian	-	-	-	*Purchases*
Penyelesaian dan penjualan	-	272	-	*Settlement and sales*
Transfer ke level 3	-	-	-	*Transfer into level 3*
Transfer dari level 3	-	(22.789)	(16.840)	*Transfer from level 3*
Efek kurs	-	940	714	*Exchange rate difference*
Saldo 31 Desember	-	11.967	7.806	*Balance at 31 December*

Total laba atau rugi yang termasuk dalam laba rugi tahun berjalan pada tabel di atas disajikan dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Total gains or losses included in profit or loss for the year in the above table are presented in the statement of profit or loss as follows:

	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for sale*	**Tagihan derivatif/ *Derivative receivables***	**Liabilitas derivatif/ *Derivative payables***	
2020				***2020***
Total laba selama periode yang termasuk dalam laba rugi:				*Total gains for the end of the reporting period:*
Pendapatan/(rugi) bersih transaksi perdagangan	-	(7.815)	6.712	*Net trading income/(loss)*
Total laba selama periode yang termasuk dalam laba rugi atas aset dan liabilitas yang dimiliki pada akhir tahun pelaporan:				*Total gains for the year included in profit or loss for assets and liabilities held at the end of the reporting period:*
Pendapatan bersih transaksi perdagangan	-	(33.206)	25.827	*Net trading income*

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

b.1. Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Tabel berikut memperlihatkan rekonsiliasi dari saldo awal ke saldo akhir melalui pengukuran nilai wajar pada level 3 hirarki nilai wajar untuk tahun 2019:

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

b.1. Valuation of financial instruments *(continued)*

Financial instruments measured at fair values *(continued)*

The following table shows a reconciliation from the beginning balance to the ending balances for fair value measurements in level 3 of the fair value hierarchy for 2019:

	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for sale*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	
2019				***2019***
Saldo 1 Januari	-	14.506	26.590	*Balance at 1 January*
Laba/(rugi) diakui:				*Total gains/(losses):*
- Dalam laba rugi	-	41.213	14.626	*In profit or loss -*
- Dalam laba rugi dari posisi penyelesaian	-	(1.713)	(72)	*In profit or loss - from positions settled*
Pembelian	-	-	-	*Purchases*
Penyelesaian dan penjualan	-	-	-	*Settlement and sales*
Transfer ke level 3	-	-	-	*Transfer into level 3*
Transfer dari level 3	-	(8.894)	(6.998)	*Transfer from level 3*
Efek kurs	-	(512)	(939)	*Exchange rate difference*
Saldo 31 Desember	-	44.600	33.207	*Balance at 31 December*

Total laba atau rugi yang termasuk dalam laba rugi tahun berjalan pada tabel di atas disajikan dalam laporan laba rugi sebagai berikut:

Total gains or losses included in profit or loss for the year in the above table are presented in the statement of profit or loss as follows:

	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for sale*	Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	
2019				***2019***
Total laba selama periode yang termasuk dalam laba rugi:				*Total gains for the end of the reporting period:*
Pendapatan/(rugi) bersih transaksi perdagangan	-	41.213	(14.626)	*Net trading income/(loss)*
Total laba selama periode yang termasuk dalam laba rugi atas aset dan liabilitas yang dimiliki pada akhir tahun pelaporan:				*Total gains for the year included in profit or loss for assets and liabilities held at the end of the reporting period:*
Pendapatan bersih transaksi perdagangan	-	30.606	7.557	*Net trading income*

5. PENGGUNAAN TAKSIRAN DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

b. Sumber akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

b.1. Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

Penyesuaian nilai wajar

Penyesuaian atas nilai wajar diterapkan ketika Bank mempertimbangkan bahwa terdapat faktor-faktor tambahan yang dipertimbangkan oleh pelaku pasar tapi tidak terdapat di dalam teknik penilaian. Tingkat penyesuaian atas nilai wajar tergantung pada banyak faktor yang spesifik terhadap entitas, sejauh Bank berkeyakinan bahwa pelaku pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam menentukan harga transaksi.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar dikategorikan sebagai level 2 dalam hirarki nilai wajar, kecuali untuk kredit yang diberikan kepada nasabah, wesel ekspor, pinjaman, dan pinjaman subordinasi dikategorikan sebagai level 3 dalam hirarki nilai wajar.

Nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar dijelaskan pada Catatan 27.

b.2. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kebijakan akuntansi Bank memberikan acuan untuk menetapkan aset dan liabilitas keuangan ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi tertentu.

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

b. Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

b.1. Valuation of financial instruments *(continued)*

Fair value adjustments

Fair value adjustments are adopted when the Bank considers that there are additional factors that would be considered by a market participant that are not incorporated within the valuation model. The magnitude of fair value adjustments depends upon many entity-specific factors, to the extent that the Bank believes that a third party market participants would take them into account in pricing a transaction.

Financial instruments not measured at fair values

As of 31 December 2020 and 2019, the fair value of financial instruments not measured at fair value is categorised as level 2 in the fair value hierarchy, except for loans to customers, export bills, borrowing, and subordinated debt are categorized as level 3 in the fair value hierarchy.

The fair value of financial instruments not measured at fair value are explained in Note 27.

b.2. Financial asset and liability classification

The Bank's accounting policies provide scope for assets and liabilities to be designated on inception into different accounting categories in certain circumstances.

6. KAS / ***6. CASH***

	2020	2019	
Rupiah	334.294	454.727	*Rupiah*
Valuta asing	292.913	241.554	*Foreign currencies*
Jumlah	627.207	696.281	*Total*

Saldo kas dalam mata uang Rupiah termasuk jumlah kas pada ATM masing-masing sebesar Rp 46.409 dan Rp 47.187 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Total cash in Rupiah currency included cash in ATMs amounting to Rp 46,409 and Rp 47,187 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

7. GIRO PADA BANK INDONESIA / *7. DEMAND DEPOSIT WITH BANK INDONESIA*

	2020	2019	
Rupiah	2.833.089	4.268.814	*Rupiah*
Valuta asing	1.419.050	3.074.974	*Foreign currencies*
Jumlah	4.252.139	7.343.788	*Total*

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Demand deposits with Bank Indonesia are provided to fulfill Bank Indonesia's Minimum Statutory Reserves requirements (GWM).

Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dan valuta asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah and foreign currencies as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
- Giro Wajib Minimum	4,12%	7,12%	*Minimum Statutory Reserve -*
- Penyangga Likuiditas Makroprudensial	39,17%	29,11%	*Macroprudential Liquidity Ratio -*
GWM valuta asing	4,12%	8,12%	*Foreign currencies GWM*

GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, sedangkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN), dan/atau Surat Berharga Negara (SBN).

Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by Bank in the current accounts with Bank Indonesia, while Macro-prudential Liquidity Buffer (PLM) is a minimum reserve in Rupiah that should be maintained by Bank which comprises of Bank Indonesia Certificates (SBI), Bank Indonesia Deposit Certificates (SDBI), Government Debenture Debt (SUN), and/or Government Commercial Notes (SBN).

Pada tanggal 31 Desember 2020, GWM Bank telah sesuai dengan PBI No. 22/19/PBI/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/35/PADG/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 22/4/PADG/2020 tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 22/4/PBI/2020 tentang insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona, dimana GWM Rupiah dipenuhi secara harian sebesar 3% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 3% serta valuta asing sebesar 4%.

As of 31 December 2020, the Bank's Minimum Statutory Reserves complies with BI regulation No. 22/19/PBI/2020 dated 16 December 2020 and Governor Members Regulation No. 22/35/PADG/2020 dated 23 December 2020 regarding the Amendment of Governor Members Regulation No. 22/4/PADG/2020 regarding incentives for Bank that funding certain economic sector as countermeasures for economic downturn due to corona virus, with Rupiah Statutory Reserves is fulfilled on a daily basis of 3% and an average basis for a certain reporting period of 3% and foreign currencies of 4%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, GWM Bank telah sesuai dengan PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif 1 Juli 2019, dimana GWM Rupiah sebesar 6% serta valuta asing sebesar 8%. GWM Rupiah dipenuhi secara harian sebesar 3% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 3%.

As of 31 December 2019, the Bank's Minimum Statutory Reserves complies with BI regulation No. 20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 and Governor Members Regulation No. 21/14/PADG/2019 dated 26 June 2019 regarding the second Amendment of Governor Members Regulation No. 20/10/PADG/2018 dated 31 May 2018 regarding Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit which effective since 1 July 2019, with Rupiah 6% and foreign currencies of 8%. Rupiah Statutory Reserves is fulfilled on a daily basis of 3% and an average basis for a certain reporting period of 3%.

7. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

GWM RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Sesuai dengan perubahan terakhir PBI No. 20/4/PBI/2018 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019, besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM RIM ditetapkan batas bawah RIM target 84% dan batas atas RIM target 94% serta KPMM insentif 14%. Pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan PADG No.22/11/ PADG/2020 efektif 1 Mei 2020, ketentuan parameter disinsentif batas bawah dan batas atas adalah 0. GWM RIM pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 0%.

Bank telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang GWM Bank Umum Konvensional pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

7. DEMAND DEPOSIT WITH BANK INDONESIA *(continued)*

RIM Statutory Reserve is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of a Current account with Bank Indonesia. In accordance with the latest amendment in PBI No. 20/4/PBI/2018 and Governor Members Regulation No. 21/22/PADG/2019 dated 28 November 2019, the amount and parameters used for the LFR Statutory Reserve calculation is set at the minimum target of RIM at 84% and the maximum target of RIM at 94%, and incentive CAR at 14%. As at 31 December 2020, in compliance with PADG NO.22/11/PADG/2020 effective per 1 May 2020, the requirement for disincentive parameter at bottom and upper line is 0. The GWM on RIM as of 31 December 2020 and 31 December 2019 are 0%, respectively.

The Bank has fulfilled the prevailing Bank Indonesia's Regulation regarding GWM for Conventional Banks as at 31 December 2020 and 2019.

8. GIRO PADA BANK-BANK LAIN

8. DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS

	2020	2019	
Rupiah	65.840	63.753	*Rupiah*
Valuta asing	3.674.900	2.197.382	*Foreign currencies*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(107)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah giro pada bank-bank lain - bersih	3.740.633	2.261.135	*Total demand deposits with other banks -net*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa saldo penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai giro pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020.

The Bank's management believes that the balance of allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment on demand deposits with other banks as of 31 December 2020.

9. PENEMPATAN PADA BANK-BANK LAIN

9. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

Penempatan pada bank-bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Placements with other banks by currency were as follows:

	2020	2019	
Rupiah	135.000	-	*Rupiah*
Valuta asing	10.519.314	7.696.511	*Foreign currencies*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(375)	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah penempatan pada bank-bank lain	10.653.939	7.696.511	*Total placements with other banks*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa saldo penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai penempatan pada bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020.

The Bank's management believes that the balance of allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment on placements with other banks as of 31 December 2020.

10. EFEK-EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI / *10. INVESTMENT SECURITIES*

Pada tanggal 31 Desember 2020, seluruh efek-efek untuk tujuan investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (2019: tersedia untuk dijual). Rincian efek-efek untuk tujuan investasi berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019, all investment securities were classified as fair value through other comprehensive income (2019: available-for-sale). Details of investment securities by type are as follows:

	2020	2019	
Tersedia untuk dijual			*Available for sale*
Obligasi pemerintah	-	9.264.204	*Government bonds*
Sertifikat Bank Indonesia	-	2.779.643	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi pemerintah - sukuk	-	2.374.955	*Government bonds – sukuk*
Jumlah	-	14.418.802	*Total*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			*Fair value through other comprehensive income*
Obligasi pemerintah	14.121.011	-	*Government bonds*
Obligasi pemerintah - sukuk	3.739.811	-	*Government bonds – sukuk*
Jumlah	17.860.822	-	*Total*
Jumlah	17.860.822	14.418.802	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua efek-efek untuk tujuan investasi merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of 31 December 2020 and 2019, investment securities were all made with third parties.

Obligasi pemerintah - Sukuk yang dimiliki oleh Bank merupakan obligasi yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Penerbit SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran bagi hasil tetap.

*Government bonds - Sukuk held by the Bank are the bonds issued by the Government of Republic of Indonesia and Perusahaan Penerbit SBSN (*Surat Berharga Syariah Negara*) under the sharia principle with fixed revenue sharing payment.*

Perubahan rugi/laba yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movement of unrealised loss/gain from the change in fair value of investment securities during the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Saldo 1 Januari - sebelum pajak penghasilan tangguhan	177.842	(83.923)	*Balance - 1 January before deferred income tax*
Penambahan rugi/(laba) yang belum direalisasi selama tahun berjalan, bersih	450.007	261.765	*Addition of unrealised loss/(gain) during the year, net*
Jumlah - sebelum pajak penghasilan tangguhan	627.849	177.842	*Total - before deferred income tax*
Penyesuaian tarif pajak (Catatan 34g)	17.892	-	*Tax rate adjustment (Note 34g)*
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 34g)	(143.462)	(44.461)	*Deferred income tax (Note 34g)*
Saldo 31 Desember - bersih	502.279	133.381	*Balance 31 December - net*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai efek-efek untuk tujuan investasi pada tanggal 31 Desember 2020.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses was adequate to cover possible impairment on investment securities as of 31 December 2020.

11. ASET KEUANGAN DALAM KELOMPOK DIPERDAGANGKAN / *11. FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING*

Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari:

Financial assets held for trading consist of the following:

	2020	2019	
Obligasi pemerintah	1.155.381	2.295.089	*Government bonds*
Obligasi pemerintah - sukuk	62.336	568.649	*Government bonds - sukuk*
Jumlah	1.217.717	2.863.738	*Total*

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF / *12. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES*

Tagihan dan liabilitas derivatif terdiri dari:

Derivative receivables and payables consist of the following:

Instrumen	2020 Jumlah nosional/ *Notional amount*	2020 Nilai wajar/*Fair values* Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	2020 Nilai wajar/*Fair values* Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	*Instruments*
Tidak dikategorikan sebagai lindung nilai				***Not designed as hedges***
Kontrak valuta berjangka	26.699.836	481.936	466.261	*Currency forward contracts*
Kontrak *swap* suku bunga	8.302.656	93.527	92.589	*Interest rate swap contracts*
Kontrak *cross currency swap*	4.916.958	89.078	92.078	*Cross-currency swap contracts*
Kontrak tunai valuta asing	2.403.824	6.946	8.588	*Currency spot contracts*
Kontrak *currency option*	28.242	11	10	*Currency option contracts*
		671.498	659.526	

Instrumen	2019 Jumlah nosional/ *Notional amount*	2019 Nilai wajar/*Fair values* Tagihan derivatif/ *Derivative receivables*	2019 Nilai wajar/*Fair values* Liabilitas derivatif/ *Derivative payables*	*Instruments*
Tidak dikategorikan sebagai lindung nilai				***Not designed as hedges***
Kontrak valuta berjangka	24.044.836	240.084	293.602	*Currency forward contracts*
Kontrak *cross currency swap*	5.486.172	131.463	79.560	*Cross-currency swap contracts*
Kontrak *swap* suku bunga	11.547.831	96.926	91.847	*Interest rate swap contracts*
Kontrak tunai valuta asing	2.402.788	3.382	4.246	*Currency spot contracts*
Kontrak *currency option*	640.719	4.876	4.286	*Currency option contracts*
		476.731	473.541	

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif yang perlu diakui pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Bank's management believes that there was no allowance for impairment losses on derivative receivables to be recognised as of 31 December 2020 and 2019.

13. TAGIHAN DAN UTANG AKSEPTASI / *13. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES*

	2020 Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	2020 Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	2019 Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	2019 Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	
Rupiah	674.157	(674.157)	1.093.157	(1.093.157)	*Rupiah*
Valuta asing	1.372.900	(1.372.900)	1.508.771	(1.508.771)	*Foreign currencies*
Total	2.047.057	(2.047.057)	2.601.928	(2.601.928)	*Total*
Dikurangi :					*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(25.398)		-		*Allowance for impairment losses*
Jumlah	2.021.659	(2.047.057)	2.601.928	(2.601.928)	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2020, manajemen Bank berkeyakinan bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai tagihan akseptasi.

As of 31 December 2020, the Bank's management believes that the allowance for impairment losses was adequate to cover possible impairment on acceptance receivables.

14. KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH / *14. LOANS TO CUSTOMERS*

Kredit yang diberikan kepada nasabah pada biaya perolehan diamortisasi:

Loans to customers at amortised cost:

a. Berdasarkan jenis kredit / *a. By type of loan*

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
Modal kerja	24.649.653	25.039.245	*Working capital*
Investasi	5.036.804	3.441.247	*Investment*
Konsumsi	3.358.313	3.908.581	*Consumer*
Karyawan	700.983	758.710	*Employee*
Jumlah - Rupiah	33.745.753	33.147.783	*Total - Rupiah*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Modal kerja	20.283.422	28.916.191	*Working capital*
Investasi	4.355.743	5.568.121	*Investment*
Konsumsi	9.253	24.965	*Consumer*
Jumlah - valuta asing	24.648.418	34.509.277	*Total - foreign currencies*
Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah	58.394.171	67.657.060	*Total loans to customers*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.059.585)	(2.123.183)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih	55.334.586	65.533.877	*Total loans to customers - net*

b. Berdasarkan sektor ekonomi / *b. By economic sector*

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
Perindustrian	7.192.063	9.038.809	*Industry*
Perdagangan, restoran dan hotel	6.779.790	7.941.189	*Trading, restaurant and hotel*
Pengangkutan, pergudangan dan jasa komunikasi	4.866.190	2.198.124	*Transportation, warehousing and communication*
Konstruksi	4.693.739	4.123.410	*Construction*
Jasa-jasa usaha	4.666.585	4.706.503	*Business services*
Jasa-jasa sosial dan masyarakat	1.340.009	88.884	*Social and public services*
Pertanian, perkebunan dan sarana perkebunan	97.186	379.035	*Agriculture, plantation and plantation improvement*
Pertambangan	45.659	375	*Mining*
Listrik, gas dan air	5.235	4.163	*Electricity, gas and water*
Lainnya	4.059.297	4.667.291	*Others*
Jumlah - Rupiah	33.745.753	33.147.783	*Total - Rupiah*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Perindustrian	16.225.033	18.576.706	*Industry*
Perdagangan, restoran dan hotel	3.074.912	4.854.423	*Trading, restaurant and hotel*
Jasa-jasa usaha	2.016.688	3.596.684	*Business services*
Pengangkutan, pergudangan dan jasa komunikasi	1.348.053	2.365.070	*Transportation, warehousing and communication*
Pertambangan	1.161.402	4.042.383	*Mining*
Pertanian, perkebunan dan sarana perkebunan	540.027	1.008.045	*Agriculture, plantation and plantation improvement*
Konstruksi	273.050	40.463	*Construction*
Jasa-jasa sosial dan masyarakat	-	538	*Social and public services*
Lainnya	9.253	24.965	*Others*
Jumlah - valuta asing	24.648.418	34.509.277	*Total - foreign currencies*
Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah	58.394.171	67.657.060	*Total loans to customers*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.059.585)	(2.123.183)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan nasabah - bersih	55.334.586	65.533.877	*Total loans to customers - net*

14. KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH (lanjutan) / *14. LOANS TO CUSTOMERS (continued)*

c. Berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia / *c. By Bank Indonesia classification*

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
Lancar	31.927.400	31.735.365	*Pass*
Dalam perhatian khusus	352.710	419.406	*Special mention*
Kurang lancar	232.084	42.913	*Substandard*
Diragukan	59.647	101.419	*Doubtful*
Macet	1.173.912	848.680	*Loss*
Jumlah - Rupiah	33.745.753	33.147.783	*Total - Rupiah*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Lancar	22.863.577	32.996.601	*Pass*
Dalam perhatian khusus	1.236.594	801.246	*Special mention*
Kurang lancar	50.012	39.499	*Substandard*
Diragukan	-	263.486	*Doubtful*
Macet	498.235	408.445	*Loss*
Jumlah - valuta asing	24.648.418	34.509.277	*Total - foreign currencies*
Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah	58.394.171	67.657.060	*Total loans to customers*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.059.585)	(2.123.183)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah - bersih	55.334.586	65.533.877	*Total loans to customers – net*

d. Berdasarkan *stage* / *d. By stage*

	2020			
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Jumlah/ *Total*
Saldo awal				67.657.060
Dampak penerapan awal PSAK 71				-
Saldo, setelah dampak penerapan awal PSAK 71	45.922.046	18.933.678	2.801.336	67.657.060
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	7.864.069	(7.859.816)	(4.253)	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(6.734.536)	6.736.120	(1.584)	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(713.529)	(331.622)	1.045.151	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(3.515.623)	(5.544.586)	(203.006)	(9.263.215)
Penghapusan	-	-	(553.229)	(553.229)
Selisih kurs	371.451	146.816	35.288	553.555
Saldo akhir	43.193.878	12.080.590	3.119.703	58.394.171

	2020			
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Jumlah/ *Total*
Saldo awal				*Beginning balance*
Dampak penerapan awal PSAK 71				*Effect on initial implementation SFAS 71*
Saldo, setelah dampak penerapan awal PSAK 71				*Balance, after effect on initial implementation SFAS 71*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)				*Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)				*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)				*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali				*Net changes in exposure and remeasurement*
Penghapusan				*Written-off*
Selisih kurs				*Exchange rate difference*
Saldo akhir				***Ending balance***

e. Kredit modal kerja terdiri dari pinjaman rekening koran dan pinjaman dengan surat promes.

Kredit investasi adalah pemberian fasilitas kepada debitur yang tujuan penggunaannya untuk investasi dan jangka waktunya disesuaikan dengan jangka waktu investasinya. Kredit investasi diberikan dalam bentuk *term-loan.*

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, *personal loans*, dan kartu kredit.

e. *Working capital loans consist of demand deposits loans and loans with promissory notes.*

Investment loans are the facilities given to debtors for investment purposes with terms depend on the investment period. Investment loans consist of term-loans.

Consumer loans consist of housing, motor vehicle ownership loans, personal loans, and credit card.

14. KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH (lanjutan)

14. LOANS TO CUSTOMERS *(continued)*

f. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Partisipasi Bank dalam pinjaman sindikasi adalah berkisar antara 1,00% - 40,00% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

f. *The syndicated loans represent loans granted to debtors under syndicated loan agreements with other banks. The Bank's participation in syndicated loans is ranging 1.00% - 40.00% as of 31 December 2020 and 2019.*

g. Selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Bank melakukan negosiasi kembali kredit dengan perpanjangan jangka waktu serta mengubah persyaratan pokok dan/atau bunga.

g. *For the years ended 31 December 2020 and 2019, the Bank renegotiated loans through the extension of the period and modification of terms on principal and/or interest.*

Program restrukturisasi terkait dengan COVID-19 juga dikategorikan sebagai kredit yang direnegosiasi.

COVID-19 restructuring program was also categorised as renegotiated loans.

Berdasarkan jenis kredit yang telah dinegoisasikan kembali:

By type of renegotiated loans

	2020	2019	
Investasi	709.013	422.574	*Investment*
Modal kerja	517.446	312.754	*Working capital*
Konsumsi	182.758	38.429	*Consumer*
	1.409.217	773.757	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(450.038)	(266.653)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang telah dinegosiasikan kembali - bersih	959.179	507.104	*Total of renegotiated loans - net*

Berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia:

By Bank Indonesia classification:

	2020	2019	
Lancar	777.727	28.560	*Pass*
Dalam perhatian khusus	59.814	98.148	*Special mention*
Kurang lancar	43.997	60.227	*Substandard*
Diragukan	183	16.165	*Doubtful*
Macet	527.496	570.657	*Loss*
	1.409.217	773.757	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(450.038)	(266.653)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang telah dinegosiasikan kembali - bersih	959.179	507.104	*Total of renegotiated loans - net*

h. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

h. *As of 31 December 2019, the Bank complied with Legal Lending Limit (LLL) requirements for both related parties and third parties.*

Tidak terdapat pelanggaran pada tanggal 31 Desember 2020, hanya terdapat pelampauan yang disebabkan oleh perubahan ketentuan yaitu dengan berlakunya POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Bank telah memiliki rencana tindak dengan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

There was no breach as of 31 December 2020, there was only an excess due to change in regulation namely the effective of POJK No.38/POJK.03/2019 regarding changes on OJK regulation No.32/POJK.03/2018 in relation to Legal Lending Limit and Large Exposure for Commercial Bank. Bank already has action plan with targeted timeline in line with prevailing regulation.

14. KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH (lanjutan) / *14. LOANS TO CUSTOMERS (continued)*

i. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

i. *As of 31 December 2020 and 2019, details of impaired loans based on economic sector are as follows:*

	2020		2019		
	Kredit bermasalah/ *Non-performing loans*	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Kredit bermasalah/ *Non-performing loans*	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Perindustrian	693.532	(473.666)	858.946	(369.301)	*Industry*
Perdagangan, restoran dan hotel	592.931	(424.266)	620.930	(411.134)	*Trading, restaurant and hotel*
Pengangkutan	472.414	(403.727)	30.575	(12.078)	*Transportation*
Konstruksi	77.148	(71.260)	45.898	(36.388)	*Construction*
Jasa-jasa usaha	52.432	(14.999)	57.761	(5.526)	*Business services*
Pertanian	15.610	(13.006)	15.968	(14.185)	*Agriculture*
Pertambangan	-	-	374	(198)	*Mining*
Lainnya	109.823	(61.308)	73.990	(31.822)	*Others*
Jumlah	2.013.890	(1.462.232)	1.704.442	(880.632)	*Total*

j. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

j. *As of 31 December 2020 and 2019, the Non-Performing Loan (NPL) ratios are as follows:*

	2020	2019	
NPL bruto	3,45%	2,52%	*Gross NPL*
NPL neto	0,94%	1,22%	*Net NPL*

k. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kredit yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai sebesar Rp 3.110.883 dan Rp 5.411.515 (Catatan 18).

k. *As of 31 December 2020 and 2019, loans collateralised by cash collateral amounted to Rp 3,110,883 and Rp 5,411,515 (Note 18).*

l. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

l. *The movement of allowance for impairment losses on loans to customers are as follows:*

	2020				
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal				2.123.183	*Beginning balance*
Dampak penerapan awal PSAK 71 (lihat Catatan 37)				(169.001)	*Effect on initial implementation SFAS 71 (refer to Note 37)*
Saldo, setelah dampak penerapan awal PSAK 71	256.127	267.021	1.431.034	1.954.182	*Balance, after effect on initial implementation SFAS 71*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	96.866	(90.945)	(5.921)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(34.036)	34.036	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(4.472)	(33.463)	37.935	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(5.151)	516.350	1.077.457	1.588.656	*Net changes in exposure and remeasurement*
Penghapusan	-	-	(553.229)	(553.229)	*Written-off*
Pemulihan	-	-	121.351	121.351	*Recovery*
Efek diskonto	-	-	(68.193)	(68.193)	*Discount effects*
Selisih kurs	1.440	2.976	12.402	16.818	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	310.774	695.975	2.052.836	3.059.585	*Ending balance*

14. KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH (lanjutan)

I. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

14. LOANS TO CUSTOMERS *(continued)*

I. *The movement of allowance for impairment losses on loans to customers are as follows: (continued)*

	2019			
	Rupiah	**Valuta asing/ *Foreign currencies***	**Jumlah/ *Total***	
Penyisihan kerugian penurunan nilai kolektif:				*Collective allowance for impairment losses:*
Saldo, 1 Januari 2019	425.733	386.049	811.782	*Balance, 1 January 2019*
Penambahan penyisihan	129.732	(18.522)	111.210	*Additions of the allowance*
Efek diskonto	(197)	-	(197)	*Effect of discounting*
Penghapusan kredit	(257.405)	-	(257.405)	*Write-offs*
Penerimaan atas kredit yang telah dihapusbukukan	100.480	-	100.480	*Recovery of loans previously written-off*
Selisih kurs	-	(11.926)	(11.926)	*Exchange rate difference*
Saldo, 31 Desember 2019	398.343	355.601	753.944	*Balance, 31 December 2019*
Penyisihan kerugian penurunan nilai spesifik:				*Specific allowance for impairment losses:*
Saldo, 1 Januari 2019	920.539	399.007	1.319.546	*Balance, 1 January 2019*
Penambahan penyisihan	43.741	516.209	559.950	*Additions of the allowance*
Efek diskonto	(49.987)	(39.371)	(89.358)	*Effect of discounting*
Penghapusan kredit	(356.036)	(29.791)	(385.827)	*Write-offs*
Penerimaan atas kredit yang telah dihapusbukukan	1.472	-	1.472	*Recovery of loans previously written-off*
Selisih kurs	-	(36.544)	(36.544)	*Exchange rate difference*
Saldo, 31 Desember 2019	559.729	809.510	1.369.239	*Balance, 31 December 2019*
Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai	958.072	1.165.111	2.123.183	*Total allowance for impairment losses*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai kredit yang diberikan kepada nasabah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover any possible impairment on loans to customers.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset lain-lain Bank adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's other assets are as follows:

	2020	**2019**	
Transaksi dalam proses penyelesaian	1.254.682	662.699	*Transaction in process of settlement*
Pajak dibayar dimuka (lihat Catatan 34a)	1.005.429	1.404.507	*Prepaid tax (refer to Note 34a)*
Pendapatan yang masih akan diterima	639.325	558.313	*Accrued income*
Tagihan transaksi *Letter of Credit*	441.389	125.816	*Letter of Credit transactions*
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 156.382 pada 31 Desember 2020 dan Rp 104.073 pada 31 Desember 2019	319.413	436.898	*Right-of-use assets - net of accumulated depreciation of Rp 156.382 on 31 December 2020 and Rp 104,073 on 31 December 2019*
Aset yang dimiliki untuk dijual	142.149	142.280	*Assets held for sale*
Uang muka	33.059	16.707	*Advances*
Jaminan setoran	31.077	49.884	*Security deposits*
Beban dibayar dimuka	4.210	27.886	*Prepayments*
Lainnya	57.807	26.078	*Others*
Jumlah	3.928.540	3.451.068	*Total*

15. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *15. OTHER ASSETS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset hak-guna terdiri dari:

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's rights-of-use assets consist of the following:

	2020				
	Saldo awal/ *Opening balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Closing balance*	
Harga perolehan					***Cost***
Bangunan	531.253	105.695	(171.495)	465.453	*Buildings*
Kendaraan bermotor	9.718	1.090	(466)	10.342	*Motor vehicles*
	540.971	106.785	(171.961)	475.795	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan	(99.944)	(87.560)	39.431	(148.073)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(4.129)	(4.180)	-	(8.309)	*Motor vehicles*
	(104.073)	(91.740)	39.431	(156.382)	
Nilai buku bersih	436.898			319.413	***Net book value***

	2019					
	Saldo awal/ *Opening balance*	Dampak PSAK 73/ *Impact of SFAS 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Saldo akhir/ *Closing balance*	
Harga perolehan						***Cost***
Bangunan	-	417.868	117.282	(3.897)	531.253	*Buildings*
Kendaraan bermotor	-	9.718	-	-	9.718	*Motor vehicles*
	-	427.586	117.282	(3.897)	540.971	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	-	-	(103.663)	3.719	(99.944)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	-	-	(4.129)	-	(4.129)	*Motor vehicles*
	-	-	(107.792)	3.719	(104.073)	
Nilai buku bersih	-				436.898	***Net book value***

16. ASET TETAP / *16. FIXED ASSETS*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap terdiri dari:

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's fixed assets consist of the following:

	2020					
	Saldo awal/ *Opening balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Closing balance*	
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	130.994	-	-	-	130.994	*Land*
Bangunan	33.790	-	-	-	33.790	*Buildings*
Perbaikan gedung	549.982	20.193	(97.477)	-	472.698	*Buildings improvement*
Perabot dan perlengkapan kantor	867.600	28.742	(61.067)	(958)	834.317	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan bermotor	421	-	(421)	-	-	*Motor vehicles*
Aset dalam penyelesaian	-	13.834	-	-	13.834	*Construction in progress*
	1.582.787	62.769	(158.965)	(958)	1.485.633	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(20.197)	(1.189)	-	-	(21.386)	*Buildings*
Perbaikan gedung	(316.846)	(57.669)	81.966	-	(292.549)	*Buildings improvement*
Perabot dan perlengkapan kantor	(529.166)	(132.153)	59.261	976	(601.082)	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan bermotor	(421)	-	421	-	-	*Motor vehicles*
	(866.630)	(191.011)	141.648	976	(915.017)	
Nilai buku bersih	716.157				570.616	***Net book value***

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset tetap terdiri dari: (lanjutan)

***16. FIXED ASSETS** (continued)*

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's fixed assets consist of the following: (continued)

	2019					
	Saldo awal/ *Opening balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Closing balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Tanah	131.696	-	(702)	-	130.994	*Land*
Bangunan	35.022	-	(1.232)	-	33.790	*Buildings*
Perbaikan gedung	475.645	146.123	(71.786)	-	549.982	*Buildings improvement*
Perabot dan perlengkapan kantor	929.530	101.889	(163.812)	(7)	867.600	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan bermotor	1769	-	(1.348)	-	421	*Motor vehicles*
	1.573.662	248.012	(238.880)	(7)	1.582.787	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(19.262)	(1.644)	709	-	(20.197)	*Buildings*
Perbaikan gedung	(322.712)	(59.754)	65.620	-	(316.846)	*Buildings improvement*
Perabot dan perlengkapan kantor	(560.719)	(130.932)	162.478	7	(529.166)	*Office furniture and fixtures*
Kendaraan bermotor	(1.769)	-	1.348	-	(421)	*Motor vehicles*
	(904.462)	(192.330)	230.155	7	(866.630)	
Nilai buku bersih	669.200				716.157	***Net book value***

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset tetap yang dimiliki Bank merupakan kepemilikan langsung.

As at 31 December 2020 and 2019, all fixed assets held by the Bank are direct ownership.

17. ASET TAKBERWUJUD

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset takberwujud terdiri dari:

17. INTANGIBLE ASSETS

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's intangible assets consist of the following:

	2020					
	Saldo awal/ *Opening balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Closing balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	321.319	9.870	-	958	332.147	*Software*
	321.319	9.870	-	958	332.147	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(184.254)	(57.796)	-	(976)	(243.026)	*Software*
	(184.254)	(57.796)	-	(976)	(243.026)	
Nilai buku bersih	137.065				89.121	***Net book value***

	2019					
	Saldo awal/ *Opening balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo akhir/ *Closing balance***	
Harga perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	319.455	16.941	(15.084)	7	321.319	*Software*
	319.455	16.941	(15.084)	7	321.319	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(141.414)	(57.570)	14.737	7	(184.254)	*Software*
	(141.414)	(57.570)	14.737	7	(184.254)	
Nilai buku bersih	178.041				137.065	***Net book value***

Seluruh aset takberwujud yang ada pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank.

All of the intangible assets as at 31 December 2020 and 2019 are fully used to support Bank's operation activities.

18. SIMPANAN DARI NASABAH / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

Simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Deposits from customers as of 31 December 2020 and 2019 consisted of the following:

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
Giro	24.362.497	18.053.679	*Demand deposits*
Deposito berjangka dan *deposits on call*	17.221.473	20.383.985	*Time deposits and deposits on call*
Tabungan	6.607.904	4.757.848	*Saving accounts*
	48.191.874	43.195.512	
Valuta asing			*Foreign currencies*
Giro	11.508.614	9.910.531	*Demand deposits*
Tabungan	8.673.368	7.641.063	*Saving accounts*
Deposito berjangka dan *deposits on call*	3.785.975	4.722.151	*Time deposits and deposits on call*
	23.967.957	22.273.745	
Jumlah	72.159.831	65.469.257	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, termasuk di dalam simpanan dari nasabah adalah jaminan untuk kredit yang diberikan kepada nasabah masing-masing sebesar Rp 1.947.360 dan Rp 1.683.679.

As of 31 December 2020 and 2019, included in deposits from customers are collaterals for loans to customers amounted Rp 1,947,360 and Rp 1,683,679, respectively.

19. SIMPANAN DARI BANK - BANK LAIN / *19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

Simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Deposits from other banks as at 31 December 2020 and 2019 consisted of the following:

	2020	2019	
Rupiah			*Rupiah*
Giro	4.464.019	3.599.982	*Demand deposits*
Deposito berjangka	-	1.435.000	*Time deposits*
	4.464.019	5.034.982	
Valuta asing			*Foreign currencies*
Giro	27.696	23.533	*Demand deposits*
Jumlah	4.491.715	5.058.515	*Total*

20. BEBAN AKRUAL DAN PROVISI / *20. ACCRUALS AND PROVISIONS*

	2020	2019	
Beban yang masih harus dibayar	331.070	336.542	*Accrued expenses*
Bunga yang masih harus dibayar	76.507	146.820	*Accrued interest expenses*
Provisi pemutusan hubungan kerja (Catatan 3t.4)	6.165	19.308	*Termination provisions (Note 3t.4)*
Jumlah	413.742	502.670	*Total*

21. LIABILITAS LAIN-LAIN / *21. OTHER LIABILITIES*

	2020	2019	
Transaksi dalam proses penyelesaian	1.427.758	601.088	*Transaction in process of settlement*
Uang jaminan	709.733	731.486	*Security deposits*
Rekening *suspense*	442.670	363.068	*Suspense accounts*
Kewajiban transaksi *Letter of Credit*	441.389	125.816	*Letter of Credit transactions payables*
Pendapatan ditangguhkan	387.448	434.512	*Deferred income*
Utang pajak lainnya	313.783	259.231	*Other tax liabilities*
Liabilitas sewa	278.567	372.374	*Lease liability*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontijensi	117.350	-	*Allowance for impairment losses of commitment and contigencies*
Transfer, inkaso, dan kliring	39.192	38.525	*Transfers, collection and clearing*
Lainnya	120.845	58.780	*Others*
Jumlah	4.278.735	2.984.880	*Total*

Uang jaminan termasuk uang yang diberikan oleh nasabah kepada Bank sebagai jaminan atas L/C impor masing-masing sebesar Rp 707.557 dan Rp 729.922 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The security deposits included deposits from customers for and import L/C of Rp 707,557 and Rp 729,922 as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

22. PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

Bank tidak memiliki program imbalan kerja berbasis saham tersendiri dan berpartisipasi dalam program dari grup HSBC. Program ini ditujukan kepada karyawan tertentu tanpa terkait dengan kinerja. Saham diberikan kepada karyawan dalam tiga tahun dengan komposisi yang sama di setiap tahunnya dengan syarat karyawan tetap bekerja dalam grup HSBC selama periode *vesting*.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saham yang masih beredar masing-masing sejumlah 222.855 (dalam nilai penuh) dan 165.673 (dalam nilai penuh) lembar.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, Bank mengakui beban masing-masing sebesar Rp 12.898 dan Rp 17.632 dalam laporan laba rugi terkait dengan pembayaran imbalan kerja berbasis saham.

Harga pasar rata-rata tertimbang dari saham yang diberikan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing senilai Rp 73.540 dan Rp 112.973 (dalam Rupiah penuh).

22. SHARE-BASED PAYMENT

The Bank has no specific share-based compensation plan of its own and participates in the HSBC group share plan. The plan is made to certain employees with no associated with performance conditions. Shares are released to employees over three years in equal portion for each year, provided the employees remain continuously employed within the HSBC group during the vesting period.

As of 31 December 2020 and 2019, the outstanding number of shares was 222,855 (in full amount) and 165,673 (in full amount), respectively.

During the year ended 31 December 2020 and 2019, the Bank recognised an expense of Rp 12,898 and Rp 17,632, respectively, to the profit or loss in respect of share-based payment compensation plan.

The weighted average fair value of share awarded in the years ended 31 December 2020 and 2019 was Rp 73,540 and Rp 112,973, respectively (in Rupiah full amount).

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

Employee benefits obligation as of 31 December 2020 and 2019 consisted of the following:

	2020	2019	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	178.723	219.433	*Short-term employee benefits obligations*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	321.003	310.113	*Post-employment benefits obligations*
Liabilitas imbalan kerja	499.726	529.546	*Employee benefits obligations*

Sejak Januari 2017, Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dan dikelola serta diadministrasikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia. Iuran untuk dana pensiun dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Bank wajib memberikan imbalan pasca-kerja manfaat pasti kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Dengan demikian Bank mencatat liabilitas yang mencerminkan imbalan pasca-kerja yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 13/2003.

Since January 2017, the Bank has a defined contribution pension plan that covers all permanent employees and managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia. The contribution of a pension plan is computed based on a certain percentage of employees' basic salary.

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 13/2003 relating to labor regulations, the Bank is required to provide post-employment defined benefits plans to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

Therefore the Bank recorded a liability which represents post-employment benefits as required by Law No. 13/2003.

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai kini kewajiban dan liabilitas imbalan pasca-kerja Bank yang tercatat di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan perubahan liabilitas imbalan pasca-kerja dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

The following table presents the movement in the present value of obligation and the post-employment benefits obligation of the Bank as recorded in the statement of financial position as of 31 December 2020 and 2019, and movement in obligation and expenses recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended 31 December 2020 and 2019:

	2020	2019	
Nilai kini liabilitas pada awal tahun	310.113	301.850	*Present value of obligation at the beginning of year*
Biaya jasa kini	27.366	(4.304)	*Current service cost*
Biaya jasa lalu			*Past service cost*
Keuntungan atas penyelesaian			*Settlement gain*
Biaya bunga	19.816	22.785	*Interest cost*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(11.197)	37.414	*Actuarial loss/(gain)*
Biaya Manfaat Terminasi		11.496	*Termination Benefits Expense*
Imbalan yang dibayar	(25.095)	(59.128)	*Benefits paid*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	321.003	310.113	*Post-employment benefits obligation*
Biaya jasa kini	36.019	34.106	*Current service cost*
Biaya jasa lalu - amandemen program	-	4.559	*Past service cost - program amendment*
Keuntungan jasa lalu – kurtailmen	-	(22.016)	*Past service credit – curtailment*
Keuntungan atas penyelesaian	(8.653)	(20.953)	*Settlement gain*
Biaya bunga	19.816	22.785	*Interest cost*
Biaya Manfaat Terminasi	-	11.496	*Termination benefits expense*
Jumlah beban yang diakui	47.182	29.977	*Total recognised cost*

	2020	2019	
Liabilitas imbalan pasca-kerja, 1 Januari	310.113	301.850	*Post-employment benefits obligation, 1 January*
Beban imbalan pasca-kerja tahun berjalan	47.182	29.977	*Post-employment benefits expense for the year*
Kerugian/(keuntungan) aktuarial tahun berjalan	(11.197)	37.414	*Actuarial loss/(gain) during the year*
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	(25.095)	(59.128)	*Payments of post-employment benefits during the year*
Liabilitas imbalan pasca-kerja, 31 Desember	321.003	310.113	*Post-employment benefits obligation, 31 December*

Perhitungan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan berdasarkan laporan aktuaris independen (PT Towers Watson Purbajaga) tanggal 10 Maret 2021 dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The calculation of post-employment benefits obligation as of 31 December 2020 and 2019 was done based on the independent actuary report (PT Towers Watson Purbajaga) dated 10 March 2021 using major assumptions as follows:

	2020	2019	
Tingkat diskonto	5,50%	6,75%	*Discount rates*
Kenaikan gaji	5,00%	6,50%	*Salary increases*
Metode aktuaria	*Projected unit credit*	*Projected unit credit*	*Valuation cost method*
Umur pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Tabel Mortalitas Indonesia 2019 (TMI 2019)/ *Indonesian Mortality Table 2019 (TMI 2019)*	Tabel Mortalitas Indonesia 2011 (TMI 2011)/ *Indonesian Mortality Table 2011 (TMI 2011)*	*Mortality rates*
Tingkat cacat	10% dari TMI 2019/ *10% of TMI 2019*	10% dari TMI 2011/ *10% of TMI 2011*	*Disability rates*
Tingkat pengunduran diri	15% per tahun pada usia 20 dan menurun secara linear sampai 0% per tahun pada usia 55/ *15% p.a. at 20 and reducing linearly to 0% p.a. at age 55*	15% per tahun pada usia 20 dan menurun secara linear sampai 0% per tahun pada usia 55/ *15% p.a. at 20 and reducing linearly to 0% p.a. at age 55*	*Resignation rates*

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Tabel-tabel dibawah menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto terhadap kewajiban imbalan pasca kerja pada 31 Desember 2020 dan 2019:

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION *(continued)*

The following tables represent the sensitivity analysis of a reasonably possible change in salary increase and discount rate of obligation to post-employment benefit obligation as of 31 December 2020 and 2019:

	2020		2019		
	Peningkatan/ *Increase by* 100 bps	**Penurunan/ *Decrease by* 100 bps**	**Peningkatan/ *Increase by* 100 bps**	**Penurunan/ *Decrease by* 100 bps**	
Tingkat diskonto	(15.705)	17.299	(15.272)	16.742	*Discount rates*
Kenaikan gaji	41.185	(35,417)	36.583	(27.958)	*Salary increases*

Durasi rata-rata tertimbang durasi dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 5,26 tahun dan 5,33 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2020 and 2019 is 5.26 years and 5.33 years, respectively.

Analisis jatuh tempo tidak terdiskonto yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Undiscounted expected maturity analysis of pension benefits are as follows:

	2020	**2019**	
Dalam 10 tahun kedepan	479.746	527.192	*Within next 10 years*
Dalam 10 sampai 20 tahun kedepan	345.693	373.878	*Within next 10 to 20 years*
Dalam 20 sampai 30 tahun kedepan	39.950	43.487	*Within next 20 to 30 years*
Dalam 30 sampai 40 tahun kedepan	18	66	*Within next 30 to 40 years*

24. MODAL SAHAM

Pada tanggal 20 Oktober 2008, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* dengan beberapa pemegang saham utama untuk mengakuisisi 88,89% kepemilikan saham Bank. Berdasarkan perjanjian tersebut, HAPH mengakuisisi 38,84% kepemilikan saham dari PT Lumbung Artakencana, 38,60% dari PT Alas Pusaka dan 11,45% dari beberapa pemegang saham individu. Akuisisi ini berlaku efektif pada saat terjadinya penutupan transaksi.

Pada tanggal 22 Mei 2009, terjadi penutupan transaksi penjualan dan pembelian saham sehingga akuisisi tersebut menjadi efektif.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, akuisisi oleh HAPH di atas dianggap sebagai pengambilalihan perusahaan terbuka yang menyebabkan HAPH harus melaksanakan penawaran tender atas maksimum 270.000.000 saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang mewakili 10,11% dari seluruh modal disetor dan ditempatkan penuh Bank. Penawaran tender dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender yang dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.

Penawaran tender dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni 2009 hingga 23 Juli 2009 dengan harga penawaran tender sebesar Rp 2.652 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selama penawaran tender, sebanyak 269.012.500 (dalam nilai penuh) saham ditawarkan untuk dibeli sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Pernyataan Penawaran Tender.

24. SHARE CAPITAL

On 20 October 2008, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) entered into a Conditional Sale and Purchase Agreement with several major shareholders to acquire 88.89% share ownership of the Bank. Under the terms of the agreement, HAPH acquired 38.84% stake from PT Lumbung Artakencana, 38.60% from PT Alas Pusaka and 11.45% from several individual shareholders. The acquisition became effective upon the closing of the transaction.

On 22 May 2009, the shares sale and purchase transactions were completed and thus, the acquisition became effective.

In accordance with Bapepam-LK rule regarding Take-Over of Public Companies, the above mentioned acquisition by HAPH constitutes a take-over of a public listed company which resulted in HAPH having to conduct a tender offer for a maximum of 270,000,000 shares held by the public shareholders representing 10.11% of the total issued and fully paid-up capital of the Bank. The tender offer was conducted with terms and conditions of the Tender Offer Statement which was declared effective by Bapepam-LK.

The tender offer was conducted from 24 June 2009 until 23 July 2009 with tender offer price at Rp 2,652 (in Rupiah full amount) per share. During the tender offer, the shares being offered were 269,012,500 (in full amount) shares in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer Statement.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Penawaran tender yang diwajibkan Bapepam-LK diselesaikan pada tanggal 12 Agustus 2009. Pembayaran kepada pemegang saham dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2009. Setelah penyelesaian penawaran tender, HAPH memiliki 2.642.312.500 (dalam nilai penuh) saham di Bank yang mewakili 98,96% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Bank.

Sehubungan dengan privatisasi, HAPH melakukan penawaran tender yang dimulai pada tanggal 2 Juli 2015 dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2015. Melalui penawaran tender, HAPH membeli sebanyak 1.619.000 lembar saham dari Pemegang Saham Publik sebesar Rp 10.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selanjutnya saham tersebut dijual kepada PT Bank Central Asia Tbk.

Pada bulan November 2015, Bank merubah nilai nominal saham dari Rp 100 (dalam Rupiah penuh) menjadi Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) serta meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 800.000.000.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 3.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 267.000.000.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 1.586.394.997.000 (dalam Rupiah penuh). Peningkatan modal tersebut dilakukan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.319.394.997 (dalam nilai penuh) saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh).

Perubahan modal saham tersebut di atas dituangkan dalam Akta No. 97 tanggal 16 November 2015 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, mengenai perubahan Anggaran Dasar Bank dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0946124.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 17 November 2015.

Lebih lanjut, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited, PT Bank Central Asia Tbk dan pemegang saham lainnya melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 1.319.395.

Pada bulan November 2016, Bank mengeluarkan saham baru sebanyak 1.000.000.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh). Penambahan modal ini telah dituangkan dalam Akta No. 64 tanggal 9 November 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, mengenai perubahan Anggaran Dasar Bank dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0097602 tanggal 10 November 2016. Penambahan modal ini menyebabkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp 2.586.395.

***24. SHARE CAPITAL** (continued)*

The tender offer required by Bapepam-LK was completed on 12 August 2009. The payment to the shareholders was made on 4 August 2009. After completion of the tender offer, HAPH owns 2,642,312,500 (in full amount) shares of the Bank representing 98.96% of the total issued and fully paid-up capital of the Bank.

Related to privatisation, HAPH performed the tender offer which was started on 2 July 2015 and expired on 4 August 2015. Through the tender offer, HAPH acquired about 1,619,000 shares from Public Shareholders by Rp 10,000 (in Rupiah full amount) per share. Subsequently, those shares were sold to PT Bank Central Asia Tbk.

In November 2015, Bank amended the par value from Rp 100 (in Rupiah full amount) to Rp 1,000 (in Rupiah full amount) and increased the authorized capital from Rp 800,000,000,000 (in Rupiah full amount) to Rp 3,000,000,000,000 (in Rupiah full amount), with issued and fully-paid up capital from Rp 267,000,000,000 (in Rupiah full amount) to Rp 1,586,394,997,000 (in Rupiah full amount). The increase in shared capital was performed by issuing new shares by 1,319,394,997 (in full amount) shares with a par value of Rp 1,000 (in Rupiah full amount).

The above changes of share capital stated in notarial deed No. 97 dated 16 November 2015 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary public in Jakarta, concerning the changes and restatement of the articles of association and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-0946124.AH.01.02. Tahun 2015 dated 17 November 2015.

Furthermore, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited, PT Bank Central Asia Tbk and other shareholders increased the issued and paid-up capital by Rp 1,319,395.

In November 2016, the Bank issued new shares by 1,000,000,000 shares with a nominal value of Rp 1,000 (in Rupiah full amount). The increase of share capital has been stated in a notarial deed No. 64 dated 9 November 2016 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary public in Jakarta, concerning the changes and restatement of the articles of association and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0097602 dated 10 November 2016. This increase caused the share capital to become Rp 2,586,395.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada bulan April 2017, Bank meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 3.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 20.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 2.586.394.997.000 (dalam Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp 10.586.394.997.000 (dalam Rupiah penuh). Peningkatan modal ini dilakukan dengan menerbitkan saham baru sebanyak 8.000.000.000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh).

Perubahan modal saham tersebut di atas dituangkan dalam Akta No. 57 tanggal 12 April 2017 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, mengenai perubahan Anggaran Dasar Bank yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0008618.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 13 April 2017.

Komposisi pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

***24. SHARE CAPITAL** (continued)*

In April 2017, the Bank increased the authorized capital from Rp 3,000,000,000,000 (in Rupiah full amount) to Rp 20,000,000,000,000 (in Rupiah full amount), with issued and fully paid-up capital from Rp 2,586,394,997,000 (in Rupiah full amount) to Rp 10,586,394,997,000 in Rupiah full amount). The increased in share capital was performed by issuing new shares by 8,000,000,000 shares with par value of Rp 1,000 (in Rupiah full amount).

The above changes of share capital stated in notarial deed No. 57 dated 12 April 2017 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notary public in Jakarta, concerning the changes and restatement of articles of association and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the decision Letter No. AHU-0008618.AH.01.02. Year 2017 dated 13 April 2017.

The composition of the Bank's shareholders as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah modal disetor dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham/ *Total paid-up capital at nominal value of Rp 1,000 (in Rupiah full amount) per share*	
HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited	10.473.719.274	98,94%	10.473.719	*HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited*
PT Bank Central Asia Tbk	112.653.737	1,06%	112.654	*PT Bank Central Asia Tbk*
Lainnya	21.986	0,00%	22	*Others*
Jumlah	10.586.394.997	100,00%	10.586.395	*Total*

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR – BERSIH

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 270.000.000 lembar saham Bank kepada masyarakat pada tanggal 8 Januari 2008 dengan nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 1.080 (dalam Rupiah penuh) per saham. Jumlah yang diterima dari penawaran umum adalah sebesar Rp 291.600.

Rincian tambahan modal disetor - bersih dari penawaran umum perdana saham Bank per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL – NET

The Bank issued 270,000,000 shares with a par value of Rp 100 (in Rupiah full amount) per share, through an initial public offering on 8 January 2008 with an offering price of Rp 1,080 (in Rupiah full amount) per share. Total proceeds from the public offering amounted to Rp 291,600.

Details of additional paid-in capital - net from initial public offering as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	Jumlah/ *Total*	
Jumlah yang diterima dari penerbitan 270.000.000 lembar saham	291.600	*Proceeds from the issuance of 270,000,000 shares*
Jumlah yang dicatat sebagai modal disetor	(27.000)	*Amount recorded as paid-in capital*
	264.600	
Beban emisi saham	(6.990)	*Share issuance costs*
Jumlah yang dicatat sebagai tambahan modal disetor	257.610	*Amount recorded as additional paid-in capital*

26. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Cadangan umum dan wajib dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif sejak 16 Agustus 2007 yang mengharuskan Perseroan membentuk cadangan umum dengan jumlah minimum 20% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor. Tidak ada batas waktu dalam pembentukan cadangan ini. Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo cadangan umum adalah Rp 49.419 (2019: Rp 26.306).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang dinyatakan dalam Akta dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 289 tanggal 28 Mei 2019, para pemegang saham Bank menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp 8.945 dari saldo laba tahun 2018.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang dinyatakan dalam Akta dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 184 tanggal 30 Juni 2020, para pemegang saham Bank menyetujui pembentukan cadangan umum sebesar Rp 23.113 dari saldo laba tahun 2019 serta pembagian dividen tunai sejumlah Rp 636.242 (Rp 60,1 (nilai penuh) per saham) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Pembayaran dividen dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2020.

26. APPROPRIATION OF NET INCOME

The general and legal reserve was provided in relation to the Law of Republic Indonesia No. 1/1995 which has been replaced with Law No. 40/2007 effective on 16 August 2007 regarding the Limited Liability Company which requires a Company to set up a general reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. There is no timeline over which this amount should be provided. As at 31 December 2020, the amount of general reserves is Rp 49,419 (2019: Rp 26,306).

Based on the Annual General Meeting of the Bank's Shareholders as stated in Notarial Deed No. 289 dated 28 May 2019 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a notary public in Jakarta, the shareholders approved the appropriation of the Bank's 2018 retained earnings amounting to Rp 8,945.

Based on the Annual General Meeting of the Bank's Shareholders as stated in Notarial Deed No. 184 dated 30 June 2020 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., a notary public in Jakarta, the shareholders approved the appropriation of the Bank's 2019 retained earnings amounting to Rp 23,113 and distribute cash dividend amounting to Rp 636,242 (Rp 60.1 (full amount) per share to shareholders who have the right to receive cash dividend. Dividend payment has been paid at the latest on 30 September 2020.

27. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tabel di bawah ini, instrumen keuangan telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi masing-masing. Kebijakan akuntansi yang penting di Catatan 3a menjelaskan bagaimana kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk laba dan rugi atas nilai wajar (perubahan nilai wajar instrumen keuangan), diakui.

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

27. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

In the below table, financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 3a describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses (changes in fair value of financial instruments), are recognised.

The fair values are based on relevant information available as at the statement of financial position date and have not been updated to reflect changes in market conditions after the statement of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of 31 December 2020 and 2019.

27. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (lanjutan)

27. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of 31 December 2020 and 2019. (continued)

	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Fair value through profit and loss*	Biaya perolehan diamortisasi/ *Amortised cost*	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Fair value through other comprehensive income*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Kas	-	627.207	-	627.207	627.207	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	4.252.139	-	4.252.139	4.252.139	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain-bersih	-	3.740.633	-	3.740.633	3.740.633	*Demand deposits with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.152.313	-	1.152.313	1.152.313	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain-bersih	-	10.653.939	-	10.653.939	10.653.939	*Placements with other banks-net*
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	-	17.860.822	17.860.822	17.860.822	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	1.217.717	-	-	1.217.717	1.217.717	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	671.498	-	-	671.498	671.498	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	9.292.848	-	9.292.848	9.292.848	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor-bersih	-	921.585	-	921.585	921.585	*Export Bills-net*
Tagihan akseptasi-bersih	-	2.021.659	-	2.021.659	2.021.659	*Acceptance receivables-net*
Kredit yang diberikan kepada nasabah-bersih	-	55.334.586	-	55.334.586	56.978.362	*Loans to customers-net*
Aset lain-lain - pendapatan yang masih akan diterima	-	639.325	-	639.325	639.325	*Other assets - accrued income*
Jumlah	1.889.215	88.636.234	17.860.822	108.386.271	110.030.047	*Total*
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Simpanan dari nasabah	-	(72.159.831)	-	(72.159.831)	(72.159.831)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	-	(4.491.715)	-	(4.491.715)	(4.491.715)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	(659.526)	-	-	(659.526)	(659.526)	*Derivative payables*
Utang akseptasi	-	(2.047.057)	-	(2.047.057)	(2.047.057)	*Acceptance payables*
Beban akrual dan provisi	-	(76.507)	-	(76.507)	(76.507)	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain*)	-	(748.925)	-	(748.925)	(748.925)	*Other liabilities**)
Pinjaman yang diterima	-	(7.516.750)	-	(7.516.750)	(7.516.750)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	(1.053.750)	-	(1.053.750)	(1.053.750)	*Subordinated debt*
Jumlah	(659.526)	(88.094.535)	-	(88.754.061)	(88.754.061)	*Total*

*) Liabilitas lain-lain pada tabel ini telah mengeluarkan komponen liabilitas lain-lain *non*-keuangan

Other liabilities in this table have excluded *) *non-financial other liabilities component*

27. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (lanjutan)

27. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of 31 December 2020 and 2019. (continued)

	2019						
	Diperdagang-kan/ *Trading*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortised cost*	Jumlah nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas	-	696.281	-	-	696.281	696.281	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	-	7.343.788	-	-	7.343.788	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	2.261.135	-	-	2.261.135	2.261.135	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	1.488.506	-	-	1.488.506	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	-	7.696.511	-	-	7.696.511	7.696.511	*Placements with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	-	-	14.418.802	-	14.418.802	14.418.802	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	2.863.738	-	-	-	2.863.738	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	476.731				476.731	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	464.945	-	-	464.945	464.049	*Securities purchased with agreement to resell*
Wesel Ekspor	-	1.434.664	-	-	1.434.664	1.434.664	*Export Bills*
Tagihan akseptasi	-	2.601.928	-	-	2.601.928	2.601.928	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah-bersih	-	65.533.877	-	-	65.533.877	66.648.142	*Loans to customers-net*
Aset lain-lain - pendapatan yang masih akan diterima	-	558.313	-	-	558.313	558.313	*Other assets - accrued income*
Jumlah	3.340.469	90.079.948	14.418.802	-	107.839.219	108.952.588	*Total*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Simpanan dari nasabah	-	-	-	(65.469.257)	(65.469.257)	(65.469.257)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	-	-	-	(5.058.515)	(5.058.515)	(5.058.515)	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	(473.541)	-	-	-	(473.541)	(473.541)	*Derivative payables*
Utang akseptasi	-	-	-	(2.601.928)	(2.601.928)	(2.601.928)	*Acceptance payables*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	*Securities sold with agreement to repurchase*
Beban akrual dan provisi	-	-	-	(146.820)	(146.820)	(146.820)	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain*)	-	-	-	(770.011)	(770.011)	(770.011)	*Other liabilities*[*)]
Pinjaman yang diterima	-	-	-	(15.062.513)	(15.062.513)	(15.062.513)	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	(1.041.188)	(1.041.188)	(1.041.188)	*Subordinated debt*
Jumlah	(473.541)	-	-	(90.150.232)	(90.623.773)	(90.623.773)	*Total*

*) Liabilitas lain-lain pada tabel ini telah mengeluarkan komponen liabilitas lain-lain *non*-keuangan

Other liabilities in this table have excluded *) *non-financial other liabilities component*

Nilai wajar aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan efek-efek untuk tujuan investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah berdasarkan harga kuotasi pasar dan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 5b.1.

The fair value of trading assets and liabilities and investment securities as of 31 December 2020 and 2019 were based on quoted market prices and valuation techniques as explained in Note 5b.1.

Nilai wajar kredit yang diberikan kepada nasabah, pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi yang mempunyai risiko nilai wajar ditentukan menggunakan metode diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The fair value of loans to customers, borrowings, and subordinated debt with fair value risk was determined by discounted cash flows method using market interest rates as of 31 December 2020 and 2019.

27. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan selain yang disebutkan di atas mendekati nilai tercatatnya karena memiliki jangka waktu yang pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Saling hapus

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang saling hapus pada laporan posisi keuangan.

Bank memiliki kredit yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai (Catatan 14j), yang menjadi subyek untuk memenuhi *netting arrangements* dan perjanjian serupa, yang tidak saling hapus pada laporan posisi keuangan.

27. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

The fair value of financial assets and liabilities other than those mentioned in the above approximated to the carrying amount because they are short term in nature, and/or the interest rates are reprised frequently.

Offsetting

As of 31 December 2020 and 2019, there is no financial assets and liabilities that are subject to offset in the statement of financial position.

The Bank has loans collateralised by cash collateral (Note 14j), which are subject to enforceable netting arrangements and similar agreements that are not set off in the statement of financial position.

28. PENDAPATAN BUNGA BERSIH / ***28. NET INTEREST INCOME***

	2020	2019	
Pendapatan bunga			***Interest income***
Kredit yang diberikan kepada nasabah	3.857.022	5.001.965	*Loans to customers*
Efek-efek untuk tujuan investasi	1.071.515	893.676	*Investment securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	291.792	58.103	*Securities purchased with agreement to resell*
Penempatan pada Bank Indonesia	38.239	40.972	*Placements with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Indonesia	18.959	4.586	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Kredit yang diberikan dan penempatan pada bank	1.954	9.162	*Loans and advances to banks*
Giro pada bank-bank lain	319	4.149	*Demand deposits with other banks*
Lain-lain	27.062	184.592	*Others*
Jumlah	5.306.862	6.197.205	*Subtotal*
Beban bunga			***Interest expenses***
Simpanan			*Deposits*
Deposito berjangka dan *deposits on call*	(808.466)	(1.020.571)	*Time deposits and deposits on call*
Giro	(225.543)	(365.297)	*Demand deposits*
Pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi	(245.578)	(638.326)	*Borrowings and subordinated debt*
Tabungan	(99.644)	(70.289)	*Saving accounts*
Simpanan dari bank lain	(15.441)	(55.236)	*Deposit from other banks*
Lainnya	(38.375)	(66.898)	*Others*
Jumlah	(1.433.047)	(2.216.617)	*Subtotal*
Pendapatan bunga bersih	3.873.815	3.980.588	*Net interest income*

29. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI BERSIH / ***29. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME***

	2020	2019	
Pendapatan provisi dan komisi			***Fees and commissions income***
Kartu kredit	391.440	543.053	*Credit cards*
Asuransi	279.297	190.680	*Insurance*
Unit *trusts*	215.520	204.313	*Unit trusts*
Jasa kustodian	154.325	149.728	*Custodial services*
Ekspor/impor	110.624	141.585	*Export/import*
Fasilitas kredit	107.223	181.770	*Credit facilities*
Remmittance	63.646	73.502	*Remmittances*
Account services	24.067	38.337	*Account services*
Lain-lain	221.338	429.040	*Others*
Jumlah	1.567.480	1.952.008	*Subtotal*

29. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI BERSIH (lanjutan) / *29. NET FEES AND COMMISSIONS INCOME (continued)*

	2020	2019	
Beban provisi dan komisi			***Fees and commissions expenses***
Kartu kredit	(185.289)	(406.835)	*Credit card*
Scripless kustodian	(37.647)	(37.700)	*Scripless custodian*
Remittance	(150)	(1.646)	*Remittance*
Lain-lain	(140.334)	(193.538)	*Others*
Jumlah	(363.420)	(639.719)	*Subtotal*
Pendapatan provisi dan komisi bersih	1.204.060	1.312.289	*Net fees and commissions income*

30. PENDAPATAN INSTRUMEN YANG DIPERDAGANGKAN - BERSIH / *30. TRADING INCOME - NET*

	2020	2019	
Instrumen derivatif	1.094.509	780.189	*Derivative instruments*
Instrumen keuangan pendapatan tetap	647.252	559.329	*Fixed income instruments*
Jumlah	1.741.761	1.339.518	*Total*

31. KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BERSIH / *31. IMPAIRMENT LOSSES – NET*

	2020	2019	
Kredit yang diberikan kepada nasabah	1.588.656	671.160	*Loans to customers*
Komitmen dan kontinjensi	90.428	-	*Commitment and contingencies*
Tagihan akseptasi	19.861	-	*Acceptance receivables*
Wesel ekspor	6.843	-	*Export bills*
Penempatan pada bank lain	174	-	*Placement with other banks*
Giro pada bank lain	49	-	*Demand deposits with other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	11.123	-	*Investment securities*
Jumlah	1.717.134	671.170	*Total*

32. BEBAN KARYAWAN / *32. EMPLOYEES EXPENSES*

	2020	2019	
Gaji dan bonus	1.122.889	1.217.889	*Salaries and bonuses*
Tunjangan	315.750	335.893	*Allowance*
Imbalan pasca-kerja (Catatan 23)	47.182	29.977	*Post-employment benefits obligation (Note 23)*
Pelatihan	34.964	67.444	*Training*
Tunjangan terkait pemutusan hubungan kerja	20.883	92.970	*Termination benefit*
Lain-lain	188.795	205.018	*Others*
Jumlah	1.730.463	1.949.191	*Total*

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2020	2019	
Komunikasi, listrik dan air	501.839	445.112	*Communication and utilities*
Sewa	102.883	117.594	*Rent*
Pemeliharaan dan perbaikan	99.733	64.922	*Repair and maintenance*
Jasa profesional	78.469	93.689	*Professional fees*
Iklan dan promosi	60.189	71.939	*Advertising and promotion*
Pungutan tahunan OJK perbankan	50.367	49.367	*Bank annual FSA levy*
Kebersihan dan keamanan	45.240	46.229	*Security and cleaning*
Asuransi	20.510	19.160	*Insurance*
Alat tulis dan barang cetakan	13.762	14.123	*Stationery and office supplies*
Perjalanan dinas	6.402	19.487	*Travelling*
Jasa layanan kas	4.064	2.183	*Cash service*
Representasi	2.211	4.306	*Representation*
Langganan/keanggotaan	2.061	1.864	*Customer services/membership*
Lain-lain	266.265	162.213	*Others*
Jumlah	1.253.995	1.112.188	

34. PERPAJAKAN / *34. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka terdiri dari: / *a. Prepaid taxes consist of:*

	2020	2019	
Pajak dibayar di muka sehubungan dengan pajak penghasilan badan yang lebih dibayar tahun 2019	-	60.019	*Prepaid tax in relation with overpaid corporate income tax in 2019*
Pajak dibayar di muka sehubungan dengan pemeriksaan pajak (Catatan 34i - 34y)	1.005.429	1.344.488	*Prepaid tax in relation with tax audit assessment (Note 34i - 34y)*
	1.005.429	1.404.507	

b. Utang pajak penghasilan terdiri dari: / *b. Income taxes payable consist of:*

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan	181.688	-	*Corporate income tax*

Utang pajak lainnya disajikan dalam liabilitas lain-lain pada Catatan 21. / *Other tax liabilities presented in other liabilities in Note 21.*

c. Beban pajak terdiri dari: / *c. Tax expense consisted of the following:*

	2020	2019	
Pajak kini	575.484	724.934	*Current tax*
Tambahan beban pajak kini tahun 2018 karena perbedaan perhitungan pajak sementara di laporan audit 2018 dengan SPT Badan tahun 2018	-	54.711	*Additional 2018 current tax expenses due to the differences between preliminary calculation in 2018 audit report and 2018 corporate tax return*
Pajak tangguhan			*Deferred tax*
Pembentukan dari perbedaan temporer	(111.481)	(56.506)	*Origination of temporary differences*
Tambahan beban pajak tangguhan tahun 2018 karena perbedaan perhitungan pajak sementara di laporan audit 2018 dengan SPT Badan tahun 2018	-	4.542	*Additional 2018 deferred tax expenses due to the differences between preliminary calculation in 2018 audit report and 2018 corporate tax return*
Surat Ketetapan Pajak	137	1.023	*Tax Assessment Letter*
Jumlah	464.140	728.704	*Total*

d. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tariff pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Bank telah menghitung dampak penurunan tarif pajak tersebut berupa penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp 51.483 dimana jumlah sebesar Rp 65.108 dibebankan ke laba rugi periode berjalan dan sebesar Rp 13.625 diakui ke pendapatan komprehensif lainnya.

d. On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia ("Perppu") No. 1 year 2020, which among others reduces the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Bank has calculated the effect of tax rate reduction in the form of a decrease in deferred tax assets by Rp 51,483 in which the amount of Rp 65,108 was charged to current year's profit and loss and Rp 13,625 was charged to other comprehensive income.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

The management believes that total deferred tax assets arising from temporary differences are probable to be realised in the future years.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

***34. TAXATION** (continued)*

e. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

e. The reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and taxable income are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	1.774.134	3.039.995	*Profit before tax*
Perbedaan temporer:			*Temporary differences:*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	(42.512)	(16.654)	*Short-term employee benefits obligation*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	747.016	225.580	*Allowance for impairment losses from financial assets*
Beban imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja lainnya	8.944	(9.842)	*Post-employment and other benefits expense*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset takberwujud	56.568	(864)	*Depreciation of fixed assets and amortisation of intangible assets*
Lain-lain	32.659	27.804	*Others*
	802.675	226.024	
Perbedaan permanen:			*Permanent differences:*
Rugi atas penerimaan yang sudah dikenakan penghasilan final	424	1.893	*Loss related to proceed subject to final income tax*
Penyusutan kendaraan non-operasional	2.757	2.616	*Depreciation of non-operational vehicles*
Representasi, sumbangan dan denda	13.868	(399.464)	*Representation, donations and penalties*
Lain-lain	21.979	28.675	*Others*
	39.028	(366.280)	
Laba kena pajak	2.615.837	2.899.739	*Taxable income*
Beban pajak kini	575.484	724.934	*Current tax expense*
Pajak dibayar dimuka	(393.796)	(784.953)	*Prepaid tax*
Pajak penghasilan badan (dibayar dimuka)/ terutang	181.688	(60.019)	*Corporate income (prepaid tax)/tax payable*

f. Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

f. The reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the statutory tax rates to income before tax are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak	1.774.134	3.039.995	*Income before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	25%	*Applicable tax rate*
	390.309	759.998	
Tambahan beban pajak tahun 2018 karena perbedaan perhitungan pajak sementara di laporan audit 2018 dengan SPT Badan tahun 2018 yang telah dilaporkan ke kantor pajak	-	59.253	*Additional 2018 tax expenses due to the differences between preliminary calculation in 2018 audit report and 2018 submitted corporate tax return*
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 22% untuk 31 Desember 2020 dan 25% untuk 31 Desember 2019	8.586	(91.570)	*Permanent differences at 22% for 31 December 2020 and 25% for 31 December 2019*
Surat Ketetapan Pajak	137	1.023	*Tax Assessment Letter*
Pajak tangguhan akibat pengurangan tarif pajak	65.108	-	*Deferred tax due to tax rate reduction*
Jumlah beban pajak	464.140	728.704	*Total tax expense*

Dalam laporan keuangan ini jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara karena Bank belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of Bank's taxable income is based on preliminary calculations as the Bank has not yet submitted its corporate income tax returns.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Terdapat tambahan beban pajak yang berasal dari perbedaan perhitungan pajak sementara antara laporan keuangan tahun 2018 dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun 2018 yang telah disampaikan ke kantor pajak.

g. Rincian dari aset pajak tangguhan bersih Bank adalah sebagai berikut:

***34. TAXATION** (continued)*

There is an additional 2018 tax expense due to differences between preliminary calculation in the 2018 audit report and 2018 submitted corporate income tax return which has been submitted to the tax office.

g. The details of the Bank's net deferred tax assets are as follows:

	31 Desember/ *December* 2019	Dampak penerapan PSAK 71/ *Impact on the SFAS 71 implementation*	Dampak perubahan tarif PPh Badan/ *Impact on the implementation of new corporate income tax rate*	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ *Recognised in current year profit or loss*	Diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2020	
Aset pajak tangguhan:							*Deferred tax assets:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	204.224	(34.060)	(48.751)	161.897	-	283.310	*Allowance for impairment losses on financial assets*
penyisihan surat berharga (FVOCL)	-	1.069	(436)	2.447	-	3.080	*Provision for securities (FVOCL)*
Penyusutan asset tetap dan amortisasi aset tak berwujud	(57.838)	-	10.436	12.445	-	(34.957)	*Depreciation of fixed assets and amortization of intangible assets*
Beban imbalan Pasca-kerja dan Imbalan kerja lainnya	150.289	-	(25.377)	(7.385)	(2.464)	115.063	*Post-employment and other benefits*
(Laba)/rugi belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek untuk) tujuan investasi	(44.461)	-	17.892	-	(99.001)	(125.570)	*Unrealised (gain)/ loss from changes in fair value of investment securities*
Lain – lain	22.968	-	(5.247)	7.185	-	24.906	*Others*
Aset pajak tangguhan-bersih	275.182	(32.991)	(51.483)	176.589	(101.465)	265.832	*Deferred tax assets-net*

	31 Desember/ *December* 2018	Dampak perbedaan perhitungan pajak di laporan audit dengan SPT badan tahun 2018/ *Impact on the calculation differences between audit report and tax return in 2018*	Diakui pada laba rugi tahun berjalan/ *Recognised in current year profit or loss*	Diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2019	
Aset pajak tangguhan:						*Deferred tax assets:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	147.828	-	56.395	-	204.223	*Allowance for impairment losses on financial assets*
Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud	(57.624)	-	(216)	-	(57.840)	*Depreciation of fixed assets and amortisation of intangible assets*
Beban imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja lainnya	147.561	-	(6.624)	9.354	150.291	*Post-employment and other benefits*
(Laba)/rugi belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi	20.980	-	-	(65.441)	(44.461)	*Unrealised (gain)/loss from changes in fair value of investment securities*
Lain-lain	20.560	(4.542)	6.951	-	22.969	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	279.305	(4.542)	56.506	(56.087)	275.182	*Deferred tax assets - net*

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Pada tanggal 29 November 2017, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2012 senilai Rp 6.362 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 180. Bank melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 180 sebagai biaya Bank di tahun 2017 dan Rp 6.182 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 28 Februari 2018, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPN.

Pada tanggal 10 Juli 2018, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2012 yang menolak keberatan Wajib Pajak. Bank tidak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut dan mencatat jumlah sengketa pajak sebesar Rp 934 sebagai biaya Bank di tahun 2018.

Pada tanggal 25 Januari 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang mengabulkan sebagian besar keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 4.987 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 260. Pada tanggal 24 April 2019, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 25 Juli 2019, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan PPh Badan Tahun Pajak 2012.

Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2012 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak sebesar Rp 260. Keputusan Pengadilan Pajak tersebut dikirimkan pada tanggal 22 Oktober 2020. Pada tanggal 6 Januari 2021, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, DJP belum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak di atas.

i. Pada tanggal 15 Desember 2017, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak 2013 senilai Rp 8.750 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 133. Bank melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 133 sebagai biaya Bank di tahun 2017 dan Rp 8.617 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 6 Maret 2018, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan.

***34. TAXATION** (continued)*

h. On 29 November 2017, LTO I issued SKB of CIT, Income Tax Article 21, Article 26, and Value Added Tax (VAT) Fiscal Year 2012 amounting to Rp 6,362 with agreed underpayment amounting to Rp 180. The Bank made full payment and recorded Rp 180 as an expense of the Bank in 2017 and Rp 6,182 as prepaid tax. On 28 February 2018, the Bank then filed an objection to the Assessment Letter of CIT and VAT.

On 10 July 2018, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of VAT Fiscal Period December 2012 which rejected the Taxpayer's objection. The Bank did not file an appeal against those Objection Decisions and recorded a tax dispute amounting to Rp 934 as an expense of the Bank in 2018.

On 25 January 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2012, which accepted most of the Taxpayer's objection of Rp 4,987, so the tax dispute amount became Rp 260. On 24 April 2019, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against that Objection Decision. On 25 July 2019, the Bank received a tax refund based on the Objection Decision of CIT Fiscal Year 2012.

On 16 October 2020, Tax Court issued a Tax Court Decision regarding an appeal against Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2012 which accepted all appeal requests of Taxpayer amounting to Rp 260. Such Tax Court decision is delivered on 22 October 2020. On 6 January 2021, the Bank received a tax refund based on that Tax Court Decision. Until this report is prepared, the DGT has not yet submitted the Judicial Review to the Supreme Court on the above Tax Court Decision.

i. On 15 December 2017, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, and Final Article 4 (2) Fiscal Year 2013 amounting to Rp 8,750 with agreed underpayment amounting to Rp 133. The Bank made full payment and recorded Rp 133 as an expense of the Bank in 2017 and Rp 8,617 as prepaid tax. On 6 March 2018, the Bank then filed an objection to the Assessment Letter of CIT.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 25 Januari 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang mengabulkan sebagian besar keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 7.843 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 773. Pada tanggal 24 April 2019, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan 2013. Pada tanggal 25 Juli 2019, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan PPh Badan Tahun Pajak 2013.

Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak sebesar Rp 773. Keputusan Pengadilan Pajak tersebut dikirimkan pada tanggal 22 Oktober 2020. Pada tanggal 6 Januari 2021, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, DJP belum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak di atas.

j. Pada tanggal 10 Juli 2018, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2014 senilai Rp 75.058 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 748. Bank melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 59.687 dan mencatat sejumlah Rp 748 sebagai biaya Bank di tahun 2018 dan Rp 58.939 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 9 Oktober 2018, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN.

Pada tanggal 3 September 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2014 yang menolak keberatan Wajib Pajak. Bank tidak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut dan mencatat jumlah sengketa pajak sebesar Rp 160 sebagai biaya Bank di tahun 2019.

Pada tanggal 5 September 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2014 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 4.167. Pada tanggal 4 Desember 2019, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPh Pasal 21 Desember 2014 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

***34. TAXATION** (continued)*

On 25 January 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2013 which accepted most of the Taxpayer's objection of Rp 7,843 so the tax dispute amount became Rp 773. On 24 April 2019, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decision of CIT 2013. On 25 July 2019, the Bank received a tax refund based on the Objection Decision of CIT Fiscal Year 2013.

On 16 October 2020, Tax Court issued a Tax Court Decision regarding an appeal against Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2013 which accepted all appeal requests of Taxpayer amounting to Rp 773. Such Tax Court decision is delivered on 22 October 2020. On 6 January 2021, the Bank received a tax refund based on that Tax Court Decision. Until this report is prepared, the DGT has not yet submitted the Judicial Review to the Supreme Court on the above Tax Court Decision.

j. On 10 July 2018, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Article 26, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2014 amounting to Rp 75,058 with agreed underpayment amounting to Rp 748. The Bank made a partial payment of Rp 59,687 and recorded Rp 748 as an expense of the Bank in 2018 and Rp 58,939 as prepaid tax. On 9 October 2018, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Final Article 4 (2), and VAT.

On 3 September 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of Income Tax Final Article 4 (2) Fiscal Period December 2014 which rejected the Taxpayer's objection. The Bank did not file an appeal against that Objection Decision and recorded a tax dispute amount of Rp 160 as an expense of the Bank in 2019.

On 5 September 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of Income Tax Article 21 Fiscal Period December 2014 which rejected Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 4,167. On 4 December 2019, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against that Objection Decision. Until this report is prepared, tax hearing on dispute Income Tax Article 21 December 2014 is still on going in Tax Court.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 5 September 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2014 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 5.344. Pada tanggal 4 Desember 2019, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPN Desember 2014 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 11 September 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2014 yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 306. Pada tanggal 9 Oktober 2019, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 16 September 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2014 yang mengabulkan sebagian besar keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 63.952 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 381. Bank tidak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut dan mencatat jumlah kurang bayar sebesar Rp 381 sebagai biaya Bank di tahun 2019. Pada tanggal 15 Januari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

k. Pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2018, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Final Pasal 21, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2015 senilai Rp 94.077 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 151. Bank melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 151 sebagai biaya Bank di tahun 2018 dan Rp 93.926 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 29 Januari 2019, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Pada tanggal 5 Agustus 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2015 yang menolak keberatan Wajib Pajak. Bank tidak mengajukan banding terhadap Keputusan Keberatan tersebut dan mencatat jumlah sengketa pajak sebesar Rp 3.369 sebagai biaya Bank di tahun 2019.

Pada tanggal 13 Desember 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2015 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 391. Pada tanggal 12 Maret 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPN Desember 2015 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

***34. TAXATION** (continued)*

On 5 September 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT Fiscal Period December 2014 which rejected Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 5,344. On 4 December 2019, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision. Until this report is prepared, tax hearing on dispute VAT December 2014 is still on going in Tax Court.

On 11 September 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of Income Tax Article 23 Fiscal Period December 2014 which fully accepted the Taxpayer's objection of Rp 306. On 9 October 2019, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision.

On 16 September 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2014 which accepted most of the Taxpayer's objection of Rp 63,952, so the tax dispute amount became Rp 381. The Bank did not file an appeal against that Objection Decision and recorded the tax dispute amount of Rp 381 as an expense of the Bank in 2019. On 15 January 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision.

k. On 30 and 31 October 2018, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2015 amounting to Rp 94,077 with agreed underpayment amounting to Rp 151. The Bank made full payment and recorded Rp 151 as an expense of the Bank in 2018 and Rp 93,926 as prepaid tax. On 29 January 2019, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT, Income Tax Final Article 4 (2), and VAT.

On 5 August 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of Income Tax Final Article 4 (2) Fiscal Period December 2015 which rejected the Taxpayer's objection. The Bank did not file an appeal against that Objection Decision and recorded a tax dispute amount of Rp 3,369 as an expense of the Bank in 2019.

On 13 December 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT Fiscal Period December 2015 which rejected the Taxpayer's objection, so the tax dispute amount remained Rp 391. On 12 March 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision. Until this report is prepared, tax hearing on dispute VAT December 2014 is still on going in Tax Court.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 23 Desember 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2015 yang mengabulkan sebagian besar keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 88.898 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 1.268. Pada tanggal 15 Januari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPh Badan 2015 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

I. Pada tanggal 24 November 2017, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2017 senilai Rp 2.300.911. Pada tanggal 23 Februari 2018, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Pada saat pengajuan keberatan, Bank belum melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut.

Pada tanggal 28 Desember 2018, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 2.016.138 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 284.773. Bank melakukan pembayaran sebesar Rp 284.773 pada tanggal 28 Desember 2018 dan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut pada 26 Maret 2019.

Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak April 2017 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak sebesar Rp 284.773. Keputusan Pengadilan Pajak tersebut dikirimkan pada tanggal 22 Oktober 2020. Pada tanggal 6 Januari 2021, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Sampai dengan laporan ini dibuat, DJP belum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak di atas.

***34. TAXATION** (continued)*

On 23 December 2019, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2015, which accepted most of the Taxpayer's objection of Rp 88,898, so the tax dispute amount became Rp 1,268. On 15 January 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision. On 11 June 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision. Until this report is prepared, tax hearing on dispute CIT 2015 is still on going in Tax Court.

I. On 24 November 2017, LTO I issued an Underpayment Tax Assessment Letter of VAT on the Utilization of Taxable Intangibles from Outside Custom Area Fiscal Period April 2017 amounting to Rp 2,300,911. On 23 February 2018, the Bank then filed an objection to that Assessment Letter. When filing the objection, the Bank had not made any payment on that Tax Assessment Letter.

On 28 December 2018, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT Fiscal Period April 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 2,016,138 so the tax dispute amount became Rp 284,773. The Bank made payment of Rp 284,773 on 28 December 2018 and then filed an appeal to Tax Court against that Objection Decision on 26 March 2019.

On 16 October 2020, Tax Court issued a Tax Court Decision regarding an appeal against Objection Decision on Assessment Letter of VAT Fiscal Period April 2017 which accepted all appeal requests of Taxpayer amounting to Rp 284,773. Such Tax Court decision is delivered on 22 October 2020. On 6 January 2021, the Bank received a tax refund based on that Tax Court Decision. Until this report is prepared, the DGT has not yet submitted the Judicial Review to the Supreme Court on the above Tax Court Decision.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

m. Pada tanggal 24 April 2019, KPP WPB I menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun Pajak 2017 senilai Rp 182.963, serta SKPKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2017 senilai Rp 36.246 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 392. Bank melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 392 sebagai biaya Bank di tahun 2019 dan Rp 35.853 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 23 Juli 2019, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPLB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN.

Pada tanggal 27 Desember 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, dan Mei 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 10. Pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 3 Februari 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 64. Pada tanggal 27 Februari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2017.

Pada tanggal 28 dan 29 Mei 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 yang mengabulkan sebagian kecil keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 7.578. Pada tanggal 26 Agustus 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 4 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2017 yang mengabulkan yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 1.755. Pada tanggal 1 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 16 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2017 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 15.893. Pada tanggal 14 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

***34. TAXATION** (continued)*

m. On 24 April 2019, LTO I issued Overpayment Tax Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2017 amounting to Rp 182,963, as well as Underpayment Tax Assessment Letters of Income Tax Article 21, Article 23, Article 26, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2017 amounting to Rp 36,246 with agreed underpayment amounting to Rp 392. The Bank made full payment and recorded Rp 392 as an expense of the Bank in 2019 and Rp 35,853 as prepaid tax. On 23 July 2019, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Article 26, Final Article 4 (2), and VAT.

On 27 December 2019, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of Income Tax Article 23 Fiscal Period January, February, March, April, and May 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 10. On 27 and 28 January 2020, the Bank received a tax refund based on those Objection Decisions.

On 3 February 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of Income Tax Article 23 Fiscal Period July, August, September, October, and December 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 64. On 27 February 2020, the Bank received a tax refund based on those Objection Decisions.

On 21 February 2020, the Bank received a tax refund based on Overpayment Tax Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2017.

On 28 and 29 May 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of Income Tax Article 26 Fiscal Period January up to December 2017 which accepted a small portion of the Taxpayer's objection so the tax dispute amount became Rp 7,578. On 26 August 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against those Objection Decisions.

On 4 June 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT on the Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area Fiscal Period December 2017 which fully accepted the Taxpayer's objection of Rp 1,755. On 1 July 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision.

On 16 June 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of VAT Fiscal Period December 2017 which rejected the Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 15,893. On 14 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2017 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 7.436. Pada tanggal 18 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 17 Juli 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 269.804. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

n. Pada tanggal 30 Oktober 2019, KPP WPB I menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret dan Juli 2019 senilai total Rp 189.703. Bank hanya melakukan pembayaran atas pokok kurang bayar pajak sebesar Rp 169.711. Pada tanggal 12 Desember 2019, Bank kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi.

   Pada tanggal 4 Februari 2020, DJP menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Secara Jabatan untuk Masa Pajak Maret 2019. Pada tanggal 6 Maret 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan keputusan tersebut.

o. Sehubungan dengan integrasi usaha, pada tanggal 21 Agustus 2017 Bank telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pengambilalihan usaha. Pada tanggal 9 Oktober 2017, DJP telah menerbitkan surat persetujuan No. KEP-164/WPJ.19/2017 untuk menggunakan nilai buku pajak.

p. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, Bentuk Usaha Tetap (BUT) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited telah memperoleh persetujuan Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 8/KDK.03/2019 tertanggal 8 April 2019 dan selanjutnya, hak dan kewajiban perpajakan BUT The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (BUT HSBC) untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya pembubaran BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) beralih kepada Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha, dalam hal ini, PT Bank HSBC Indonesia.

***34. TAXATION** (continued)*

On 22 June 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of Income Tax Article 21 Fiscal Period December 2017 which rejected the Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 7,436. On 18 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

On 17 July 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection so the tax dispute amount became Rp 269,804. On 11 August 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision. On 15 October 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

n. On 30 October 2019, LTO I issued Tax Collection Letters of income Tax Article 25 Fiscal Period March and July 2019 amounting to Rp 189,703. The Bank only made payment for the underpaid tax of Rp 169,711. On 12 December 2019, the Bank then submitted a request for nullification of administrative sanction.

   On 4 February 2020, DGT issued a Decision regarding the Nullification of Administrative Sanction on Tax Collection Letter ex Officio for Fiscal Period March 2019. On 6 March 2020, the Bank received a tax refund based on that decision.

o. In relation to the business integration, on 21 August 2017 the Bank has submitted a request for using book value on the asset transferred in relation to the business integration. On 9 October 2017, the DGT has issued the approval decision No. KEP-164/WPJ.19/2017 for using fiscal book value.

p. Based on the Ministry of Finance (MoF) Regulation No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value for the Transfer and Acquisition of Assets in the Context of Merger, Consolidation, Expansion, or Acquisition, Permanent Establishment (PE) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited had received approval for Revocation of Business License of Branch Office from Financial Service Authority (FSA) with the Decree of FSA Commissioners No. 8/KDK.03/2019 dated 8 April 2019 and after that, the tax rights and obligations of PE The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (PE HSBC) for fiscal period, part of fiscal year, and/or fiscal year before the liquidation of PE as mentioned in Article 9 paragraph (1) and (2) are transferred to the Taxpayer who received the assets in the context of merger, consolidation, or acquisition, in this case, PT Bank HSBC Indonesia.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saldo bersih aset pajak BUT HSBC pun dialihkan ke PT Bank HSBC Indonesia secara bertahap sejak 31 Januari 2019 sampai dengan sebelum tanggal pencabutan izin usaha senilai total Rp 679.915.

q. Pada tanggal 17 dan 23 Desember 2015, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 23/26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2010 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 386.531. BUT HSBC melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 3.688 sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2015 dan Rp 382.843 sebagai pajak dibayar di muka. BUT HSBC kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan pada tanggal 11 Maret 2016 dan PPh Final Pasal 23/26 pada tanggal 14 Maret 2016.

Pada tanggal 21 Februari 2017, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2010 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 17.746 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 365.097. Pada tanggal 11 April 2017, BUT HSBC kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 dan mencatat jumlah sengketa pajak sebesar Rp 3.255 yang tidak diajukan banding sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2017.

Pada tanggal 20 Februari 2019, Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2010 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak sebesar Rp 361.987.

Pada tanggal 4 April 2019 dan 26 Juni 2019, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak BUT HSBC untuk PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2010 berdasarkan Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 27 Mei 2019, DJP menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak di atas yang diterima oleh Bank pada tanggal 14 Juni 2019. Bank menyampaikan jawaban (kontra memori) terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut pada tanggal 10 Juli 2019. Pada tanggal 17 Februari 2020, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali DJP.

***34. TAXATION** (continued)*

In regard to the above matters, the balance of net tax assets of PE HSBC was also transferred to PT Bank HSBC Indonesia gradually since 31 January 2019 until before the date of business license revocation in a total of Rp 679,915.

q. On 17 and 23 December 2015, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Final Article 23/26, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2010 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 386,531. PE HSBC made full payment and recorded Rp 3,688 as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2015 and Rp 382,843 as prepaid tax. PE HSBC then filed an objection to Assessment Letter of CIT on 11 March 2016 and Income Tax Final Article 23/26 on 14 March 2016.

On 21 February 2017, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2010 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 17,746, so the tax dispute amount became Rp 365,097. On 11 April 2017, PE HSBC then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decisions of CIT and Income Tax Final Article 23/26 and recorded tax dispute amount of Rp 3,255 which was not appealed as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2017.

On 20 February 2019, Tax Court issued Tax Court Decisions regarding an appeal against Objection Decisions on Assessment Letters of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2010 which accepted all appeal requests of Taxpayer amounting to Rp 361,987.

On 4 April 2019 and 26 June 2019, the Bank received a tax refund of PE HSBC for CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2010 based on Objection Decisions and Tax Court Decisions.

On 27 May 2019, DGT submitted a civil review request to the Supreme Court on the above Tax Court Decisions which was received by the Bank on 14 June 2019. The Bank submitted responses (counter-memorials) to that civil review request on 10 July 2019. On 17 February 2020, the Supreme Court then issued a Supreme Court Decision that rejected the review request of DGT.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

r. Pada tanggal 19 dan 28 Desember 2016, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 136.706. BUT HSBC melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 1 sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2016 dan Rp 136.705 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 7 Maret 2017, BUT HSBC kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26.

Pada tanggal 13 Desember 2017, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 24.359 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 112.346. Pada tanggal 12 Maret 2018, BUT HSBC kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final 23/26.

Pada tanggal 18 September 2019, Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak sebesar Rp 112.346.

Pada tanggal 4 April 2019 dan 17 Januari 2020, Bank menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak BUT HSBC untuk PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2011 berdasarkan Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 19 Desember 2019, DJP menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak di atas yang diterima oleh Bank pada tanggal 9 Januari 2020. Bank menyampaikan jawaban (kontra memori) terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut pada tanggal 5 Februari 2020. Pada tanggal 9 September 2020, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali DJP.

s. Pada tanggal 21 Desember 2017, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak 2012 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 46.874 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 2.685. BUT HSBC melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 2.685 sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2017 dan Rp 44.189 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 20 Maret 2018, BUT HSBC kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26.

***34. TAXATION** (continued)*

r. On 19 and 28 December 2016, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2011 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 136,706. PE HSBC made full payment and recorded Rp1 as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2016 and Rp 136,705 as prepaid tax. On 7 March 2017, PE HSBC then filed an objection to the Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

On 13 December 2017, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2011 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 24,359 so the tax dispute amount became Rp 112,346. On 12 March 2018, PE HSBC then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decisions of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

On 18 September 2019, Tax Court issued Tax Court Decisions regarding an appeal against Objection Decisions on Assessment Letters of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2011 which accepted all appeal requests of Taxpayer amounting to Rp 112,346.

On 4 April 2019 and 17 January 2020, the Bank received a tax refund of PE HSBC for CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2011 based on Objection Decisions and Tax Court Decisions.

On 19 December 2019, DGT submitted a civil review request to the Supreme Court on the above Tax Court Decisions which was received by the Bank on 9 January 2020. The Bank submitted responses (counter-memorials) to that civil review request on 5 February 2020. On 9 September 2020, the Supreme Court then issued a Supreme Court Decision that rejected the review request of DGT.

s. On 21 December 2017, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 23, Final Article 23/26, and Final Article 4 (2) Fiscal Year 2012 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 46,874 with agreed underpayment amounting to Rp 2,685. PE HSBC made full payment and recorded Rp 2,685 as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2017 and Rp 44,189 as prepaid tax. On 20 March 2018, PE HSBC then filed an objection to the Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 14 Maret 2019, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2012 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 44.189. Pada tanggal 29 Mei 2019, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final 23/26. Sampai dengan laporan ini dibuat, Pengadilan Pajak belum mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak mengenai banding atas Keputusan Keberatan tersebut.

t. Pada tanggal 7 Desember 2018, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak 2013 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 86.029 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 1.725. BUT HSBC melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 67.001 dan mencatat sejumlah Rp 1.725 sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2019 dan Rp 65.277 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 5 Maret 2019, BUT HSBC kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26.

Pada tanggal 28 Januari 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2013 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 30.118 sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 54.186. Pada tanggal 26 Februari 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 14 Juli 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final 23/26. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 2013 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

u. Pada tanggal 15 November 2019 dan 9 Desember 2019, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 23/26, dan PPh Final Pasal 4 (2) Tahun Pajak 2014 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 45.919 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 643. Bank melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 39.682 dan mencatat sejumlah Rp 643 sebagai biaya Bank di tahun 2019 dan Rp 39.039 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 13 Februari 2020, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26.

Pada tanggal 13 Januari 2021, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2014 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 39.039. Bank berencana untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

***34. TAXATION** (continued)*

On 14 March 2019, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2012 which rejected the Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 44,189. On 29 May 2019, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decisions of CIT and Income Tax Final Article 23/26. Until this report is prepared, Tax Court has not issued Tax Court Decision regarding appeal against those Objection Decisions.

t. On 7 December 2018, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 23, Final Article 23/26, and Final Article 4 (2) Fiscal Year 2013 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 86,029 with agreed underpayment amounting to Rp 1,725. PE HSBC made a partial payment of Rp 67,001 and recorded Rp 1,725 as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2019 and Rp 65,277 as prepaid tax. On 5 March 2019, PE HSBC then filed an objection to Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

On 28 January 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2013 which accepted some of the Taxpayer's objection of Rp 30,118, so the tax dispute amount became Rp 54,186. On 26 February 2020, the Bank received a tax refund based on those Objection Decisions. On 14 July 2020, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decisions of CIT and Income Tax Final Article 23/26. Until this report is prepared, tax hearing on dispute CIT and Income Tax Final Article 23/26 2013 is still on going in Tax Court.

u. On 15 November 2019 and 9 December 2019, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 23, Final Article 23/26, and Final Article 4 (2) Fiscal Year 2014 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 45,919 with agreed underpayment amounting to Rp 643. The Bank made a partial payment of Rp 39,682 and recorded Rp 643 as an expense of the Bank and Rp 39,039 as prepaid tax. On 13 February 2020, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

On 13 January 2021, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2014 which rejected the Taxpayer's objection, so the tax dispute amount remained Rp 39,039. The Bank plans to file appeal to the Tax Court against those Objection Decisions.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

v. Pada tanggal 27 Desember 2018, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2015 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 49.993 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 104. Bank melakukan pembayaran penuh dan mencatat sejumlah Rp 104 sebagai biaya dalam laporan laba rugi BUT HSBC tahun 2019 dan Rp 49.889 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 26 Maret 2019, BUT HSBC kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26.

Pada tanggal 24 dan 31 Januari 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 Tahun Pajak 2015 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 49.889. Pada tanggal 14 Juli 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan PPh Badan dan PPh Final 23/26. Sampai dengan laporan ini dibuat, proses sidang terkait sengketa PPh Badan dan PPh Final Pasal 23/26 2015 masih berlangsung di Pengadilan Pajak.

w. Pada tanggal 25 April 2019, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2017 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 96.167 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 176. Bank melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 79.259 dan mencatat sejumlah Rp 176 sebagai biaya Bank di tahun 2019 dan Rp 79.083 sebagai pajak dibayar di muka. Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 26 (4), PPh Pasal 26, dan PPN pada tanggal 19 Juli 2019.

Pada tanggal 8 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 5.941. Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 4 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 (4) Masa Pajak Desember 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 8.636. Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 4 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

***34. TAXATION** (continued)*

v. On 27 December 2018, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 23, and Final Article 23/26 the Fiscal Year 2015 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 49,993 with agreed underpayment amounting to Rp 104. The Bank made full payment and recorded Rp 104 as expense in the statement of profit or loss of PE HSBC for the year 2019 and Rp 49,889 as prepaid tax. On 26 March 2019, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT and Income Tax Final Article 23/26.

On 24 and 31 January 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of CIT and Income Tax Final Article 23/26 Fiscal Year 2015 which rejected the Taxpayer's objection, so the tax dispute amount remained Rp 49,889. On 14 July 2020, the Bank then filed an appeal to the Tax Court against Objection Decisions of CIT and Income Tax Final Article 23/26. Until this report is prepared, tax hearing on dispute CIT and Income Tax Final Article 23/26 2015 is still on going in Tax Court.

w. On 25 April 2019, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Article 26, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2017 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 96,167 with agreed underpayment amounting to Rp 176. The Bank made a partial payment of Rp 79,259 and recorded Rp 176 as an expense of the Bank in 2019 and Rp 79,083 as prepaid tax. The Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT, Income Tax Article 26 (4), Article 26, and VAT on 19 July 2019.

On 8 June 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letter of CIT Fiscal Year 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection so the tax dispute amount became Rp 5,941. On 6 July 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision. On 4 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

On 9 June 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of Income Tax Article 26 (4) Fiscal Period December 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection so the tax dispute amount became Rp 8,636. On 6 July 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision. On 4 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

34. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli, Agustus, September, November, dan Desember 2017 yang mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak menjadi Rp 3.964. Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut. Pada tanggal 4 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2017 yang menolak keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah sengketa pajak tetap Rp 4.508. Pada tanggal 14 September 2020, Bank kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (PPN BKPTBLN) Masa Pajak Desember 2017 yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 1.986. Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

Pada tanggal 8 Juni 2020, DJP menerbitkan Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (PPN JKPLN) Masa Pajak Desember 2017 yang mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak sebesar Rp 21.271. Pada tanggal 6 Juli 2020, Bank menerima kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut.

x. Pada tanggal 30 November 2020, KPP WPB I menerbitkan SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN Tahun Pajak 2016 atas Wajib Pajak BUT HSBC senilai Rp 133.981 dengan jumlah kurang bayar yang disetujui senilai Rp 320. Bank melakukan pembayaran penuh sebesar Rp 133.981 dan mencatat sejumlah Rp 320 sebagai biaya Bank di tahun 2020 dan Rp 133.661 sebagai pajak dibayar di muka. Pada tanggal 23 Februari 2021, Bank kemudian mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan, PPh Pasal 26 (4), PPh Pasal 26, PPN BKPTBLN, dan PPN JKPLN.

***34. TAXATION** (continued)*

On 9 June 2020, DGT issued Objection Decisions on Assessment Letters of Income Tax Article 26 Fiscal Period July, August, September, November, and December 2017 which accepted some of the Taxpayer's objection so the tax dispute amount became Rp 3,964. On 6 July 2020, the Bank received a tax refund based on those Objection Decisions. On 4 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against those Objection Decisions.

On 8 June 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT Fiscal Period December 2017 which rejected the Taxpayer's objection so the tax dispute amount remained Rp 4,508. On 14 September 2020, the Bank then filed appeal to the Tax Court against that Objection Decision.

On 9 June 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT on the Utilization of Taxable Intangibles from Outside Custom Area (VAT on Offshore Intangibles) Fiscal Period December 2017 which fully accepted the Taxpayer's objection of Rp 1,986. On 6 July 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision.

On 8 June 2020, DGT issued Objection Decision on Assessment Letter of VAT on the Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area (VAT on Offshore Services) Fiscal Period December 2017 which fully accepted the Taxpayer's objection of Rp 21,271. On 6 July 2020, the Bank received a tax refund based on that Objection Decision.

x. On 30 November 2020, LTO I issued Underpayment Tax Assessment Letters of CIT, Income Tax Article 21, Article 23, Article 26, Final Article 4 (2), and VAT Fiscal Year 2016 for Taxpayer PE HSBC amounting to Rp 133,981 with agreed underpayment amounting to Rp 320. The Bank made a full payment of Rp 133.981 and recorded Rp 320 as an expense of the Bank in 2020 and Rp 133.661 as prepaid tax. On 23 February 2021, the Bank then filed an objection to Assessment Letter of CIT, Income Tax Article 26 (4), Article 26, VAT on Offshore Intangibles, and VAT on Offshore Services.

35. JASA KUSTODIAN

Divisi Jasa Kustodian Bank mendapatkan izin untuk menyediakan jasa kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. S-05/PM.2/2017 tanggal 20 Januari 2017.

35. CUSTODIAL SERVICES

The Bank's Custodial Services Division obtained a license to provide custodial services from the Capital Market Supervisory Agency Division of Financial Service Authority under its Decree No. S-05/PM.2/2017 dated 20 January 2017.

35. JASA KUSTODIAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset yang disimpan dan diadministrasikan oleh Divisi Jasa Kustodian Bank terdiri dari saham, obligasi, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat-surat berharga dan instrumen pasar modal dan pasar uang lainnya.

Jasa yang ditawarkan oleh Divisi Jasa Kustodian Bank meliputi jasa penyimpanan, penyelesaian dan penanganan transaksi, aksi korporasi, serta jasa-jasa penunjang terkait lainnya.

***35. CUSTODIAL SERVICES** (continued)*

As at 31 December 2020 and 2019, the assets which were maintained and administered by the Bank's Custodial Services Division consisted of shares, bonds, time deposits, certificate of deposits, commercial paper and other capital market and money market instruments.

The services offered by the Bank's Custodial Services Division include safekeeping, settlement and transaction handling, corporate action, and other related supporting services.

36. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The details of significant balance with related parties as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Jumlah/ *Amount*	**Persentase/ *Percentage*[1)]**	**Jumlah/ *Amount***	**Persentase/ *Percentage*[1)]**	
Giro pada bank-bank lain	2.908.335	2,58	1.746.901	1,56	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	10.519.314	9,34	7.696.511	6,88	*Placements with other banks*
Wesel ekspor	51.517	0,05	-	0,00	*Export bills*
Tagihan derivatif	15,567	0,01	67.888	0,06	*Derivative receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	5.507	0,00	2.954	0,00	*Loans to customers*
Aset Lain-lain	578.319	0,51	205.096	0,18	*Other Assets*
Simpanan dari nasabah	11.629	0,01	24.786	0,03	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	785.843	0,84	1.628.842	1,74	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	119.612	0,13	94.397	0,10	*Derivative payables*
Utang akseptasi	76.525	0,08	136.367	0,15	*Acceptance payables*
Beban akrual dan provisi	10.852	0,01	74.445	0,08	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain	91.795	0,10	129.788	0,14	*Other Liabilities*
Pinjaman yang diterima	7.516.750	8,06	15.062.513	16,07	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi	1.053.750	1,13	1.041.188	1,11	*Subordinated debt*

[1)] Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas

Percentage of the total assets/liabilities [1)]

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset keuangan dengan pihak berelasi memiliki kualitas lancar.

As of 31 December 2020 and 2019, all financial assets with the related party are classified as current.

Pada tanggal 1 Mei 2013, Bank menandatangani perjanjian pinjaman dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited untuk fasilitas sebesar USD 150 juta (dalam nilai penuh) dan tenor pinjaman sampai dengan 3 tahun. Perjanjian pinjaman ini telah diperbaharui pada tanggal 9 September 2016. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 7.516.750 (USD 535 juta). Pinjaman ini memiliki tingkat suku bunga mengambang, yaitu LIBOR 1 bulan ditambah *spread* berkisar antara 46 bps sampai dengan 116 bps (*basis point)*. Tanggal jatuh tempo pinjaman ini mulai dari November 2021 sampai dengan Juli 2022. Tidak ada aset yang ditempatkan sebagai jaminan atas pinjaman ini.

On 1 May 2013, the Bank entered into a borrowing agreement with the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited for a facility amounting to USD 150 million (in full amount) and borrowing tenor up to 3 years. This borrowing agreement was renewed on 9 September 2016. As of 31 December 2020, the outstanding amount from this facility was Rp 7,516,750 (USD 535 million). This borrowing bears a floating interest rate of 1 month LIBOR plus spread between 46 bps to 116 bps (basis point). The maturity dates of the borrowing balances are ranging from November 2021 to July 2022. There is no asset put as collateral for this borrowing.

36. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sebagai bagian dari integrasi usaha, terdapat pengalihan fasilitas pinjaman sebesar USD 1.250 juta. Jumlah saldo pinjaman yang ditransfer dari IMO kepada Bank pada 17 April 2017 adalah sebesar Rp 9.942.375 (USD 750 juta).

Pada tanggal 10 April 2017, Bank menandatangani perjanjian pinjaman subordinasi dengan HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) dan telah menerima dana sebesar USD 75 juta yang jatuh tempo pada tanggal 10 April 2027. Pinjaman subordinasi ini memiliki tingkat suku bunga mengambang, yaitu USD LIBOR 3 bulan ditambah 407 bps *(basis point)*. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas fasilitas ini adalah sebesar Rp 1.053.750 (USD 75 juta). Pinjaman subordinasi ini ditujukan untuk mendukung Modal Pelengkap (Tier 2).

Rincian transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

As part of the business integration, the Bank assumed borrowing facility amounting to USD 1,250 million. The total borrowing balances that were transferred from IMO to the Bank as of 17 April 2017 was amounting to Rp 9,942,375 (USD 750 million).

On 10 April 2017, the Bank entered into a subordinated loan agreement with the HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (HAPH) and has already received funding amounting to USD 75 million which maturing on 10 April 2027. This subordinated debt bears a floating interest rate of 3 month USD LIBOR plus 407 bps (basis points). As of 31 December 2020, the outstanding amount from this facility was Rp 1,053,750 (USD 75 million). The subordinated debt is intended to support Supplementary Capital (Tier 2).

The details of significant transactions with related parties for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Jumlah/ *Amount*	Persentase/ *Percentage*[2)]	Jumlah/ *Amount*	Persentase/ *Percentage*[2)]	
Pendapatan bunga	27.093	0,51	184.422	2,98	*Interest income*
Pendapatan provisi dan komisi	15.249	0,97	13.352	0,68	*Fees and commission income*
Beban bunga	245.577	17,14	638.326	28,80	*Interest expenses*
Beban provisi dan komisi	82.594	22,73	118.729	18,56	*Fees and commission expenses*
Beban umum dan administrasi	382.706	30,52	262.445	23,60	*General and administrative expenses*
Pendapatan lainnya - bersih	-	0,00	1.607	0,37	*Other income - net*

[2)] Persentase terhadap masing-masing jumlah pendapatan/beban

Percentage of the respective total income/expenses [2)]

Rincian tagihan kontinjensi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of contingent receivables with related parties as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020		2019		
	Jumlah/ *Amount*	Persentase/ *Percentage*[3)]	Jumlah/ *Amount*	Persentase/ *Percentage*[3)]	
Tagihan kontinjensi :					*Contingent receivables :*
Garansi yang diterima dari bank-bank lain	3.633.224	18,57	8.365.089	52,71	*Guarantees received from other banks*

[3)] Persentase terhadap jumlah komitmen dan kontinjensi

Percentage of the total commitments and contingencies [3)]

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

Pihak berelasi/*Related party*	Sifat relasi/*Nature of relationship*	Jenis transaksi/*Type of transaction*
HSBC Bank Australia Limited	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
HSBC Bank Canada	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan pendapatan provisi dan komisi/*Demand deposits and fees and commissions income*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Thailand branch) Bangkok	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*

[1)] Telah dilakukan pencabutan ijin usaha pada tanggal 8 April 2019. Terdapat saldo laba rugi selama periode 1 January 2019 - 8 April 2019

There was revocation of business licence on 8 April 2019. [1)] There was remaining profit and loss from period 1 January 2019 - 8 April 2019

36. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of 31 December 2020 and 2019 are as follows: (continued)

Pihak berelasi/*Related party*	Sifat relasi/*Nature of relationship*	Jenis transaksi/*Type of transaction*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Australian branches) Sydney	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Indian branches) Mumbai	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan akseptasi/*Demand deposits and acceptance*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Japanese branches) Tokyo	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (New Zealand branches) Auckland	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
Hang Seng Bank Limited	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	*Call money*
HSBC Bank plc	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro, surat berharga dan transaksi derivatif/*Demand deposits, investment securities and derivative transactions*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, (Singaporean branches) Singapore	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro, akseptasi, transaksi derivatif, dan surat berharga/*Demand deposits, acceptance, derivative transactions, and investment securitie*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro, akseptasi, transaksi derivatif, *call money*, pinjaman yang diterima, surat berharga, dan beban bunga yang masih harus dibayar/*Demand deposits, acceptance, derivative transactions, call money, borrowings, investment securities, and accrued expenses*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch[1)]	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	-
HSBC Trinkaus and Burkhardt AG	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan akseptasi/Demand deposits and *acceptance*
HSBC Bank Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan akseptasi/Demand deposits and *acceptance*
HSBC Amanah Malaysia Berhad	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited	Perusahaan induk/*Parent company*	Liabilitas lain-lain, Pinjaman subordinasi/ *Other liabilities, Subordinated debt*
Dewan Komisaris, Direksi dan keluarga	Manajemen kunci/*Key management*	Kredit yang diberikan kepada nasabah dan simpanan dari nasabah/*Loans to customers and Deposits from customers*
HSBC Bank USA	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro /*Demand deposits*
HSBC Bank (China) Company Limited	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan akseptasi/*Demand deposits and acceptance*
HSBC France	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro/*Demand deposits*
HSBC Bank (Taiwan) Limited	Perusahaan afiliasi/*Affiliated company*	Giro dan akseptasi/*Demand deposits and acceptance*

[1)] Telah dilakukan pencabutan ijin usaha pada tanggal 8 April 2019. Terdapat saldo laba rugi selama periode 1 January 2019 - 8 April 2019

There was revocation of business licence on 8 April 2019. [1)] There was remaining profit and loss from period 1 January 2019 - 8 April 2019

Transaksi dengan personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Personil manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi tertentu yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang signifikan untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan Bank.

Transactions with key management personnel

Key management personnel are parties who have the authority and responsibility to control the Bank activities, directly or indirectly.

Key management personnel include the Board of Commissioners, Directors and certain Heads of Division that have significant authority and responsibility for planning, directing and controlling the Bank's activities.

36. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan personil manajemen kunci (lanjutan)

***Transactions with key management personnel** (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kredit yang diberikan kepada personil manajemen kunci dikategorikan sebagai lancar.

As of 31 December 2020 and 2019, loans to the key management personnel are classified as current.

Remunerasi personil manajemen kunci untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

Remuneration of key management personnel for the years ended 31 December 2020 and 2019 comprised:

	2020	2019	
Imbalan kerja jangka pendek	324.038	325.374	*Short-term employee benefits*
Imbalan kerja berbasis saham	8.788	21.769	*Share-based compensation plan*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	5.767	2.536	*Other long-term employee benefits*
Imbalan pasca-kerja	34.465	3.873	*Post-employment benefits*

Rincian gaji, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of salaries, allowance and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Risk Monitoring Committee for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Direksi	74.791	62.299	*Directors*
Dewan Komisaris	8.453	5.075	*Board of Commissioners*
Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	720	720	*Audit Committee and Risk Monitoring Committee*
Jumlah	83.964	68.094	*Total*

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, komitmen dan kontinjensi Bank adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2020 and 2019, Bank's commitment and contingencies are as follows:

	2020	2019	
Komitmen			***Commitment***
Kewajiban komitmen			*Committed liabilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	(2.050.678)	(2.332.307)	*Irrevocable L/C*
Fasilitas kredit yang belum digunakan - *committed*	(9.611.269)	(4.242.629)	*Unused credit facilities - committed*
Jumlah kewajiban komitmen	(11.661.947)	(6.574.936)	*Total committed liabilities*
Kontinjensi			***Contingency***
Kewajiban kontinjensi			*Contingent liability*
Bank garansi yang diterbitkan	(7.908.442)	(9.294.264)	*Bank guarantees issued*
Jumlah	(19.570.389)	(15.869.200)	*Total*

Bank garansi diterbitkan atas nama nasabah dalam rangka penjaminan pembayaran kredit dan pelaksanaan proyek.

Bank guarantees are issued on behalf of customers for credit repayment and project implementation purposes.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua L/C dan bank garansi diterbitkan untuk pihak ketiga.

As of 31 December 2020 and 2019, all L/C and bank guarantees were issued to third parties.

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat beberapa tuntutan hukum, pengurusan administrasi dan klaim yang belum terselesaikan dalam kegiatan usaha Bank. Tidak mungkin untuk memastikan apakah Bank akan memenangkan masalah atau tuntutan hukum tersebut, atau dampaknya jika Bank kalah. Namun demikian, manajemen Bank yakin bahwa hasil keputusan masalah atau tuntutan hukum tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan pada hasil usaha, posisi keuangan maupun likuiditas Bank.

Bank tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

***37. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES** (continued)*

As of 31 December 2020 dan 2019, there are several legal actions, administrative proceedings, and claims in the ordinary course of the Bank's business. It is not possible to predict with certainty whether or not the Bank will ultimately be successful in any of these legal matters or, if not, what the impact might be. However, the Bank's management does not expect that the results in any of these proceedings will have a material adverse effect on the Bank's results of operations, financial position or liquidity.

The Bank has no significant contingent liability as of 31 December 2020 and 2019.

38. PERJANJIAN PENTING

Management support agreement

Dalam rangka membantu Bank untuk memperluas, mengembangkan dan meningkatkan bisnis dan operasinya dan untuk memastikan bahwa Bank memiliki tata kelola perusahaan yang sesuai dengan standar internasional, manajemen Bank telah meminta The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) untuk memberikan beberapa bantuan manajemen yang dibutuhkan dan untuk melaksanakan alih pengetahuan di bidang perbankan dan tata kelola yang baik kepada Bank.

Untuk tujuan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2009, Bank telah menandatangani *Management Services Agreement* dengan HBAP, berdasarkan mana HBAP telah setuju untuk memberikan, atau menyebabkan untuk diberikannya oleh HSBC Holdings plc atau salah satu perusahaan yang dimiliki oleh HSBC Holdings plc kepada Bank jasa manajemen tertentu.

Selanjutnya, *Management Services Agreement* telah diubah dan dinyatakan kembali oleh Bank dan HBAP dengan menandatangani *Amendment and Restatement Management Services Agreement* (*Management Support Agreement* atau MSA) pada tanggal 10 Mei 2012.

Berdasarkan MSA ini, HBAP telah setuju untuk memberikan, atau memastikan bahwa anggota yang relevan dari HSBC Grup harus memberikan bantuan manajemen kepada Bank. Bantuan manajemen yang dimaksud berupa:

(i) Bantuan manajemen dan teknis (tidak termasuk pengaturan konsultasi dalam jenis apapun),
(ii) Berbagai pengetahuan perbankan yang dimiliki dan akan diberikan oleh HBAP (atau anggota dari HSBC Holding plc) kepada Bank, dan
(iii) Bantuan lain yang telah disetujui secara tertulis yang akan disediakan oleh HBAP kepada Bank dari waktu ke waktu.

Perjanjian layanan jasa antargrup - HBAP

Pada tanggal 31 Maret 2017, Bank telah menandatangani Perjanjian Layanan Jasa Antargrup dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP), dimana HBAP telah setuju untuk memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pemberian bantuan teknis untuk bidang-bidang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

38. SIGNIFICANT AGREEMENT

Management support agreement

In order to assist the Bank to expand, develop and improve its business and operations and to ensure that the Bank has a corporate governance regime which corresponds with the best international standards, the Bank's management has requested The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) to provide certain agreed management services and to facilitate the transfer of banking knowledge, expertise and best practices to the Bank.

For this purpose, on 25 May 2009, the Bank and HBAP signed a Management Services Agreement, in which HBAP has agreed to provide or cause to be provided by either HSBC Holdings plc or one of the group companies owned by HSBC Holdings plc to the Bank certain management services.

Subsequently, the Management Services Agreement was changed and restated by the Bank and HBAP through the signing of the Amendment and Restatement Management Service Agreement (Management Support Agreement or MSA) on 10 May 2012.

Based on this MSA, HBAP has agreed to provide, or to ensure that a relevant member of the HSBC Group shall provide the management's support to the Bank. The management's support includes:

(i) Management and technical support (not a consultancy arrangement in any kind),
(ii) The sharing of Banking Know-How by HBAP (or any other member of the HSBC Holding plc) to the Bank, and
(iii) Any other support in writing to be provided by HBAP to the Bank from time to time.

Intra-group service agreement - HBAP

On 31 March 2017, the Bank and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) have signed the Intra-Group Service Agreement, in which HBAP agrees to provide technical assistance for subjects that are mutually agreed upon by both parties.

38. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian layanan jasa antargrup – HBAP (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2019, pemberi layanan jasa untuk layanan *management support agreement* dan perjanjian layanan jasa antargrup - HBAP diatas, akan berubah dari the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) menjadi HSBC Global Services (HK) Limited (HGSH). Perubahan ini merupakan bagian restrukturisasi guna memiliki sebuah organisasi yang memberikan pelayanan secara global (HSBC Global Services) dimana HGSH merupakan bagian di dalamnya, *ring-fenced* dari grup HSBC. HGSH merupakan anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh HSBC Global Services Limited. Tidak ada perubahan yang berarti dalam hal pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Perjanjian layanan jasa antargrup - IMO

Dalam rangka membantu The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Jakarta (IMO) untuk melakukan operasinya setelah integrasi dengan tujuan penutupan cabang, Bank telah menandatangani Perjanjian Layanan Jasa Intra-Grup dengan IMO dimana Bank telah setuju untuk memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan manajemen resiko, tata kelola, operasional usaha, pelaporan serta jasa lainnya sebagaimana disetujui kedua belah pihak efektif sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2019.

Pada tanggal 24 Januari 2019, Perjanjian Layanan Jasa Intra-Grup telah ditandatangani oleh HBAP dan HBID dimana karyawan HBID akan memberikan jasa untuk menunjang operasi sehari-hari terkait kegiatan yang tersisa paska penutupan Bank.

***38. SIGNIFICANT AGREEMENT** (continued)*

***Intra-group service agreement – HBAP** (continued)*

Effective 1 January 2019, the service provider for the above management support agreement and intra-group service agreement - HBAP, will change from the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HBAP) to HSBC Global Services (HK) Limited (HGSH). This change is part of a restructuring to have an organization that provides service globally (HSBC Global Service) where HGSH is part of it and ring-fenced from HSBC Group in the event of a recovery scenario. HGSH is a subsidiary that fully owned by HSBC Global Service Limited. There is no meaningful change in terms of services provided under the current condition.

Intra-group service agreement - IMO

In order to assist The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Jakarta branches (IMO) to conduct in operation post integration for the purpose of branch closure, the Bank has signed an Intra-Group Service Agreement with IMO in which the Bank agrees to provide services relating to risk management, corporate governance, business operation, reporting, and other services as mutually agreed by both parties effectively since 17 April 2017 up to 8 April 2019.

On 24 January 2019, an Intra-Group Service Agreement was signed by HBAP and HBID in order for relevant HBID's personnel in which HBID will provide day-to-day operational support for residual activities post the Bank's closure.

39. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71

Bank telah menerapkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

39. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71

Bank has adopted SFAS 71 as of 1 January 2020, the effect of this transistion to SFAS 71 has had on these financial statements as of 1 January 2020 are as follows:

	Catatan/ *Notes*	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ *Balance before adoption of SFAS 71*	Dampak penerapan PSAK 71/ *Impact of SFAS 71 implementation*	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ *Balance after adoption of SFAS 71*	
ASET					***ASSET***
Kas	6	696.281	-	696.281	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	7	7.343.788	-	7.343.788	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain - bersih	8	2.261.135	(57)	2.261.078	*Demand deposits with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia		1.488.506	-	1.488.506	*Placements with Bank Indonesia - net*
Penempatan pada bank - bank lain - bersih	9	7.696.511	(193)	7.696.318	*Placements with other banks - net*
Efek - efek tujuan investasi	10	14.418.802	-	14.418.802	*Investment securities*
Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	11	2.863.738	-	2.863.738	*Financial assets held for trading*
Tagihan derivatif	12	476.731	-	476.731	*Derivative receivables*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		464.945	-	464.945	*Secutities purchase with agreements to resell*
Wesel ekspor		1.434.664	-	1.434.664	*Export bills - net*
Tagihan akseptasi - bersih	13	2.601.928	(5.535)	2.596.393	*Acceptance receivables - net*
Kredit yang diberikan kepada nasabah- bersih	14	65.533.877	169.001	65.702.878	*Loans to customers - net*
Aset lain-lain	15	3.451.068	-	3.451.068	*Other assets*
Aset tetap - bersih	16	716.157	-	716.157	*Properties and equipments - net*
Aset tak berwujud - bersih	17	137.065	-	137.065	*Intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	34g	275.182	(32,991)	242.191	*Deferred tax assets*
JUMLAH ASET		111.860.378	130.225	111.990.603	***TOTAL ASSETS***

39. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 (lanjutan)

Bank telah menerapkan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

39. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71 *(continued)*

Bank has adopted SFAS 71 as of 1 January 2020, the effect of this transistion to SFAS 71 has had on these financial statements as of 1 January 2020 are as follows: (continued)

	Catatan/ *Notes*	Saldo sebelum penerapan PSAK 71/ *Balance before adoption of SFAS 71*	Dampak penerapan PSAK 71/ *Impact of SFAS 71 implementation*	Saldo setelah penerapan PSAK 71/ *Balance after adoption of SFAS 71*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Simpanan dari nasabah	18	65.469.257	-	65.469.257	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank-bank lain	19	5.058.515	-	5.058.515	*Deposits from other banks*
Liabilitas derivatif	12	473.541	-	473.541	*Derivative payables*
Utang akseptasi	13	2.601.928	-	2.601.928	*Acceptance payables*
Beban akrual dan provisi	20	502.670	-	502.670	*Accruals and provisions*
Liabilitas lain-lain	21	2.984.880	26.977	3.011.857	*Other liabilities*
Pinjaman yang diterima		15.062.513	-	15.062.513	*Borrowings*
Pinjaman subordinasi		1.041.188	-	1.041.188	*Subordinated debt*
Liabilitas imbalan kerja	23	529.546	-	529.546	*Employee benefits obligation*
JUMLAH LIABILITAS		93.724.038	26.977	93.751.015	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS					***EQUITIES***
Modal saham	24	10.586.395	-	10.586.395	*Share capital*
Tambahan modal disetor - bersih	25	257.610	-	257.610	*Additional paid-in-capital - net*
Cadangan program kompensasi berbasis saham	22	14.894	-	14.894	*Share-based payments program reserves*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja		(67.363)	-	(67.363)	*Remeasurement from post employee benefits obligation*
Perubahan nilai wajar bersih- efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	10	133.381	-	133.381	*investment securities at fair value through other comprehensive income*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian - efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	4.276	4.276	*Allowance for expected credit loss - investment securities at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba					*Retained earnings*
telah ditentukan penggunaannya	26	26.306	-	26.306	*Appropriated*
belum ditentukan penggunaannya		7.185.117	98.972	7.284.089	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		18.136.340	103.248	18.239.588	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		111.860.378	130.225	111.990.603	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Berikut ini menyajikan dampak atas transisi dari "*incurred loss approach*" menjadi "kerugian kredit ekspektasian" untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

The following summarizes the effects of transitioning from the "incurred loss approach" to the "expected credit loss" approach for financial assets measured at amortised cost:

		1 Januari/*January* 2020								
		Cadangan kerugian penurunan nilai menurut PSAK 55/ *Allowance for impairment losses per SFAS 55*			Kerugian penurunan nilai menurut PSAK 71/ *Impairment losses per SFAS 71*					
	Catatan/ *Notes*	Cadangan kerugian penurunan nilai kolektif/ *Collective impairment provision*	Cadangan kerugian penurunan nilai individual/ *Individual impairment provision*	Jumlah/ *Total*	*Stage 1*	*Stage 2*	*Stage 3*	Jumlah/ *Total*	Kenaikan/ (penurunan)/ *Increase/ (decrease)*	
Giro pada bank-bank lain	8	-	-	-	55	2	-	57	57	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	9		-	-	193	-	-	193	193	*Placement with other banks*
Tagihan akseptasi	13	-	-	-	3.600	1.931	4	5.535	5.535	*Acceptance receivables*
Kredit yang diberikan kepada nasabah	14	753.944	1.369.239	2.123.183	256.127	267.021	1.431.034	1.954.182	(169.001)	*Loans*
Liabilitas lain-lain	21	-	-	-	16.081	10.865	31	26.977	26.977	*Other liabilities*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian - efek-efek tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		-	-	-	4.276	-	-	4.276	4.276	*Allowance for expected credit loss - investment securities at fair value through other comprehensive income*
		753.944	1.369.239	2.123.183	280.332	279.819	1.431.069	1.991.220	(131.963)	

40. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pada bulan November 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja ("*Omnibus Law*") yang antara lain akan berdampak pada liabilitas imbalan paska kerja. Namun demikian, peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan pada bulan Februari 2021 sehingga Bank masih melakukan perhitungan liabilitas imbalan paska kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") yang sejalan dengan UU No.13/2003. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Bank masih menganalisis dampak yang mungkin timbul dari penerapan *Omnibus law* tersebut.

40. SIGNIFICANT EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD

In November 2020, the Government of the Republic of Indonesia has signed Law No.11/2020 relating to Job Creation ("Omnibus Law") that among others will impact the obligation for post-employment benefits. However, the implementation regulation has just issued in February 2021 therefore, the Bank still calculated the obligation for post-employment benefits based on Collective Labor Agreement ("CLA") which in line with UU No.13/2003. Until the completion date of this financial statements, the Bank is still analysing the possible impact of the implementation of this Omnibus Law.

41. REKLASIFIKASI

Laporan arus kas

Aktivitas tertentu dalam laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi sehubungan dengan perolehan hak guna usaha agar sesuai dengan penyajian laporan arus untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

41. RECLASSIFICATION

Statement of cash flows

Certain activities in the statement of cash flows for the year ended 31 December 2019 has been reclassified in relation with acquisition of right of use assets to conform with the presentation of statement of cash flows for the year ended 31 December 2020.

	31 Desember/*December* 2019			
	Disajikan sebelumnya/ ***As previously stated***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Setelah reklasifikasi/** ***After reclassification***	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:***
Aset lain-lain	(552.533)	117.282	(435.251)	*Other assets*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:***
Perolehan aset hak guna usaha	-	(117.282)	(117.282)	*Acquisition of right of use asets*

LANGKAH-LANGKAH **STRATEGIS 2020**

Pada tahun 2020 PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") fokus pada prioritas strategis untuk tumbuh secara berkesinambungan:

- Meningkatkan fokus terhadap nasabah untuk bertumbuh di segmen, sektor, wilayah, dan industri yang dituju.
- Membantu nasabah terdampak COVID-19 dan terus memetakan dan memitigasi risiko terkait untuk menjaga kesehatan portolio Bank.
- Memanfaatkan jaringan internasional untuk memaksimalkan peluang bisnis lintas batas.
- Memperkuat proposisi produk untuk menarik lebih banyak rekening operasional untuk mendukung portofolio DPK yang lebih kuat.
- Berinvestasi di bidang digital untuk memacu bisnis ritel, termasuk jumlah nasabah, kartu kredit, *wealth*, dan *Retail Business Banking*.
- Menarik, mendidik, dan menjaga talenta yang ada di samping merampingkan operasi dan meningkatkan pengawasan.

PENGHARGAAN **2020**

- **Top 3 Indonesia's World Best Bank 2020 dari Forbes**
- **Indonesia's Best Subcustodian, Best Fund Administrator for Retail Fund 2020 dari The Asset Triple A Awards**
- **Indonesia Trade Finance Market Leader 2020 dari Euromoney**
- **Indonesia Best Trade Finance Service Leader 2020 dari Euromoney**
- **Asia's Best Bank for Financing dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Asia's Best Bank for Sustainable Finance dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Excellence in Leadership in Asia dari Euromoney Awards for Excellence 2020**
- **Best Performance in the Year dari Infobank Awards 2020**
- **Indonesia's Best Wealth Manager 2020 dari The Asset Triple A Awards**
- **Top Bank Award 2020 Predikat Platinum Kategori BUKU 3 dari RRI dan Iconomics Research and Consulting**
- **Best in Service Cash Manager for Corporates in Indonesia for Overall Service 2020 dari Euromoney**